

e-ISSN 2798-8961



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

HITA AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOLUME 5 NOMOR 4 TAHUN 2024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI BISNIS
DAN PARIWISATA**

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

DAFTAR ISI

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

Ni Made Aprila Wati, I Putu Deddy Samtika Putra, Ni Wayan Yuniasih (1-12)

PENGARUH MODAL USAHA, LITERASI KEUANGAN DAN *DIGITAL MARKETING* TERHADAP KEBERLANJUTAN UMKM DI KOTA DENPASAR

Ni Kadek Asri Pramesti, Ni Made Wisni Arie Pramuki, Ni Putu Yeni Yuliantari (13-22)

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, *TAX MORALE*, DAN SIKAP *LOVE OF MONEY* TERHADAP NIAT PATUH WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT)

Ni Putu Ayu Febriani, Putu Nuniek Hutnaleontina, I Wayan Budi Satriya (23-35)

PENGARUH EFEKTIVITAS DANA BANTUAN USAHA MIKRO (BPUM) PENGGUNAAN *E-COMMERCE*, DAN MODAL USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SE-KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Ni Luh Ayu Mahayuni, Kadek Dewi Padnyawati, Putu Cita Ayu (36-46)

PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA, PERAN PERANGKAT DESA, DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SE-KECAMATAN UBUD)

Ni Komang Ayu Narayanti, Ni Komang Sumadi (47-55)

PENGARUH PERMODALAN, KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABANAN

Desi Rahmadani Susilo, Ni Komang Sumadi, I Made Endra Lesmana Putra (56-66)

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA INDUSTRI PROPERTIES & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 - 2022)

Putu Dhea Apriyanti Utami, Ni Wayan Alit Erlina Wati, Kadek Dewi Padnyawati (67-78)

PERAN BADAN PENGAWAS MEMODERASI PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA SE-KECAMATAN MENGWI

Komang Ayu Pradnya Lestari Sangging, Ni Putu Ayu Kusumawati, Putu Cita Ayu (79-89)

PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI *COVID-19* SESEUAI PMK NO.9/PMK.03/2021 DI KABUPATEN BADUNG

Kadek Dwiyanti Agustini, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Ni Wayan Yuniasih (90-99)

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR KRISNA YUNA DANA

Ni Kadek Natalia Pratiwi, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (100-110)

PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, KEMAMPUAN TEKNIK PERSONAL, DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA BUMDES DI KECAMATAN SUKAWATI

Ni Kadek Feby Arsita Dewi, Ni Komang Sumadi, Ni Ketut Muliati (111-122)

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KECAMATAN GIANYAR

I Wayan Ardiyasa, Putu Cita Ayu, Ni Made Wisni Arie Pramuki (123-137)

PENGARUH PENGAKUAN PROFESIONALISME, PENGHARGAAN FINANSIAL, DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP MINAT UNTUK BERKARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA)

I Gusti Ayu Putu Mirah Intari Dewi, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Wayan Budi Satriya (138-148)

PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, PENGALAMAN KERJA PERSONAL DAN KINERJA INDIVIDU TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA SE-KECAMATAN KUTA UTARA

Ni Luh Putu Diah Lokita Pratami, Cokorda Gde Bayu Putra, Putu Cita Ayu (149-159)

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, ASMETRI INFORMASI DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD) AKUNTANSI PADA LPD SE-KECAMATAN TABANAN

Kadek Sintya Dewi, Kadek Dewi Padnyawati, Putu Nuniek Hutnaleontina (160-169)

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDAPATAN OBJEK WISATA GUNUNG KAWI DESA SEBATU

Ni Ketut Erlina Yanti, I Made Endra Lesmana Putra, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (170-179)

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN

Ni Made Novi Cahyanti, I Putu Deddy Samtika Putra (180-190)

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI DI KECAMATAN MANGGIS
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 BERDASARKAN PETUNJUK TEKNIS
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN NO. 15 TAHUN 2021

**I Made Dedikurniawan, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Made Endra Lesmana
Putra (191-201)**

BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KINERJA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN TAMPAKSIRING

Ida Ayu Diah Maharani, Ni Putu Ayu Kusumawati (202-215)

ANALISIS ATAS PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ATAS
BANTUAN ATAU SUMBANGAN

Luh Putu Yuniasih (216-226)

PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN KEAMANAN TERHADAP KEPUASAN
PENGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGI* (FINTECH) *PEER TO PEER* (P2P)
LENDING DI DENPASAR

Ni Luh Putu Eka Anatasia, Ni Ketut Muliati (227-236)

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TEKNOLOGI INFORMASI DAN
BUDAYA ETIS ORGANISASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN
AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDESA) SE KABUPATEN KLUNGKUNG

Ni Ketut Mulyadewi, Ni Komang Sumadi (237-250)

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN
PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH (STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN)

**Anak Agung Putu Agung Wahyu Pratama, Putu Cita Ayu, Ni Putu Trisna Windika
Pratiwi (251-264)**

PENGARUH PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBEBASAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN SOSIALIASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN GIANYAR)

I Kadek Bayu Mahardika, I Wayan Sudiana, Ni Wayan Alit Erlina Wati (265-282)

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL
MENENGAH (SAK EMKM) DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI APLIKASI
PENCATATAN INFORMASI KEUANGAN (SI APIK) PADA LAPORAN KEUANGAN
ANUGERAH BALI COMPUTER

**Made Hari Krisnayanti, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Wayan Budi Satriya (283-
292)**

PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, PERSEPSI RISIKO INVESTASI DAN MODAL MINIMAL INVESTASI TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM BERINVESTASI DI PASAR MODAL (STUDI PADA MAHASISWA S1 PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA)

Luh Putu Dian Athari Cahyani, Ni Wayan Yuniasih (293-304)

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM LEMBAGA PERKREDITAN DESA.

I Ketut Bagus Demi Ryana Putra, Ni Komang Sumadi, Ni Wayan Alit Erlinawati (305-313)

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENJALANI PROGRAM BREVET PAJAK

Ni Komang Juliantari, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Rai Dwi Andayani W (314-329)

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, KOMPETENSI APARAT DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI DENPASAR BARAT

I Gusti Ayu Made Budiani, Cokorda Gede Bayu Putra, Putu Cita Ayu (330-340)

PENGARUH LITERASI KEUANGAN, *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN PENGGUNAAN *E-COMMERCE* PADA KINERJA UMKM DI DENPASAR

Ni Ketut Ulan Anjelina Sugi Artini, Ni Komang Sumadi, I Putu Deddy Samtika Putra (341-351)

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan

**Ni Made Aprila Wati⁽¹⁾
I Putu Deddy Samtika Putra⁽²⁾
Ni Wayan Yuniasih⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: apriawati513@gmail.com

ABSTRACT

Accountability for village fund management is a form of responsibility and obligation for village fund managers to carry out their duties transparently, efficiently and responsibly. Several factors that can influence the accountability of village fund management include clarity of budget targets, reporting systems and the role of village officials. This research aims to determine the influence of clarity of budget targets, reporting systems and the role of village officials on accountability in managing village funds. This research was conducted at the Selemadeg District Village Office, Tabanan Regency. The sample was 80 people with the sample determination method using purposive sampling. Technical analysis uses multiple linear regression analysis. The variable clarity of budget targets has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. The reporting system and the role of village officials does not have a significant effect on it.

Keywords: Clarity of Budget Targets, Reporting System, Role of Village Officials, Accountability of Village Fund Management

PENDAHULUAN

Berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan “desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia”. Dengan dikeluarkannya UU tersebut, pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya peran desa sebagai pusat pembangunan nasional. Melalui konsep otonomi desa, desa diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya (G. A. P. W. Anggraeni et al., 2023). Salah satu kewenangan desa yaitu mengelola dana desa dan menetapkan kebijakan terkait penggunaan dana desa adalah tanggung jawab utama dalam manajemen dana desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dana ini difokuskan guna memajukan penduduk desa serta mendukung proses pembangunan di tingkat desa (Widyarini & Wati, 2021).

Salah satu fenomena positif tentang pengelolaan dana desa terjadi di Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2023, sebanyak 27 desa dari 133 desa di Kabupaten Tabanan memperoleh tambahan dana desa. Hanya 27 desa di Tabanan yang memperoleh dana desa tambahan antara lain “Desa Bajera, Desa Wanagiri, Pupuan Sawah, Berembeng, Selemadeg, Antap, Manikyang, Megati, Tangguntiti, Tegal Mengkeb, Mundeh Kangin, Mundeh Kauh, Selabih, Tibubiu, Pangkung Karung, Samsam, Tunjuk, Kukuh, Peken Belayu, Buruan, Penatahan, Tegalinggah, Pesagi, Munduk Temu, Pujungan, Belatungan, dan Pajahan”. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengungkapkan desa yang memperoleh penambahan dana tersebut dianggap berhak karena desa-desa tersebut mampu mengelola dana desa dengan baik, dan menyajikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga program nasional melalui dana desa tersebut telah tercapai. Total dana desa tambahan yang didapat Kabupaten Tabanan mencapai 3,7 miliar dengan masing-masing desa mendapat 139 juta. Dana tambahan desa harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dana ini dapat digunakan untuk membangun jalan guna mendukung kegiatan pertanian, mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan teknis (Nusabali.com, 2023).

Pemberian dana desa tambahan merupakan program berskala nasional dan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 98 Tahun 2023. Berdasarkan pasal 13 ayat 6, kategori dalam penilaian dana desa tambahan berdasarkan tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa terdiri atas ketersediaan laporan konsolidasi realiasi APBDes dan kelengkapan penyampaian laporan realisasi dan laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah. Dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Tabanan mencerminkan bahwa desa yang memperoleh dana desa tambahan telah mengelola dana desa secara tepat sehingga terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas menurut (Widyarini & Wati, 2021) merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, akuntabilitas ialah bentuk tanggungjawab dalam mengelola keuangan dan menjalankan kebijakan yang diberikan ke pihak pelaporan dalam mencapai target. Akuntabilitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah termasuk pemerintah desa. Sebagai pemegang kepercayaan masyarakat desa, pemerintah desa harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan transparansi. Akuntabilitas adalah faktor penting untuk menunjukkan dana desa dikelola dengan efisien dan sesuai kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan

akuntabilitas, diperlukan sistem, prosedur, dan mekanisme kontrol yang efektif dalam pengelolaan dana desa (Dewi, 2023).

Jumlah dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga dalam pengelolaannya harus memperhatikan prinsip transparansi dan adanya kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan penjelasan (K. P. Dewi & Wati, 2020), kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa spesifik dan mudah dimengerti tujuan yang ditetapkan dalam anggaran oleh pihak yang mengelolanya. Menetapkan tujuan anggaran yang terperinci dapat mendorong para pengelola anggaran untuk melakukan tugasnya penuh dengan dedikasi tinggi, berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut bisa mengoptimalkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sistem pelaporan adalah mekanisme yang menunjukkan proses pertanggungjawaban dari staf ke pimpinan (Arta & Rasmini, 2019). Sistem pelaporan adalah instrumen yang penting guna memonitor serta mengevaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam pelaporan, penting untuk menyajikan secara detail dari hasil kerja dari pertanggungjawaban dan alokasi anggarannya. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Sistem pelaporan yang efektif dapat menentukan kinerja manajerial dalam mengelola keuangan, sehingga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Ronal, 2023).

Pegawai desa berfungsi guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan dana desa agar dapat terealisasikan dengan baik berdasarkan sasaran anggaran yang telah ditetapkan serta pelaporan yang tepat waktu perlu adanya peran perangkat desa yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa berperan penting untuk memajemen keuangan desa dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menggunakan sumber daya sesuai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Apabila perangkat desa menjalankan perannya dengan baik, maka dapat membantu memastikan dana desa dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan sasaran anggaran.

Didasarkan pemaparan diatas, penulis melaksanakan kajian yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Studi ini bertujuan guna “menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan

peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa”. Hasil studi dapat memberi pemahaman teoritis tentang fokus penelitian ini, serta sebagai tambahan informasi bagi aparaturnya yang mengelola dana desa, dan pemerintah dalam melakukan evaluasi dan mekanisme alokasi dana desa yang ada, dengan harapan agar prinsip akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan kedepannya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship ialah konsep yang berfokus pada perilaku, pola berpikir, serta mekanisme psikologis manusia, termasuk motivasi, identifikasi, dan kekuasaan di suatu organisasi. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan memegang peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen tidak hanya dikuasai oleh ambisi individu, melainkan lebih mengutamakan pencapaian hasil yang menguntungkan organisasi secara keseluruhan (Donaldson & Davis, 1991). Pada studi ini, teori Stewardship diartikan sebagai situasi di mana para pengelola tidak didorong oleh keinginan pribadi atau tujuan personal, namun lebih berfokus pada kepentingan entitas atau principal. Dalam hal ini, teori Stewardship menggambarkan bagaimana kepala desa dan pemerintah desa berfungsi sebagai pengelola keuangan desa yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola keuangan desa. Harapannya, mereka dalam menjalankan fungsinya penuh dengan integritas, dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.

Kejelasan sasaran anggaran adalah tingkat ketepatan dan kejelasan dalam penetapan tujuan anggaran, di mana tujuan tersebut harus dirumuskan secara spesifik, jelas, serta dapat dimengerti individu atau pihak yang bertanggung jawab dalam mencapai sasaran. Hasil studi dari (Dewi, 2023) , (Ronald, 2023) dan (Anggreni et al., 2021) mengungkapkan kejelasan sasaran anggaran memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas. Adanya tujuan anggaran yang terdefinisi secara rinci dalam pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa lebih mudah dalam memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dari penjelasan tersebut, hipotesisnya adalah:

H1: “Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

Sistem pelaporan adalah mekanisme penyajian informasi dan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, yaitu dari pemerintah desa selaku pengelola dana desa kepada masyarakat. Keberadaan sistem pelaporan yang efektif diperlukan guna mengawasi serta mengontrol pekerjaan manajemen dalam menjalankan keuangan. Hasil studi dari (Arta &

Rasmini, 2019), (Widyarini & Wati, 2021) dan (Pratiwi et al., 2022) menyatakan sistem pelaporan berdampak positif signifikan terhadap akuntabilitas. Melalui sistem pelaporan yang efisien, terorganisir, dan transparan, dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diusulkan yaitu:

H2: "Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".

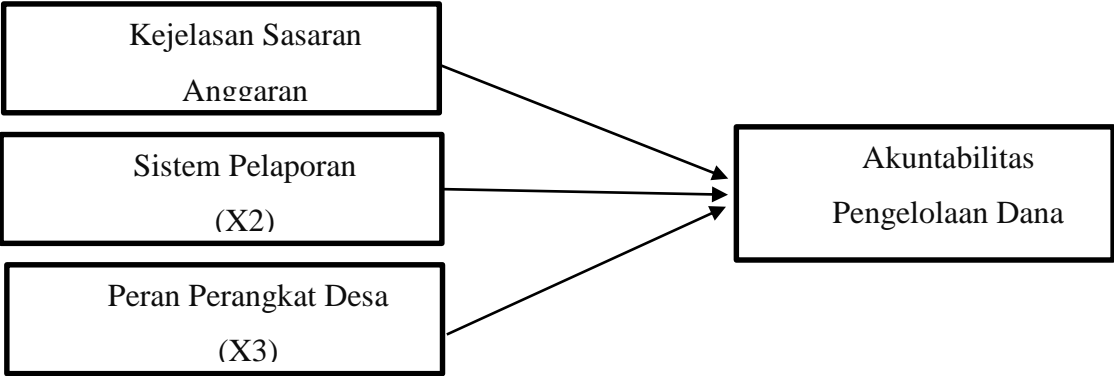
Perangkat desa merupakan individu atau kelompok dalam struktur pemerintah desa yang bertindak mendukung kepala desa dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangannya terkait urusan pemerintahan dan urusan penduduk desa. Kolaborasi yang harmonis antar perangkat desa dapat menghasilkan transparansi dalam penggunaan dana desa, sehingga akan mendorong dan mengoptimalkan akuntabilitas manajemen dana desa. Hasil studi (Anggreni et al., 2021) mengindikasikan peran perangkat desa berdampak positif pada akuntabilitas. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diusulkan yakni:

H3: "Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan penjelasan (Sugiyono, 2022) Pendekatan kuantitatif ialah metode meneliti yang berakar pada filosofi positivisme. Metode tersebut diperuntukan guna mengkaji suatu populasi, di mana proses penghimpunan datanya melalui instrumen penelitian. Data penelitian dianalisis secara statistik dengan maksud untuk menguji hipotesisnya. Kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa spesifik dan jelas anggaran tersebut disusun, serta sejauh mana pemahaman pihak pengelola terhadapnya. Dengan sasaran anggaran yang sudah ditetapkan secara jelas dan spesifik dapat memudahkan pengelola anggaran bekerja secara optimal supaya dana desa bisa tersalurkan dan dipergunakan berdasarkan tujuan anggarannya sehingga dapat berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaannya.

Akuntabilitas pengelolaan dana ditentukan sistem pelaporan yang efektif dimana, dengan sistem pelaporan yang efisien mampu mengarahkan kinerja perangkat desa saat penganggaran. Keberadaan mereka tentunya sangat penting sebagai pengelola dana untuk mencapai sasaran anggaran dan diimplementasikan dengan baik dan dilaporkan dengan sistem pelaporan yang baik dan tepat waktu sebagai gambaran sistem pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didasarkan uraian ini, maka kerangka berfikirnya adalah:



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

Pada studi ini, populasinya meliputi keseluruhan perangkat desa yang berjumlah 151 orang di Kecamatan Selemadeg dari 10 desa. Metode pengambilan sampelnya yakni *purposive sampling*, yang sampel diambil berlandaskan pertimbangan atau kriteria khusus. Sampel penelitian yaitu para perangkat desa, dan terlibat dalam pengelolaan dana desa. Sehingga berlandaskan kriteria tersebut, sampel pada studi ini berjumlah 80 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	80	27.00	35.00	31.8375	2.36238
X2	80	19.00	25.00	22.3500	1.68463
X3	80	27.00	35.00	31.4625	2.18710
Y	80	12.00	20.00	17.2625	2.19172
Valid N (listwise)	80				

Dalam tabel 1 ditunjukkan nilai minimum, maximum, rerata dan standar deviasinya. Kejelasan sasaran anggaran memperlihatkan N sebanyak 80, nilai minimum 27.00, nilai maksimum 35.00, reratanya 31.8375 dan standar deviasi 2.36238. Pada sistem pelaporan memperlihatkan N sebanyak 80, nilai minimum 19.00, nilai maksimum 25.00, reratanya 22.3500 dan standar deviasi 1.68463. Pada peran perangkat desa memperlihatkan N sebanyak 80, nilai minimum 27.00, nilai maksimum 35.00, reratanya 31.4625 dan standar deviasi 2.18710. Pada akuntabilitas pengelolaan dana desa memperlihatkan N sebanyak 80, nilai minimum 12.00, nilai maksimum 20.00, reratanya 17.2625 dan standar deviasi 2.19172.

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Indikator	Uji Validitas			Uji Realibilitas		
	<i>Pearson Correlation</i>	Batas	Ket	<i>Cronbach Alpha</i>	Batas	Ket
Variabel X1 X1.1; X1.2; X1.3; X1.4; X1.5; X1.6; X1.7	0,639; 0,696; 0,705; 0,506; 0,644; 0,593; 0,726	0,30	Valid	0,760	0,60	Reliable
Variabel X2 X2.1; X2.2; X2.3; X2.4; X2.5	0,660; 0,618; 0,560; 0,719; 0,632	0,30	Valid	0,638	0,60	Reliable
Variabel X3 X3.1; X3.2; X3.3; X3.4; X3.5; X3.6; X3.7	0,643; 0,620; 0,570; 0,631; 0,538; 0,575; 0,657	0,30	Valid	0,710	0,60	Reliable
Variabel Y Y.1; Y.2; Y.3; Y.4	0,776; 0,854; 0,859; 0,793	0,30	Valid	0,839	0,60	Reliable

Hasil uji validitas berdasarkan nilai *pearson correlation* berada di atas 0,30 dan pada uji reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach alpha* > 0,60 maka seluruh instrument penelitian dikatakan valid dan reliable sehingga bisa diperuntukan sebagai instrument penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas mengindikasikan tingkat signifikansi 0,056, menandakan data penelitian memenuhi asumsi distribusi normal. Dari hasil pengujian multikolinearitas, nilai toleransi dari setiap variabel melebihi 10% (X1=0.605; X2=0.584; X3=0.668) dan nilai VIF < 10 (X1=1.652; X2=1.712; X3=1.496) artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independennya. Hasil uji heterokedasitas menunjukkan hasil X1=0.237; X2=0.594; X3=0.720 berarti model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 3 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Strandardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig
(Constant)	6.529	3.721		1.996	.050
X1	.290	.108	.392	2.692	.009
X2	.008	.156	.008	-.055	.957
X3	.069	.110	.087	.630	.531
R					0,437
<i>R Square</i>					0,191
<i>Adjusted R Square</i>					0,153
Uji F					4,961
Sig. Uji F					0,004

Berlandaskan hasil uji regresi dalam tabel 4.6, maka persamaan regresi linear berganda yakni:

$$Y = 6.529 + 0,290 X_1 - 0,008 X_2 + 0,069 X_3 + e$$

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis regresi, R^2 memperlihatkan sejauh mana variasi variabel independen mempengaruhi variabel terikatnya. Nilai *Adjusted R-Square* 0,153 mengindikasikan 15,3% dari variasi variabel bebas dapat diterangkan variabel terikatnya. Sementara itu, 84,7% dari variasi tersebut diatribusikan pada variable lainnya.

Uji Signifikansi Nilai F (F Test)

Uji F diperuntukan guna menilai apakah seluruh variabel independennya secara simultan berdampak signifikan pada variabel dependen. Dari pengujian F, nilai Fhitung adalah 4.961 dengan level sig. 0,004. Nilai ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Karena nilai sig. (0,004) kurang dari batas signifikansi yang umumnya ditetapkan (0,05), maka kesimpulannya model regresi yang dipergunakan dapat mengasumsikan variabel dependen. Diartikan secara keseluruhan variabel independen berdampak signifikan pada variabel dependennya, maka model pada studi ini dianggap valid.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian yang diperuntukan guna menilai pengaruh satu variabel independen pada variabel dependennya. Hasil pengujian diperoleh nilai uji t untuk setiap variabel independen adalah:

- a. Variabel X1 berdampak positif signifikan pada variabel Y dengan koefisien 0.290 dan tingkat signifikansi 0.009. Hipotesis pertama (H_1) diterima berdasarkan temuan ini.

- b. Variabel X2 tidak berdampak signifikan pada variabel Y dengan koefisien -0.008 dan tingkat signifikansinya 0,957. Hipotesis kedua (H₂) ditolak berdasarkan temuan ini.
- c. Variabel X3 tidak berdampak signifikan pada variabel Y, dengan koefisien 0.069 dan tingkat signifikansinya 0,531. Hipotesis ketiga (H₃) ditolak berdasarkan temuan ini.

Hipotesis pertama studi ini diterima, sehingga dapat dikatakan adanya sasaran anggaran yang jelas dan spesifik dalam pengelolaan dana desa maka akan membantu pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang diembannya. Hasil penelitian ini didukung hasil kajian dari (Ronal, 2023) dan (Pratiwi et al., 2022), di mana kejelasan sasaran anggaran berdampak positif signifikan terhadap akuntabilitas.

Hipotesis kedua ditolak, sehingga dapat dikatakan tidak adanya pengaruh variabel sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa disebabkan oleh kondisi pemerintah desa belum mampu menerapkan secara optimal sistem pelaporan yang tersedia. Hasil ini didukung oleh hasil kajian (Noventiningtyas, 2018), di mana sistem pelaporan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hipotesis ketiga penelitian ini ditolak, ini berarti peran perangkat desa tidak mempengaruhi akuntabilitas manajemen dana, karena peran mereka tidak optimal dalam mengelola dana desa, seperti kekurangan kesiapan perangkat desa untuk menyediakan fasilitas dan layanan untuk mendukung pengelolaan dana desa. Temuan ini konsisten dengan hasil studi dari (P. D. Anggraeni & Yuliani, 2019), di mana peran perangkat desa tidak mempengaruhi signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan temuan penelitian, kesimpulannya kejelasan sasaran anggaran memberikan dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas manajemen dana desa. Sementara itu, sistem pelaporan dan peran dari perangkat desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadapnya.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran bagi Kantor Desa di Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Setiap perangkat desa yang terlibat dalam manajemen dana desa seharusnya memahami dengan baik hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan desa. Mengenai sistem pelaporan, penting untuk menyusun laporan dengan sistematis, efisien, dan memiliki jadwal yang teratur. Hal ini dapat memudahkan badan pengawas desa dan penduduk dalam mengevaluasi kinerja perangkat desa, pada akhirnya transparansi dan akuntabilitas manajemen dana desa dapat ditingkatkan. Selain itu, guna memastikan dana desa dikelola dengan baik, sasaran dari anggaran dana desa harus ditentukan dengan jelas dan

Wardana, y. M. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kerambitan . *Ekonomi dan akuntansi*.

Wardani, a. K. (2022). *Pengaruh sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kediri*.

Widyarini, w., & wati, a. E. (2021). *Pengaruh sistem pelaporan, audit kinerja, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus: kantor desa se-kecamatan Denpasar utara)*.

Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, demokratisasi ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja, UMKM dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong sektor lain untuk menuju kemajuan dalam suatu perekonomian.

Modal usaha merupakan suatu yang penting, keterbatasan modal usaha merupakan hambatan dihadapi oleh UMKM saat mereka ingin memperluas bisnisnya. Lestari (2020) dan Solikha (2022) menemukan bahwa modal usaha memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberlanjutan UMKM. Namun penelitian berbeda ditemukan oleh Dewi & Herawati (2023) Modal tidak memengaruhi kelangsungan bisnis.

Selain variabel modal, literasi keuangan sangat penting untuk menentukan keberhasilan dan keberlanjutan ekonomi, salah satunya seperti UMKM (Ratnasari, 2020). menemukan literasi keuangan memiliki dampak penting pada keberlanjutan UMKM.

Dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan serta teknologi pada saat ini yang canggih juga mempengaruhi cara setiap individu dalam melakukan transaksi jual beli salah satunya melalui digital marketing. Namun pada fakta yang terjadi lapangan adalah pelaku usaha tidak serta mengikuti kemajuan digital, terutama karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Mufidah et al (2023) menemukan *Digital marketing* memberikan dampak positif terhadap kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah. Dari kasus serta masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Modal Usaha, Literasi Keuangan Dan Digital Marketing Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Kota Denpasar”**.

KAJIAN PUSTAKA

Teori RBV dipelopori pertama kali oleh Wernerfelt (1984) mengemukakan pendapat bahwa sumber daya dan kemampuan usaha sangat penting bagi kinerjanya dan kemampuan daya saingnya. Asumsi dari teori RBV tersebut adalah bagaimana suatu usaha dapat bersaing dengan usaha lain, dengan mengelola sumber daya yang dimiliki bersangkutan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sumber daya internal perusahaan, baik yang materiil maupun yang tidak materiil, merupakan nilai serta potensi yang mendukung operasional bisnis. Sehingga harus memiliki modal yang cukup untuk mencapai pertumbuhan kinerja berkelanjutan. Hasil dari penelitian Azzahra, dkk (2021) menyatakan terdapat antara investasi bisnis dan kelangsungan bisnis yang artinya

Sektor Usaha					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perdagangan	42	42,0	42,0	42,0
	Jasa	12	12,0	12,0	54,0
	Non Pertanian	46	46,0	46,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Tabel 2 Uji Discriminant Validity

Variabel	AVE	\sqrt{AVE}	Modal Usaha (X1)	Literasi Keuangan (X2)	Digital Marketing (X3)
Modal Usaha (X1)	1,000	1,000			
Literasi Keuangan (X2)	0,541	0,735	0,150		
Digital Marketing (X3)	0,551	0,742	0,156	0,511	
Keberlanjutan UMKM (Y)	0,716	0,846	0,203	0,614	0,469

Sumber : Lampiran 4

Tabel 3 Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Modal Usaha (X1)	1,000	1,000
Literasi Keuangan (X2)	0,829	0,874
Digital Marketing (X3)	0,814	0,859
Keberlanjutan UMKM (Y)	0,901	0,926

Sumber: Lampiran 4

Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai *composite reliability* dan *Cronbach Alpha* untuk setiap konstruk telah memperlihatkan kuantitas diatas 0,60, maka dari itu memenuhi persyaratan reliabilitas berlandaskan kapabilitas *composite reliability*.

Tabel 4 Evaluasi Model Struktural Melalui R-Square (R²)

	R Square	R Square Adjusted
Keberlanjutan UMKM	0,419	0,401

Sumber : Lampiran 5

Tabel 4 menunjukkan nilai R square keberlanjutan UMKM 0,401, hal ini menunjukkan modal usaha, literasi keuangan, dan *digital marketing* memiliki pengaruh yang moderat terhadap keberlanjutan UMKM sebesar 0,401.

Tabel 5 Evaluasi Model Struktural Inner Melalui f-Square

Variabel	Keberlanjutan UMKM
Modal Usaha (X1)	0,016
Literasi Keuangan (X2)	0,312
Digital Marketing (X3)	0,050

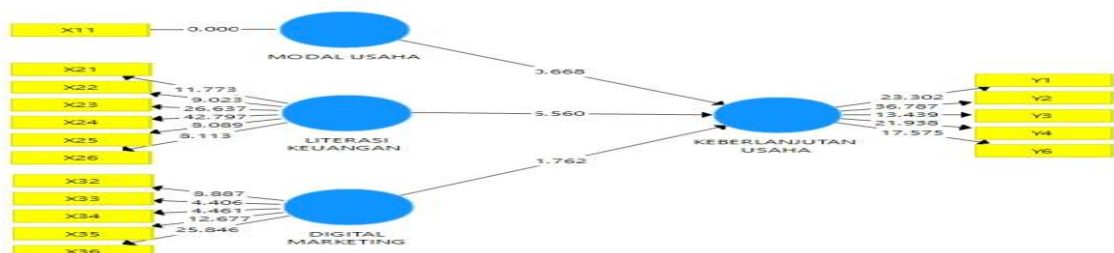
Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan modal usaha dan *digital marketing* memiliki pengaruh yang lemah yaitu masing-masing sebesar 0,016 dan 0,050 terhadap keberlanjutan UMKM. Sedangkan literasi keuangan memiliki pengaruh yang moderat cenderung kuat terhadap keberlanjutan UMKM sebesar 0,312.

Tabel 6 Path Analisis dan Pengujian Hipotesis, yang diharapkan adalah Ho ditolak atau nilai sig < 0,05.

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics (O/STD EV)	P Values	Keterangan hipotesis
Modal Usaha -> Keberlanjutan Usaha	0,097	0,668	0,252	Ditolak
Literasi Keuangan -> Keberlanjutan Usaha	0,497	6,560	0,000	Diterima
Digital Marketing -> Keberlanjutan Usaha	0,200	1,762	0,039	Diterima

Sumber : Lampiran 5



Gambar 6.1 Bootstrapping

Tabel 6 menunjukkan bahwa:

- 1. Pengaruh positif dari modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM sebesar 0,097 tidak signifikan, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat disokong.

- Literasi keuangan memiliki dampak positif signifikan sebesar 0,497 terhadap kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini terbukti benar.
- Digital marketing* memiliki dampak positif sebesar 0,200 terhadap kelangsungan UMKM dan hubungan ini signifikan, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini benar.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Denpasar

Hasil pengujian diperoleh bahwa modal usaha memiliki dampak positif tidak signifikan terhadap kelangsungan UMKM di Kota Denpasar, maka hipotesis pertama (H1) tidak terbukti. Hasil ini didukung dari penelitian Dewi & Herawati (2023) yang menyatakan bahwa modal usaha yang digunakan oleh para pelaku usaha belum mampu secara optimal berdampak terhadap keberlanjutan usahanya. Pelaku UMKM lebih cenderung menggunakan uang yang mereka tabung sendiri sebagai modal usaha, daripada melakukan pinjaman kepada pihak bank maupun Lembaga keuangan lainnya, hal inilah diduga menjadi salah satu penyebab tidak nyatanya pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan usaha.

Selain itu, dugaan modal usaha memiliki pengaruh positif tidak signifikan ialah pelaku usaha cenderung memiliki pemikiran yang apatis, dimana mereka berpandangan bahwa modal usaha hanyalah sebatas yang berhubungan dengan uang, padahal modal usaha dapat juga tercipta dari lokasi usaha yang strategis, lingkungan yang nyaman saat konsumen berbelanja serta pengetahuan dan keahlian-keahlian pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya masih belum diperhitungkan.

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Kota Denpasar

Hasil pengujian menunjukkan literasi keuangan berdampak positif secara signifikan terhadap kelangsungan UMKM di Kota Denpasar, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dapat disetujui. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Trisnadewi & Dewi (2023) dan Dewi & Herawati (2023) menegaskan literasi keuangan memiliki dampak positif signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Pengaruh positif signifikan literasi keuangan terhadap keberlanjutan usaha menunjukkan semakin meningkat literasi keuangan yang dimiliki oleh pelaku usaha akan

mendukung keberlanjutan usaha yang ada. Implikasi hasil penelitian ini mendukung *Resource Based View Theory* (RBV) dimana literasi keuangan merupakan pemahaman yang komprehensif tentang perencanaan, mengelola keuangan, teknologi informasi keuangan, investasi serta manajemen risiko dapat membantu pengusaha dalam merancang strategi bisnis dan mengurangi risiko, sehingga mendukung kelangsungan usaha di masa depan.

Pengaruh *Digital Marketing* terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Denpasar

Hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa *digital marketing* berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Denpasar, maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil ini relevan dengan penelitian dari Mufidah dkk (2023) bahwa *digital marketing* memiliki dampak positif signifikan terhadap sustainability UMKM.

Pengaruh yang positif signifikan digital marketing terhadap keberlanjutan usaha menunjukkan bahwa pemasaran yang berbasis digital mampu meningkatkan keberlanjutan usaha. Implikasi hasil penelitian ini mendukung *Resource Based View Theory* (RBV) dimana pemanfaatan media sosial tentunya akan memudahkan UMKM untuk melakukan pengenalan produk dan penjualan produk tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Intensitas pemasaran melalui media online dapat menjadi lebih masif dan menjangkau lebih banyak konsumen. Hal ini artinya berpotensi meningkatkan penjualan dan pelanggan. Melalui pemasaran digital, pemilik usaha juga dapat membangun brand image yang baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan UMKM di Kota Denpasar dipengaruhi oleh literasi keuangan dan *digital marketing*. Temuan lain dalam penelitian ini yakni modal usaha memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keberlanjutan usaha, pelaku usaha belum mampu secara optimal berdampak terhadap keberlanjutan usahanya. Selanjutnya, literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keberlanjutan usaha, semakin meningkatnya pemahaman pelaku usaha akan literasi keuangan akan mendukung keberlanjutan usaha. *Digital marketing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan usaha, pemasaran yang berbasis digital mampu meningkatkan keberlanjutan usaha.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*, dan Sikap *Love of Money* Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat)

**Ni Putu Ayu Febriani⁽¹⁾
Putu Nuniek Hutnaleontina⁽²⁾
I Wayan Budi Satriya⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sanggalangit, Tembawu, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: putuayufebriani@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to examine tax knowledge, tax morale, and love of money attitudes that influence non-employee individual taxpayers regarding the intention to comply with taxation. This research was conducted in the coverage area of KPP Pratama West Denpasar using a questionnaire. Accidental sampling was used, and the samples were 100 respondents involved in this study. The SEM PLS to analyze data, in the Smart PLS software. The results indicate tax knowledge and tax morale have a significant positive effect on the intention to comply with non-employee individual taxpayers. The love of money attitude has positive insignificant effect on the intention to comply with non-employee individual taxpayers.

Keywords: *Taxation Knowledge, Tax Morale, Love of Money Attitude, Compliance Intention, Taxpayer*

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk penopang jalannya perekonomian dan pembangunan nasional. Penerimaan dan pendapatan dari pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pajak digambarkan sebagai kewajiban individu untuk menyeter sebagian dari penghasilan mereka atau sumbangsih kepada negaranya dengan tujuan untuk mendukung terlaksananya program pemerintah, yang hasilnya dinikmati bersama dalam bentuk fasilitas Negara. Meskipun pajak disebut sebagai sumbangsih, pajak memiliki sifat memaksa yang setiap prosesnya berlandaskan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak, tidak hanya mengandalkan kesadaran dan usaha dari pegawai perpajakan, namun juga diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Kepatuhan pajak dapat dikatakan sebagai perilaku dan motivasi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya dan memperoleh hak berkaitan dengan aspek perpajakan. Kepatuhan terhadap pajak menjadi bahasan yang cukup penting, untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak dan wajib pajak

melakukan kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa banyak wajib pajak orang pribadi (WP OP) non karyawan yang belum patuh untuk mengungkapkan pajak tahunan mereka. Dari keseluruhan 4,4 juta wajib pajak, hanya 1,5 juta atau sekitar 34,09% yang telah melaporkan SPT mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siswanto, 2023). Ini mengindikasikan masih banyak WP OP non karyawan yang belum membayar kewajiban perpajakannya dengan benar.

Mematuhi kewajiban perpajakan seringkali menjadi tantangan bagi wajib pajak. Banyak dari mereka yang cenderung menghindari atau tidak memperhatikan kewajiban perpajakannya. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang hal ini, berikut disajikan jumlah kepatuhan WP OP non karyawan di KPP Pratama Denpasar Barat.

Table 1 Realisasi Pelaporan SPT 2018-2022

Tahun	WP OP Non Karyawan Terdaftar	Realisasi SPT	Persentase Tingkat Kepatuhan
2018	9.892	9.876	99,83%
2019	9.934	9.713	97,53%
2020	11.578	8.730	75,16%
2021	10.298	7.651	74,60%
2022	11.207	8.072	72,64%

Sumber: data diolah (2024)

Jika dilihat dari data jumlah wajib pajak WP OP non karyawan yang tercatat KPP Pratama Denpasar Barat dari 2018 sampai 2022, terjadi penurunan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kepatuhan WP OP non karyawan adalah minimnya kesadaran mereka untuk menjalankan kewajiban *self assessment*-nya. Sistem *self assessment* merupakan pendekatan dalam pengenaan pajak di mana wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, memiliki tanggung jawab dan kebebasan untuk menentukan, menghitung, dan membayar jumlah pajaknya. Melalui sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak guna mengelola dan memenuhi kewajiban pajak mereka secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku.

Dari studi sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan (Haryanti et al., 2022). Pemahaman seorang wajib pajak tentang sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban pajaknya. Pengetahuan mengenai yang sangat mendalam dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

(Wijayanti & Ekowati, 2022). Hasil studi dari Wijayanti & Ekowati (2022) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Tax morale dipandang sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak (Sumule & Erawati, 2023). Wajib pajak yang memiliki *tax morale* yang baik akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya, serta cenderung bertindak jujur dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian dari Sumule & Erawati (2023), menyatakan bahwa *tax morale* berdampak positif pada kepatuhan calon wajib pajak. Niat kepatuhan terhadap pajak juga ditentukan oleh sikap kecenderungan berlebihan individu terhadap uang atau *love of money*. *Love of money* merupakan tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dan cara orang tersebut dalam mengartikan pentingnya uang bagi kehidupannya (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Hubungan *Love of money* dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dapat dilihat dari, cara individu dalam mendapatkan dan mengumpulkan uang dengan menekan pengeluaran, begitu pula saat mereka membayar pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020). Hasil kajian dari Harfiani & Tjan (2021) menyatakan *love of money* berdampak negatif pada ketaatan wajib pajak, sedangkan hasil studi Ratnawardhani et al. (2020), menyatakan *love of money* mempengaruhi positif pada ketaatan calon wajib pajak.

Pada studi ini, peneliti menjadikan WP OP non karyawan sebagai subjek penelitian karena tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh WP OP non karyawan masih tergolong rendah dibandingkan wajib pajak lainnya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar niat yang dimiliki oleh WP OP non karyawan. Dari penjelasan latar belakang, maka peneliti memutuskan mengkaji fenomena ini berjudul: “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*, dan Sikap *Love of Money* Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat)”.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan yang dikembangkan oleh Stanley Milgram tahun 1963 menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mematuhi perintah atau aturan tertentu. Teori ini mengidentifikasi 2 perspektif utama tentang kepatuhan pada hukum. Pertama, Perspektif Instrumental, yang menekankan bahwa individu cenderung mematuhi hukum karena dorongan kepentingan pribadi dan persepsi mereka tentang konsekuensi dari tindakan yang

dilakukan. Kedua, Perspektif Normatif, yang mengaitkan kepatuhan dengan keyakinan individu terhadap moralitas dan prinsip keadilan yang lebih tinggi dari kepentingan pribadi mereka. Seorang individu yang mematuhi hukum biasanya dianggap memiliki konsistensi dengan nilai-nilai dan norma internal yang mereka pegang.

Kepatuhan dapat diinterpretasikan sebagai perubahan dalam perilaku seseorang dari tidak mematuhi menjadi mematuhi aturan atau peraturan yang berlaku (Putri et al., 2022). Teori Kepatuhan yang relevan dapat memotivasi seseorang untuk lebih taat terhadap aturan yang ada, seperti halnya wajib pajak yang berupaya memenuhi kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya (Wangi et al., 2023). Teori Kepatuhan dapat diterapkan untuk menilai pengaruh setiap variabel dalam penelitian ini, diantaranya pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan sikap *love of money* terhadap niat patuh WP OP non karyawan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi atau keahlian yang seseorang peroleh melalui pengalaman pribadi atau observasi langsung (Pratiwi & Jati, 2020). Memiliki pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal esensial bagi wajib pajak, dengan harapan dapat membuka pemikiran masyarakat akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara (Wijayanti & Ekowati, 2022). Dengan adanya pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan diharapkan wajib pajak akan sadar dan taat guna membayarkan kewajiban pajaknya. Dari penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H1 : “Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan”.

Tax Morale

Tax Morale ialah motivasi yang bersumber dari dalam diri wajib pajak, Wardani & Anugrah (2023) juga menjelaskan bahwa *Tax Morale* atau moral pajak diartikan sebagai motivasi yang timbul pada individu yang mempercayai pajak merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab bersama. *Tax morale* merupakan salah satu hal yang mendorong individu untuk mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Subiantoro et al. (2023) menjelaskan bahwa *tax morale* memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak seseorang membayarkan pajaknya secara sukarela. Wajib pajak dengan *tax morale* yang baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya, serta bersikap jujur dan patuh untuk mentaati peraturan perpajakan (Sumule & Erawati, 2023). Daeri penjelasan diatas, dirumuskan hipotesis berikut ini:

H2 : “*Tax Morale* Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.”

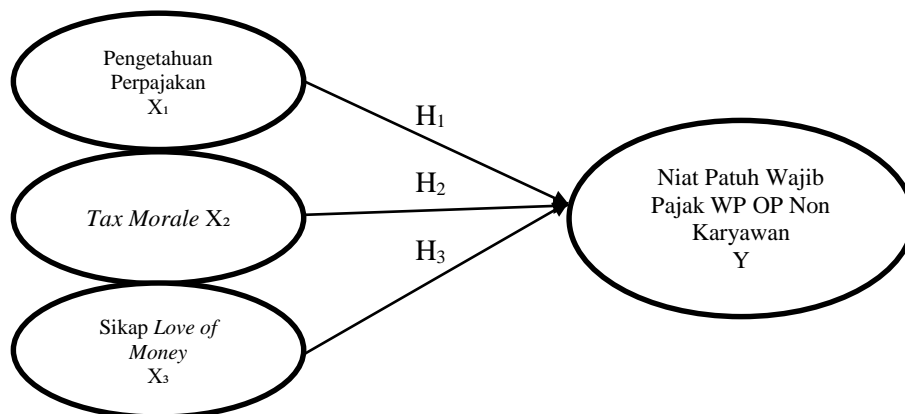
Sikap *Love of Money*

Diartikan sebagai level kecintaan individu terhadap uang. Tingginya sikap ini dalam diri individu akan membuatnya menganggap bahwa uang merupakan segalanya yang memegang peranan penting dalam kehidupan. *Love of money* sering dikaitkan dengan kerakusan dan ketamakan (Farhan et al., 2019). Dalam hal ini, maksud dari sikap *love of money* yaitu cara individu melakukan berbagai cara untuk mendapatkan banyak uang dengan menekan pengeluaran, begitu pula ketika mereka membayar kewajiban pajaknya (Choiriyah & Damayanti, 2020). Seseorang yang memiliki kecintaan berlebih terhadap uang, mungkin dapat menjadikan seseorang tersebut akan mempertimbangkan kembali untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun, seseorang menunjukkan *love of money* yang tinggi, tidak menutup kemungkinan jika tingginya sikap tersebut, masih memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ratnawardhani et al., 2020). Dari penjelasan diatas, dirumuskan hipotesis yaitu:

H3 : “Sikap *Love of Money* Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan”.

METODE PENELITIAN

Dari pemaparan di atas, maka disusunlah desain penelitian ini yang tersaji dalam gambar 1.



Gambar 1. Desain Penelitian

Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019), Variabel penelitian adalah karakteristik atau nilai yang berbeda dari individu, objek, atau kegiatan yang dipilih peneliti untuk dikaji dan disimpulkan. Dalam studi ini menggunakan variabel independent meliputi Pengetahuan Perpajakan (X₁), *Tax Morale* (X₂), dan Sikap *Love of Money* (X₃) dan variabel *dependen* yakni Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Y). Adapun populasinya merupakan WP OP non karyawan yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat berjumlah

11.207 orang. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menerapkan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad n = \frac{11.207}{1+11.207(0,1)^2} = 99,11 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin, jumlah sampelnya sebanyak 99,34 dibulatkan menjadi 100 responden. Metode pengambilan sampelnya yakni *non probability sampling (accidental sampling)*, yaitu pengambilan sampel secara acak dari individu yang memenuhi kriteria sebagai sampel.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan teknik statistik deskriptif. Teknik ini difokuskan pada analisis data dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bisa digeneralisasi untuk seluruh populasi, melainkan lebih pada pemahaman dan interpretasi data yang ada (Sugiyono, 2019). Pada studi ini, teknik analisis data yang diterapkan yaitu Partial Least Square (PLS), sebagai salah satu model dari SEM. Metode PLS ini dianggap efektif karena tidak memerlukan asumsi bahwa data wajib berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2021) PLS-SEM mencakup model pengukuran (*Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Reliability*), dan model structural (*R-Square, F-Square, Path Analysis* dan Pengujian Hipotesis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis deskriptif, pengetahuan perpajakan menunjukkan skor rerata indikator yaitu 4,08, menunjukkan tingkat penilaian yang tinggi. Variabel *tax morale* mendapatkan penilaian tinggi dengan skor rerata indikator 4,09. Sementara itu, sikap *love of money* dinilai tinggi dengan skor rerata indikator 3,85. Selanjutnya, variabel niat patuh wajib pajak mendapatkan penilaian yang sangat tinggi, skor rerata indikator sebesar 4,23.

Karakteristik responden, yaitu: 1) Berdasarkan Jenis kelamin: perempuan lebih mendominasi, yang berjumlah 64 orang (64%), 2) Usia responden: kebanyakan responden berusia 26-35 Tahun, yang berjumlah 41 orang (41%), 3) Berdasarkan Pendidikan: Lebih banyak responden yang merupakan tamatan S1 sebanyak 59 responden (59%), 4) Karakteristik Pekerjaan dalam penelitian ini didominasi berasal dari pekerja bebas lainnya sebanyak 69 responden (69%), dan 5) Karakteristik Domisili dalam penelitian ini didominasi berasal dari daerah Denpasar Barat sebanyak 52 responden (52%).

Uji Model Pengukuran

Convergent Validity

Tabel 1. Nilai *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.2	0,735
	X1.3	0,757
	X1.4	0,659
	X1.5	0,778
	X1.6	0,830
	X1.7	0,636
	Tax Morale (X2)	X2.2
X2.3		0,833
X2.6		0,712
X2.7		0,745
Sikap <i>Love of Money</i> (X3)	X3.7	1,000
Niat Patuh Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,715
	Y1.2	0,765
	Y1.3	0,647
	Y1.4	0,819
	Y1.5	0,784
	Y1.6	0,655
	Y1.7	0,779

Sumber: data diolah (2024)

Didasarkan hasil dalam Tabel 1, ditunjukkan semua indikator sudah memenuhi ketentuan validitas yaitu nilai *outer loading* berada diatas 0,60.

Discriminant Validity

Tabel 2. Uji *Discriminant Validity*

Variabel	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$	Pengetahuan perpajakan (X1)	Tax morale (X2)	Sikap Love of Money (X3)
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,541	0,736			
Tax morale (X2)	0,568	0,754	0,583		
Sikap Love of Money (X3)	1,000	1,000	0,380	0,475	
Niat Patuh WP (Y)	0,548	0,740	0,607	0,709	0,419

Berdasarkan Tabel 2, seluruh konstruk menunjukkan nilai $\text{AVE} > 0,50$, dan nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ dari tiap variabel berada dalam rentang 0,736 hingga 1,000. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar variabel, yang berkisar antara 0,380 hingga 0,709. Dengan demikian, data memenuhi ketentuan validitas sesuai kriteria *discriminant validity*.

Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Tabel 3. *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,831	0,875
Tax Morale (X2)	0,746	0,840
Sikap love of money (X3)	1,000	1,000
Niat patuh WP (Y)	0,862	0,894

Ditunjukkan dalam Tabel 3, nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* untuk setiap konstraknya melebihi 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data memenuhi kriteria reliabilitas berdasarkan standar *Composite Reliability*.

Evaluasi Model Struktural

Melaui pengujian *R-Square* (R^2)

Tabel 4. Evaluasi Melalui *R-Square*

	R Square	R Square Adjusted
Niat patuh wp	0,563	0,549

Tabel 4 memperlihatkan nilai *R-Square* niat patuh wajib pajak 0,563 merujuk pada kriteria Chin (Ghozali, 2021), sehingga model ini dikategorikan sebagai model moderat cenderung kuat, bahwasannya niat patuh WP OP non karyawan mampu dipengaruhi pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan sikap *love of money* sebesar 0,563.

Melalui *F-Square*

Tabel 5. Evaluasi Melalui *F-Square*

Variabel	Niat Patuh WP
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,118
<i>Tax Morale</i> (X2)	0,350
Sikap <i>love of money</i> (X3)	0,008

Sumber: data diolah (2024)

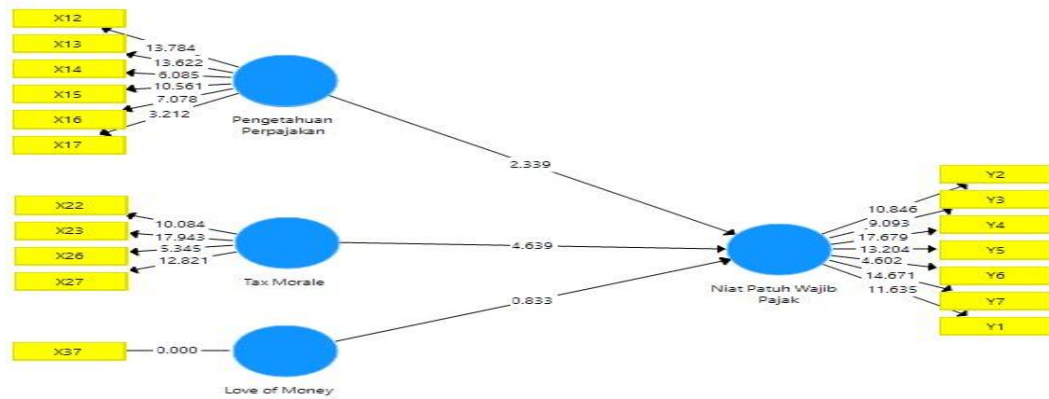
Tabel 5 mengindikasikan pengetahuan perpajakan memperlihatkan pengaruh yang moderat (tidak lemah tidak kuat) terhadap niat patuh wajib pajak sebesar 0,118. *Tax morale* berpengaruh kuat terhadap niat patuh wajib pajak yaitu 0,350, sedangkan sikap *love of money* pengaruhnya lemah terhadap niat patuh wajib pajak yaitu 0,008.

Path Analisis dan Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Path Analisis dan Pengujian Statistik

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan Hipotesis
Pengetahuan Perpajakan -> Niat Patuh Wajib Pajak	0,283	2,339	0,020	Diterima
Tax Morale -> Niat Patuh Wajib Pajak	0,511	4,639	0,000	Diterima
Love of Money -> Niat Patuh Wajib Pajak	0,068	0,833	0,405	Ditolak

Sumber: data diolah (2024)



Gambar 2. Bootstrapping

Tabel 6 menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berdampak positif yaitu 0,283 terhadap variabel Y dengan signifikansi yaitu $0,020 < 0,05$ maka hipotesis pertama diterima.
2. *Tax morale* berdampak positif yaitu 0,511 terhadap variabel Y dengan signifikansi yakni $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima.
3. Sikap *love of money* berdampak positif yaitu 0,068 terhadap variabel Y dengan signifikansi yaitu $0,405 > 0,05$ maka hipotesis ketiga ditolak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 mengindikasikan pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada variabel Y, sehingga H1 diterima. Meningkatnya pengetahuan seseorang mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan mereka semakin meningkat, sehingga mereka senantiasa menjalankan kewajiban pajaknya. Hasil ini relevan dengan hasil studi dari Sugiyani et al. (2022) dan Sumule & Erawati (2023), yaitu pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa 2 mengindikasikan pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada variabel Y, sehingga H1 diterima. Semakin meningkatnya *tax morale* dari wajib pajak, maka kepatuhan mereka semakin tinggi dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pengaruh positif signifikan *tax morale* terhadap niat patuh wajib pajak mampu menjelaskan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban moral untuk memiliki sikap patuh terhadap mekanisme perpajakan yang berlaku, serta adanya motivasi dalam diri wajib pajak guna memenuhi pajak dengan tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, individu dengan *tax morale* yang tinggi tentunya akan berpotensi kuat menjadi individu yang patuh, dimana hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Temuan ini relevan dengan hasil studi Sumule & Erawati (2023) dan Wardani & Anugrah (2023), di mana *tax morale* berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Didasarkan hasil pengujian hipotesa 3 mengindikasikan *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada variabel Y, sehingga hipotesis H3 ditolak. Secara konseptual, *love of money* menggambarkan suatu sikap atau perasaan yang berlebihan terhadap uang. Konsep ini erat kaitannya dengan ketamakan, di mana seseorang yang sangat mencintai uang cenderung memiliki sifat yang tamak atau serakah. Orang yang memiliki *love of money* yang tinggi biasanya lebih fokus pada aspek materialistik dan finansial dalam hidupnya. Mereka mungkin terobsesi untuk mendapatkan lebih banyak uang dan memprioritaskan kekayaan material di atas hal-hal lain dalam hidup. Individu yang menunjukkan rasa cinta terhadap uang akan memutuskan apakah akan membayarkan pajaknya atau tidak dengan membandingkan hasil yang akan dia dapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, kesimpulannya sikap *love of money* baik tinggi maupun rendah, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Wajib pajak secara umum menyadari dan percaya bahwa membayar pajak yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kontribusi mereka untuk masyarakat. Mereka meyakini bahwa dengan membayar pajak, mereka berkontribusi pada pembangunan dan mendapatkan manfaat yang sepadan dari kewajiban pajak yang mereka bayar (Choiriyah & Damayanti, 2020). Temuan ini relevan dengan hasil kaian (Ratnawardhani et al., 2020) dan (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023) dimana sikap *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil studi memperlihatkan Pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada niat patuh WP OP. Ini mengindikasikan tingginya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar kewajiban pajaknya. *Tax morale* berdampak positif signifikan pada niat kepatuhan WP OP. Ini mengindikasikan tingginya *tax morale* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Sementara itu, *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada niat patuh WP OP dalam membayar pajaknya, karena setiap orang memiliki orientasi yang berbeda dalam menilai uang. Dapat dikatakan bahwa tingkat *love of money* pada diri wajib pajak tidak berpengaruh pada ketaatan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebab mereka menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat, di mana hasilnya nanti dapat dinikmati secara tidak langsung oleh masyarakat.

Berlandaskan kesimpulan di atas, saran yang hendak disampaikan yakni bagi KPP Pratama Denpasar Barat dapat memperluas sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat dan menanamkan motivasi dalam diri (*tax morale*) masyarakat sebagai wajib pajak sejak dini dengan cara memberikan edukasi dan pengenalan mengenai perpajakan di setiap jenjang pendidikan. Bagi para wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan atau mempelajari literasi perpajakan. Selain itu meningkatkan kesadaran untuk patuh terhadap sistem perpajakan yang berlaku (*tax morale*), sehingga wajib pajak lebih patuh dan menyadari atas keharusannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Individu yang cenderung memiliki sikap *love of money* juga diharapkan mampu memaksimalkan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat. Untuk peneliti selanjutnya yang bermaksud untuk mengkaji aspek serupa mengenai niat patuh WP OP non karyawan diharapkan untuk mengembangkan kajian serupa dengan menambahkan beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh pada niat patuh wajib pajak dan menggunakan populasi serta sampel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh machiavellian dan love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486.
- Ghozali, I. (2021). Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2. 9 (3 rd). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Harfiani, H., & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2(1), 140–154.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371.
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, religiusitas, love of money, dan etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30.
- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674.
- Putri, N. K. D. A., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*,

- 4(1), 287–299.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2), 177–187.
- Siswanto, D. (2023, October). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Belum Sentuh 50%*. <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Rasio-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Non-Karyawan-Belum-Sentuh-50>.
- Subiantoro, G., Hananto, H., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh tax morale terhadap tax evasion intention di surabaya dengan kepribadian conscientiousness & agreeableness sebagai moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33.
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2389–2395.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung. Alfabeta, 2019.
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273–280.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 443–455.
- Wardani, D. K., & Anugrah, W. (2023). Pengaruh Tax Morale Dan Pemahaman Tri Nga Terhadap Peningkatan Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(2), 221–226.
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394–406.
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3.

pada kearifan lokal. Sebagai kota besar, Kota Denpasar mengalami perkembangan UMKM yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan UMKM sebesar 175,52 persen atau dari 11. 500 menjadi 31. 685 unit pada tahun 2019 hingga 2020. Usaha-usaha ini diklasifikasikan menjadi empat jenis: komersial, lainnya, agribisnis, dan non-pertanian”.

Namun, meskipun usaha kecil dan menengah di Kota Denpasar memberikan kontribusi aktif terhadap perekonomian, namun tetap terjadi fenomena penurunan pendapatan usaha (penjualan). Data menunjukkan, usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat diberlakukannya PKB untuk penjualan produk. Lely Susilawati, 30, salah satu pedagang Kubaya memperkirakan, kondisi tersebut disebabkan perekonomian belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi virus corona. Bahkan, penjualannya menurun sejak PKB tahun lalu. Lely enggan menyebutkan nominalnya, tapi sekitar 50 persen. Tahun ini naik menjadi 60 persen (<https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6792091/secepat-pkb-2023-pedagag-kebaya-buat-omzet-menurun>, 25 Juni 2023).

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, kesulitan dalam meningkatkan modal, masalah bahan baku, persaingan produksi dan pasar, biaya pemasaran, dan meningkatnya penggunaan barang impor, yang menjadi alasan utama mengapa UMKM Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Kota Denpasar (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/article/baca/15941/Perikatan-UMKM-di-Kota-Denpasar.html>, 5 Maret 2023)

Tabel 1. Jumlah UMKM Di Denpasar Periode 2019-2022

NO	Bidang Usaha	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara
1	Bidang Kuliner	2431	1101	3180	2030
2	Bidang Fasion	1785	998	3011	1302
3	Bidang Pendidikan	74	69	170	130
4	Bidang Otomotif	536	733	852	560
5	Bidang Agrobisnis	859	463	1196	3535
6	Bidang Teknologi Internet	367	97	275	320
7	Bidang Lainnya	994	500	1030	1026
	JUMLAH	7046	3961	9714	8903

Sumber: Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Denpasar

Selanjutnya berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kota Denpasar jumlah UMKM pada tahun 2023 di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 135 UMKM. UMKM di Kecamatan Denpasar Timur bergerak di bidang perdagangan dengan jumlah 103 usaha, perindustrian 10 usaha, Jasa 8 usaha, peternakan 10 usaha, dan pertanian 4 usaha. Berdasarkan hasil observasi

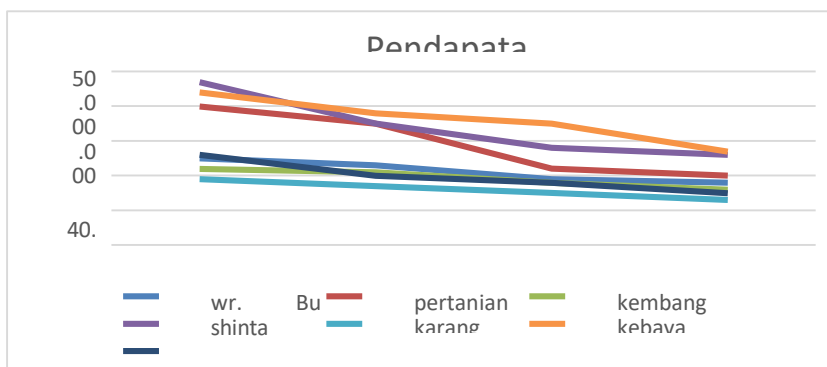
peneliti yang dilakukan pada 7 UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Denpasar Timur yakni yakni 1) Wr. Bu shinta, 2) Pertanian karang abian, 3) Kembang kebaya bali ,4) Wr. Sembako Bu bayu ,5) Yesi_naillash_studio, 6) Wr. Nasi Bu artha, 7)Wr. Ayam merah Indra. Tidak semuanya dapat bertahan lama dan bahkan sulit untuk berkembang sehingga usaha UMKM itu tidak berhasil. Penggunaan kelima jenis usaha tersebut sebagai studi pendahuluan dikarenakan jenis kelima usaha tersebut yang paling mendominasi rata – rata UMKM di Denpasar Timur. dihasilkan yang semakin menurun”. Berikut data perkembangan pendapatan uasaha (omset) selama 4 tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dan grafik 1 berikut:

Tabel 2. Pendapatan 5 UMKM di Kecamatan Denpasar Timur Periode 2019-2022

UMKM	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
wr. Bu shinta	Rp 25.000.000	Rp 23.000.000	Rp 19.000.000	Rp 18.000.000
pertanian karang abian	Rp 40.000.000	Rp 35.000.000	Rp 22.000.000	Rp 20.000.000
kembangkebaya bali	Rp 22.000.000	Rp 21.000.000	Rp 18.000.000	Rp 16.000.000
wr. Sembako bu bayu	Rp 47.000.000	Rp 35.000.000	Rp 28.000.000	Rp 26.000.000
yesi_nailsh_studio	Rp 19.000.000	Rp 17.000.000	Rp 15.000.000	Rp 13.000.000
wr nasi bu artha	Rp 44.000.000	Rp 38.000.000	Rp 35.000.000	Rp 27.000.000
wr. Ayam merahindra	Rp 26.000.000	Rp 20.000.000	Rp 18.000.000	Rp 15.000.000

Sumber: Data Diolah (2023)

Gambar 2.1 Pendapatan 7 UMKM di Kecamatan Denpasar Timur Periode 2019-2022



Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1, pendapatan UMKM di wilayah Denpasar Timur selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan rata-rata penjualan mengalami penurunan yang cukup tajam selama empat tahun yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Penurunan pendapatan dunia usaha ini kemungkinan disebabkan oleh tekanan pandemi COVID-

“Penelitian yang dilakukan oleh (Helmalia & Afrinawati, 2018), pengaruh *e-commerce* terhadap peningkatan pendapatan UMKM binaan RKB BNI Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-commerce* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM.”

“Penelitian yang dilakukan oleh (Yusvita Aprilyan et al., 2022), Pengaruh *E-commerce* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan penggunaan *e-commerce* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Lombok Barat”

“Program BPUM ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan permodalan bagi pelaku UMKM dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong sektor UMKM meningkatkan produksi sehingga dapat mempertahankan usaha dan meningkatkan pendapatan (Rahim et al. , 2021). Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. , 2022 menyatakan bahwa dengan hadirnya Banpres Produktif Usaha Mikro diharapkan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan usaha dan usaha mikro mampu bertahan hidup. tanpa mengalami kesulitan modal”.

H1 : “Efektivitas Dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)”.

E-commerce, atau lebih dikenal dengan belanja online, adalah penggunaan komputer atau alat komunikasi elektronik untuk melakukan transaksi berupa penjualan, pembelian, perintah pembayaran, dan promosi barang dan jasa. Pengunjung dari seluruh dunia dapat berpartisipasi selama mereka memiliki akses ke kawasan ini. E-commerce tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga tingkat penjualan dan pembelian, sehingga mengurangi dana mengangkur untuk barang (N.K.A. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh A. W. Putri & Purwanti, 2022) (Yusvita Aprilyan et al. , 2022) telah mengembangkan model untuk meningkatkan daya saing UMKM berbasis e-commerce, sehingga sistem e-commerce menjadi lebih mudah dan dikatakan dapat mendukung usaha kecil dan menengah. dan Usaha Menengah (UMKM) untuk mengelola tata kelola perusahaan, mengurangi biaya operasional dan periklanan, sehingga meningkatkan pendapatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

H2 : “*E-Commerce* Berpengaruh Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)”.

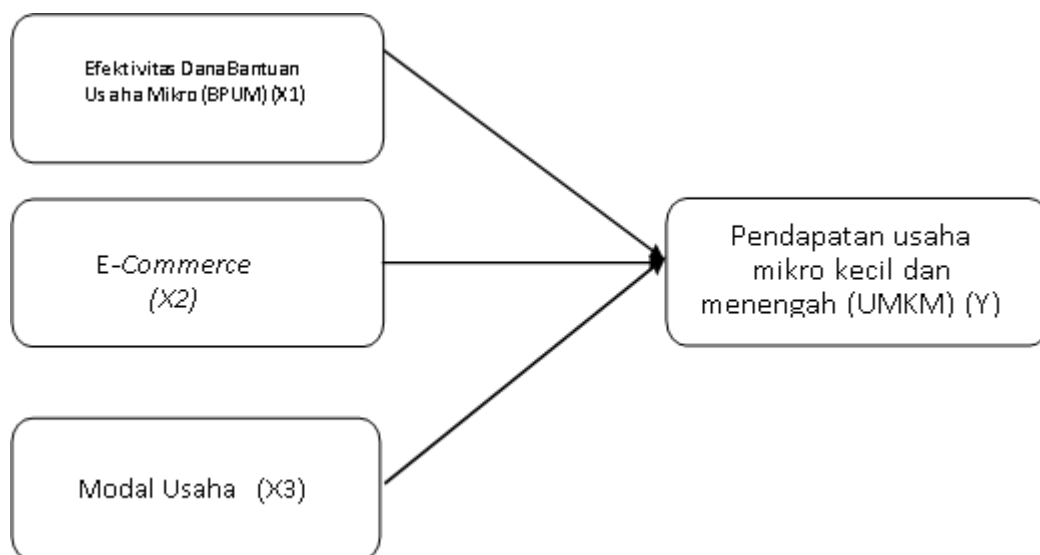
Modal perusahaan mutlak diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya keuangan pada tingkat tertentu sebagai dasar evaluasi keuangan suatu

perusahaan yang dikelola. Sumber modal perusahaan dapat berasal dari modal sendiri, dukungan pemerintah, lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank. Modal merupakan unsur usaha yang harus tersedia sebelum melaksanakan suatu kegiatan menurut (Karmuni, 2023) sambil melakukan penelitian menurut (). Ridhiyawati et al., 2022)) menyatakan bahwa modal merupakan salah satu unsur yang harus ada sebelum memulai suatu usaha. Banyak orang yang kesulitan memulai bisnis karena sulitnya mencari dana. Semakin banyak modal yang dimiliki suatu perusahaan, semakin tinggi keuntungannya. Oleh karena itu korelasi dengan penelitian ini mempunyai arti modal perusahaan berpengaruh positif terhadap pendapatan.

H3 : “Modal Usaha Berpengaruh Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)”

METODE PENELITIAN

“Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif.”



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Populasi penelitian ini terdiri dari 3961 UMKM di Kecamatan Denpasar Timur (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2021). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Berdasarkan persamaan Slovin, nilai kritis yang diinginkan adalah 10%, dan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 97,53 yang dibulatkan menjadi 100 sampel. “Teknik analisis data meliputi uji penelitian (uji validitas dan reliabilitas), uji penerimaan klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), uji kelayakan model (uji F, koefisien determinasi (R²), uji t. statistik). memeriksa). Dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan dan Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,338	0,34		0,994	0,323
Efektivitas Dana BPUM (X1)	0,082	0,038	0,146	2,17	0,032
Penggunaan E Commerce (X2)	0,711	0,068	0,701	10,528	0,000
Modal Usaha (X3)	0,127	0,059	0,145	2,162	0,033
R					0,762
<i>R Square</i>					0,581
<i>Adjusted R Square</i>					0,568
Uji F					44,429
Sig. Model					0,000

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,338 + 0,082X_1 + 0,711X_2 + 0,127X_3 + e$$

1. “Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,568. Artinya Dana Penunjang Usaha Mikro (BPUM), e-commerce dan pemanfaatan modal perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan UMKM sebesar 56,8%, dan sisanya sebesar 43,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini”.
2. Nilai uji F sebesar 44,429 dan signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. “Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini digunakan untuk menguji efektivitas Dana Penunjang Usaha Kecil (BPUM), penggunaan e-commerce, dan jasa. Usaha cukup modal dari pendapatan UMKM”.

“Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa efektivitas Dana Pendukung Usaha Mikro (BPUM) berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima dalam penelitian ini Bisa Dukungan BPUM merupakan salah satu cara untuk memperkuat daya nafas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Upaya pemerintah memberikan dukungan BPUM dinilai sangat efektif

mengatasi permasalahan permodalan bagi UMKM. Dukungan BPUM ini dapat digunakan oleh pelaku ekonomi untuk menambah modal dan menjalankan usahanya dalam rangka periklanan dan pemasaran produknya”. Program ini diharapkan dapat membantu sektor UMKM untuk tetap beroperasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rahim et al. (2021); Wahini dkk. (2022) menyatakan bahwa Dana Penunjang Usaha Kecil (BPUM) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan UMKM.

“Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa penggunaan e-commerce berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan UMKM”. “Hipotesis kedua penelitian ini diterima karena peningkatan penggunaan e-commerce oleh pelaku ekonomi dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Denpasar Timur. Perdagangan elektronik adalah kegiatan pendistribusian, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jaringan Internet. Transaksi terjadi dengan lancar tanpa perlunya konsumen dan penjual bertatap muka. Dengan kata lain e-commerce memberikan kemudahan dalam berbelanja online. E-commerce tidak hanya membuka pasar baru bagi produk dan jasa yang ditawarkan, namun juga memudahkan bisnis bagi UMKM. Memanfaatkan e-commerce juga mengarah pada peningkatan efisiensi operasional. Para pebisnis bisa memasarkan produknya dari rumah atau dimana saja. E-commerce juga sangat efisien waktu. E-commerce dapat meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil karena pencarian informasi produk dan transaksi lebih cepat dan akurat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Helmalia dan Afrinawati (2018). Wahini dkk. (2022); Aprilian et al. (2022) menyatakan bahwa penggunaan e-commerce memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan UMKM”.

“Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa modal perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan UMKM. Semakin besar modal maka produktivitas dapat ditingkatkan dan pendapatan UMKM di Kecamatan Denpasar Timur dapat meningkat. Hipotesis ketiga penelitian ini diterima. Perusahaan yang baru didirikan mempunyai ukuran yang besar dan modal yang kuat, sehingga semakin banyak modal yang digunakan maka semakin banyak pula pendapatan yang dapat diperoleh. Peningkatan modal menyebabkan peningkatan pendapatan karena menciptakan peluang ekspansi dan peningkatan kapasitas usaha. Permodalan juga memungkinkan para pelaku UMKM untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kelangsungan usaha”. Hasil penelitian ini mendukung temuan Ridhiyawati dkk. (2022) dan Arniyasa & Karmini (2023) menyatakan modal berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa “Dana bantuan usaha mikro (BPUM) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Denpasar Timur. Penggunaan *e-commerce* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Denpasar Timur. Modal usaha berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Denpasar Timur”. Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pendapatan UMKM melalui penyaluran BPUM sebagai inisiatif pemerintah. Selain itu, perlu dilakukan percepatan sosialisasi ekonomi digital (melalui *e-commerce*) agar para pelaku ekonomi menjadi melek teknologi dan juga mampu mengakses pasokan modal usaha dengan bunga rendah melalui produk keuangan perbankan. Para pemangku kepentingan ekonomi diharapkan mengetahui program-program yang diprakarsai pemerintah berikut ini: Seperti pemberian pinjaman tanpa jaminan atau keikutsertaan dalam workshop dan kursus pelatihan yang mempengaruhi pendapatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim¹, Elly Karmeli², Susi Paramita .2021. "Pengaruh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Pendapatan UMKM (Studi Pada UMKM di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes)".Jurnal ekonomi &bisnis . Volume .9. Nomor 1. 2580-7285
- Afrinawati , 2018 . "Pengaruh E-commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padang". JEBI(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 3, Nomor 2.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. 2022. "Laporan Data UMKM Kota Denpasar"
- Helmalia dan Efrinawati. 2018. "Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padang". JEBI(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 3, Nomor 2
- Hartono dan Hartomo, Deny Dwi. 2014. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta". Jurnal Bisnis & Manajemen. Vol. 14, No. 1. Hal. 15-30.
- <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6792091/seminggu-pkb-2023-pedagang-kebaya-sebut-omzet-menurun>
- Kotler, P., & Keller, K.L. (2008). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga
- Liza wahyuni, himawan sutanto, abdul. 2022. "Pengaruh bantuan produktif usaha mikro (bpum), pemanfaatan e-commerce, dan lama usaha terhadap peningkatan pendapatan pengusaha mikro di kecamatan kopang". Journal of Economics and Business 8(2):232-244 (115,488)
- Pinatih , M. W. K & Indrajaya ,I. G. B,. (2019) "Peran Jumlah Pelanggan Dalam Memediasi Penggunaan *E-Commerce* Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Di Kota Denpasar" . E-Jurnal EP Unud.8 (12), 2959-2988
- Rahmadiawati Devi. 2021. "Pengaruh Modal Usaha Dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Usaha Kecil (MIKRO) Di Kawasan M. Said Samarinda". eJournal Administrasi Bisnis, Volume 9, Nomor 1

Salma Ridhiyawati1, Ai Fitri Nur Avia, Gunardi3.2022. "Pengaruh Modal Usaha Dan E-Commerce (Borongdong.Id) Terhadap Pendapatan UMKM Di Kota Bandung. Management Studies and Entrepreneurship" Journal Vol 3(2)2022 : 538-547

Tri Utari Dan Putu Martini Dewi . 2014. "Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (umkm) Di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat". E-Jurnal EP Unud, 3 [12] : 576-585

Yusvita Aprilyan, Elin Erlina Sasanti, Nurabiah. 2022. "Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Lombok Barat". Jurnal Risma . Vol. 2 No. 2

Wijaya Kresna , Ida Bagus 2016."Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Industri Kerajinan Bambu Di Kabupaten Bangli" .E-Junal EP Unud ,5(4). Hal .434- 459.

Sugiyono. 2018. "Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan RdanD". Bandung: Alabeta.

Pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab adalah pengelolaan keuangan yang memperhatikan segala sesuatu mulai dari kegiatan perencanaan desa hingga pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Mencapai akuntabilitas adalah tujuan utama reformasi sektor publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan keuangan desa. Desa diharapkan mampu mengelola keuangannya secara mandiri dan mengelola pendapatan serta pengeluaran rumah tangga dengan baik.

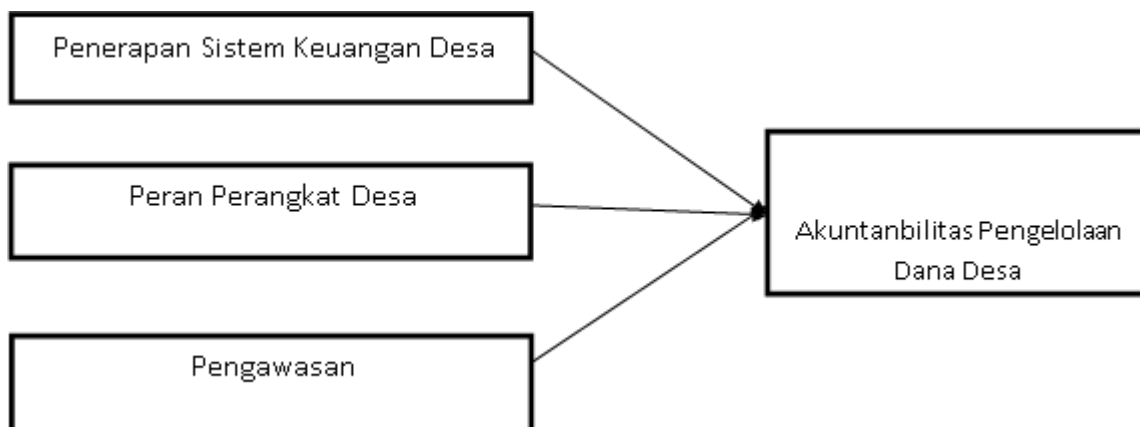
Ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan sistem keuangan desa untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang digunakan desa untuk menganggarkan, mengelola, dan melaporkan keuangan desa. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang Anda perlukan, menghemat waktu dan uang, mengurangi risiko penipuan dan kesalahan, serta mendukung agregasi data. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Fungsi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dirancang sederhana dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan untuk membantu pengelolaan keuangan desa, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mengelola seluruh anggaran yang dikelola desa menjadi lebih mudah.

Pedoman pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 bertujuan untuk memandu perangkat desa dalam menjalankan prosedur pengelolaan keuangan desa secara efektif. Dokumen ini mencakup langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, peraturan ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, serta menuntut keteraturan dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Perangkat desa bertugas sebagai pelaksana yang membantu kepala desa dalam administrasi dan pelayanan teknis di desa. Mereka juga bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban atas tugas yang mereka laksanakan. Keterlibatan aktif perangkat desa sangat diperlukan untuk menghindari potensi masalah dalam pengelolaan dana desa. Identifikasi permasalahan yang terjadi di desa merupakan tanggung jawab perangkat desa yang dapat memengaruhi kualitas sistem akuntansi desa. Analisis catatan-catatan dalam sistem akuntansi keuangan desa dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks penerimaan dana desa yang signifikan, perhatian terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa menjadi penting. Hal ini mencakup kurangnya keterbukaan antara pemerintah desa dengan

lembaga musyawarah desa dan masyarakat dalam berbagai tahapan kegiatan pemerintahan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan berjalannya pemerintahan desa yang baik, diperlukan sistem pengendalian yang dapat mengawasi seluruh aspek kegiatan pemerintahan desa agar sejalan dengan tujuan pembangunan desa.

Tanggung jawab perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di desa mempengaruhi kualitas sistem akuntansi desa yang ada. Mengidentifikasi catatan-catatan dalam sistem akuntansi keuangan dan menganalisis setiap catatan akan membawa perubahan positif dalam akuntansi keuangan desa. Besarnya dana desa yang diterima setiap desa menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Sebab, kegiatan pemerintahan desa beragam, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemantauan, hingga tahap evaluasi. Berbagai jenis kesalahan dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa. Kesalahan yang dapat terjadi adalah tidak adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan lembaga musyawarah desa dan/atau masyarakat, baik pada tahap perencanaan, penyusunan anggaran hingga tahap evaluasi akhir. (www.bpkp.com). Untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dan tercapainya berjalannya pemerintahan desa dengan baik, diperlukan suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh jalannya pemerintahan desa agar sejalan dengan tujuan pembangunan desa.

Hingga tahun 2019, pemanfaatan dana desa yang rata-rata sebesar Rp 1 miliar per tahun di Bali masih belum optimal. Hal ini disebabkan terbatasnya staf, peralatan, pengawasan, dan peraturan yang sering berubah. Hambatan pengelolaan keuangan desa antara lain tidak kompetennya aparat desa, kurangnya pembinaan tenaga penunjang profesional (TPP), dan kurangnya peralatan operasional berupa infrastruktur dan perangkat komputer. /laptop memuat cara atau tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Di Kabupaten Gianyar, terdapat banyak temuan bahwa aparat desa hanya mengalokasikan sebagian kecil dari sumber daya desa yang mereka miliki untuk program-program yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing wilayah desa. Ada pula kasus yang terjadi di Gianyar. Dengan kata lain, persiapan APBdes mengalami keterlambatan di 11 dari 64 desa di Kabupaten Gianyar. Terdapat beberapa desa di Kabupaten Ubud yang belum selesai APBdesnya, antara lain Desa Sayan, Desa Lodtundu, Desa Petulu, dan Desa Kedewatan. Kecamatan Payangan yaitu Desa Phu, Desa Meringi dan Desa Buah. Letaknya di Kecamatan Proteinshirin yaitu Desa Pejeng. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tegalalang yaitu Desa Kedisan dan Pupuan (Nusabali.com, 2020) Mengingat banyaknya kasus dana desa yang tidak dikelola secara maksimal dan penyusunan APBdes yang tertunda, maka perlu dihindari penyalahgunaan yang memerlukan sistem pengelolaan yang lebih



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Populasi penelitian ini terdiri dari 128 orang yang bekerja sebagai perangkat desa di tujuh desa di kabupaten Ubud. Kriteria yang digunakan dalam survei pengambilan sampel adalah seluruh perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala desa, direktur keuangan, direktur perencanaan, direktur pemerintahan, direktur kesejahteraan masyarakat, dan direktur pelayanan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 56 orang”. Metode analisis dalam penelitian ini: Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi (R2), Uji F, Uji t

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut

(Sugiyono, 2012):

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

“Hasil pengujian instrumen penelitian dapat dijelaskan oleh semua variabel yang mempunyai nilai koefisien lebih besar dari 0,30, dan koefisien alpha lebih besar dari 0,6, sehingga seluruh instrumen valid dan reliabel. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai asymp.sig (two-tailed) lebih besar dari 0,05 (0,143 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel “Pelaksanaan sistem keuangan desa” (X1) mempunyai nilai toleransi sebesar 0,256 dan nilai VIF sebesar 3,909. Variabel toleransi (X2) peran perangkat desa sebesar 0,275 dan nilai VIF sebesar 3,400. Nilai toleransi variabel yang dipantau (X3) sebesar 0,179 dan nilai VIF sebesar 2,642. Karena toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF tidak lebih besar dari 10, kita dapat berasumsi bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji Glejser dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai signifikansi variabel lebih

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas”.

Tabel 1 Hasil Uji Kelayakan dan Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.832	1.087		-2.607	0.012
Penerapan Sistem Keuangan Desa	0.435	0.073	0.517	5.930	0.000
Peran Perangkat Desa	0.121	0.208	0.094	2.583	0.032
Pengawasan	0.266	0.111	0.376	3.399	0.020
R					0,948
<i>R Square</i>					0,899
<i>Adjusted R Square</i>					0,893
Uji F					154,086
Sig. Model					0,000

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1 dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2,832 + 0,435X_1 + 0,121X_2 + 0,266X_3 + e$$

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,893. Artinya penerapan sistem keuangan desa, peran dan pengawasan perangkat desa dapat memberikan dampak sebesar 89,3% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan sisanya sebesar 10,7% disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini terpengaruh. Nilai uji F sebesar 154,086 dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa model penelitian ini digunakan untuk memantau efektivitas penerapan sistem keuangan desa, peran perangkat desa, dan akuntabilitas desa. Pengelolaan Dana Desa cocok.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin baik penerapan dari sistem keuangan desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengaruh positif signifikan ini memberikan makna bahwa, peran dari perangkat desa yang dapat dijalankan dengan baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik

- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa(Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di desa Banyudono Kecamatan Dukun. *JESYA (jurnal Ekonomi & Ekonomi syariah)*, 763-776. Faizah, D.
- N. (2021). "Pengaruh Peran Perangkat Desa ,Transparansi,Partisipasi,Dan kompetensi Terhadap Akuntabilitas Dana desa". *repository.upstegal.ac.id*, 1-109.
- Ghozali. (2016). Uji Validitas.
- Husna, & Abdullah. (2016). "Otoritas desa dapat lebih mudah melayani kepentingan publik".
- Indonesia. (2014). "Perangkat desa yang berperan penting malah tidak mengerjakan pekerjaannya".
- Iqbal, M. (2022). "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang". *Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian*, 1-68.
- Jeremias, & Setiawan. (2018)." Akuntabilitas berfungsi sebagai tolak ukur bagi pemerintah desa".
- Kharisma. (2014). Good Governance merupakan salah satu aspek yang berperan penting terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
- Krisnanti, N. P. (2022). "Pengaruh Kepemimpinan,Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".
- Kusmawardani, G., & Nurfadliyah. (2022). "Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi kasus di desa kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)". *Jurnal Tambora*, 113- 117.
- Maharini. (2019). "Pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas dari perencanaan pengelolaan dana desa yang baik".
- Mardiasmo. (2002). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah.
- Mega, K. N., Kalangi, L., & M.Kapojos, P. (2022). "Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur". *Jurnal Riset Akuntansi 17(3),2022,150-161-*, 150-161.
- Nainggolan, F. A. (2017). "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)". *repository.uinsu.ac.id*, 106.
- Nurak, Y. V., Mitan, W., & Go'o, E. E. (2023). "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa". *Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 243-256.
- Olivia, C. R., & Utomo, R. B. (2023). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat,Peran Perangkat Desa,dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".
- Riduan, M. A. (2021). "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Persepektif Akuntansi Syariah". *repository.radenintan.ac.id*, 45.
- Ridwan. (2019). Sistem Keuangan Akan memberikan Keuntungan.
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi,Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka". *Maro;Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 168.
- Wulandari, A. (2022). "Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES),Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi Empiris pada pemerintah Nagari di Kecamatan Kamang Baru,Kabupaten Sijunjung,Sumatera Barat)". *UIN SUSKA RIUA*, 1-120.

Peran penting bank dalam pembangunan nasional telah mengantarkan perkembangan yang pesat pada sektor ini, mewujudkan mobilitas keuangan yang merata membuat penyaluran dana menjadi merata di setiap aspek kehidupan masyarakat (Sudiyatno, 2018). Salah satu jenis usaha perbankan yang ada di Indonesia yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan dimanapun BPR tersebut berdiri yang memberikan pelayanan secara konvensional (Hasibuan, 2018). Penyaluran dana yang merata membuat industri ini terus meningkat, yang didukung juga dengan dikeluarkannya berbagai peraturan oleh pemerintah untuk mendukung usaha perbankan jenis ini (Yanti, 2019).

Setiap perusahaan termasuk Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik saham maupun para investor yang ada di dalamnya melalui keuntungan yang diperoleh dari setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan (Agustina, 2020). Menurut (Armansyah et al., 2023) profitabilitas adalah keuntungan yang berhasil didapatkan perusahaan dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang dihitung selama periode tertentu atau umumnya menggunakan periode tahunan, keuntungan tersebut diperoleh dari menggunakan segala sumber daya yang dimiliki perusahaan serta pengelolaan yang baik dari sumber daya tersebut.

Di Bali saat ini terdapat 132 unit BPR yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Di Kabupaten Tabanan khususnya terdapat 18 unit BPR yang melayani seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan dan kabupaten lain di sekitarnya. Berdasarkan data pertumbuhan profitabilitas BPR di Kabupaten Tabanan yang termuat dalam situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat mengalami fluktuasi yang terlihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Rata-Rata Pertumbuhan Profitabilitas (ROA) BPR di Kabupaten Tabanan

Tahun	Rata-Rata ROA	Pertumbuhan
2018	2,25 %	-
2019	1,98 %	-12,00 %
2020	1,54 %	-22,22 %
2021	0,21 %	-86,36 %
2022	0,86 %	309,52 %

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 1. terlihat bahwa pada tahun 2018 rata-rata profitabilitas yang tercatat diperoleh BPR di Kabupaten Tabanan sebesar 2,25% kemudian pada tahun 2019 menjadi sebesar 1,98% atau menurun 12,00%, pada tahun 2020 perolehan rata-rata profitabilitas tercatat sebesar 1,54% atau menurun signifikan sebesar 22,22%, hal ini disebabkan mulai terdampaknya ekonomi Indonesia dari adanya pandemi Covid 19, pada tahun 2021 perolehan rata-rata profitabilitas juga semakin menurun menjadi sebesar 0,21% atau menurun 86,36% dari tahun

sebelumnya, kemudian pada tahun 2022 tercatat mulai adanya peningkatan menjadi 0,86% atau meningkat 309,52% dari tahun 2021. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan beberapa perusahaan menderita kerugian yang tidak sedikit, selama periode tersebut yang diakibatkan belum pulihnya ekonomi nasional dari pandemi yang terjadi.

Rumusan masalah yang diteliti yaitu Bagaimana pengaruh permodalan, kualitas aktiva produktif, dan likuiditas terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. Untuk itu, menjawab rumusan masalah yang dikemukakan yaitu mengetahui pengaruh permodalan, kualitas aktiva produktif, dan likuiditas terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan menjadi tujuan penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Teori ini dicetuskan oleh (Alchian & Demsetz, 1972) kemudian dikembangkan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan bahwa dalam sebuah perusahaan saat orang yang berstatus sebagai pemilik sebuah perusahaan mempekerjakan satu atau beberapa orang untuk diberikan wewenang mengurus perusahaan tersebut, mengambil keputusan, dan melakukan pengelolaan terhadap perusahaannya akan melahirkan hubungan keagenan. Pemilik sebagai *principal* dan pengurus sebagai *agent* (Dewanti & Mulyadi, 2021). *Agent* akan melakukan tugasnya sebagai pengelola perusahaan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, serta diharapkan memberikan keuntungan bagi *principal*, serta *agent* harus membuat laporan keuangan yang berisi informasi segala kegiatan yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu, sehingga *principal* dapat mengetahui mengenai kegiatan, rasio keuangan, tingkat kesehatan perusahaan, serta prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan (Mulyanti et al., 2023).

Menurut (Akbar, 2019) profitabilitas adalah sebuah rasio keuangan yang menggambarkan besarnya keuntungan yang dicapai perusahaan pada kegiatan dalam periode tertentu, dimana keuntungan tersebut didapatkan dari pengelolaan asset perusahaan. Rasio ini memiliki tujuan agar *stakeholder* atau pemegang saham perusahaan dapat mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, serta tingkat keefektifan pengelolaan usaha yang dijalankan manajemen perusahaan saat ini (Septiani, 2016).

Permodalan merupakan gambaran struktur dari modal yang dimiliki perusahaan, baik dari hutang/pinjaman, dana pihak ketiga, maupun modal yang dimiliki perusahaan sendiri yang digunakan untuk menjalankan usaha perusahaan (Fahmi, 2020). Perusahaan dengan rasio permodalan yang baik dan stabil memiliki peluang besar dalam menghasilkan profit yang lebih tinggi, karena modal yang dimiliki dapat dialokasikan pada aktiva produktif, aktivitas investasi,

dan disalurkan kepada masyarakat berupa kredit usaha atau konsumtif yang nantinya akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Sehingga, permodalan yang semakin tinggi membuat keuntungan yang dicapai juga meningkat. Penelitian terdahulu oleh (Ariani & Prinoya, 2021), (Muliayanti et al., 2023), (Dewi et al., 2023) menyatakan rasio permodalan yang baik memberikan pengaruh yang membuat semakin meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hipotesis 1 dapat dikemukakan bahwa:

H1: Permodalan berpengaruh terhadap profitabilitas

Menurut (L. Nugroho, 2020) aktiva produktif adalah tersedianya dana (aktiva) yang dapat menghasilkan bagi bank, baik untuk disalurkan dalam bentuk kredit maupun dana yang dapat disimpan atau ditempatkan pada lembaga keuangan yang lebih besar yang dapat memberikan keuntungan bagi penyimpannya, dana-dana tersebut diharapkan memiliki kualitas yang baik atau memungkinkan untuk menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan jika digunakan untuk hal-hal tersebut. Salah satu bentuk aktiva produktif adalah dana pembiayaan dalam bentuk kredit kepada nasabah yang memberikan sumbangsih besar kepada profitabilitas. Sehingga, semakin baik tingkat kualitas aktiva yang bersifat produktif tersebut, akan memberikan lebih besar peluang untuk mendapatkan profit dari penggunaannya. Penelitian terdahulu oleh (Ruslan, 2021), (Widhiasti, 2021), (Sahara, 2022) yang menyatakan perusahaan yang memiliki aktiva produktif yang berkualitas baik akan membuat semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan. Hipotesis 2 dapat dikemukakan bahwa:

H2: Kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap profitabilitas

Menurut (Ismanto, 2019) likuiditas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabahnya saat ditagih, berupa penarikan tabungan, deposito, dan lainnya yang menjadi hutang jangka pendek perusahaan. Adanya rasio ini memberikan rasa aman bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan di bank, karena rasio likuiditas menjadi bukti bahwa bank memiliki kemampuan yang baik untuk mengembalikan dana nasabah yang ada di bank (Kasmir, 2019). Rasio ini juga berhubungan dengan kepercayaan masyarakat kepada sebuah bank, jika masyarakat menilai bahwa tingkat likuiditas bank mampu melakukan kewajibannya, maka kredibilitas bank akan semakin meningkat dan banyak nasabah serta masyarakat sebagai calon nasabah akan melakukan transaksi di bank tersebut, yang tentunya hal tersebut akan menguntungkan bank yang mendapatkan bunga dan biaya administrasi yang dikenakan dari transaksi tersebut. Sehingga, rasio likuiditas yang tinggi akan meningkatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Penelitian terdahulu oleh (Ariani & Prinoya, 2021), (Ruslan, 2021),

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,195	2,734		0,803	0,426
	CAR	0,003	0,014	0,028	0,187	0,852
	KAP	0,056	0,069	0,119	0,811	0,421
	LDR	-0,015	0,032	-0,069	-0,485	0,630

a. Dependent Variable: abs

Sumber: Data diolah, 2024

Pengujian dinyatakan bebas heteroskedastisitas dengan nilai Sig. > 0,05.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,009	1,711		-2,927	0,005
	CAR	0,036	0,015	0,337	2,445	0,018
	KAP	0,138	0,065	0,294	2,122	0,039
	LDR	0,033	0,016	0,259	2,021	0,049

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah, 2024

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil uji tersebut.

$$ROA = -5,009 + 0,036CAR + 0,138KAP + 0,033LDR$$

Tabel 8. Hasil Analisis Determinasi

		Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	0,441 ^a	0,194	0,146	2,09651	2,048	

a. Predictors: (Constant), LDR, CAR, KAP

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah, 2024

Besar nilai *Adjusted R Square* menunjukkan besarnya pengaruh model regresi 14,6% sedang sisanya 85,4% dipengaruhi variabel lain.

Tabel 9. Uji Simultan (F-test)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53,041	3	17,680	4,023	0,012 ^b
	Residual	219,769	50	4,395		
	Total	272,810	53			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), LDR, CAR, KAP

Sumber: data diolah, 2024

Besar F hitung 4,023 dan sig. 0,012 < 0,05 menunjukkan seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel terikat sehingga model layak untuk diteliti.

mengembalikan dana nasabah yang ada di bank (Kasmir, 2019). Rasio ini juga berhubungan dengan kepercayaan masyarakat kepada sebuah bank, jika masyarakat menilai bahwa tingkat likuiditas bank mampu melakukan kewajibannya, maka kredibilitas bank akan semakin meningkat dan banyak nasabah serta masyarakat sebagai calon nasabah akan melakukan transaksi di bank tersebut, yang tentunya hal tersebut akan menguntungkan bank yang mendapatkan bunga dan biaya administrasi yang dikenakan dari transaksi tersebut. Sehingga, rasio likuiditas yang tinggi akan meningkatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Penelitian terdahulu oleh (Ariani & Prinoya, 2021), (Ruslan, 2021), (Armansyah et al., 2023), (Dewi et al., 2023) menyatakan rasio likuiditas yang tinggi akan meningkatkan keuntungan yang didapatkan perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. kualitas aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan.

Dari simpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan yaitu: Disarankan kepada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan untuk dapat menjaga permodalan agar tetap stabil, sehingga dapat lebih mengembangkan usaha-usaha lain BPR seperti pelayanan pembayaran tagihan listrik, telepon, internet dan lainnya, yang tentunya akan menghasilkan profit yang lebih tinggi pula bagi BPR. Untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas aktiva produktif yang dimiliki dimana perusahaan dapat meningkatkan dana untuk penyaluran kredit yang tentunya akan menghasilkan profit yang lebih tinggi pula bagi BPR. Untuk dapat menjaga kestabilan rasio likuiditas yang dimilikinya, dimana kepercayaan nasabah akan lebih meningkat jika BPR memiliki likuiditas yang stabil sehingga masyarakat sebagai calon nasabah tertarik untuk menggunakan jasa BPR dalam transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. P. P. (2020). Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan Non Performing Loan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT BPR Kencana Graha. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1), 228–241.
- Akbar, T. (2019). *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank. Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). Production, Information Costs, and Economic Organization. *American Economic Review*, 62(5), 777–795.

**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
(Studi Empiris Pada Industri Properties & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2019 - 2022)**

Putu Dhea Apriyanti Utami ⁽¹⁾

Ni Wayan Alit Erlina Wati ⁽²⁾

Kadek Dewi Padnyawati ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sanggalangit, Penatih Denpasar Timur
Email :dheaapriantii14@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian Stock Exchange requires prompt financial report submissions from all publicly traded companies. Financial reports must be submitted on time in order to provide meaningful information. The purpose of this study is to examine the relationship between the reliability of financial reporting times for property and real estate businesses listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2022 and the following factors: profitability, leverage, and the reputation of the public accounting firm. Using purposive selection, this quantitative study draws from a pool of 57 different businesses. This study makes use of logistic regression analysis for its statistical data. The study found that profitability is a positive attribute that affects financial reporting time accuracy. At the same time, the public accounting firm's reputation and leverage are irrelevant to the performance of financial reports.

Keywords: Profitability, Leverage, KAP Reputation, Timeliness of Submission of Financial Reports

PENDAHULUAN

Perusahaan yang ingin melakukan IPO di Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan laporan keuangan kepada investor dan Bursa Efek Indonesia, yang sebagai sumber informasi berharga tentang perusahaan tersebut. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu sebagai suatu aspek krusial dalam memberikan informasi yang relevan. Pasal 7 ayat 2 Peraturan OJK No.44/POJK.04/2016 yang mengatur tentang tenggat waktu penyampaian dan publikasi laporan menyebutkan yaitu laporan finansial tahunan industri wajib diungkapkan kepada OJK selambat-lambatnya 90 hari. setelah akhir tahun anggaran. Sejumlah Keputusan Direksi BEI dikeluarkan pada masa pandemi COVID-19 yang memperpanjang tenggat waktu penyampaian laporan keuangan dan tahunan jadi dua bulan. Persyaratan lama, yaitu

penyampaian laporan keuangan pada tanggal 31 Maret setiap tahun, diberlakukan kembali seiring dengan mulai menandakan tanda-tanda perbaikan perekonomian Indonesia.

Banyak perusahaan yang masih merasakan keterlambatan penyampaian laporan keuangan karena perubahan peraturan mengenai tanggal jatuh tempo. Di antara 61 perusahaan yang diketahui gagal mengutarakan laporan keuangan tahun 2022, terdapat kejadian keterlambatan penyampaian. BEI akan memberi teguran tertulis II dan denda Rp50 juta dimulai kalender ke-31, sesuai klausul II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H yang mengatur mengenai sanksi. Perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan sampai dengan hari kalender ke-60 setelah tenggat waktu yang ditentukan. Tautan tersebut dikunjungi pada 4 Oktober 2023 dari <https://investasi.kontan.co.id/>.

Kemampuan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu sebagai suatu kriteria yang memengaruhi seberapa cepat laporan keuangan harus diungkapkan. Korporasi tidak akan menyembunyikan informasi yang memuat laba karena laba akan berdampak baik bagi perusahaan. Leverage suatu perusahaan dapat dijabarkan sebagai rasio total utang kepada nilai asetnya; rasio ini menandakan seberapa jauh industri bergantung pada pinjaman untuk mendanai operasinya. Bila suatu organisasi mempunyai banyak hutang dan tingkat leverage yang tinggi, itu berarti organisasi tersebut berisiko secara finansial dan mungkin berada dalam masalah. Kredibilitas Kantor Akuntan Publik (KAP) juga merupakan faktor penentu; saat melakukan audit, bisnis hanya akan bekerja sama dengan KAP yang telah mendapatkan reputasi yang baik di antara kliennya. Prosedur audit yang lebih cepat dalam menghasilkan laporan keuangan sebagai suatu cara menandakan reputasi kuat seorang KAP.

Tujuan dari riset ini ialah untuk menguji hubungan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada bisnis properti dan real estate yang terdaftar BEI dengan profitabilitas, leverage, dan reputasi KAP ketika 2019 sampai 2022. Dilihat dari kelebihan, riset ini sebagai alat dalam mengembangkan pengetahuan serta wawasan dan praktek dalam penerapan akuntansi selama perkuliahan untuk mahasiswa. Untuk universitas akan jadikan riset

perusahaan. Untuk membantu banyak pengguna dalam membuat keputusan, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang status keuangan perusahaan.

Agar suatu bisnis dapat menghasilkan keuntungan, ia harus mampu meningkatkan nilai yang ditawarkannya kepada pemegang sahamnya. Rekam jejak profitabilitas yang kuat menandakan yaitu organisasi pandai menghasilkan uang, yang berarti dapat memasukkan lebih banyak uang ke dalam tanggung jawab sosial dan membuat lebih banyak orang menyadarinya dalam laporan keuangan (Sekarwigati dan Effendi, 2019).

Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utangnya bila terjadi likuidasi dapat dinilai melalui penerapan leverage, menurut Diliasmara dan Nadirsyah (2019). Seberapa besar pendanaan perusahaan berasal dari sumber luar, Seberapa besar pendanaan perusahaan yang berasal dari sumber luar seperti debitor ditunjukkan oleh rasio ini. Ketika membandingkan organisasi-organisasi yang sehat secara finansial dengan organisasi-organisasi yang merasakan kesulitan, organisasi-organisasi tersebut cenderung terlambat mengutarakan laporannya. Perusahaan yang merasakan masalah keuangan terkadang tidak mengungkapkan status keuangannya secara tepat waktu karena dianggap sebagai berita negatif (Putri, 2020).

Cameran (2005) mengutip Suhayati (2014) yang mengatakan yaitu kredibilitas laporan keuangan sangatlah kebergantungan kepada reputasi KAP. Perihal ini dikarenakan perusahaan audit yang mempunyai reputasi baik diinginkan lebih efisien dan mempunyai fleksibilitas yang lebih besar agar menuntaskan audit menyesuaikan jadwal. Masyarakat mempunyai opini yang tinggi kepada auditor yang bekerja pada KAP besar. Akuntan publik asosiasi (KAP) di suatu kantor akuntan "Empat Besar" yang diakui secara global biasanya akan memberi gambaran ini.

Kapasitas suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan menandakan profitabilitasnya. Secara teoritis, teori sinyal menyebutkan yaitu manajemen lebih cenderung memberikan laporan keuangan tepat waktu bila nilai aset perusahaan yang dilaporkan tinggi, karena perihal ini akan memberi kesan kepada pihak luar bahwa industri berjalan dengan baik. Menurut riset Putri (2020) dan Angkasali & Dewi (2022) sebelumnya, profitabilitas mempunyai peranan besar dalam menentukan seberapa cepat laporan keuangan diungkapkan.

H₁ : Profitabilitas berdampak kepada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Seberapa jauh suatu industri memakai utang untuk membiayai asetnya disebut leverage. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berada dalam posisi keuangan yang genting; mereka sangatlah kebergantungan kepada pinjaman dari sumber luar untuk membiayai aset mereka, alhasil meningkatkan kemungkinan mereka bangkrut. Bila suatu industri merasakan kesulitan finansial, mungkin lebih bijaksana bila industri tersebut menunda penerbitan laporan

keuangannya. Menurut teori sinyal, perihal ini dapat dilihat sebagai sinyal yang mengungkapkan situasi suatu perusahaan. Riset sebelumnya yang diselenggarakan oleh Agustina dan Rahmawati (2023) serta Ferdina dan Wirama (2017) menandakan yaitu leverage berdampak kepada kesesuaian waktu menyampaikan laporan finansial.

H₂ : Leverage berdampak kepada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

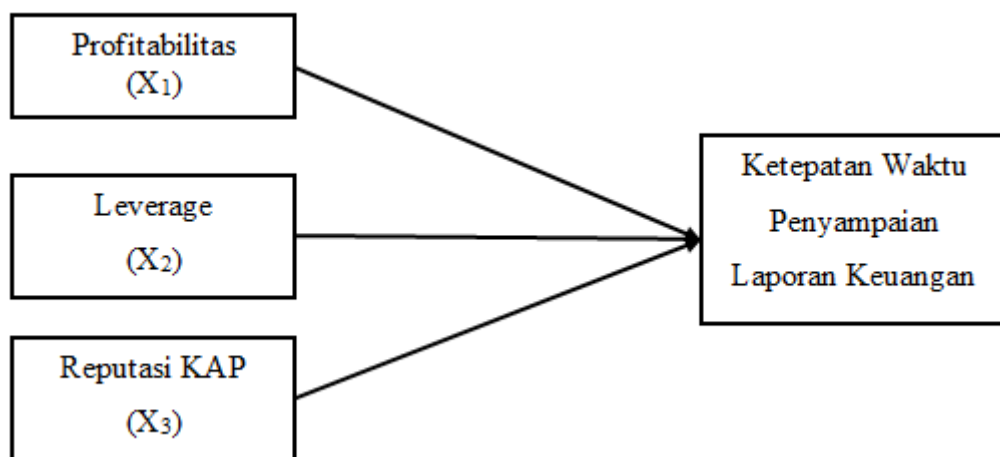
Ketika seorang KAP menjadi anggota Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4), sebuah KAP yang sangat besar dan terpandang, perihal itu menandakan yaitu mereka mempunyai reputasi yang baik. Dalam teori sinyal menyebutkan yaitu pemegang saham dan pihak-pihak lain dapat memakai ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai sinyal positif tentang kinerja dan integritas perusahaan. KAP dengan reputasi yang baik dapat mengindikasikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa industri tersebut dapat diandalkan. Akibatnya, dunia usaha mungkin merasakan tekanan yang lebih besar untuk mengutarakan laporan keuangannya tepat waktu. Rahmatia (2020) dan Tang & Elvi (2021) menemukan yaitu reputasi KAP sangat memengaruhi seberapa cepat laporan keuangan diungkapkan.

H₃ : Reputasi KAP berdampak kepada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Riset ini memiliki desain sebagai berikut:

Gambar 1. Desain Penelitian



Sumber : Data diolah (2024)

Variabel Penelitian

Ketepatan penyampaian laporan keuangan jadi variabel dependen dalam riset ini. Untuk mengukur variabel ini, kami memakai variabel dummy dengan angka 0 bagi industri yang terlambat dan 1 bagi industri yang mengutarakan laporan keuangan tepat waktu.

Profitabilitas, leverage, dan Reputasi KAP merupakan faktor independen dalam riset ini. Berikut adalah bagaimana variabel-variabel dalam riset ini dijabarkan secara operasional:

1.
$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$
2.
$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$
3. Skala yang dipakai untuk KAP adalah skala nominal yang dimana dihitung memakai varibel dummy dan ditunjukkan sebagai berikut: Reputasi KAP = 1 apabila industri berafiliasi dengan Big 4 sedangkan Reputasi KAP = 0 apabila industri berafiliasi dengan selain Big 4.

Riset ini memakai 66 perusahaan yang terdaftar BEI ketika 2019 sampai 2022 sebagai populasinya. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam industri properti dan real estate. Riset ini memakai data sekunder yang bersumber dari situs resmi BEI yang dapat dilihat di www.idx.co.id. Agar mendapat sampel yang selaras terhadap riset ini, peneliti memakai teknik purposive sampling. Berikut kriteria yang dipakai:

1. Perusahaan *Properties & Real Estate* yang terdaftar BEI Periode 2019 - 2022
2. Perusahaan *Properties & Real Estate* yang melaporkan laporan keuangan selama periode 2019 – 2022

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan <i>Properties & Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022	66
2	Perusahaan <i>Properties & Real Estate</i> yang tidak melaporkan laporan keuangan selama periode 2019 -2022	(9)
	Total sampel penelitian	57
	Total pengamatan (periode) 2019-2022	4
	Total sampel selama periode penelitian (total sampel × 4)	228

Sumber : Data diolah (2024).

tidak dapat dibedakan dari data observasi. Oleh karena itu, model regresi riset ini dinilai praktis dan berhasil dalam memprediksi nilai-nilai yang diamati.

Tabel 4. Hasil Tes Overall Fit Model Awal

Iteration History ^{a,b,c}			
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	179,068	1,491
	2	173,829	1,868
	3	173,743	1,925
	4	173,743	1,926
	5	173,743	1,926

- a. Constant is included in the model.
 - b. Initial -2 Log Likelihood: 173,743
 - c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.
- Sumber : Data diolah (2024)

Tabel 5. Hasil Uji Overall Fit Model Akhir

Iteration History ^{a,b,c,d}						
Iteration		-2 Log likelihood	Consta nt	Coefficients		
				ROA	LEV	REPUTASI KAP
Step 1	1	167,897	1,434	4,664	,037	,026
	2	156,686	1,867	9,747	,041	-,002
	3	155,706	2,011	12,419	,040	-,033
	4	155,691	2,029	12,820	,040	-,038
	5	155,691	2,029	12,827	,040	-,038
	6	155,691	2,029	12,827	,040	-,038

- a. Method: Enter
 - b. Constant is included in the model.
 - c. Initial -2 Log Likelihood: 173,743
 - d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.
- Sumber : Data diolah (2024)

Nilai awal -2Log Likelihood (nomor blok = 0) sejumlah 173.743 ditemukan sebelum ditambahkan sebagai variabel independen, menurut temuan. Nilai akhir -2Log Likelihood sejumlah 155.691 diperoleh setelah ketiga variabel independen dimasukkan (nomor blok = 1). Penurunan sejumlah 18.052 ditunjukkan oleh selisih -2Log Likelihood asli dan final. Karena

angka -2Log Likelihood yang terakhir lebih rendah dari yang sebelumnya, maka yang pertama lebih tinggi. Masuknya variabel bebas memperbaiki model regresi, perihal ini menandakan yaitu H0 diterima yang berarti model yang dihipotesiskan selaras terhadap data.

Tabel 6. Hasil Tes Cox & Snell R Square

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	155,691 ^a	,076	,143

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Data diolah (2024)

Berlandaskan angka Nagelkerke R Squared, analisis regresi menandakan koefisien determinasi jumlahnya 0,143. Artinya, variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan reputasi KAP hanyalah bisa menjabarkan 14,3% variansi variabel dependen yaitu kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial. Pada saat yang sama, 85,7% variasi disebabkan oleh beragam faktor yang tidak mencakup di riset ini.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step	ROA	12,827	3,783	11,498	1	,001	372070,545
	1 ^a						
	LEV	,040	,050	,646	1	,422	1,041
	REPUTASI	-,038	,589	,004	1	,949	,963
	KAP						
	Constant	2,029	,240	71,447	1	,000	7,607

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, LEV, REPUTASI KAP.

Sumber : Data diolah (2024)

Ini ialah persamaan regresi logistik yang dapat dipakai untuk menyebutkan temuan analisis regresi logistik.

$$\text{Ln} \frac{TW}{1 - TW} = 2,029 + 12,827 X1 + 0,040 X2 - 0,038 X3 + \epsilon$$

Persamaan regresi logistik di atas memungkinkan seseorang untuk mengujikan hubungan antara variabel independen dan dependen berikut ini:

1. Dengan asumsi variabel independen bernilai konstan, maka nilai kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial adalah sejumlah 2,029, karena nilai konstanta (α) sama dengan 2,029.

2. Dengan angka koefisien positif sejumlah 12,827 pada variabel Profitabilitas, maka bisa menyimpulkan yaitu akan terjadi peningkatan kesesuaian waktu pengungkapan laporan finansial sejumlah 12,877 poin seiring dengan meningkatnya profitabilitas.

3. Nilai koefisien positif jumlahnya 0,040 pada variabel Leverage menandakan yaitu terdapat hubungan positif diantara leverage dengan kesesuaian waktu pengungkapan laporan finansial.

4. Variabel Reputasi KAP bernilai koefisien negatif sejumlah -0,038 yang berarti akan terjadi penurunan kesesuaian waktu pengungkapan laporan finansial jumlahnya 0,038 seiring dengan membaiknya reputasi Kantor Akuntan Publik.

Tingkatan signifikansi hipotesis ditentukan oleh nilai p-value sig wald yang merupakan angka probabilitas. Hipotesis dapat diterima atau ditolak berlandaskan perbandingan ambang signifikansi $\alpha = 0,05$. Tabel 7 dengan jelas menandakan yaitu:

1. Nilai beta variabel X_1 sejumlah 12,827 dengan probabilitas 0,001 dibawah tignkatan signifikansi 0,05. Angka signifikansi $< 0,05$ maknanya variabel X_1 berdampak positif kepada variabel Y.
2. Nilai beta variabel X_2 jumlahnya 0,040 dengan probabilitas 0,422 diatas tignkatan signifikansi 0,05. Angka signifikansi $> 0,05$ maknanya variabel X_2 tidak berdampak kepada variabel Y.
3. Nilai beta variabel X_3 sejumlah -0,038 dengan probabilitas 0,949 diatas tignkatan signifikansi 0,05. Angka signifikansi $> 0,05$ maknanya variabel X_3 tidak berdampak kepada variabel Y.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Kepada Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Dengan probabilitas 0,001, yang kurang dari ambang signifikansi 0,05, temuan uji Wald (t) menandakan angka beta sejumlah 12,827. Dengan p-value kurang dari 0,05 berarti bisa menyimpulkan yaitu H1 diterima karena variabel profitabilitas berdampak kepada kesesuaian waktu pengungkapan laporan finansial. Bisa menyimpulkan yaitu kesesuaian waktu pengungkapan laporan finansial berdampak positif kepada profitabilitas. Temuan riset ini menguatkan riset lain yang menandakan yaitu profitabilitas berdampak kepada kesesuaian waktu pengungkapan laporan finansial (Putri, 2020; Angkasali dan Dewi, 2022).

Pengaruh Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Nilai beta yang ditunjukkan oleh uji Wald (t) adalah 0,040 serta probabilitasnya adalah 0,422, lebih dari ambang batas signifikansi 0,05. H2 dapat kita tolak karena angka

signifikansinya melampaui 0,05 yang menandakan yaitu variabel leverage tidak berdampak kepada kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial. Dari sini bisa menyimpulkan yaitu penyampaian laporan keuangan tidak terpengaruhi oleh leverage. Riset sebelumnya oleh Tang dan Elvi (2021) dan Shafira (2022) menandakan yaitu leverage tidak memengaruhi kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial, dan hasil kami menguatkan temuan mereka.

Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Nilai beta sejumlah -0,038 dan probabilitas jumlahnya 0,949, keduanya lebih dari ambang batas signifikansi 0,05, seperti yang ditunjukkan oleh temuan uji Wald (t). Dengan tignkatan signifikansi yang melampaui 0,05 berarti H3 dapat kita tolak dan berkesimpulanyaitu variabel Reputasi KAP tidak berdampak kepada kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial. Perihal ini mungkin bisa dilihat sebagai indikasi bahwa kedudukan KAP tidak berdampak pada kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial. Riset sebelumnya yang diselenggarakan oleh Asriyatun dan Syarifudin (2020) serta Mariantini, Yusralaini, dan Julita (2023) tidak menemukan pengaruh reputasi KAP kepada kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial, dan riset kami membenarkan temuan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Temuan ini berasal dari riset ini dan didukung oleh alasan yang diberikan di atas. Kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial berkorelasi positif dengan profitabilitas. Dengan demikian, kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial perusahaan bergantung pada besarnya profitabilitas. Dalam hal kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial, leverage tidak relevan. Dengan demikian, kesesuaian waktu pengungkapan lapporan finansial tidak terpengaruhi oleh tingkat leverage. Dalam hal penyampaian laporan keuangan tepat waktu, reputasi KAP tidak relevan. Meskipun KAP mempunyai reputasi yang baik, namun tidak ada jaminan yaitu perusahaan tersebut akan tepat waktu dalam mengutarakan laporan keuangannya.

Karena kekurangan riset ini, penulis memberikan banyak rekomendasi untuk riset lebih lanjut sebagai berikut. Riset ini terbatas pada periode riset yang singkat yaitu mulai tahun 2019-2022, untuk riset selanjutnya diinginkan menambah periode waktu pengambilan sampel agar dapat mencerminkan kondisi sesungguhnya. Supaya memperluas cakupan riset selanjutnya, alangkah baiknya bila sampel diambil dari industri yang lebih luas di luar perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Supaya membuat riset di masa depan lebih fokus dan mendapatkan hasil maksimal dari datanya, para peneliti berencana untuk memakai lebih banyak faktor independen.

Daftar Pustaka

- Diliasmara, D. A., & Nadirsyah, N. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Financial Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Ketika 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 304-316.
- Effendi, B. (2019). Komite Audit, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur-Sektor Logam. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(3), 149-157.
- Ferdina, N. W., & Wirama, D. G. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Pada Ketepatanwaktuan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2293-2318.
- Nurjani, A. (2023). Telat Setor Laporan Keuangan, 61 Emiten Kena Sanksi dan Denda Rp 50 Juta. <https://investasi.kontan.co.id/news/telat-setor-laporan-keuangan-61-emiten-kena-sanksi-dan-denda-rp-50-juta>. diakses 4 Oktober 2023.
- Putri, D. A. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 333-353.
- Sekarwigati, M., & Effendi, B. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 16-33.
- Shafira, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada industri Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Suhayati, E. (2014). Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Rentang Waktu Penyelesaian Audit. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(1).

Peran Badan Pengawas Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Koperasi Serba Usaha Se-Kecamatan Mengwi

Komang Ayu Pradnya Lestari Sangging⁽¹⁾
Ni Putu Ayu Kusumawati⁽²⁾
Putu Cita Ayu⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Paiwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: ayupradnyasangging@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the Role of the Supervisory Body in Moderating the Influence of Organizational Commitment and Organizational Culture on Fraud Prevention in Multi-Business Cooperatives throughout Mengwi District. This research uses primary data obtained from interviews and questionnaires and secondary data obtained from supporting data contained in Multi-Business Cooperatives throughout Mengwi District. The population for this research is all supervisors in multi-business cooperatives in Mengwi District, a total of 96 people. The sampling method used in this research is saturated sampling where all members of the population are used as samples, so that the number of samples is the same as a population of 96 respondents. Research data was collected using a questionnaire which was then processed using multiple linear regression analysis with the help of fPLS. The results of the research show that Organizational Commitment and Organizational Culture have a positive and insignificant effect on Fraud Prevention. The interaction of Organizational Commitment and Organizational Culture with the Role of the Supervisory Body has not been able to strengthen the relationship between organizational commitment and fraud prevention

Keywords: Role of the Supervisory Body, Organizational Commitment, Organizational Culture, Fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga keuangan resmi yang berada di Indonesia dengan badan hukum yang jelas sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia. Koperasi memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien, maka koperasi harus memiliki manajemen yang baik di dalam setiap kegiatannya agar terhindar dari praktik yang tidak sehat. Koperasi terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha merupakan salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi serba usaha kegiatan usahanya di berbagai ekonomi seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan dan jasa yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi sesuai dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri.

Koperasi rentan terhadap risiko kecurangan atau fraud, yang sering kali terjadi dalam bentuk manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan markup yang merugikan keuangan perusahaan. Untuk menghadapi hal ini, pencegahan kecurangan sangat penting. Ini melibatkan pengawasan yang ketat, mempersempit peluang kecurangan, mengurangi tekanan terhadap anggota, dan menolak alasan untuk membenarkan kecurangan. Pencegahan ini krusial untuk melindungi reputasi institusi dan individu serta mencegah kerugian lebih lanjut. (Kuswati, 2023)

Perkembangan koperasi di Bali pesat, dengan 5.394 unit tersebar di seluruh kabupaten. Di Kabupaten Badung, khususnya Kecamatan Mengwi, terdapat 32 Koperasi Serba Usaha, di mana satu di antaranya mengalami kasus korupsi. Koperasi Werdhi Sedana di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana nasabah senilai Rp 2,9 miliar. Audit menunjukkan penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP). Meskipun diundang berkali-kali, manajer koperasi tidak memenuhi undangan pengurus timsus untuk membahas hasil audit. Sembilan nasabah akhirnya melapor ke Polda Bali setelah upaya somasi tidak berhasil. Polda Bali sedang menyelidiki laporan tersebut. (Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Kabid Humas Polda Bali)

Kasus korupsi pada Koperasi Serba Usaha Werdhi Sedana di Desa Baha, Mengwi, Bali, menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan masih belum optimal. Faktor-faktor seperti birokrasi berlapis, rendahnya integritas lingkungan kerja, tekanan yang tinggi, dan kurangnya kontrol dapat menjadi penyebabnya. Komitmen organisasi memainkan peran penting dalam pencegahan kecurangan, dengan komitmen tinggi dapat mengurangi niat untuk melakukan kecurangan. Namun, penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Selain komitmen, budaya organisasi juga berperan dalam pencegahan kecurangan dengan menciptakan budaya kejujuran dan etika tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, namun hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang beragam. Untuk menguji hubungan antara komitmen organisasi, budaya organisasi, dan pencegahan kecurangan, perlu diperhatikan peran badan pengawas sebagai pemoderasi. Badan pengawas dapat membantu mengurangi kecurangan melalui pengawasan yang baik dan memberikan masukan kepada pengurus. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direncanakan untuk meneliti peran badan pengawas dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada koperasi serba usaha di Kecamatan Mengwi, Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Fraud triangle theory pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. *Fraud triangle theory* merupakan ide yang timbul dari penyebab munculnya kecurangan. Menurut Teori Triangle Fraud oleh Cressey (1953) ada tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan fraud atau tindak kecurangan yaitu adanya tekanan (Pressure), peluang atau kesempatan (Opportunity), dan rasionalisasi (Rationalization) (TE Daeli, 2023).

Pencegahan kecurangan adalah suatu upaya atau usaha untuk menolak atau menahan segala bentuk kecurangan atau perbuatan curang yang dilakukan pegawai yang berdampak merugikan bagi organisasi/ perusahaan. Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga cita-cita perusahaan akan tercapai dan membuat reputasi perusahaan menjadi lebih baik (Anggraeni Mersa & Niken Elok Larasatining Malini, 2021). Pencegahan akan berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan *fraud*. Oleh karena itu dengan melaksanakan pencegahan secara efektif akan menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku *fraud* potensial. Hal ini juga dapat mengurangi kerugian akibat kecurangan (Sumendap et al., 2019). Untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kecurangan, harus meningkatkan sistem pengawasan, meningkatkan budaya organisasi, komitmen organisasi, meningkatkan kemampuan dalam bekerja, mensosialisasikan kebijakan menghadapi kecurangan kepada seluruh karyawan, dengan cara membentuk perubahan terhadap kinerja manusia.

Komitmen organisasi dipandang sebagai suatu orientasi nilai terhadap organisasi yang menunjukkan individu sangat memikirkan dan mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. Komitmen pada organisasi tersebut juga membahas kedekatan karyawan merefleksikan kekuatan keterlibatan dan kesetiaan karyawan pada organisasi (Anggoe & Reskino, 2023). Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi, serta kelekatan secara psikologi yang dirasakan oleh seseorang terhadap organisasinya (Made et al., 2021).

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (*value*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (**assumptions**), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya (Gaya Kepemimpinan et al., 2020). Selain itu, membangun budaya organisasi yang transparan mempengaruhi setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi dan menciptakan nilai atau norma positif yang

mencegah individu melakukan kecurangan. Budaya kejujuran dan etika dengan nilai tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi (Septiani et al., 2023).

Dewan Pengawas adalah sebuah badan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan operasional suatu perusahaan. Tugas utamanya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, praktik, dan keputusan yang diambil oleh Direksi atau manajemen perusahaan. Namun, perannya tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga memberikan nasihat yang strategis kepada Direksi untuk memastikan bahwa kegiatan pengurusan perusahaan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan serta nilai perusahaan.

Komitmen organisasi juga menjadi faktor yang penting dalam pencegahan kecurangan. Komitmen organisasi merupakan salah ukuran yang dilakukan untuk memahami hubungan antara tujuan dan hasil kerja. Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja sangat menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi. Individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi menyebabkan individu tersebut berupaya untuk semaksimal mungkin meraih tujuan organisasi, sehingga mereka akan patuh pada aturan-aturan yang berlaku dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan (Anggoe & Reskino, 2023). Penelitian (Made et al., 2021) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan . Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan tindakan, menetapkan norma-norma perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, memandu pengelolaan dan alokasi sumber daya, dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan internal dan eksternal. Ketika karyawan menjunjung tinggi prinsip-prinsip panduan organisasi, budayanya dikatakan kuat. Perusahaan dan organisasi dengan budaya organisasi yang kuat memiliki tingkat penipuan yang lebih rendah, dan sebaliknya (Karyani dkk, 2024). Budaya yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika didalam sebuah organisasi dapat mengurangi tindak kecurangan yang dapat merugikan Perusahaan (Sumendap et al., 2019). Penelitian (Anggraeni Mersa & Niken Elok Larasatining Malini, 2021) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

Badan pengawas memainkan peran krusial dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan dengan menyediakan pengawasan independen dan objektif terhadap praktik akuntansi perusahaan. Mereka memastikan bahwa komitmen perusahaan terhadap integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan hukum dipertahankan, serta bahwa peran badan pengawas yang efektif diimplementasikan. Dengan melakukan pemantauan yang cermat terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur pencegahan kecurangan, badan pengawas membantu memastikan bahwa kepentingan pemangku kepentingan dilindungi, dan kepercayaan publik terjaga, sehingga meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. Penelitian yang menyatakan bahwa bila badan pengawas internal mampu menerapkan sebuah pengendalian yang optimal pada suatu perusahaan maka akan mampu menurunkan perilaku kecurangan yang dilakukan pegawai di tempatnya bekerja. Hasil studi ini selaras dengan studi yang diselenggarakan (Kustina & Prilandewi, 2022), dimana dalam studinya menyatakan makin tinggi dan efektif peran panureksa akan menyebabkan makin rendah terjadi kecenderungan kecurangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

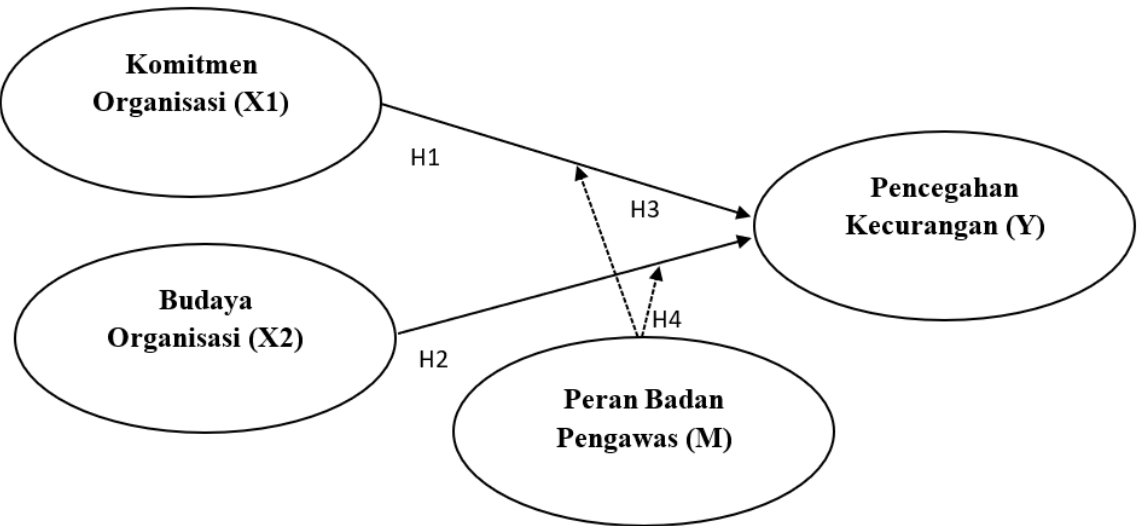
H3: Peran badan pengawas memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan

Badan Pengawas memiliki peran penting dalam memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dengan memastikan adopsi dan penguatan nilai-nilai integritas, etika, dan transparansi dalam seluruh lapisan perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi budaya organisasi dan memastikan bahwa sikap, perilaku, dan praktik yang mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pencegahan kecurangan diterapkan secara konsisten. Melalui pemantauan dan evaluasi yang cermat, Badan Pengawas dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dalam budaya organisasi yang dapat memicu praktik kecurangan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat kepatuhan dan integritas. Dengan demikian, mereka berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung praktik bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta mengurangi risiko terjadinya kecurangan.

H4: Peran badan pengawas memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel. Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara Peran Badan Pengawas Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Koperasi Serba Usaha se-Kecamatan Mengwi.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti, 2024

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu badan pengawas yang ada di Koperasi Serba Usaha se- Kecamatan Mengwi, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 96 orang. Menurut Sugiyono (2019) teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, seperti jumlah populasi 96 orang pada 32 unit Koperasi Serba Usaha se-Kecamatan Mengwi, maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 responden. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya Uji Analisis Partial Least Square (PLS) yang terdiri dari model pengukuran (*Outer Model*) yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Reliability* serta Model Struktural (*Inner Model*) yaitu *R-square*, *F Square* dan *Path Analysis* serta pengujian hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Hasil perhitungan mengenai nilai *outer loading* menunjukkan semua indikator telah memenuhi syarat valid yaitu nilai outer loading berada diatas 0,60. Pada Uji *Discriminant Validity* menunjukkan bahwa nilai AVE seluruh konstruk > 0,50 dan nilai \sqrt{AVE} masing-masing variabel berkisar antara 0,724 s.d 1,000 lebih besar dari nilai korelasi yang

besarnya antara 0,082 s.d 0,467 sehingga memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria *discriminant validity*. Nilai *composite reliability* dan *Cronbach Alpha* masing-masing konstruk telah menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60 sehingga memenuhi syarat reliabel berdasarkan kriteria *composite reliability*.

Tabel 1. Evaluasi Model Struktural *Inner* Melalui R-square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Pencegahan kecurangan	0,529	0,503

Sumber : Data diolah, 2024

Nilai R square pencegahan kecurangan 0,529 berdasarkan kriteria Chin (Ghozali,2021), maka model tersebut termasuk kriteria model moderat, bahwasanya pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, peran badan pengawas, interaksi peran badan pengawas dengan komitmen organisasi, interaksi peran badan pengawas dengan budaya organisasi sebesar 0,529 terhadap pencegahan kecurangan.

Tabel 2. Evaluasi Model Struktural *Inner* Melalui f-Square

Variabel	Pencegahan kecurangan
Komitmen Organisasi (X1)	0,004
Budaya Organisasi (X2)	0,005
Peran Badan Pengawas (Mod)	0,558
Interaksi Peran Badan Pengawas* Komitmen Organisasi	0,009
Interaksi Peran Badan Pengawas *Budaya Organisasi	0,005

Sumber : Data diolah, 2024

Menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh lemah sebesar 0,004 terhadap pencegahan kecurangan, budaya organisasi berpengaruh lemah sebesar 0,004 terhadap pencegahan kecurangan, peran badan pengawas berpengaruh kuat sebesar 0,558 terhadap pencegahan kecurangan, Interaksi peran badan pengawas dengan komitmen organisasi berpengaruh lemah sebesar 0,009 terhadap pencegahan kecurangan, Interaksi peran badan pengawas dengan komitmen organisasi berpengaruh lemah sebesar 0,005 terhadap pencegahan kecurangan.

- Hadi, M., Ariyanti, R., & Notoatmojo, M. I. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Studi Kasus Pada Rsud Bendan Kota Pekalongan). *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 4(1), 21-28.
- Kuswati, E. W. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 66–76.
- Kuang, T. M., & Natalia, E. (2023). Pengujian Fraud Triangle Theory Dalam Menjelaskan Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1752-1764.
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 101-116.
- Muthmainnah, D. M. (2019). *Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang: Studi Pada PT. Marinal Indoprime* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Made, N., Karyani, M. S., Putu, N., Kusumawati, A., Rai,), & Andayani, D. (N.D.). *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*.
- Made, N., Sanjani, W., Nyoman, D., & Werastuti, S. (2021). Peran Komitmen Organisasi, Perspektif Budayatri Hita Karana, Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(1).
- Septiani, A. K., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, MORALITAS INDIVIDU, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN. *JURNAL ECONOMINA*, 2(6), 1306–1317.
- Sonia Dewi, Adiputra. (2022). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Se-Kecamatan Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 12 No. 2, Mei-Agustus 2022
- Sumendap, P., Hidayat, W., Prabowo, A., Kumala Sari, R., Wahyuningrum, F., Umar, H., & Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, P. (2019). *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun*.

- Setiawan, R., Andreas, A., & Nasrizal, N. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Mutu Karyawan, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan: Efektivitas Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perbankan Bumh Di Pekanbaru). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 322-329. Setiawan, E., & Setiawan, R. (2020). THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLE, QUALITY OF STAFF AND ORGANISATIONAL CULTURE ON THE PREVENTION OF FRAUD: EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL AS A MODERATING VARIABLE (A STUDY ON THE STATE OWNED BANKS IN PEKANBARU). In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 4, Issue 3).
- Trisna Wulandari. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal Dan Wishtleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan
- Wirahadi, I. N. E. D. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahaan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 166-176.
- Yusni. (N.D.). *Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi.*
- Sulistiyant, R., Rahmah, S., & Arizah, A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Perilaku Etis Karyawan Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT Bank Rakyat Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 4(3).
- Reskia, R. (2022). Pengaruh Internal Audit, Anti Fraud Awareness, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Studi kasus PT. Inti Persada Nusantara). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 419-432.

Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Seseuai PMK NO.9/PMK.03/2021 Di Kabupaten Badung

Kadek Dwiyanti Agustini⁽¹⁾
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
Ni Wayan Yuniasih⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Prodi Akuntansi
Jalan Sagalangit, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Dentim, Bali
e-mail: dwiyantiagustinii@gmail.com

ABSTRACT

Tax incentives represent the government's support for taxpayers aimed at national interests. One swift action taken by the government was the issuance of Minister of Finance Regulation No. 9/PMK.03/2021 regarding Tax Incentives for Taxpayers Affected by 2019 of Corona Virus Disease Pandemic. The key point of this regulation is the deduction of final tax income rate is 0.5%. With a significant tax incentive for final income, the government aims to maximize the country's tax revenue as part of national economic recovery effort. This study aims to determine the Influence of Final Income Tax Incentives on SME Taxpayer Compliance during the COVID-19 Pandemic According to Regulation No. 9/PMK.03/2021 in Badung Regency. The sampling technique employed in this research is random sampling, involving 100 SMEs in Badung Regency with a Taxpayer Identification Number (NPWP). The data analysis techniques used include simple linear regression coefficient analysis, determination analysis, and the t-test, conducted using computer software (SPSS) Version 26.00 for system operation of Windows. The analysis results indicate that provision of final income taxes incentive had a positive and significant effect on taxpayer compliance in the regency of Badung.

Keywords: Final Income Tax Incentives and Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Melewati masa sulit yang ditimbulkan dari pandemi covid-19 memberikan dampak bagi perekonomian seperti menurunnya pendapatan/penghasilan bagi pelaku usaha seperti usaha kecil (UMKM) hal itu memberikan dampak bagi pendapatan negara karena penghasilan pajak yang menurun yang diakibatkan kepatuhan wajib pajak yang rendah. Pengertian dari kepatuhan wajib pajak menurut (Gunadi, 2013) yakni bahwa WP mempunyai kesediaan untuk memenuhi keewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi sekesama, peringatan ataupun ancaman dan penarikan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pajak penghasilan atau PPh merupakan sebuah jenis dari pajak yang dikenakan kepada seorang individu dan atau perusahaan atas pendapatan yang diperoleh didalam satu tahun dari pajak. Kemudian Pajak ini adalah terkait dengan penerima pendapatan sehingga sering disebut

sebagai pajak subjektif. Ada dua jenis pajak penghasilan berdasarkan cara pemotongan atau pemungutannya, yaitu PPh (Pajak Penghasilan) final dan PPh (Pajak Penghasilan) tidak final.

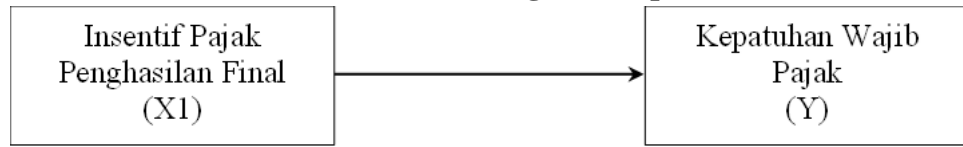
Pajak Penghasilan final merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun dengan tarif dan dasar tertentu. Ketika PPh final dipotong atau dibayarkan oleh pihak lain atau sendiri, itu bukanlah pembayaran pajak di muka, tetapi merupakan pelunasan pajak yang sebenarnya terutang atas penghasilan. Dengan demikian, tindakan tersebut dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak.

Penghasilan yang diterima akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan tarif dan juga dasar tertentu disaat penerimaan. PPh yang dipotong atau disetor oleh pihak lain akan langsung menutupi kewajiban pajak untuk penghasilan tersebut, sehingga tidak ada utang pajak yang harus dibayarkan oleh seorang Wajib Pajak. Dengan begitu, penghasilan yang sudah dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) final tidak lagi perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah bertindak cepat dengan memberikan insentif pajak. Menurut Latief (2020), insentif pajak merupakan tindakan pemerintah yang bersifat mendukung terhadap WP dengan tujuan kepentingan nasional. Salah satu langkah cepat yang diambil pemerintah adalah dengan menerbitkan Permenkeu Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Bagi WP Yang Terdampak Pandemi Corona Virus 2019. Tujuan dari peraturannya ini adalah pemerintah menanggung PPh dari usaha yang diterima dan atau diperoleh WP akibat memiliki peredaran bruto sesuai dengan ketentuan tertentu. Jika WP yang memenuhi syarat menerima tunjangan insentif dari pajak penghasilan final melakukan transaksi yang menjadi objek pajak potongan dan atau pemugutan, WP harus menyampaikan fotocopi SK yang telah terkonfirmasi keabsahannya pada keterangan Direktorat Jendral Pajak. WP yang memiliki omset kotor tertentu wajib menginformasikan pencapaian pajak penghasilan akhir yang ditanggung oleh pemerintah melalui situs web www.pajak.go.id sesuai dengan model yang dijabarkan dalam lampiran formulir pencapaian pajak penghasilan akhir yang ditanggung oleh pemerintah. Pemotong atau pemungut pajak diharuskan menyiapkan korespondensi pajak atau kode billing yang mengindikasikan PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks. PMK Nomor 09/PMK.03/2021 pada rubrik rincian pembayaran Korespondensi Pajak atau rubrik aplikasi pembuat kode billing. WP harus mengirimkan laporan pencapaian pajak penghasilan akhir yang ditanggung oleh pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika diperlukan, WP bisa memohon koreksi terhadap laporan pencapaian pajak penghasilan akhir yang ditanggung oleh pemerintah paling terlambat ujung bulan selanjutnya setelah batasan waktu penyampaian yang diberikan.

didapat dari observasi ini diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner ke seorang wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini memiliki variabel bebas yaitu insentif pajak penghasilan final dan untuk variabel terikatnya yaitu kepatuhan WP.

1. Gambar Kerangka Berpikir



Sumber : Kajian Teori dan Penelitian Sebelumnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel Simpulan Uji Validity serta Reliabilitas

Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	R Product Moment	Ket.	Alpha Cronbach	Standar Alpha Cronbach	Ket.
Insentif Pajak Penghasilan Final (X1)	X1.1	0,426	0,300	Valid	0,613	0,6	Reliabel
	X1.2	0,765	0,300	Valid			
	X1.3	0,802	0,300	Valid			
	X1.4	0,716	0,300	Valid			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,565	0,300	Valid	0,783	0,6	Reliabel
	Y.2	0,743	0,300	Valid			
	Y.3	0,762	0,300	Valid			
	Y.4	0,646	0,300	Valid			
	Y.5	0,397	0,300	Valid			
	Y.6	0,704	0,300	Valid			
	Y.7	0,785	0,300	Valid			
	Y.8	0,421	0,300	Valid			

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi di setiap item pernyataan nilainya > dari nilai R produk momen sebesar 0,300 dan nilai alfa cronbach setiap variabel nilainya > dari nilai standar alfa cronbach 0,6. Hal ini bisa dipahami bahwasannya setiap item pernyataan valid dan reliabel.

Tabel Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak Penghasilan Final	10	12	20	16.85	1.982
Kepatuhan Wajib Pajak	10	27	40	34.01	3.307
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil dari analisis jenis statistic deskriptif menjelaskan jumlah sampel yang valid sejumlah 100. Variabel Insentif Pajak Penghasilan Final (X1) dan variable Kepatuhan WP (Y) punyai nilai mean yang > dari nilai std. deviation. Hal ini berarti penyebaran data merata.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum telaah regresi linear majemuk, model dari persamaan regeresi semestinya lulus dari percobaan dugaan sederhana yang diantaranya yakni oleh uji noromalitas, linieritas dan uji hetroskedasitisitas, yakni.

Tabel dari Hasil Uji Noromalitas

		Unstaandardized Residual
N		100
Normal Paraameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.48121140
Most Extremes Difference	Absolute	.109
	Positive	.065
	Negative	-.109
Test Setatistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

Asal muasal : Data diolah, 2023

Hasil dari uji normalilitas menunjukkan asymp. Sig. (2-tailed) didapat 0,200 > 0,05. artinya data yang di penelitaian ini terdistribusi normal.

Tabel dari Hasil Uji Liinieritas

			Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Si g.
Kepatuhan Wajib Pajak * Insentif Pajak Penghasilan Final	Between Groups	(Combined)	890.177	8	111.272	52.516	.000
		Linearity	865.785	1	865.785	408.615	.000
		Deviation from Linearity	24.391	7	3.484	1.645	.133
	Within Groups		192.813	91	2.119		
Total			1082.990	99			

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil dari uji linieritas menunjukkan tingkat signifikan *deviation from linearity* 0,133 > 0,05. maka bisa disimpulkan bahwa antara varabel insentif pajak penghasilan final (X1) dan varibel kepatuhan wajiib pajak (Y) terdapat hubungan yag linear.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.631	.798		2.044	.044
Insesntif Pajak Penghasilan Flnal	-.028	.047	-.061	-.605	.547

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data diolah, 2023 (Lampiran 4)

Hasil dari uji hetroskedastisitas menunjukkan tingkat sig. dari variabel Insesntif Pajak Penghasilan Final (X1) senilai $0,547 > 0,05$. Berarti variabele bebas dlam observasi ini terbebas dari gejala hetroskedastisitas.

Hasil Analisis Regeresi Linear Sederhanna

Pengkajian regresi linear yang simpel dimaksudkan untuk mengamati keterkaitan sebab-akibat yang timbul antarana variable ynag satu dengan laiannya dalam studi ini yakni Dampak Pemberian Insentif Pajaak Penghasilan Akhir Pada Ketaatan WP Umkm Selama Pamdemi Covid-19 Sesuai PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Di Wilayah Badung. Untuk hasilnya dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel Rangkurnan Hasil Analisis Data

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.864	1.281		6.920	.000
Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final	1.492	.076	.894	19.764	.000
R					.894
R Square					.799
Adjusted R Square					.797

Asal: Data diolah, 2023

Hasil evaluasi regeresi linear berjamak menunjukkan data ditemukan persamaan regresi linier berganda $Y = 8,864 + 1,492x1$. Berdasarkan persamaan itu menunjukkan data bahwa :

- a. Angka tetap (a) memiliki jumlah positif sebesar 8,864. Fakta ini mengindikasikan bahwa apabila variabel pemberian insentif pajak penghasilan akhir (X1) berjumlah 0 persen atau tidak berubah, maka nilai kepatuhan WP (Y) adalah 8,864.

- b. Koefisien perhitungan regresi buat variabel pemberian ganjaran pajak penghasilan terakhir (X1) yakni sebanyak 1,492. Maksudnya apabila pemberian ganjaran pajak penghasilan terakhir (X1) mengalami peningkatan sebanyak 1%, karenanya variabel kepatuhan WP (Y) bakal alami kenaikan sebanyak 1,492.

Hasil Analisis Statistik Uji t

Pengujian t bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai kebermaknaan $\leq 0,05$, lalu Hipotesis diperoleh. Dari tabel 4.6 di atas, nilai pengujian t bisa disampaikan sebagai:

H1 : Variabel struktur informasi akuntansi (X1) memiliki besaran thitung sebesar 19,764 dengan besaran yang memiliki arti penting sebesar $0,000 < 0,05$. Hal Ini bisa dimengerti bahwa pemberian dorongan pajak penghasilan akhir sebagian mempunyai dampak yang positif dan penting terhadap ketaatan WP. Ini mengimplikasikan bahwa hipotesis alternatif yang dikemukakan diterima.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Dari table 4.6 di atas menampilkan angka R Square sebesar 0,799 menandakan bahwa besarnya koefisien determinasi yakni 79,9%, yang berarti bahwa pemberian insentif pajak penghasilan akhir (X1) memberikan kontribusi sebesar 79,9% terhadap ketaatan WP (Y) dan 20,1% lainnya dipengaruhi dengan faktor lainnya.

Pemanfaatan Penyerahan Insentive Pajak Penghasilan Final Memengaruhi Kepatuhan WP

Dari hasil koefisien regresi senilai 1,492 dan angka thitung senilai 19,764 dengan angka signifikan (Sig.) seluas $0.000 < 0.05$, data ini menampilkan bahwa pemberian insentif pajak penghasilan akhir memiliki dampak positif dan signifikan pada ketaatan WP. Menunjukkan bahwa jika pemberian insentif pajak penghasilan akhir berhasil, maka akan meningkatkan ketaatan WP. Temuan ini juga didukung oleh penelitian dari (Nuridah, 2022) dan (Nurwijayanti, 2021) yang membuktikan bahwa pemberian insentif pajak penghasilan akhir memiliki dampak yang positif dan signifikan pada ketaatan WP.

SIMPULAN

Didasarkan pada temuan eksplorasi analisis melalui verifikasi hipotesis, maka hasil yang bisa ditarik adalah bahwa pemberian insentif pajak penghasilan akhir memiliki dampak positif & signifikan pada ketaatan WP usaha UMKM pada periode pandemi Covid-19 sesuai dengan PMK N. 9/PMK.03/2021 Di Kabupaten Badung.

- Khafidloh. (2021). Peran Fintech Terhadap Perkembangan UMKM di Vogvakarta. *Ejournal UIKA*, 93-99.
- Lijan Poltak. (2016). *Manajernen Surnber Dava Manusia : Mernbangun Tirn Kerja Vang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: PT Burni Aksara.
- Lupivoadi. (2006). *Manajernen Pernasaran Jasa*. Jakarta: Salernba Ernpat.
- Luthans. (2006). Pengertian Kornitnren Organisasi. In L. P. Sinarnbela, & S. Sinarnbela, *Manajernen Kinerja : Pengelolaan, Pengukuran Dan Implikasi Kinerja* (pp. 531-532). Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mangku Negara, A. P. (2012). *Manajernen Surnber Dava RNanusia*. Bandung: PT. Rernaja Rosdakarva.
- Mangkunegara. (2013). *Manajernen Surnber Dava Manusia Perusahaan*. Bandung: Rernaja Rosdakarva.
- Mangkunegara. (2017). *Manajernen Surnber Dava Manusia Perusahaan*. Bandung: Rernaja Rosdakarva.
- Mangkunegara, A. P. (2009). *Manajernen Surnber Dava Manusia*. Bandung: PT. Rernaja Rosdakarva.
- Marsoit, P., Greis, S., & Rurnokov, F. (n.d.). Pengaruh Pelatihan, Disiplin Kerja dan Kornitnren Organisasi t.
- Martono, N. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RavaGrafindo Persada.
- RNcShane, & Glinow, V. (2008). Pengertian Kornitnren Organisasi. In L. P. Sinarnbela, & S. Sinarnbela, *Manajernen Kinerja : Pengelolaan, Pengukuran Dan Irrnpikasi Kinerja* (pp. 531-532). Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Munawir. (2006). *Analisa Laporan Keuangan*. Vogvakarta: Libertv.
- Murtani. (2017). Pengaruh Pengembangan Karvawan dan Fasilitas Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karvawan di PT. Bank Surnut Svariah Cabang Medan. *Jurnal Al-Qasd Universitas Potensi Utama*.
- Muthuveloo, dkk./et.all. (2005). Typology of Organisational. *American Journal of Applied Science*, 2, 1078-1081.
- OJK. (2020). *www.ojk.go.id*. Retrieved Januari Rabu, 2022, from <http://iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Docurnents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>
- Parirnita. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kornpensasi terhadap Kepuasan Kerja pada Karvawan PT. Tridava Erarnina Bahari. *Jurnal Riset Manajernen Sains Indonesia (JRMSI)*.
- PMK.No.9/PMK.03. (2021). *tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdarnpak Panderni Corona Virus Disease 2019*. Indonesia: JDIH Kernentrian Keuangan.
- Prawira. (2020). Pengaruh Kornpensasi, Kepernirnpinan dan Fasilitas Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilrniah Magister Manajernen*, 28-40.
- Rahadi. (2010). *Manajernen Kinerja Surnber Dava Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Rahadi, & Rianto, D. (2010). *Manajernen Kinerja Surnber Dava Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Saprudin. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Kornpensasi terhadap Kepuasan Kerja Karvawan. *JISAMAR Sekolah Tinggi Ilmu Ekonorni Javakarta*.
- Sarton, & Lijan Poltak. (2019). *Manajernen Kinerja : Pengelolaan, Pengukuran Dan Irrnpikasi Kinerja*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sedarnavanti. (2016). *Surnber Dava Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sihotang. (2007). Pengertian Manajernen Surnber Dava Manusia. In L. P. Sinarnbela, *Manajernen Surnber Dava Manusia : Mernbangun Tirn Kerja Vang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja* (pp. 7-9). Jakarta: PT Burni Aksara.

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Krisna Yuna Dana

Ni Kadek Natalia Pratiwi ⁽¹⁾

Ni Putu Trisna Windika Pratiwi ⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾ Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
e-mail: kadeknataliapratiwi2001@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain how internal control system components are applied when granting credit at PT. BPR Krisna Yuna Dana. In order to gather information for this descriptive qualitative study of loan provision at PT. BPR Krisna Yuna Dana, informants were interviewed and observations were made. Data gathering, reduction, presentation, and conclusion/verification are the analysis techniques used. On the basis of the findings and debate, it is possible to draw the conclusion that PT. BPR Krisna Yuna Dana has successfully implemented the internal control system for credit provision. Nonetheless, there are gaps in the communication and informational components, and there is currently little knowledge on the awarding of approved or disapproved credit decisions, and failures still occur when authorizing the granting of credit in communication via the system. through the Banking Smart System application. Apart from that, in the control environment element, there is still a dual task and authority because the existing organizational structure is not yet clear and control activities include policies and procedures and there is no separation of credit giving functions between legal & credit analysis and monitoring & remedial. In this case, the credit provider is also responsible for monitoring the debtor's financial performance during the credit loan which results in arrears in payments, giving rise to bad credit or problematic credit.

Keywords: *internal control system, credit provision*

PENDAHULUAN

Khususnya di bidang ekonomi, perbankan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, bank terdiri dari bank umum dan bank BPR, akronim dari Bank Perkreditan Rakyat, yang fungsinya hanya menghimpun dana dan memberikan kredit kepada masyarakat. Namun, setelah UU. RI No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) mulai berlaku pada 12 Januari 2023, istilah "Bank Perkreditan Rakyat" atau BPR telah diganti menjadi "Bank Perekonomian Rakyat". Sri Mulyani mengatakan bahwa perubahan nama dilakukan untuk menghidupkan kembali peran BPR sebagai penggerak ekonomi Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah. bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, termasuk upaya untuk meningkatkan literasi dan intermediasi perbankan melalui percepatan konsolidasi dan pengaturan dampak digitalisasi perbankan.

Menurut UU No. 4 Tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa meskipun BPR memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penyedia kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) karena stigma yang melekat pada BPR selama ini adalah bahwa mereka hanya menangani urusan kredit, meskipun sebenarnya BPR juga menyediakan layanan perbankan lainnya seperti tabungan dan deposito. Digitalisasi layanan, inklusi keuangan, dan pendidikan masyarakat semuanya dapat berfungsi. Dengan mengubah nama, fungsi BPR menjadi lebih kuat dengan memperluas bidang usaha ke transfer dana yang tetap diawasi oleh OJK dan penukaran valuta asing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran BPR dalam mendukung bisnis UMKM, yang pada gilirannya dapat membantu perekonomian Indonesia. Istilah BPR berubah menjadi perekonomian, membuka lebih banyak ruang kerja, terutama untuk sistem pengendalian internal. Agar tujuan perusahaan dapat dicapai, sistem pengendalian internal sangat penting. Selain menjaga keamanan aktiva, sistem pengendalian internal mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Tanpa sistem ini, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai (Tuanakotta, 2014:127). Komisi Sponsor Organisasi Komite Treadway (COSO) adalah model Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang sering dipergunakan oleh auditor sebagai pondasi untuk mengevaluasi dan mengembangkan SPI.

SPI membantu menjaga aset aman, memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan, mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan perusahaan, dan meningkatkan efisiensi operasional (Tuanakotta, 2014:127). Komisi Sponsor Organisasi Komite Treadway (COSO) adalah model sistem pengendalian internal yang sering digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi dan membangun sistem pengendalian internal.

Bank atau lembaga keuangan akan meminjamkan kredit jika mereka benar-benar yakin bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak. Bisa ada konsekuensi di kemudian hari, seperti penunggakan pembayaran, jika debitur tidak mematuhi peraturan tersebut. Banyak faktor memengaruhi timbulnya tunggakan kredit, tetapi penelitian ini hanya membahas faktor sistem pengendalian internal. Dalam sistem ini, analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah debitur atau calon debitur layak untuk mendapatkan kredit.

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian—hati-hati dalam pemberian kredit yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik—dibutuhkan. Akibatnya, peneliti tertarik untuk mempelajari situasi dan kondisi yang berkaitan dengan fenomena sistem pengendalian internal, yang sangat penting untuk pemberian kredit. Didasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin

melakukan penelitian pemberian kredit dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR KRISNA YUNA DANA”**

KAJIAN PUSTAKA

Pada 12 Januari 2023, UU.RI No. 4 Tahun 2023 tentang (RUU P2SK) menghidupkan kembali peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penggerak ekonomi Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah, adalah alasan mengapa namanya diubah. Ruang kerja BPR menjadi lebih luas karena istilah diubah menjadi "perekonomian". Selama ini, BPR dikenal hanya melayani urusan kredit, tetapi sebenarnya mereka juga menyediakan layanan perbankan seperti tabungan dan deposito. Digitalisasi layanan, inklusi keuangan, dan edukasi masyarakat semuanya dapat berfungsi.

Bagian Kedua, Pasal 1 RUU P2SK mendefinisikan Bank Perekonomian Rakyat sebagai bank yang melakukan bisnis secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dengan perubahan nama, fungsi BPR semakin kuat karena bidang usahanya diperluas ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan peran BPR semakin besar dalam mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

SPI terdiri dari struktur organisasi, metode, dan dimensi, seperti yang dinyatakan oleh Mulyadi (2016:163). Semua elemen ini digabungkan untuk memastikan bahwa organisasi tetap kaya, memeriksa data akuntansi dengan hati-hati, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pelaksanaan kebijakan manajemen. Definisi ini menekankan tujuan daripada komponen—komponen yang membentuk sistem tersebut. Jason Scott (2014:226) mengatakan SPI yakni proses yang dilaksanakan untuk memastikan suatu tujuan pengendalian telah dicapai. Namun, menurut Komite Sponsoring Organisasi Komite Treadway (COSO) (1992), SPI yakni suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan staf lainnya. Dibangun untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (3) kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut COSO, sistem pengendalian internal terdiri dari dua unsur: (1) Lingkungan pengendalian, yang merupakan set aturan, prosedur, dan struktur yang membentuk dasar sistem pengendalian internal di seluruh organisasi, dan (2) Penaksiran risiko, yang merupakan proses

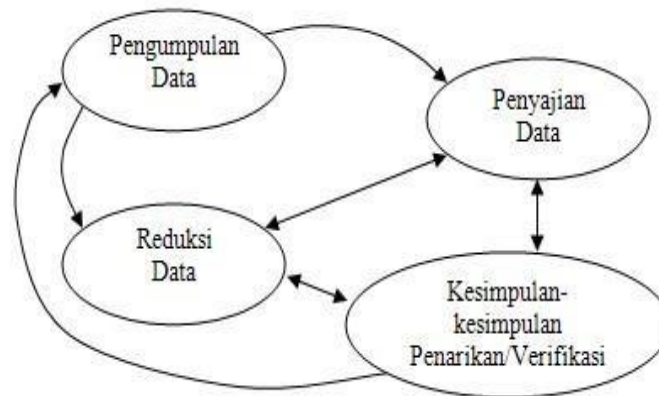
dan tujuan yang terus berubah yang menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Dalam hal ini, analisis, tindakan, dan evaluasi digunakan untuk menilai risiko perusahaan. Mengidentifikasi perubahan internal dan eksternal serta tindakan yang diperlukan adalah tahapan yang paling penting dari penilaian risiko. Untuk memastikan bahwa arahan organisasi tidak mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan dan prosedur mengatur tindakan yang dikenal sebagai pengendalian. Tahapan keempat adalah informasi dan komunikasi, yang mencakup informasi yang diperlukan entitas untuk memenuhi tanggung jawab sistem. Seluruh sistem pengendalian internal, yang mencakup pembentukan kebijakan, analisis risiko, dan pengawasan yang dilakukan, akan sangat sulit untuk dijalankan jika tidak ada informasi dan komunikasi ini. (5) Pemantauan adalah upaya untuk memastikan bahwa masing-masing dari lima bagian sistem pengendalian internal ada dan beroperasi dengan benar. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh sistem mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan model atau metode yang disebut desain penelitian untuk mengarahkan penelitian mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka (Cresswell, 2016). Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Krisna Yuna Dana" membahas tentang lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Indikator juga dimasukkan dan dijelaskan tentang hasil dan diskusi.

Untuk analisis deskriptif, data dikumpulkan melalui pertanyaan lisan kepada bagian-bagian yang terlibat dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit, yaitu pimpinan, staf untuk pengendalian internal, bagian legal & analisis kredit, bagian marketing lending, dan bagian admin. Objek pada penelitian ini yaitu PT. BPR Krisna Yuna Dana yang merupakan salah satu Bank Perekonomian Rakyat yang berlokasi di Batubulan.

Peneliti memakai metode observasi, wawancara dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data untuk analisis ini. Untuk menemukan solusi untuk rumusan masalah, peneliti menggunakan berbagai teknik analisis data, diantaranya yaitu :



Dua metode analisis data digunakan dalam penelitian ini. (1) Wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka adalah metode pengumpulan data; dan (2) Teknik reduksi data didasarkan pada tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Selain itu, reduksi data adalah proses yang membutuhkan banyak pemikiran dan wawasan. Dalam hal ini, bisa melalui observasi untuk mendapatkan data awal dan mempersiapkan draft wawancara terkait topik penelitian, (3) Teknik penyajian data : Dalam penelitian kualitatif, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data. Dengan menyajikan data ini, data disusun dan diorganisasikan sehingga lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti akan mengklasifikasikan/menggolongkan data wawancara kemudian menguraikan hasilnya secara menyeluruh. (4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Hasil penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Hasil penelitian dapat berupa gambaran atau deskripsi dari hal-hal yang sebelumnya tidak jelas yang menjadi jelas setelah penelitian. Misalkan Anda membandingkan hasil data dengan bagian dan teori yang didasarkan pada prinsipnya. Teknik triangulasi data mencakup tiga komponen: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Mereka digunakan untuk mengukur metode uji keabsahan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa aspek lingkungan pengendalian diteliti dalam penelitian ini. Yakni :

1) Dari integritas dan nilai etika, Dalam hal ini, PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah memiliki kebijakan yang tertulis di dalamnya kebijakan tertulis dan lisan tentang etika dalam sistem pemberian kredit yang yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKPB). Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan integritas dan nilai etika dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 2) Dari komitmen terhadap kompetensi, PT. BPR Krisna Yuna Dana merekrut karyawan—pekerja yang memiliki bakat dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mereka ditempatkan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan

keterampilan mereka. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan komitmen terhadap kompetensi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

3) Dari dewan komisaris dan komite audit, Komite audit yang merupakan bagian pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yaitu dalam hal ini Direksi yang berperan dalam mengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan dewan komisaris dan komite audit dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) Pimpinan bank telah memberikan contoh yang baik dari filosofi manajemen dan gaya operasi dalam kebijakan manajemen dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, memberikan arahan, dan selalu memotivasi karyawan untuk bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya., misalkan pada saat jam kerja, setiap pagi hari sebelum memulai aktivitas pekerjaan, Pimpinan Bank berkumpul dengan karyawan untuk mengadakan doa bersama dan membaca visi dan misi dari PT. BPR Krisna Yuna Dana beserta memberikan arahan, dorongan, dan semangat terhadap kinerja karyawan kedepannya. Selain itu juga, Pimpinan Bank selalu mengadakan kegiatan rutin rapat / meeting bulanan yaitu pada pertengahan bulan pada tanggal 15 (menyesuaikan situasi dan kondisi jika tidak ada halangan) dan pada saat semua pekerjaan karyawan sudah selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan filosofi manajemen dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

5) Dari struktur organisasi, masih terdapat perangkapan tugas dan wewenang yang terjadi karena struktur organisasi yang ada belum jelas, misalkan pada bagian legal & analisis kredit dalam tugas dan wewenang masih jadi satu antara fungsi legal dan fungsi analisis kredit. Selain itu juga, pada bagian monitoring & remedial juga dalam tugas dan wewenang masih jadi satu antara fungsi monitoring dan fungsi remedial. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan struktur organisasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 6) Dari kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya, untuk mendukung operasional layanan perusahaan dan pengembangan sumber daya manusia, PT. BPR Krisna Yuna Dana telah melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan baik secara online maupun offline yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pajak, maupun lembaga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Tujuan perusahaan secara keseluruhan, tujuan di setiap tingkat proses, identifikasi dan analisis risiko, dan pengelolaan perubahan adalah beberapa aspek penaksiran risiko dalam penelitian ini.

1) Dari tujuan perusahaan secara keseluruhan, Pimpinan Bank selalu melakukan estimasi penilaian risiko terhadap setiap kebijakan yang akan diambil. Dalam hal ini, BPR memiliki 4 eksposur risiko yang paling dominan dialami sesuai dengan ketentuan dari OJK, yakni : (1) Risiko Kredit, (2) Risiko Operasional, (3) Risiko Likuiditas dan (4) Risiko Kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 2) Dari tujuan di setiap tingkat proses, Pimpinan Bank selalu mengedepankan prinsip kehati – hatian dan prinsip tata kelola dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Agar setiap keputusan yang diambil memiliki potensi risiko yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan tujuan di setiap tingkat proses dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

3) Dari identifikasi risiko dan analisisnya, dalam hal ini PT. BPR Krisna Yuna Dana selalu melakukan evaluasi, identifikasi dan penilaian terhadap seluruh risiko yang ada dan kemungkinan muncul. Dalam hal ini, PT. BPR Krisna Yuna Dana telah memiliki Divisi Khusus yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko Bank yakni PE Kepatuhan / SPI. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan identifikasi dan analisis risikonya dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) PT. BPR Krisna Yuna Dana akan mengelola perubahan dengan meninjau keadaan dan kondisi saat ini jika terjadi masalah. Misalnya, mereka akan mengubah struktur organisasi jika diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan mengelola perubahan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Dalam penelitian ini, aktivitas pengendalian mengamati beberapa hal, yakni :

1) Dari kebijakan dan prosedur, adanya kebijakan dalam setiap proses, mulai dari proses permohonan kredit, proses SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), proses wawancara & survey ke lapangan (on the spot), proses komite kredit, proses pengikatan kredit dan proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan prosedur mengenai penanganan saat terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Selain itu juga, terkait kebijakan pemisahan fungsi beserta tugas dan wewenang yang merupakan suatu prinsip dan praktik yang digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada satu individu pun yang memiliki kontrol penuh atas suatu proses bisnis atau

aktivitas yang bisa menghasilkan kecurangan atau pelanggaran. Dalam hal ini, tentu masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam SOP. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan kebijakan dan prosedur dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

2) Dari keamanan aplikasi dan jaringan, PT. BPR Krisna Yuna Dana sesuai dengan Penerapan Standar Teknologi Informasi yaitu POJK No. 75/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2017 atau SOP Pedoman Kebijakan IT dan Rencana Bisnis Berkelanjutan di bidang IT tanggal 07 Desember 2017. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan keamanan dalam hal aplikasi jaringan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 3) Aplikasi Smart Banking System digunakan dalam manajemen perubahan aplikasi untuk memberikan fasilitas kredit kepada pelanggan untuk memastikan bahwa berkas-berkas yang diajukan sesuai untuk memenuhi fasilitas kredit. Karena itu, PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan manajemen perubahan dan aplikasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) Dari kelangsungan bisnis, dari bagian IT melakukan strategi khusus mengenai penyimpanan cadangan dokumen, misalkan jika tiba – tiba terkendala atau komputer rusak, maka semua data yang ada di komputer sudah di backup di harddisk agar tidak hilang. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan kelangsungan bisnis dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Dalam penelitian ini, informasi dan komunikasi mengamati beberapa hal, yaitu kualitas informasi dan efektivitas komunikasi.

1) Dari kualitas informasi, dalam hal penyampaian informasi, misalkan dalam hal komite kredit dalam hal pemberian keputusan kredit jika hasilnya tidak disetujui, maka dari pihak marketing lending akan menyampaikan ke nasabah dan jika disetujui maka dari pihak marketing lending akan memberikan informasi kepada nasabah untuk dibuatkan PK (Perjanjian Kredit). Namun dalam hal ini, masih kurangnya dalam penyampaian informasi terkait pemberian keputusan kredit disetujui atau tidak disetujui bahkan tidak ada respon / tanggapan dan jawaban sama sekali dari Pimpinan Bank. Hal ini tentu sangat menyimpang dari ketentuan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan kualitas informasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

2) Dari efektivitas komunikasi, dimana Pimpinan Bank memberikan pemahaman yang jelas tentang peranan dan tanggung jawab masing-masing karyawan sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif atau nyaman dalam hal berkomunikasi sesama karyawan / rekan kerja bisa melalui WA grup untuk memastikan keadaan situasi secara efektif dan efisien misalkan pada

karyawan yang bekerja di luar kantor, jika komunikasi lewat sistem misalkan pada karyawan yang bekerja dalam kantor, menggunakan aplikasi Banking Smart System dalam menginput data kredit tersebut sudah diapprove atau tidak di approve dilihat dari otorisasi dalam pemberian kredit, maka selanjutnya dari pihak karyawan akan berkomunikasi lewat telepon kantor kepada Pimpinan Bank untuk memberikan persetujuan terkait otorisasi dalam pemberian kredit tersebut. Namun dalam hal ini, masih saja terdapat kredit di sistem yang tidak diotorisasi oleh Pimpinan Bank sehingga menimbulkan kegagalan dalam otorisasi pemberian kredit. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit yang tidak terkendali dan potensi pembengkakan portofolio kredit macet atau kredit bermasalah. Tentu ini yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Hal ini tidak sesuai dengan aturan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah tidak sesuai dengan penerapan efektivitas komunikasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

1) Pemimpin bank selalu mengawasi dan mengontrol semua tindakan pekerja.. Pemantauan kinerja karyawan yang berada di dalam kantor melalui perangkat CCTV. Pemantauan dari segi struktur yang berperan pada aktivitas karyawan dalam pemberian kredit yang terdiri dari PE Kepatuhan / SPI, Legal & Analis Kredit, Admin, Marketing Lending, dan Monitoring & Remedial. Akan tetapi, Karena aktivitas yang dilakukan sebagian besar di luar kantor, bagian marketing lending menerima pemantauan yang lebih ketat. Bagian ini harus memberikan laporan melalui grup WA yang dirancang khusus oleh Pimpinan Bank berupa foto yang dikirim melalui WA grup untuk mengetahui sejauhmana kinerja karyawan tersebut.

2) Dari evaluasi yang terpisah, setiap bulan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semua divisi dan jika dinilai terdapat penyimpangan, kelemahan atau pelanggaran dalam pengendalian internal perkreditan, maka Pimpinan Bank akan melakukan tindakan koreksi dan dilakukan evaluasi secara berkala terkait efektifitas sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan evaluasi yang terpisah dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 3) Dalam melaporkan kekurangan – kekurangan yang terjadi, jika terdapat kekurangan, kelemahan atau pelanggaran dalam hal aktifitas pemberian kredit maka bagian kredit akan selalu berkomunikasi dengan Pimpinan Bank, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya beragam eksposur risiko dikemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan melaporkan kekurangan – kekurangan yang terjadi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

SIMPULAN DAN SARAN

Didasarkan analisis dan pembahasan penelitian yang dilaksanakann terkait penerapan sistem pengendalian internal yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan yaitu pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Krisna Yuna Dana telah menerapkan unsur sistem pengendalian internal menurut Teori COSO dalam pemberian kredit yang sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi dari lima unsur sistem pengendalian internal tersebut, masih ada yang perlu dievaluasi / diperbaiki yaitu pada unsur yang tidak sesuai yaitu pada informasi dan komunikasi masih kurangnya dalam penyampaian informasi terkait pemberian keputusan kredit disetujui atau tidak disetujui bahkan tidak ada respon / tanggapan dan jawaban sama sekali dari Pimpinan Bank dan juga masih terjadi kegagalan pada saat pemberian otorisasi dalam pemberian kredit dalam komunikasi lewat sistem melalui aplikasi Banking Smart System sehingga mengakibatkan banyaknya kredit yang tidak diotorisasi oleh Pimpinan Bank yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit yang tidak terkendali dan potensi pembengkakan portofolio kredit macet atau kredit bermasalah. Tentu ini yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah.

Selain itu juga, pada unsur lingkungan pengendalian yaitu masih terdapat perangkapan tugas dan wewenang karena struktur organisasi yang ada belum jelas dan pada aktivitas pengendalian pada kebijakan dan prosedur dan tidak adanya pemisahan fungsi pemberi kredit antara bagian legal & analis kredit dan monitoring & remedial. Dalam hal ini, peranan tugas pemberi kredit adalah untuk menetapkan syarat – syarat kredit mengurangi risiko dan mengevaluasi risiko agar tetap terkendali dan analisis kelayakan terhadap calon debitur dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Pemberi kredit juga bertanggung jawab untuk memantau kinerja keuangan debitur selama peminjaman kredit berlangsung yang mengakibatkan tunggakan pembayaran sehingga menimbulkan terjadinya masalah kredit.

Berdasarkan analisis SPI pemberian kredit yang dilaksanakn ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan dan peneliti yang akan melakukan penelitian tentang subjek ini:

Untuk menghindari perangkapan tugas dan wewenang, perusahaan harus melakukan evaluasi terkait penambahan atau pembentukan karyawan baru. Ini karena fungsi dan tugas yang tidak sesuai dipisahkan dari tugas dan wewenang. Perusahaan juga dapat meminta pimpinan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan baru.

Selanjutnya dihimbau untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian untuk menemukan waktu yang tepat bagi peneliti untuk mencari / menemukan data dan tidak mengganggu pimpinan dan karyawan pada saat bekerja, dalam hal ini keterbatasan dalam hal

mencari pimpinan yang susah dicari, bisa melalui perwakilan dan mencari alternatif yang lain untuk ditambah dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliandu, B., Londa, Y., Marselina, A., & Akuntansi, P. S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Di Larantuka. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 1–7.
- Ayudia, R., Aswansyah, D., Ekonomi, F., Itb, B., & Jakarta, S. (n.d.). *REMITTANCE ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI DI BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU TEBET JAKARTA SELATAN*.
- F. F. D. Pasalbessy, V. (2021). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 55–72. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.72>
- Kamaluddin, N., & Haryati, M. A. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama. *Monex*, 9(1), 109–118. <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1772%0Ahttp://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/viewFile/1772/1101>
- Kartikasari, J. D., Nikmatuniayah, N., & Asrori, M. (2021). Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Ksp Lohjinawe Cabang Pembantu Kundurankantor Cabang Blora. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v4i1.2791>
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1579–1590.
- Pasaribu, A. R., Purba, D. H., & Sitorus, P. J. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Investasi Pada Bank Mandiri Pusat Pasar Medan. *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 1(1), 17-26.
- Rangian, M. M., Nangoi, G. B., & Wokas, H. R. . (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Di PT Bukopin Finance Graha Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 415. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32197/30555>
- Wijoyo, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 157–162.

Pengaruh Keterlibatan Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Bumdes Di Kecamatan Sukawati

Ni Kadek Feby Arsita Dewi⁽¹⁾
Ni Komang Sumadi⁽²⁾
Ni Ketut Muliati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Tembau, Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim.,Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: dekfey1@gmail.com

ABSTRACT

The goal of this research was to identify how factors like user participation, individual engineering skills, and training initiatives impacted Accounting Information System performance. The BUMDes in Sukawati was host to this study. Outer and inner PLS models are used in this data analysis method. Quantitative data, in the form of the numerical results of responses to questionnaires measuring using a likert scale, was employed in this research. According to the analyses, user input has a notable and beneficial influence on the efficiency of the accounting information system. The effectiveness of an organization's accounting information system is positively and noticeably influenced by employees' individual engineering skills. The effectiveness of the accounting information system is positively and significantly impacted by the quality of the training programmes available..
Keywords: *user involvement, personal capabilities, and training programs.*

PENDAHULUAN

Usaha-usaha yang ada di desa (disebut BUMDesa) dimanfaatkan untuk mempromosikan dan memfasilitasi segala usaha yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan dalam masyarakat”, sedangkan ayat (2) dan (3) menyatakan “BUMDesa diselenggarakan dengan a focus on family and teamwork" dan "Sesuai dengan undang-undang, BUMDesa dapat melakukan kegiatan komersial dan/atau pelayanan public”. Tujuan utama BUMDes adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan manusia yang tersedia di masyarakat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk mempromosikan keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi di desa, serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pendapatan mereka.

Tujuan utama BUMDes adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang tersedia di masyarakat digunakan secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Hal ini juga dimaksudkan untuk digunakan untuk membantu menstabilkan dan memperluas ekonomi desa, meningkatkan pendapatan rata-rata warga, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang

tersedia. (djpb.kemenkeu 2021). Ironisnya, upaya pemerintah yang dipimpin oleh BUMDes untuk mendorong perekonomian pedesaan ternyata jauh dari harapan. Menurut Badan Pengawas Keuangan, beberapa BUMD masih belum melengkapi semua dokumen persyaratannya (Tirto.id, 2019). Manajer di BUMDes mungkin telah gagal memasang sistem informasi akuntansi dengan baik, yang menyebabkan pelaporan keuangan yang tidak akurat. BPK juga mencatat bahwa beberapa BUMDes tidak memiliki manajemen yang profesional, sektor komersial BUMDes tidak sesuai dengan potensi masyarakat yang sangat besar, dan BUMDes masih memberikan persentase kecil dari pendapatan masyarakat (Tirto.id, 2019).

Pembentukan sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan salah satu prioritas utama operasional BUMDesa sehari-hari karena organisasi berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan berbagai cara. Karyawan dapat menangani data dengan lebih cepat dan akurat karena penerapan SIA di BUMDesa. Data keuangan yang berkaitan dengan transaksi dalam siklus akuntansi diproses oleh SIA, sistem akuntansi terkomputerisasi, dan kemudian disajikan kepada manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan.

Baru-baru ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menaruh perhatian besar kepada BUMDes sebagai tumpuan perekonomian desa dengan menggalakkan sistem informasi akuntansi (SIA) BUMDes (portal.dairikab, 2022). Kinerja yang lebih baik dan pelaporan keuangan yang lebih transparan dimungkinkan jika BUMDesa mengadopsi sistem informasi akuntansi yang kuat. Efisiensi sistem informasi akuntansi merupakan proksi yang baik untuk nilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. BUMDesa membutuhkan input pengguna, kemampuan teknis individu, dan pelatihan untuk menginspirasi keunggulan dalam kinerja sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi dapat memperoleh banyak manfaat dari partisipasi pengguna, oleh karena itu sangat penting. Menurut (Susanto, 2013) Lebih banyak perhatian diberikan pada peran pengguna dan bagaimana input mereka didukung dan dipandu selama proses desain sistem informasi ketika pengguna secara aktif terlibat dalam desain dan pengembangan sistem ini. (Firmansyah et al., 2022) mengklaim bahwa produktivitas sistem informasi akuntansi dapat ditingkatkan dengan bantuan input pengguna. Temuan serupa diamati dalam penelitian lain dari (Putri & Ayu, 2020) dan (Ardiwinata & Sujana, 2019). Serta hasil temuan dari (Agnesia, I Putu Edy Arizona, 2021) dan (Pranata et al., 2021) membuktikan bahwa kinerja perangkat lunak akuntansi tidak terpengaruh oleh input manusia.

Untuk mengevaluasi tingkat kompetensi seseorang saat ini, mereka harus menunjukkan keterampilan teknis mereka sendiri. Kompetensi ini akan memfasilitasi peningkatan kinerja

berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan penerapan teknologi secara keseluruhan. Pada tahun 2003, Venkatesh dan rekan kerjanya mengajukan hipotesis yang mereka sebut model UTAUT. Kesiapan individu untuk mengadopsi teknologi informasi baru digambarkan dengan konsep ini. Menurut (Kamus Besar, 2020) Sebagai kata benda, "kinerja" dapat merujuk pada tindakan melakukan sesuatu atau hasil dari usaha tersebut. Kinerja seorang pekerja dapat didefinisikan sebagai upaya mereka, yang hasilnya harus ditunjukkan dengan cara yang jelas dan terukur. Sistem informasi akuntansi adalah program komputer yang menganalisis transaksi bisnis dan menyajikan hasilnya dalam bentuk yang bermakna (Antari, 2022). Untuk mengevaluasi seberapa baik sistem informasi akuntansi organisasi memenuhi tujuannya untuk memberikan data keuangan yang andal dan tepat waktu sejalan dengan tujuan strategisnya, kami melihat seberapa baik penerapannya (Ayu & Dhamayanti, 2022). Anggota organisasi atau kelompok pengguna yang dituju mengambil bagian dalam proses desain dan pengembangan sistem informasi melalui partisipasi pengguna (Putri & Ayu, 2020). Partisipasi pengguna dalam fase desain sistem informasi menunjukkan sejauh mana responden berinvestasi dalam sistem informasi akuntansi yang dihasilkan dan kompetensi responden sambil mengembangkan perangkat lunak untuk digunakan dengan pembukuan digital, desain sistem informasi akuntansi, dan data akuntansi terkomputerisasi. keterampilan untuk menjalankan sistem dalam mengubah informasi dari data mentah dan dapat ditindaklanjuti adalah salah satu definisi keterampilan teknis pribadi (Antari, 2022). Kinerja sistem informasi akuntansi dapat ditingkatkan dengan bantuan individu yang memiliki kemampuan teknis yang kuat karena ini akan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan sistem tersebut. Menurut (Kamus Besar, 2020) Dalam konteks organisasi atau bisnis, pelatihan mengacu pada serangkaian tindakan yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan karyawannya. Pelatihan dilakukan agar pengguna dapat melakukan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Pengguna sistem informasi akuntansi di perusahaan tidak akan berada pada level terbaiknya tanpa pelatihan akuntansi, dan perusahaan itu sendiri akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensinya.

1. Temuan hasil sebelumnya dari (Ardiwinata & Sujana, 2019) Menurut bukti empiris, memasukkan umpan balik pengguna akhir ke dalam proyek TI akuntansi meningkatkan hasil proyek.
2. Temuan hasil sebelumnya dari (Pradnyana & Dharmadiaksa, 2018) Kinerja sistem informasi akuntansi terbukti meningkat dengan penambahan keahlian pengguna, pendidikan formal, dan pengalaman langsung.

- 3. Temuan hasil sebelumnya dari (Pranata et al., 2021) Temuan dari tes menunjukkan bahwa partisipasi pengguna mengurangi efisiensi sistem informasi akuntansi.
- 4. Temuan hasil sebelumnya dari (Ablelo, 2021) Hasil pengujian menunjukkan bahwa efisiensi sistem informasi akuntansi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat keahlian teknis masing-masing penguji.
- 5. Temuan hasil sebelumnya dari (Putu et al., 2022) Kinerja sistem informasi akuntansi tidak terpengaruh oleh pelatihan, menurut temuan pengujian yang dilakukan.

Dari tahap pertama perencanaan dan pengembangan hingga tahap terakhir implementasi sistem, Pengguna Informasi Akuntansi Input Ke Desain Sistem menunjukkan interaksi manusia yang asli dari pengguna. (Putri & Ayu, 2020) Mengklaim bahwa ada korelasi yang baik kinerja sistem informasi akuntansi dan partisipasi pengguna dalam desain dan pengembangannya, yang pada gilirannya akan menghasilkan hasil yang lebih baik dengan keterlibatan pengguna yang lebih banyak (Ardiwinata & Sujana, 2019) dan (Firmansyah et al., 2022) mengklaim bahwa temuan studi tersebut menunjukkan bahwa menyertakan pengguna dalam pengembangan TI akuntansi meningkatkan efisiensi teknologi tersebut. Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut, mengingat informasi sebelumnya:

H1 : Efisiensi sistem informasi akuntansi mendapat manfaat dari partisipasi pengguna.

Kapasitas untuk menggunakan alat untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti bergantung pada keahlian teknis pengguna. Setiap pekerja diandalkan untuk mempelajari sistem dengan cukup baik untuk memberikan laporan keuangan yang berharga, karena pengguna mungkin tidak dapat menginterpretasikan data yang disajikan oleh sistem dengan benar, yang menyebabkan hasil yang tidak akurat. Hasil penelitian (Swara & Widhiyani, 2019) dan (Indrayani, 2022) Kemampuan untuk memanfaatkan sistem mengubah informasi yang belum diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan bergantung pada keahlian teknis pengguna. Setiap pekerja diandalkan untuk mempelajari sistem dengan cukup baik untuk memberikan laporan keuangan yang berharga, menegaskan bahwa efisiensi sistem informasi akuntansi dapat ditingkatkan melalui penggunaan strategi individu. Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut, mengingat informasi sebelumnya:

H2 : Kemampuan teknik personal berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi

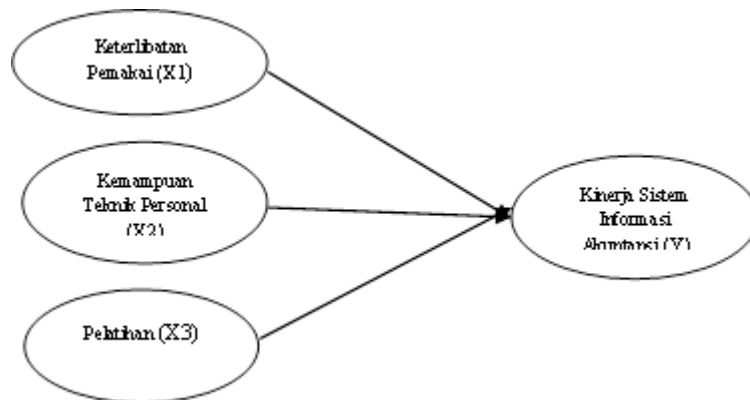
Pelatihan adalah setiap program yang dirancang untuk membuat pekerja lebih efektif dalam posisi mereka saat ini (Ardiwinata & Sujana, 2019). Menurut (Pranata et al., 2021) Sistem informasi akuntansi yang lengkap juga akan mencakup program pelatihan bagi anggota

staf untuk meningkatkan kemahiran mereka dengan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi meningkat secara proporsional dengan intensitas pelatihan yang diberikan kepada mereka yang memanfaatkannya. Hasil penelitian (Krisna Dewi & Wiratmaja, 2020) dan (Pradnyana & Dharmadiaksa, 2018) mengklaim bahwa efektivitas Pelatihan dapat membantu membuat sistem informasi akuntansi menjadi lebih baik. Pembeneran ini memungkinkan kita untuk menyatakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Efisiensi sistem informasi akuntansi mendapat manfaat dari pelatihan.

METODE PENELITIAN

Proses penelitian dapat dibantu dengan mengikuti rencana studi yang telah ditentukan. Tujuan dari desain penelitian adalah untuk memberikan peneliti kerangka kerja logis untuk melakukan studi mereka. Metode kuantitatif digunakan dalam metode ini. Jadi, metodologinya terlihat seperti ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Populasi adalah kelompok yang diperiksa dari mana kesimpulan dibentuk tentang kelompok secara keseluruhan berdasarkan fitur dan atribut yang dipilih oleh peneliti (Sugiyono, 2020). Sepuluh BUMDesa di Kabupaten Sukawati diikutsertakan dalam penelitian, dan total 36 pengguna SIA (direktur, bendahara, dan karyawan) memberikan tanggapan.

Sampel menurut (Sugiyono, 2020), Ciri-ciri yang ditemukan dalam sampel merupakan subset dari ciri-ciri yang ditemukan dalam populasi secara keseluruhan. Ini menekankan perlunya memastikan bahwa sampel benar-benar mewakili populasi dari mana ia diambil. Penelitian ini menggunakan sampel yang sepenuhnya representatif. Semua anggota populasi termasuk dalam sampel saat menggunakan metode sampling jenuh. Ada 36 peserta dalam sampel.

Pendekatan analitik berikut digunakan untuk penyelidikan ini: Dengan memeriksa nilai

data terendah, tertinggi, tengah, dan terendah dari variabel independen dan dependen, Distribusi dan perilaku data sampel dapat diringkas dengan menggunakan uji statistik deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2020) Analisis penelitian kuantitatif dapat mencakup mengkategorikan data berdasarkan variabel dan kelompok responden, mentabulasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan variabel, menyajikan data untuk setiap variabel yang dianalisis, dan menyelesaikan perhitungan untuk menemukan solusi guna mengidentifikasi masalah dan menguji hipotesis Anda. Analisis Partial Least Square (PLS) digunakan untuk penelitian ini. PLS adalah persamaan pemodelan yang menggunakan Persamaan Struktural. Tujuan PLS-SEM, seperti yang dikemukakan oleh Ghazali et al. (2015), adalah konstruksi teoritis (sikap prediktif). Hubungan antara variabel laten (prediksi) dapat dijelaskan dengan PLS. PLS lebih unggul dari OLS (Ordinary Least Square) karena tidak membutuhkan data untuk didistribusikan secara teratur. Perangkat Lunak Smart PLS 3.0, yang beroperasi melalui teknik bootstrap atau perkalian acak, digunakan untuk analisis statistik penelitian ini. Karena itu, kami tidak akan memiliki masalah dengan asumsi kenormalan. SmartPLS dapat digunakan dalam studi dengan ukuran sampel kecil karena tidak bergantung pada ukuran sampel minimum yang telah ditentukan sebelumnya (berkat bootstrap). Studi PLS-SEM terdiri dari dua model: model pengukuran eksternal dan model struktural internal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat sepuluh BUMDesa di Kecamatan Sukawati yang menjadi lokasi kajian. 36 pengguna SIA (termasuk direktur, bendahara, dan karyawan) mengisi kuesioner penelitian untuk memberikan informasi. Silakan gunakan tabel di bawah ini sebagai panduan saat mengisi dan mengirimkan kembali kuesioner.

Tabel 1 Data Pengembalian Kuisisioner Penelitian

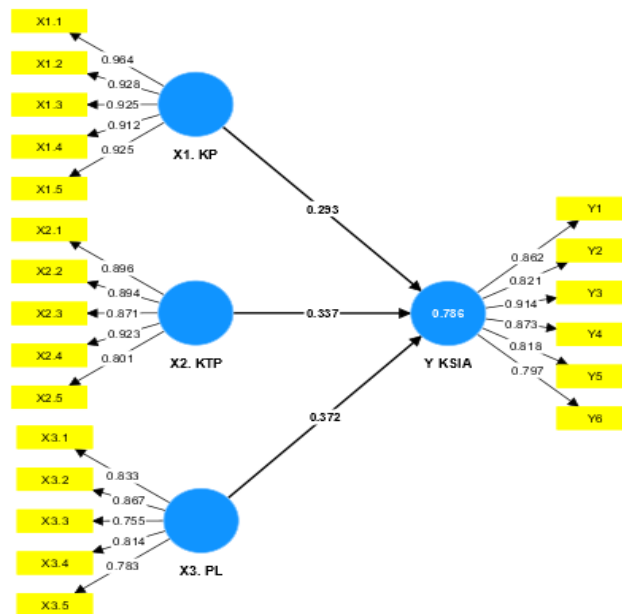
Keterangan	Jumlah kuisisioner
Kuisisioner yang disebar	36
Kuisisioner yang kembali	36
Kuisisioner yang dianalisis	36
Tingkat pengembalian	100%

Sumber: Hasil dilapangan, 2023

Tabel 1 menjelaskan bahwa total 36 survei dikirim, dan semua 36 kuisisioner menerima tanggapan yang cukup untuk dianalisis. Evaluasi semua variabel dan indikator yang mengukurnya. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa interaksi pengguna secara keseluruhan berkualitas sangat tinggi, dengan skor indikasi rata-rata 3,99. Kelompok yang termasuk dalam

variabel personal technical competence memiliki rata-rata skor indikator sebesar 3,39. Skor rata-rata indikator sebesar 3,58 menempatkan variabel pelatihan dalam kisaran "baik". Indikator kinerja sistem informasi akuntansi memperoleh skor total 4,28 sehingga berada dalam rentang yang baik.

Semua syarat validitas konvergen telah terpenuhi yang ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai outer loading yang menunjukkan bahwa nilai outer loading lebih dari 0,60 dan signifikan secara statistik.



Gambar 2. Model Outer Loading

Menurut data, nilai AVE semua konstruksi adalah nilai AVE berkisar antara 0,811 hingga 0,931 untuk setiap konstruksi, lebih tinggi dari nilai korelasi 0,549 hingga 0,931.

Nilai alpha Cronbach untuk setiap konstruk lebih dari 0,70, dan skor reliabilitas komposit keseluruhan juga lebih tinggi dari 0,70, sehingga data memenuhi standar reliabilitas.

Nilai R-Square (R²) dapat digunakan untuk menunjukkan sejauh mana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Kekuatan dan kelemahan model penelitian juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan R-Square (R²). Menurut Chin (Ghozali, 2016), Model yang kuat memiliki nilai R-Square (R²) sebesar 0,67, model yang sedang memiliki nilai R-Square (R²) sebesar 0,33, dan model yang buruk memiliki nilai R-Square (R²) sebesar 0,19.

Tabel 2 Evaluasi Model Struktural Inner

lainnya (Putri & Ayu, 2020) Mengklaim bahwa ada korelasi yang baik peningkatan kinerja sistem informasi akuntansi dan partisipasi pengguna dalam desain dan pengembangannya dengan keterlibatan pengguna yang lebih banyak (Ardiwinata & Sujana, 2019) dan (Firmansyah et al., 2022) mengklaim bahwa temuan studi tersebut menunjukkan bahwa menyertakan pengguna dalam pengembangan TI akuntansi meningkatkan efisiensi teknologi tersebut.

Temuan penelitian ini memberikan kepercayaan terhadap hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa tingkat kecakapan teknis individu berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap efisiensi sistem informasi akuntansi. Pengguna sistem informasi akuntansi BUMDesa Kabupaten Sukawati memiliki kemampuan yang kuat untuk menjalankan sistem yang diterapkan pada BUMDesa karena dampak yang menguntungkan pada kinerja sistem informasi akuntansi dan kemampuan teknis pribadi mereka yang cukup besar di daerah ini.

Kemampuan individu dengan teknologi telah terbukti berpengaruh pada produktivitas mereka ketika menggunakan sistem informasi akuntansi, menurut Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Orang yang paham secara teknis memiliki kesan yang lebih baik tentang intuisi sistem informasi akuntansi, yang meningkatkan efisiensi sistem tersebut. Ini juga merupakan ukuran bagaimana seseorang menganggap sistem informasi akuntansi membantu mereka melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Orang-orang dengan kemampuan teknis individu yang kuat lebih mungkin untuk melihat nilai dan menggunakan sistem informasi akuntansi secara efektif dalam kehidupan profesional mereka, yang meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Swara & Widhiyani, 2019) dan (Indrayani, 2022) menegaskan bahwa efisiensi sistem informasi akuntansi dapat ditingkatkan melalui penggunaan strategi individu.

Hipotesis ketiga (H3) diterima berdasarkan hasil pengujian Ini menunjukkan pentingnya pelatihan untuk keberhasilan perangkat lunak akuntansi perusahaan. Pelatihan yang dilakukan di BUMDesa di Kecamatan Sukawati dapat meningkatkan kapasitas responden untuk memanfaatkan sistem di BUMDes karena pengaruh pelatihan yang menguntungkan dan substansial terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Seperti yang dianjurkan oleh Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Yang kami maksud dengan "pelatihan" adalah prakarsa formal untuk memberikan pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan individu untuk memanfaatkan sistem informasi akuntansi secara optimal. Konsisten dengan penelitian lain ini, yang satu ini menemukan hasil yang serupa (Krisna Dewi & Wiratmaja, 2020) dan (Pradnyana & Dharmadiaksa, 2018)

menegaskan bahwa peningkatan kinerja sistem informasi akuntansi adalah akibat langsung dari upaya pelatihan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menemukan bahwa keterlibatan pengguna secara signifikan meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi. Kinerja sistem informasi akuntansi sangat baik dan menguntungkan oleh tingkat keahlian teknis staf akuntansi; seiring BUMDesa di Kabupaten Sukawati terus mengembangkan sumber daya manusianya, maka departemen akuntansi kabupaten akan menjadi lebih efisien dan efektif. Telah terbukti bahwa kualitas pelatihan yang ditawarkan oleh BUMDesa di Kabupaten Sukawati memiliki pengaruh langsung dan menguntungkan terhadap efisiensi dan efektivitas sistem informasi akuntansi.

Temuan studi dan kesimpulannya menyiratkan bahwa Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada BUMDesa di Kabupaten Sukawati dapat ditingkatkan dengan menerapkan rekomendasi yang dibuat di sini. Itu dicapai dengan: Meningkatkan partisipasi pengguna, dicapai dengan menyediakan infrastruktur kepada pihak terkait untuk mengambil bagian dalam proses pengembangan sistem. Memberikan instruksi untuk meningkatkan efektivitas keterampilan seseorang sendiri. Saat peralatan baru tersedia, BUMDesa perlu lebih sering mengedukasi stafnya. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan lebih efektif oleh staf dengan bantuan teknologi modern.

Daftar Pustaka

Ablelo, J.E. (2021). Pengaruh keterlibatan pengguna, dukungan manajemen senior, dan keterampilan teknis individu terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (di kabupaten Opd Maluku barat daya). *Bekerja sambil kuliah: penelitian dan praktik*, 18(3), 195–197.

Agnesia, I Putu Edy Arizona, b. TOLONG (2021). Pengaruh kompleksitas teknologi informasi, keterlibatan pengguna, tingkat pendidikan, ukuran organisasi, dukungan manajemen senior terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada bank perkreditan rakyat di kabupaten kediri. 1(4), 1265–1274.

Antari, k. (2022). Pengaruh kompetensi individu, program pelatihan, ekspektasi kinerja dan penggunaan teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada BUMDES di kabupaten Kubutambahan. *Kompatibilitas*, 12(1), 243–253.

Ardiwinata, I.GNP, & sujana, i. K. (2019). Pengaruh Kemampuan Teknis Individu, Keterlibatan Pengguna, Pelatihan dan Pendidikan terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali. *Jurnal Elektronik Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 1867–1896.

Ayu, d., & dhamayanti, m. (2022). Pengaruh kemampuan teknis individu, dukungan dari manajemen senior, program pendidikan dan pelatihan pengguna, dan kepuasan pengguna akhir terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Banjarangkan. 2(1), 2296–2308.

Eni, Susi, a. (2021). E-issn 2798-8961 Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia, Edisi Oktober 2021. 2010, 297–309.

menjadi pertimbangan bagi manajerial organisasi suatu koperasi alhasil bisa memberikan hal baik dari segi kualitas dan kauntitas pengelola koperasi.

KAJIAN PUSTAKA

Pernyataan Barney (1991) *Resource Based View Theory* (RBV), ialah sebuah paradigma untuk memeriksa sebuah organisasi atau perusahaan mengingat banyak sumber keunggulan kompetitif jangka panjangnya. Kata “sumber daya” mengacu pada “kumpulan beragam faktor yang bisa dikendalikan dan dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tertentu”, yang keduanya dapat berwujud, mengacu pada Barney (1991). Semacam aset tidak berwujud yang dikenal sebagai modal intelektual mencakup item seperti 1) sumber daya manusia perusahaan (*Human Capital*), yang mencakup keterampilan, keahlian, dan pendidikan personelnnya. 2) Modal structural (*Structural Capital*) mencakup tata kelola perusahaan yang sehat, struktur organisasi yang fungsional, dan budaya organisasi yang sehat. 3) Hubungan (*Relasi Capital*) dengan pelanggan di luar perusahaan disebut hubungan modal.

Kinerja koperasi ialah sesuatu yang diciptakan oleh koperasi dalam jangka waktu tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan, alhasil sangat penting untuk mempunyai pengukuran yang menyeluruh tidak terpaku pada perspektif keuangan tetapi juga mengukur non keuangan, dan mampu menggambarkan bagaimana kinerja koperasi. organisasi mencapai tujuannya. Kepuasan pelanggan, efektivitas proses bisnis internal, dan peluang pertumbuhan dan pembelajaran dipertimbangkan saat mengevaluasi kinerja non-keuangan koperasi memakai metodologi *balanced scorecard* (Lesmana, 2021).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) telah menetapkan lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada tata kelola yang baik, yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, transparansi, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, menemukan konsensus, keadilan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan perencanaan jangka panjang, (Yudhasena dan Putri, 2019)

Pernyataan Schein (1992) yang memperluas definisi ini, budaya organisasi bisa dianggap sebagai asumsi yang dibuat, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu untuk membantu organisasi dalam menganalisis dan menuntaskan beragam masalah yang diciptakan dari integrasi internal. dan adaptasi eksternal, Wulantari *et al.*(2022).

Penelitian oleh Marlina (2019) dan Putri, *et al.* (2023) menunjukkan dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governace*) berpengaruh positif kepada kinerja koperasi. Hasil ini selaras terhadap riset Utomo, *et al.* (2018) yang menampilkan yaitu tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) meningkatkan kinerja koperasi. Kajian penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada kinerja koperasi di Kota Denpasar menunjukkan hasil yang sangat baik, selaras terhadap temuan Pramesti dan Tandio (2018).

Penelitian Yudhasena dan Putri (2019) menampilkan yaitu dengan budaya organisasi yang kuat seringkali berjalan lebih efisien. Riset ini mendukung temuan Tiwa, et al. (2020) yang menyatakan yaitu budaya organisasi mempunyai dampak positif dan signifikan secara statistik kepada kinerja koperasi. Bahwa dengan budaya organisasi yang menguntungkan sering kali mempunyai personel yang rukun. ini selaras terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh Perawati dan Badera (2018) yang menampilkan yaitu budaya organisasi perusahaan dapat pengaruh positif pada kinerja koperasi simpan pinjam. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gumelar (2017) yang menampilkan yaitu budaya organisasi mempunyai dampak yang relatif positif kepada kinerja koperasi.

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Koperasi

Perusahaan harus mematuhi seperangkat hukum, aturan, dan norma yang dikenal sebagai "tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)" untuk memastikan bahwa sumber dayanya dipakai secara efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan ekonomi jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat setempat. Bukti dari riset yang dilaksanakan oleh Marlina (2019) dan Putri, et al. (2023) menampilkan bahwasanya Good Corporate Governance memengaruhi positif kepada kinerja koperasi. Dari data yang diberikan, rumusan hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif dari Good Corporate Governance terhadap kinerja koperasi

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Koperasi

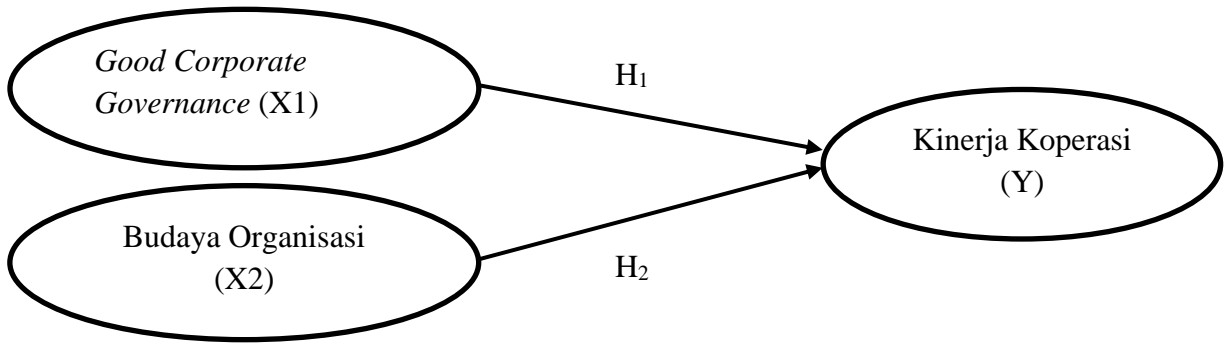
Budaya organisasi ialah keterampilan, sumber daya, informasi, dan kesadaran akan sifatnya sendiri semuanya bisa disebut sebagai bagian dari budayanya di tempat kerja. Budaya perusahaan memengaruhi seberapa mudah beradaptasi dan seberapa banyak kesuksesan atau kegagalan yang dialaminya. Budaya organisasi ialah teknik yang dipakai koperasi untuk mengarahkan karyawan dan anggota baru menuju metode terbaik untuk mempertimbangkan dan menangani masalah yang berkembang di dalam bisnis. Budaya organisasi meningkatkan kinerja koperasi, mengacu pada riset Perawati dan Badera (2018), Putri (2019), dan Tangkeallo (2022). Dari data yang diberikan, rumusan hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh positif dari Budaya Organisasi terhadap Kinerja Koperasi.

METODE PENELITIAN

Untuk membangun hubungan kausal antara variabel independen (memengaruhi) dan dependen (berdampak), penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif berlandaskan bentuk riset asosiatif. Berikut kerangka kerja yang dipakai dalam perencanaan riset ini:

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian



Sumber: Data diolah, 2023

Good Corporate Governance ialah wawasan tentang sistem kontrol dan regulasi perusahaan, dimungkinkan untuk mengevaluasi hubungan antara banyak pihak yang mengelola perusahaan serta nilai-nilai yang termasuk dalam mekanisme manajemen itu sendiri melalui tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Indikator-indikator variabel diukur memakai skala Likert dari 1 sampai dengan 5: dengan 7 indikator yaitu 1) transparansi dalam pengambilan keputusan; 2) ketepatan waktu, relevansi, dan keakuratan laporan keuangan; 3) pengetahuan tentang visi, misi, dan tujuan organisasi; 4) penyelarasan tanggung jawab dengan keahlian individu; 5) kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib; 6) keputusan berlandaskan kriteria objektif; dan 7) memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan wajar. (Wulantari et al., 2022)

Budaya organisasi berfungsi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan di masa depan serta digunakan untuk konsep dalam penyusunan Strategi dalam pengembangan pada organisasi. Variabel ini terdiri dari 6 indikator yang masing-masing dinilai dengan skala Likert dari 1 sampai 5, yaitu 1) Inovasi serta pengambilan resiko, 2) Bertindak agresif serta inovatif, 3) Kerja tim, 4) Loyalitas kerja, 5) Penyelesaian tugas tepat waktu, 6) Ketepatan waktu, (Wulantari et al., 2022).

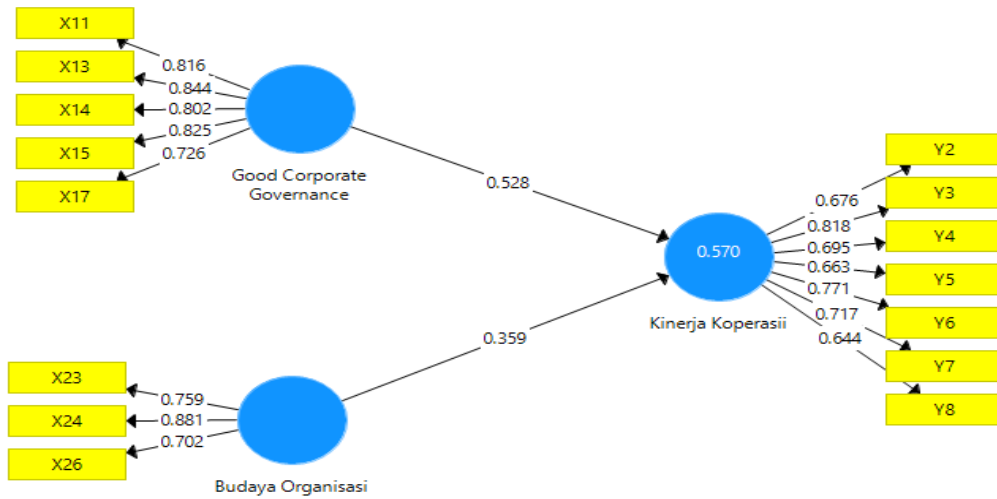
Kinerja koperasi ialah sesuatu yang diciptakan oleh koperasi dalam jangka waktu tertentu dengan mengacu pada kriteria tertentu, penting untuk mengukur kegiatan kinerja koperasi yang dirancang untuk memahami bagaimana kinerja kegiatan dan hasil dicapai. Pendekatan pengukuran memberikan ruang untuk penyesuaian di masing-masing dari empat perspektif *balanced scorecard*: keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan

Tabel 4.2 Nilai *Outer Loading* Hasil Estimasi Setelah Eksekusi

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Good Corporate Governance (X1)	X1.1	0,816
	X1.3	0,844
	X1.4	0,802
	X1.5	0,825
	X1.7	0,726
Budaya Organisasi (X2)	X2.3	0,759
	X2.4	0,881
	X2.6	0,702
Kinerja Koperasi (Y)	Y1.2	0,676
	Y1.3	0,818
	Y1.4	0,695
	Y1.5	0,663
	Y1.6	0,771
	Y1.7	0,717
	Y1.8	0,644

Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 4.2. Model struktural sesudah eksekusi



Sumber: Data diolah, 2023

Berlandaskan perhitungan dan hasil yang disajikan melalui Tabel 4.2, angka outer loading di atas 0,60 menampilkan bahwasanya semua indikator terpenuhi syarat *convergent validity*.

Tabel 4.3 Uji *Discriminant Validity*

Variabel	AVE	√AVE	GCG	Budaya Org
GCG	0,646	0,804		
Budaya Organisasi	0,615	0,784	0,428	
Kinerja Koperasi	0,510	0,714	0,682	0,585

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa:

1. *Good corporate governance* berpengaruh positif sebesar 0,528 terhadap kinerja koperasi dan hubungan ialah signifikan dalam tingkatan 0,05.
2. Budaya organisasi berpengaruh positif sebesar 0,359 terhadap kinerja koperasi dan hubungan ialah signifikan dalam tingkatan 0,05.

Pembahasan

Pengaruh *good corporate governance* kepada kinerja koperasi simpan pinjam se Kecamatan Gianyar

Hipotesis pertama (H1 diterima) dari *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja koperasi simpan pinjam se Kecamatan Gianyar didukung oleh data empiris, yang menunjukkan hubungan yang menguntungkan secara statistik antara tata kelola perusahaan yang luar biasa dan kelangsungan hidup keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Gianyar.

Kinerja koperasi simpan pinjam di Kecamatan Gianyar terpengaruhi secara positif dan signifikan pada *good corporate governance*, artinya makin sukses implementasinya *good corporate governance*, maka kinerja koperasi simpan pinjam di Kecamatan Gianyar akan makin baik. Kinerja organisasi ialah sejauh mana tujuan tercapai atau tugas diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Prinsip-prinsip transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, dan keadilan yang terkenal dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat berkontribusi pada hasil pekerjaan yang lebih baik. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang tinggi, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diterapkan sebagai sumber daya organisasi untuk mendukung operasi bisnis, serta ini bisa meningkatkan kinerja koperasi. Hasil riset yang menampilkan bahwasanya *good corporate governance* secara positif dan signifikan meningkatkan kinerja koperasi, selaras terhadap riset Putri, *et al.* (2023) dan Marlina (2019)

Pengaruh budaya organisasi kepada kinerja koperasi simpan pinjam se Kecamatan Gianyar

Hasil pengujian menunjukkan bahwasanya ada pengaruh positif signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja koperasi se Kecamatan Gianyar, mendukung hipotesis kedua (H2 diterima).

Mengingat manfaat budaya organisasi, nampaknya koperasi di Kecamatan Gianyar akan berkinerja lebih baik karena budaya yang diterapkan dengan lebih terampil, dalam perihal ini ketersediaan sumber daya internal yang dimiliki yang merupakan suatu *value* ataupun

kesempatan yang dipunyai oleh tiap industri bisa menjadikan penerapan budaya organisasi menghasilkan peningkatan kinerja organisasi (koperasi) yang baik. Budaya perusahaan ialah aset tidak berwujud yang bisa meningkatkan laba organisasi. Keberadaan budaya yang mendukung yang mengilhami para pekerja untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi dan merasa mempunyai tugas yang diberikan untuk meningkatkan keberhasilan organisasi (koperasi). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Perawati dan Badera (2018), Putri (2019), dan Tangkeallo (2022), yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja koperasi. .

SIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas kinerja koperasi simpan pinjam di Kecamatan Gianyar berpengaruh positif dan signifikan oleh *good corporate governance* dan budaya organisasi pada tempat kerja yang dinamis. Dampak positif signifikan tata kelola perusahaan yang baik kepada kinerja koperasi simpan pinjam di Kecamatan Gianyar menampilkan bahwasanya dampak tersebut tumbuh dengan makin suksesnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di dalam suatu organisasi (KSP). Budaya organisasi dan efektivitas koperasi simpan pinjam di Kecamatan Gianyar berpengaruh positif dan signifikan. Ketika koperasi simpan pinjam berhasil menerapkan budaya organisasi yang baik di dalam organisasi (KSP), maka hal ini menjadi lebih kuat pada kinerja koperasi simpan pinjam tersebut.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada koperasi simpan pinjam se Kecamatan Gianyar ialah agar tetap bahkan mampu meningkatkan lagi penerapan *good corporate governance* dan budaya organisasi yang ada diperusahaan, Mengimplementasikan *good corporate governance* pada koperasi simpan pinjam diharapkan bisa menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta diiringi budaya organisasi yang baik ditinjau dari perspektif individual pada setiap elemen-elemen koperasi simpan pinjam, alhasil toleransi terhadap tindakan resiko serta pengarahan dari atasan kepada bawahan maupun dari senior kepada juniornya dilaksanakan dengan baik, guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Saran bagi riset selanjutnya, agar bisa mengembangkan kembali hasil riset ini dengan memperluas area riset dan penambahan variabel riset yang lain.

- Marlina, E. (2019). Pengaruh good cooperative governance terhadap kinerja koperasi di Kota Pekanbaru , Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 11–21.
- Martini I.A.O, Lasmi N.W, Jaya N.K dan Sutrisni E. (2017). Improving Cooperative Performance through Human Resource Development Effort. *International Journal of Social Science and Humania*.
- Mulyanti, D., & Rina. (2017). Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman. *Ecodemica*, 1(1), 81–88.
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/1431%0A>
- Nanda, M. R. (2017). *Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Sistem Penggajian Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan di CV . Multi UNY Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta)*. 154.
- Nuraini, K., Sari, P., & Purwanto, A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pengetahuan Pengurus Terhadap Kinerja Koperasi (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kabupaten Bantul). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Perawati, K. M., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi pada Kinerja Organisasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1856. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p09>
- Pramesti, G. A. A., & Tandio, D. R. (2018). Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Koperasi Di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 55–64.
- Pratami, L. A. R. (2018). Budaya Organisasi Memediasi Kualitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepercayaan Teknologi Informasi pada Kinerja Karaywan. *Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), h: 1032-1058.
- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 179–189. <https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.131>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkeallo, D. I. (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo Ta Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. *Universitas Kristen Indonesia Toraja*
- Utomo, M.N., et all. (2018). IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCIPTAKAN KINERJA (STUDI EMPIRIS PADA KOPERASI DI KOTA TARAKAN). *JURNAL BORNEO HUMANIORA*, 32–42.
- Wulantari, N. L. P., Sudiana, I. W., & Arie Pramuki, N. M. W. (2022). Peran Kompetensi Manajerial Dalam Memoderasi Hubungan Good Corporate Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Sukawati.

Pengaruh Pengakuan Profesionalisme, Penghargaan Finansial, dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Untuk Berkarir Sebagai Akuntan Publik (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Hindu Indonesia)

**I Gusti Ayu Putu Mirah Intari Dewi⁽¹⁾
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
I Wayan Budi Satriya⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit.denpasar.Bali
e-mail: agungmira40@gmail.com

ABSTRACT

Students of accounting have the option of pursuing a career in public accounting. The research team wanted to know how things like prestige in the field, salary expectations, and job prospects might influence people to go into public accounting. The Indonesian Hindu University in Denpasar hosted this study. Samples included 131 people. Information will be collected via questionnaire. Multiple regression analysis is being used to analyze the data. Positive and statistically significant relationship between professional recognition and decreased desire to become a public accountant. Gainful employment in the public accounting sector is strongly influenced by financial incentives. The attractiveness of public accounting as a profession is significantly influenced by the job market.

Keyword : professional recognition, financial reward, labor market considerations

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dunia yang cepat, terbukanya lapangan kerja di berbagai industri pun turut meningkat (Yasa, Pradnyani, & Atmadja, 2019). Menurut (Anggraeni, Maslicahi, & Sudaryanti, 2020), karir adalah suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Menurut (Janrosl, 2017), akuntan publik adalah salah satu dari banyak bidang di mana lulusan perguruan tinggi baru-baru ini dapat mencapai kesuksesan. Hal ini karena banyak bisnis mencari talenta baru untuk membantu mereka tumbuh dan memperluas operasinya. Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) adalah akuntan yang telah mendapat izin praktik akuntan publik oleh Menteri Keuangan atau pejabat lain yang berwenang (Misbahul, 2019). Jasa audit pribadi diberikan oleh akuntan publik, yang dapat bekerja secara independen atau sebagai bagian dari kantor akuntan publik.

Rahmat (2018:161) mengartikan minat sebagai "keadaan menaruh perhatian terhadap sesuatu disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan menunjukkan bahwa sesuatu itu benar." Keinginan dan dorongan mahasiswa untuk memasuki bidang akuntan publik (Santoso, 2016) inilah yang membuat mahasiswa tertarik pada profesi tersebut. Insentif finansial merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam meniti karir sebagai akuntan publik. Komitmen keuangan di masa depan harus masuk akal mengingat tingkat upaya yang diharapkan. Siswa dapat memilih untuk mengambil jurusan akuntansi publik karena tingginya permintaan bidang tersebut dan jumlah posisi yang tersedia relatif tinggi.

Tabel 1.1. Hasil Pra Survei Keinginan Berkarir Mahasiswa Akuntansi

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1	Saya memiliki keinginan melanjutkan karir sebagai akuntan public	4	6	6	2	2
2	Saya ingin memiliki karir yang diakui sebagai profesional oleh Masyarakat	0	0	10	8	2
3	Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang menawarkan penghargaan finansial yang tinggi	0	0	0	10	10
4	Saya ingin karir yang memiliki pasar kerja yang tinggi	0	0	8	6	6

Sumber : data diolah (2023)

Dari dua puluh siswa yang disurvei, hanya dua siswa yang menyatakan sangat setuju, dua siswa menjawab setuju, enam siswa menjawab cukup setuju, enam siswa menjawab tidak setuju, dan empat siswa sisanya menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil survei, 10 orang peserta “sangat setuju”, 8 orang “setuju”, dan 2 orang “sangat setuju” ketika ditanya mengenai mendapat pengakuan di bidangnya. Sepuluh orang disurvei, dan kesepuluh orang tersebut mendukung gaji dan bonus yang besar. Delapan responden menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi dengan memilih “agak setuju”, “setuju”, atau “sangat setuju” ketika ditanya pendapat mereka mengenai pasar kerja. Rendahnya minat mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan publik sangat disayangkan mengingat tingginya permintaan akan tenaga profesional tersebut di Indonesia dan, lebih khusus lagi, di pulau Bali. Selain itu, di kalangan lulusan Universitas Hindu Indonesia, tidak terdapat satupun akuntan publik bersertifikat, seperti yang terlihat dari data yang diperoleh dari IAI Bali.

Penghargaan dalam bidang keahlian seseorang merupakan magnet yang kuat untuk menarik perhatian. Menurut Febriyanti (2019), motivasi memasuki bidang akuntan publik adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan profesional. Siswa yang tertarik pada akuntan publik harus menyadari banyaknya peluang untuk promosi dan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk kesuksesan profesional. Yopeng (2020) menemukan bahwa keinginan seseorang untuk

menjadi akuntan publik dipengaruhi oleh persepsinya terhadap gengsi profesinya. Namun seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Viriany (2022), nama-nama bergengsi di bidang tersebut tidak menginspirasi lebih banyak orang untuk terjun ke bidang tersebut.

Motivasi seorang siswa untuk mengejar jalur karir tertentu juga dapat dipengaruhi oleh prospek gaji di bidang tersebut. Menurut Efendi dan Taman (2018), imbalan uang berfungsi sebagai sistem kontrol yang penting bagi bisnis, menginspirasi pekerja untuk bertindak sejalan dengan perilaku yang diinginkan perusahaan dan dengan demikian memungkinkan bisnis mencapai tujuannya. Saat memutuskan karier, orang sering kali memikirkan uang yang bisa mereka hasilkan. Wheeler dan Suyono (2018) menemukan bahwa orang-orang dengan latar belakang bisnis, psikologi, dan pendidikan selain akuntansi percaya bahwa akuntan menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan mereka yang bekerja di bidang pemasaran, manajemen, keuangan, atau perbankan. Menurut penelitian Arthasari (2022), motivasi masyarakat menjadi akuntan publik dipengaruhi oleh prospek keuangannya. Namun Suratman (2021) menemukan hal sebaliknya, yaitu insentif finansial menurunkan motivasi memasuki bidang akuntan publik.

Pasar kerja juga mempengaruhi motivasi pilihan karir. Pasar kerja harus dipertimbangkan ketika memilih pekerjaan karena masing-masing pekerjaan memiliki tantangan dan imbalan yang unik. Kondisi pasar tenaga kerja saat ini mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja di masa depan. Pekerjaan yang lebih besar akan menarik lebih banyak orang dibandingkan dengan pekerjaan yang lebih kecil. Wibowo (2021) menemukan bahwa faktor pasar kerja mempengaruhi keinginan akuntan publik untuk menjadi akuntan. Sejalan dengan Dary (2018), estimasi pekerjaan tidak mempengaruhi aspirasi akuntan publik.

Ketidakpastian mahasiswa terhadap jalur karir yang terbuka bagi akuntan publik merupakan salah satu dari beberapa fenomena yang terlihat dari hasil observasi yang tampaknya berkaitan dengan minat menjadi akuntan publik. Akuntan publik masih kurang menarik perhatian mahasiswa sebagai jalur karir yang potensial, berbeda dengan pegawai negeri yang menjadi dambaan banyak mahasiswa karena lintasannya yang jelas. Menurut persepsi siswa mengenai status profesional dan imbalan finansial di pasar kerja yang kompetitif saat ini, karier sebagai konsultan keuangan atau pajak adalah pilihan yang tepat. Selain itu, menurut Theory of Reasoned Action (TRA), banyak mahasiswa yang ingin menjadi akuntan publik jika yakin mampu dan mempunyai sikap yang kuat.

Berdasarkan fenomena yang ada dan kesenjangan penelitian, maka judul tersebut diteliti. **“Pengaruh Pengakuan Profesionalisme, Penghargaan Finansial, Dan Pertimbangan Pasar**

publik. Keinginan untuk menjadi guru di bidang akuntansi berkorelasi positif dengan paparan pengakuan dan pelatihan profesional, seperti yang ditemukan dalam penelitian Harahap (2021).

Ketika memasuki bidang akuntan publik, seseorang berharap dapat diakui prestasinya. Tingkat pendidikan yang tinggi dan kedudukan profesional merupakan dua faktor terpenting dalam menginspirasi masyarakat untuk meniti karir sebagai akuntan publik. Minat menjadi akuntan publik dipengaruhi oleh tingkat pengakuan profesional seseorang, menurut penelitian Wibowo (2021).

H1 : “Pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat berkarir sebagai akuntan publik.”

Sesuai dengan ketentuan kontrak kerja, pekerja berhak atas imbalan finansial dalam bentuk pembayaran rutin yang dilakukan oleh pemberi kerja. Ketertarikan seseorang untuk menjadi akuntan publik dapat tergerak dengan menawarkan insentif yang menggiurkan. Menurut penelitian Arthasari (2022), motivasi seseorang untuk menjadi akuntan publik dipengaruhi oleh gaji yang dapat diharapkannya.

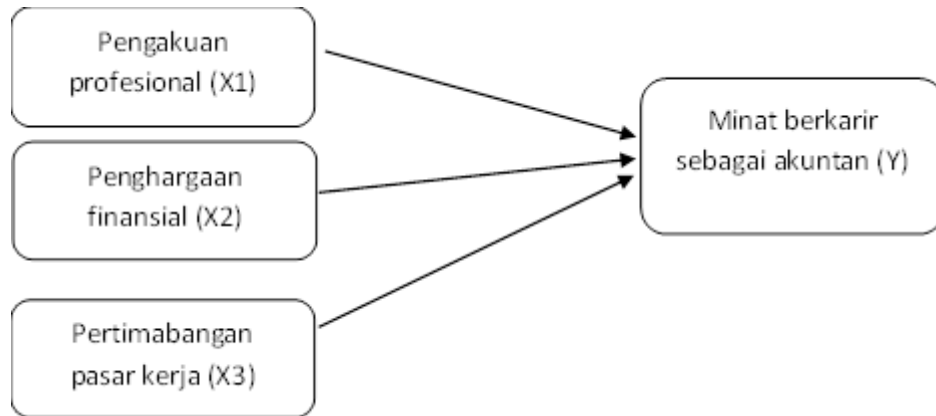
H2 : “Pengganaan finansial berpengaruh terhadap minat berkarir sebagai akuntan publik.”

Karena pekerjaan yang berbeda menghadirkan tantangan dan imbalan yang berbeda, penting untuk mempertimbangkan pasar tenaga kerja saat mengambil keputusan karier. Akuntan publik, misalnya, memiliki banyak sekali calon pemberi kerja yang dapat dipilih, sehingga permintaan mereka akan selalu tinggi. Menurut temuan Wibowo (2021), keinginan menjadi akuntan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pasar kerja.

H3 : “Pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat berkarir sebagai akuntan publik.”

METODE PENELITIAN

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia mempunyai mahasiswa S1 sebanyak 195 orang. Mahasiswa semester 8 tahun 2019 telah mengambil mata kuliah auditing 1 dan 2 sehingga dapat memahami materi auditing. Jurusan akuntansi semester delapan dipilih untuk penelitian ini karena telah menyelesaikan seluruh persyaratan utama dan mulai mempertimbangkan rencana pasca kuliah. Rumus Slovin menghasilkan 131 peserta penelitian. Kerangka teori penelitian adalah:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Validitas suatu kuesioner dapat ditentukan dengan bantuan uji validitas. Signifikansi korelasi Pearson yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Nilai signifikansi suatu item pertanyaan dianggap valid jika kurang dari 0,05 dan tidak valid jika lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016).
2. Reliabilitas suatu kuesioner dapat diukur dengan melihat seberapa baik kuesioner tersebut memprediksi variabel target atau konstruk (Ghozali, 2016). Alfa Cronbach adalah ukuran reliabilitas statistik. Jika skor Cronbach Alpha suatu konstruk atau variabel lebih besar dari 0,70, maka kita dapat dengan yakin menyebutnya reliabel (Ghozali, 2016).
3. Kepatuhan model terhadap asumsi klasik diperlukan untuk estimasi yang andal. Uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas merupakan contoh uji asumsi klasik.
4. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Untuk menganalisis dampak berbagai faktor terhadap satu variabel, ahli statistik menggunakan regresi linier berganda (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan rumus analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$
5. Jika Anda ingin mengetahui seberapa baik kinerja fungsi regresi sampel Anda dalam memperkirakan nilai sebenarnya, Anda dapat menggunakan uji statistik F. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen jika F kurang dari 0,05. Statistik F juga mengungkapkan apakah variabel independen model bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Tingkat signifikansi statistik F sebesar 0,05 (Ghozali, 2016). Jika nilai signifikansi statistik F kurang dari 0,05 sebagaimana diperlukan untuk pengujian hipotesis, maka model dapat diimplementasikan secara praktis (Ghozali, 2016).

6. Untuk menilai seberapa baik suatu model dapat menjelaskan variasi variabel terikat, peneliti menggunakan statistik yang disebut koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Variabel independen dapat meningkatkan atau menurunkan signifikansi model R² yang disesuaikan (Ghozali, 2016)
7. Statistik t mengukur seberapa besar variasi dalam variabel terikat yang dapat dikaitkan dengan perubahan dalam satu variabel penjelas (independen). Tingkat signifikansi statistik untuk uji t adalah = 5%. T-statistik menentukan apakah suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara statistik (Ghozali, 2016). Jika $t < 0,05$ maka hipotesis diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil 131 responden yang ditentukan oleh peneliti akan digambarkan berdasarkan karakteristik responden. Usia dan jenis kelamin responden dicantumkan di profil mereka. Responden laki-laki berjumlah 41 orang (31,30%), sedangkan responden perempuan berjumlah 90 orang (66,70%) yang mengisi survei. Keseluruhan 131 orang di sana berusia antara 21 dan 30 tahun, yang merupakan kelompok usia terbesar.

Dengan koefisien alpha lebih dari 0,6 dan koefisien korelasi lebih dari 0,30, maka seluruh variabel dalam penelitian ini dapat digunakan dengan aman pada penelitian selanjutnya. Model regresi normal karena taraf signifikansi uji normalitas sebesar 0,136 lebih besar dari 0,05. Multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen mempunyai VIF dibawah 10 dan skor toleransi diatas 0,10. Kesimpulannya, model regresi tidak multikolinear. Heteroskedastisitas membuat semua variabel menjadi signifikan. Regresi tanpa heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		<u>Coefficients^a</u>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,551	,786		14,698	,000
	X1	,230	,040	,317	5,793	,000
	X2	,286	,040	,499	7,112	,000
	X3	,135	,055	,174	2,480	,014

Sumber: Data Diolah, 2023

“Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 11,511 + 0,230 X1 + 0,286 X2 + 0,135 X3 + e”$$

Pengaruh Partisipasi Pemakai Sistem Informasi Akuntansi, Pengalaman Kerja Personal Dan Kinerja Individu Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Pengkreditan Desa Se-Kecamatan Kuta Utara

**Ni Luh Putu Diah Lokita Pratami⁽¹⁾
Cokorda Gde Bayu Putra ⁽²⁾
Putu Cita Ayu ⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Jl. Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur, Bali
e-mail: diahlokita28@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the ways in which accounting information system users in Se Village, North Kuta District, have an impact on the efficiency with which accounting information systems are used by credit institutions. This study surveyed 191 workers from 8 different Village Credit Institutions (LPD) in North Kuta District. Purposive sampling was used to choose 123 participants, and their data was analyzed using various linear regression methods. According to the findings of this research, the efficiency with which accounting information systems are used improves when their users take actively in their development and implementation. Accounting information system efficiency is enhanced by previous job experience. The efficiency with which accounting information systems are used is boosted by strong individual performance. Based on the findings of this study, the LPD should soon be in a position to expand the number of people using accounting information systems by offering them on-the-job training. In order to ensure that future workers are able to make the most of accounting information systems, it is imperative that current employees get enough training in their usage.

Keywords: *Users, Personal Work Experience, Individual Performance, Effective*

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha yang bermotif sosial dan keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat desa adat atau masyarakat Pekraman. Ketika masyarakat ingin meningkatkan kondisi keuangannya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat membantu mereka dengan memberikan pinjaman dan memungkinkan mereka berinvestasi dan menyimpan pendapatan mereka untuk masa depan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan bank yang mengolah data dan melakukan transaksi dengan menggunakan sistem

Komponen pertama adalah keterlibatan pengguna, yang telah lama dikenal sebagai hal yang penting bagi pertumbuhan keberhasilan atau kegagalan sistem informasi untuk pembukuan. Bahwa sistem informasi akuntansi efektif telah ditunjukkan suatu organisasi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna yang terlibat dalam penerapannya (Ayu Kusuma Dewi, dkk., 2021).

Pertimbangan kedua adalah riwayat pekerjaan kandidat yang sebenarnya. Istilah "pengalaman kerja" mengacu pada informasi dan kemampuan yang diperoleh melalui pekerjaan sebenarnya. Para veteran sistem informasi akuntansi akan mampu menavigasi sistem dengan mudah dan cepat beradaptasi dengan setiap permasalahan yang muncul selama produksi data (Elinda Novita Sari, dkk., 2020).

Menggunakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan yang Terkomputerisasi yang efisien juga bergantung pada tingkat kinerja manusia yang tinggi. Efektivitas pribadi, atau seberapa banyak yang dicapai dan apa yang dicapai di tempat kerja, relatif terhadap tujuan yang telah ditentukan dan batasan waktu. Efisiensi sistem informasi akuntansi meningkat ketika pekerja dapat memberikan bukti atas usaha keras mereka.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Utara menjadi subjek penelitian ini. Pemerintah Daerah menginvestasikan Rp. 5.000.000,00 pada tahun 1992 sebagai modal awal dan kontribusi masyarakat untuk membantu pembentukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Dalung, menurut penelitian. Uang ini berasal langsung dari Pemerintah Daerah. Tiga orang—Kepala, Sekretaris, dan Bendahara—awalnya bertugas menjalankan Lembaga Perkreditan Desa Adat Dalung setelah didirikan. Lembaga Perkreditan Desa Adat Dalung telah berkembang selama bertahun-tahun, sehingga dapat mempekerjakan lebih banyak orang untuk menjalankan operasinya.

Meski lebih banyak orang yang bekerja di Lembaga Perkreditan Desa Adat Dalung, namun hal itu belum cukup mendongkrak pertumbuhannya. Mayoritas staf belum menguasai penggunaan sistem entri data perusahaan. Beberapa pekerja di Lembaga Perkreditan Desa Adat Dalung merasa heran karena mereka masih ragu untuk mengadopsi sistem komputerisasi, sehingga mereka tidak bisa memahami sepenuhnya sistem akuntansi yang ada saat ini. Pekerja dari luar dusun dilarang oleh LPD Adat Dalung dan harus warga setempat. Oleh karena itu mereka mengadakan pelatihan-pelatihan sertifikasi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Perkreditan Desa sendiri maupun oleh Kabupaten atau Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Provinsi. Walaupun VCI menyatakan misinya untuk “mempromosikan masyarakat dan desa adat,” sebagian besar stafnya jelas masih belum memiliki pemahaman yang

kuat mengenai administrasi fiskal, struktur dewan, dan komputerisasi. Peneliti mengungkapkan sejarah tersebut karena relevan dengan kajian pokok bahasan yang dimaksud dalam judul **“Pengaruh Partisipasi Pemakai Sistem Informasi Akuntansi, Pengalaman Kerja Personal dan Kinerja Individu Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Pengkreditan Desa Se Kecamatan Kuta Utara”**.

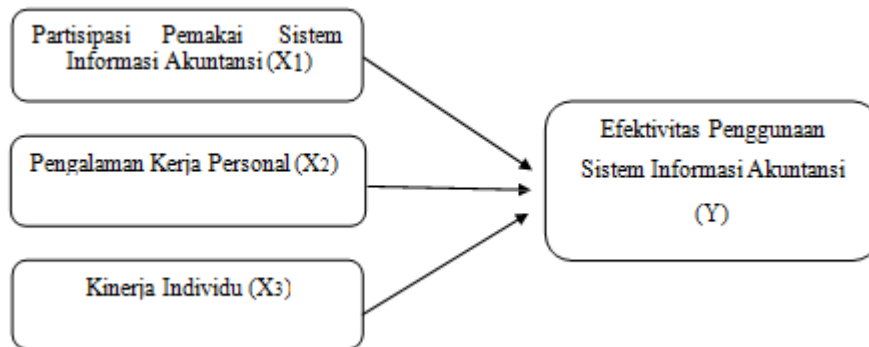
KAJIAN PUSTAKA

TAM adalah singkatan dari "Model Penerimaan Teknologi". Menurut teori ini, pengguna sistem akan menemukan antarmuka yang intuitif dan bermanfaat (Fishbein, M., & Ajzen, 1975). Tujuan TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh utama terhadap sikap dan tindakan pengguna TI terhadap penerapan teknologi baru. Ayu Kusuma Dewi dkk. (2021) menemukan bahwa keterlibatan pengguna adalah salah satu prediktor paling signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan sistem informasi. Pengguna, sering kali dikenal sebagai karyawan atau staf, mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil upaya organisasi untuk memasang sistem informasi akuntansi. Jabatan, sebagaimana didefinisikan dalam karya Komang Ayu Desvira dkk. (2021), memungkinkan dilakukannya identifikasi dan analisis metodis terhadap kebutuhan pekerjaan, serta orang-orang yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Ketika menugaskan pekerjaan di dalam suatu bisnis atau organisasi, para pekerja harus ditempatkan pada kapasitas yang paling sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan bakat mereka.

Kata “kinerja individu” adalah sejauh mana seseorang telah mencapai hasil, sasaran, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dalam melakukan aktivitas tertentu selama jangka waktu tertentu. Efektivitas sistem informasi akuntansi dapat diukur dari kapasitasnya dalam mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan menyimpannya digital secara efisien; mengubah data tersebut menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti; dan menghasilkan laporan standar yang diperlukan. Wewidangan Desa Pakraman Desa Pakraman merupakan lokasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017.

Dukungan pengguna sangat penting bagi keberhasilan setiap pengenalan sistem perangkat lunak akuntansi baru, yang sering disebut karyawan atau staf. Kualitas data yang dihasilkan oleh sistem informasi berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pengguna dalam desain dan implementasinya. Sistem informasi akuntansi (SIA) lebih berhasil ketika penggunanya terlibat, menurut penelitian Ayu Kusuma Dewi dkk. (2021). Hasil temuan dari Anggarini dkk. (2021), user engagement meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi yang

Untuk menguji apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap tantangan yang ada. Kerangka teori penyelidikan ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mensurvei 191 pekerja dari 8 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berbeda di Kecamatan Kuta Utara. Karakteristik sampel mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampel dengan tujuan tertentu digunakan untuk memilih ukuran sampel sebanyak 123 responden. Metode analisis yang digunakan disini adalah:

1. Pertama, kita verifikasi keabsahan dan reliabilitas data dengan menguji reliabilitas instrumen penelitian. Ada dua jenis pengujian instrumen: uji validitas untuk memastikan angkanya tepat, dan uji reliabilitas untuk memastikan observasi dapat diulang.
2. Jenis tes yang kedua adalah analisis deskriptif, yang memberikan ringkasan tingkat tinggi mengenai keadaan seluruh variabel yang diteliti, termasuk nilai ekstrem dan meannya.
3. Untuk memastikan data penelitian berdistribusi normal dan tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi hasil, maka dilakukan Uji Asumsi Klasik.
4. Analisis regresi linier multivariat pada penelitian ini menghasilkan persamaan sebagai berikut: $Y = + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + e$.
5. Kelangsungan model akan dievaluasi dengan menggunakan uji signifikansi statistik t, uji koefisien determinasi, dan uji simultan (f), dimana data yang sangat baik adalah data dengan konstruksi keterkaitan dengan variabel bebas secara keseluruhan terhadap Y.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan merata-ratakan jawaban setiap variabel yang diberikan responden (mean). Berikut adalah temuan statistik deskriptif dari penyelidikan ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Pemakai Sistem Informasi Akuntansi	123	10.00	25.00	19.4228	3.58048
Pengalaman Kerja Personal Kinerja Individu	123	12.00	30.00	23.2114	4.30260
Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi	123	8.00	20.00	15.8293	2.90761
Valid N (listwise)	123	15.00	35.00	27.2439	5.14438

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat total 123 observasi untuk masing-masing variabel kualifikasi. Partisipasi pengguna dalam sistem informasi akuntansi (X1) berlangsung dari pukul 10.00 hingga 25.00, rata-rata 19.4228 dan berukuran 3.58048. Pada pukul 12.00 hingga 30.00, data Pengalaman Kerja Individu (X2) mempunyai mean sebesar 23,2114 dan standar deviasi sebesar 4,30260. Rerata sebaran Data Kinerja Individu (X3) sebesar 15,8293 dan standar deviasi sebesar 2,90761. Mulai pukul 8.00 hingga 20.00. Mean sebesar 27,2439 dan standar deviasi sebesar 5,14438 untuk nilai Efisiensi Sistem Informasi Akuntansi (Y) dari 15,00 hingga 35,00.

Temuan uji validitas dikatakan valid karena sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dan hasil uji reliabilitas memberikan gambaran yang konsisten terhadap data pengamatan tersebut sehingga menghasilkan nilai alpha sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Apabila data penelitian berdistribusi normal dan tingkat signifikansi 0,05 atau lebih maka telah lolos uji normalitas berdasarkan asumsi klasik. Uji multikolinearitas pada penelitian ini membuahkan hasil yang baik. Tampaknya tidak ada hubungan antara berbagai faktor. Temuan yang baik dan signifikan secara statistik dapat ditemukan dengan menggunakan uji heteroskedastisitas.

Table 2. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.502	.921		.545	.587
Partispasi Pemakai Sistem Informasi Akuntansi	.437	.180	.304	2.431	.017
Pengalaman Kerja Personal	.317	.152	.265	2.084	.039
Kinerja Individu	.689	.158	.389	4.350	.000
R					0,938
R Square					0,880
Adjusted R Square					0,877
Uji F					290,488
Sig. Model					0,000

Sumber: Lampiran (Data diolah, 2023)

Tabel 4.6 menampilkan hasil studi regresi linier berganda, yang dapat diperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = 0,502 + 0,437X_1 + 0,317X_2 + 0,689X_3 + e$$

Setelah disesuaikan dengan variabel perancu seperti pelatihan kerja, Ditunjukkan dengan nilai R-Squared sebesar 0,877 dari penelitian koefisien determinasi, Keterlibatan Pengguna dalam Sistem Informasi Akuntansi, Pengalaman Kerja Pribadi, dan Kinerja Individu berkontribusi sebesar 87,7% terhadap varians Efektivitas. Menggunakan Database untuk Pelaporan Keuangan. Nilai F dihitung menggunakan uji F dengan ambang signifikansi 0,000. Hitungannya adalah 290.428. Tingkat signifikansi dibawah 0,05 menunjukkan bahwa Keterlibatan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi, Pengalaman Kerja Individu, dan Kinerja Individu mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Diperoleh maka kepraktisan model yang digunakan dalam penyelidikan ini.

Hasil analisis signifikan secara statistik (p 0,05) hubungan positif antara variabel partisipasi pengguna sistem informasi akuntansi dan efektivitas (koefisien regresi = 0,437, thitung = 2,431). Menurut temuan penelitian, keberhasilan sistem informasi akuntansi berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan pengguna dengan sistem tersebut. Pengguna, yang

sering disebut sebagai pekerja atau staf, Kualitas data menurun ketika partisipasi pengguna dalam pengembangan suatu sistem informasi menurun.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan Ayu Kusuma Dewi dkk. (2021), yang menemukan bahwa memasukkan pengguna sistem informasi akuntansi dalam desain mereka akan meningkatkan efisiensi sistem tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Anggarini dkk. (2021), efisiensi sistem informasi akuntansi pada LPD di Kota Denpasar akan meningkat ketika penggunanya terlibat aktif dalam sistem tersebut.

Kesimpulannya, koefisien parameter sebesar 0,317, thitung sebesar 2,084, dan tingkat signifikansi sebesar 0,039 menunjukkan bahwa pengalaman kerja meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi. Hasil temuan diperoleh bahwa pengguna sistem informasi akuntansi dengan pengalaman kerja lebih banyak lebih efektif. Pengetahuan dan keahlian di bidangnya, ditentukan oleh lamanya pengalaman profesionalnya. Menurut Manulang (1984:25), seorang karyawan memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan melalui partisipasi langsung dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Elinda Novita Sari dkk. (2020) Mereka menemukan bahwa Pengalaman kerja berpengaruh langsung terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada koperasi simpan pinjam Marga Kabupaten Tabanan.

Nilai thitung sebesar 4,350, tingkat signifikansi sebesar 0,000, dan koefisien parameter sebesar 0,689. berdasarkan temuan analisis. Hasilnya, kita dapat mengatakan bahwa terdapat korelasi positif antara indikator kinerja individu dan efisiensi sistem informasi akuntansi (pada tingkat signifikansi 0,05). Data menyajikan hal itu tingkat kinerja individu yang lebih tinggi berkorelasi dengan efisiensi sistem informasi akuntansi yang lebih besar. Kata "kinerja individu" mengacu pada sejauh mana seorang individu telah mencapai hasil kerja, sasaran, tujuan, atau standar lain yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya sebelumnya selama jangka waktu tertentu. Kinerja individu seseorang sangat baik dan patut diantisipasi jika berada pada atau di atas tujuan yang telah disepakati. Temuan penelitian ini menguatkan temuan Ayu Kusumawati dkk. (2019) Siapa yang menentukan bahwa kinerja karyawan yang tinggi meningkatkan kegunaan TI akuntansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Mengingat apa yang telah dikatakan, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sistem informasi akuntansi meningkat ketika penggunanya terlibat secara aktif,

memiliki pengalaman kerja yang relevan, dan bertanggung jawab atas hasil mereka sendiri. Berikut adalah sejumlah rekomendasi yang dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian dan temuan yang dibahas. LPD berencana meningkatkan kemampuannya dalam mendidik pegawai memanfaatkan sistem informasi akuntansi di masa depan. Untuk memastikan bahwa pekerja di masa depan dapat memanfaatkan sistem informasi akuntansi secara maksimal, pelatihan diharapkan dapat membekali karyawan saat ini dengan informasi dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukannya dengan sukses. Untuk memastikan bahwa semua pekerja dapat dengan mudah memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang sudah ada, penting bagi LPD untuk mempertimbangkan berbagai jenis pengalaman kerja yang dimiliki oleh calon pekerja. Terkait sistem informasi akuntansi, sangat penting bagi pihak LPD untuk mengawasi kinerja pegawai secara individual, memastikan bahwa seluruh pekerja memiliki kinerja yang sangat baik dengan terus melakukan tinjauan pekerjaan.

Daftar Pustaka

Anggarini, N.P.T., Arizona, I.P.E. dan Ernawatingsingh, N. (1999). PL (2021). Pengaruh penggunaan teknologi informasi, pengalaman profesional, pelatihan, keterampilan dan keterlibatan pengguna terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kumpulan Hasil Penelitian Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1). Dewi, Ni Made Ayu Kusuma, I. Putu Edy Arizona dan Ni Putu Lisa Ernawatiningsih. "Pengaruh keterlibatan pengguna dalam sistem informasi akuntansi, kompetensi teknis individu, kecanggihan teknologi informasi, dan peran pengawas internal terhadap efektivitas sistem informasi.percaya." Rangkuman Hasil Penelitian Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) 3.1 (2021).

Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 23. Semarang : Pers Universitas Diponogoro.

Ikanbein, M. (1975). Ajzen, daun bawang (1975), Keyakinan, sikap, niat dan perilaku: Pengantar teori dan penelitian. Baca, MA: Addison Wisley.

Kusumawati, Ni Putu Ayu dan Putu Cita Ayu. "Pengaruh kinerja individu dan keterampilan teknis individu terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi dengan pendidikan dan pelatihan sebagai moderator." Keuangan dan Akuntansi Widya 1.2 (2019):77-95.

M, Manulang. 1984. Manajer karyawan. Ibukota Jakarta:Ghalia Indonesia.

Islam, AB, Yani, NA dan Permatasari, M. D. (2022). Pengaruh kompleksitas teknologi informasi, keterampilan teknis dan pengalaman profesional terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi (studi kasus Sicepat Ekspres Indonesia). Jurnal Akuntansi Perusahaan Pelita Bangsa, 7(01), 17-39.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali N. 44 2017. (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64909>

Pratiwi, Intan. "Pengaruh dukungan manajemen senior, kompleksitas teknologi informasi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan kinerja individu terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (studi) penelitian pada hotel bintang tiga dan empat di Provinsi Banten)." Jurnal Penelitian Akuntansi Tirtayasa 4.1 (2019):50-63.

Putri, P. I.A., Ardianti, P.N.H. dan Sunarwijaya, I.K. (2022). PENGARUH PENGALAMAN PROFESIONAL, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN KOMPLEKSITAS TUGAS

TERHADAP EFISIENSI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI. Kumpulan Hasil Penelitian Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 4(2), 45-55

Sari, Elinda Novita dan Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati. “DAMPAK PROGRAM PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, KINERJA PRIBADI DAN PENGALAMAN KERJA PRIBADI TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SECARA EFEKTIF DALAM KERJASAMA TIEN VAYA KIM DAN MARA KIEV.” Finance and Accounting Hita 1.1 (2020):299-323

sudah kehabisan uang. Berdasarkan informasi tersebut, penyidik korupsi memeriksa LPD Desa Adat di Kota Tabanan dan menemukan dugaan penyimpangan, antara lain Ketua LPD tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya pada Juni 2018 dan sekretaris tetap menjalankan LPD meski kondisi keuangan LPD sedang buruk. Dana yang dikelola ada agustus 2018 sebesar Rp.12.155.187.694. Setelah dilakukan penelusuran keberadaan dana tersebut ditemukan selisih sebesar Rp.7.318.569.557. Selisih tersebut diakibatkan penggunaan pribadi oleh pengurus dari tahun 2010 sampai 2016 sebesar Rp. 1.33.445.000 yang dilakukan dengan cara kas bon. Selain mengamil uang secara kas bon ketua LPD menarik uang yang ada di Bank BPD Cabang Tabanan sebesar Rp. 2.405.000.000 yang digunakan untuk foya – foya. LPD Desa Adat Kota Tabanan kehilangan Rp. 7.318.569.557 akibat kejadian tersebut, menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali.

Kecenderungan Penipuan Akuntansi adalah tindakan yang disengaja dan direncanakan yang melanggar aturan akuntansi, menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan dilakukan untuk keuntungan finansial. Peluang memiliki dampak yang signifikan terhadap kecenderungan untuk berbuat curang. Ketika ada banyak uang yang harus dihasilkan, penipuan lebih mungkin terjadi, begitu pula sebaliknya. Pernyataan berlebihan dan ketidakadilan, keduanya buruk bagi banyak orang, dapat dihindari dengan bantuan pengendalian internal yang dirancang dengan baik dan pengawasan yang ketat. Potensi kecurangan akuntansi berkurang atau dihilangkan dalam organisasi dengan pengendalian internal yang kuat.

Asimetri informasi, atau ketidakseimbangan dalam perolehan informasi terkait perusahaan, dapat menyebabkan perilaku tidak jujur. Pengurus LPD bisa lebih lunak atau memberikan laporan keuangan palsu jika terjadi asimetri informasi karena masyarakat desa pakraman kurang memahami data dari rekening keuangan yang sebenarnya. “Tujuannya sematamata karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja yang telah dilakukan dengan memanipulasi informasi keuangan dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi ini.

Dengan mematuhi semua ketentuan atau aturan akuntansi dalam melakukan pengelolaan keuangan dan menyiapkan laporan keuangan, sebuah organisasi dapat menumbuhkan lingkungan keterbukaan dan akuntabilitas sambil melindungi diri dari potensi dampak buruk dari karyawan yang tidak patuh.” Berdasarkan konteks di atas, maka judul penelitian ini cukup deskriptif: “Pengaruh Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD di Kabupaten Tabanan”.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem pengendalian internal perusahaan dikatakan efektif jika membantu perusahaan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, operasi yang efisien dan efektif, serta kepatuhan yang ketat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widiutami, 2017). Kecurangan akuntansi diperkirakan akan berkurang atau hilang sama sekali jika pengendalian internal yang baik dilakukan (Chandra, 2015). (Putri, 2022) Pengendalian internal yang efektif mengurangi perilaku tidak jujur, menurut penelitian Ni Made Ayu Diah Utari, Edy Sujana, dan Adi Yuniarta. Ni Wayan Murti, Edy Sujana, dan Putu Sukma Kurniawan menemukan bahwa adanya sistem pengendalian internal yang efektif mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Ni Wayan Ayu Putri menemukan hal yang sama juga terjadi pada kecurangan akuntansi.

H1 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Ketika prinsipal dan agen memiliki akses yang tidak sama ke informasi yang relevan, keadaan asimetri informasi terjadi. Karena faktor-faktor tersebut, pekerja dapat melakukan kecurangan dengan memberikan data akuntansi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mendistorsi data keuangan dengan sengaja memiliki satu tujuan: memberikan evaluasi kinerja masa lalu yang lebih akurat (Permatasari et al., 2017). “Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2021) berdasarkan penelitian Putu Eva Indah Pujayani menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan Ni Wayan Eka Juliantari, I Gede Cahyadi Putra, I Ketut Sunarwijaya (2021) mengklaim bahwa kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem diuntungkan oleh asimetri informasi secara signifikan.”

H2 : Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Ketika prinsipal dan agen memiliki akses yang tidak sama ke informasi yang relevan, keadaan asimetri informasi terjadi. Karena faktor-faktor tersebut, pekerja dapat melakukan kecurangan dengan memberikan data akuntansi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mendistorsi data keuangan dengan sengaja memiliki satu tujuan: memberikan evaluasi kinerja masa lalu yang lebih akurat (Permatasari et al., 2017). “Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2021) berdasarkan penelitian Putu Eva Indah Pujayani menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan Ni Wayan Eka Juliantari, I Gede Cahyadi Putra, I Ketut Sunarwijaya (2021) mengklaim bahwa

akan dihasilkan persamaan $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$ (1)

- 8. Sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi.
- 9. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen dan apakah model regresi berganda layak atau valid.
- 10. Tujuan uji t, suatu analisis statistik, adalah untuk menentukan sejauh mana fluktuasi variabel dependen dapat dikaitkan dengan perubahan variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan merata-ratakan tanggapan terhadap setiap variabel yang diberikan oleh responden (mean). Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari penyelidikan ini:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Internal	35	15.00	35.00	26.5714	6.30259
Asimetri Informasi	35	15.00	24.00	19.5714	1.88314
Ketaatan Aturan Akuntansi	35	11.00	25.00	18.8000	4.43781
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	35	23.00	50.00	38.1429	9.10121
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data Diolah, 2023

N, jumlah total pengamatan untuk semua variabel yang valid adalah 35 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Rentang nilai data pengendalian intern (X1) adalah 15,00–35,00, dengan rata-rata 26,5714 dan standar deviasi 6,30259. Rentang nilai untuk data asimetri informasi (X2) adalah 15.00–24.00 dengan rata-rata 19.5714 dan standar deviasi 1.88314. Data kepatuhan terhadap aturan akuntansi (X3) dapat mengambil nilai antara 11 dan 25, dengan rata-rata 18,8000 dan standar deviasi 4,43781. Dengan rentang dari 23.00 hingga 50.00, rata-rata 38.1429, dan standar deviasi 9.10121, Data Kecenderungan Penipuan Akuntansi (Y) berada di tengah-tengah.

Semua variabel dalam penelitian ini dianggap valid dan reliabel untuk digunakan pada penelitian selanjutnya karena memiliki koefisien alfa () lebih besar dari 0,6 dan koefisien korelasi (r) lebih besar dari 0,30. “Model regresi diasumsikan berdistribusi normal karena uji normalitas menghasilkan tingkat signifikansi $0,200 > 0,05$. Semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan angka toleransi lebih besar dari 0,1, sesuai dengan hasil uji multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan

koefisien regresi sebesar -0,123 dan nilai thitung sebesar -2,293 pada taraf signifikansi 0,002. Menurut temuan studi tersebut, kecenderungan perusahaan untuk melakukan kecurangan akuntansi menurun seiring dengan meningkatnya kualitas sistem pengendalian internalnya. Sistem pengendalian internal perusahaan dikatakan efektif jika membantu perusahaan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, operasi yang efisien dan efektif, serta kepatuhan yang ketat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widiutami, 2017). Kecurangan akuntansi diharapkan berkurang atau hilang seluruhnya jika pengendalian internal yang baik atau efektif diterapkan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Ni Made Ayu Diah Utari, Edy Sujana, Adi Yuniarta yang menyatakan Efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. "Menurut penelitian ,Ni Wayan Murti , Edy Sujana , Putu Sukma Kurniawan yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud), dan menurut penelitian Ni Wayan Ayu Putri yang menyatakan Efektivitas Pengendalian Internal juga Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Akuntansi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Asimetri Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud), dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yang ditunjukkan dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,820 dan nilai t hitung sebesar 2,949 dengan tingkat signifikansi. dari 0.000. Temuan mengungkapkan korelasi antara peningkatan tingkat asimetri informasi dan kecenderungan peningkatan penipuan akuntansi. Ketika prinsipal dan agen memiliki jumlah pengetahuan yang berbeda tentang situasi tertentu, ini disebut asimetri informasi. Pekerja dalam situasi seperti itu mungkin tergoda untuk melakukan penipuan dengan melaporkan detail fiskal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Satu-satunya alasan untuk memanipulasi data keuangan adalah untuk meningkatkan akurasi evaluasi kinerja (Permatasari et al., 2017). Temuan ini sejalan dengan Putu Eva Indah Pujayani dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2021) yang menemukan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh asimetri informasi. Asimetri informasi positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem menurut Ni Wayan Eka Juliantari, I Gede Cahyadi Putra, dan I Ketut Sunarwijaya (2021).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan terhadap Aturan Akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud), yang ditunjukkan dengan nilai koefisien parameter sebesar -0,825 dan nilai t hitung sebesar -3,789 pada taraf signifikansi 0,013. . Menurut temuan studi tersebut, kejadian kecurangan

akuntansi dapat diminimalkan jika karyawan benar-benar mematuhi kebijakan akuntansi. Ketentuan atau aturan akuntansi yang harus diikuti oleh organisasi dalam pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan adalah contoh-contoh yang dimaksud dengan “pemenuhan aturan akuntansi”. Ketika sebuah organisasi atau lembaga pemerintah melanggar hukum dengan tidak mengikuti prosedur akuntansi yang benar, mereka melakukan penipuan. Kecenderungan akuntansi dapat dikurangi jika lembaga atau instansi mengikuti aturan akuntansi yang berlaku. Penyimpangan keuangan di LPD cabang Seririt. Menurut Ni Wayan Eka Juliantari, I Gede Cahyadi Putra, I Ketut Sunarwijaya (2021), kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem berkurang jika mengikuti aturan.”

SIMPULAN DAN SARAN

Menurut temuan, ada hubungan negatif dan signifikan antara prevalensi pengendalian internal dan kemungkinan kecurangan akuntansi, sementara ada hubungan positif dan signifikan antara asimetri informasi dan kemungkinan kecurangan akuntansi. Kedepannya pihak LPD Se-Kecamatan Tabanan harus memperhatikan sistem pengendalian internal didalam lembaganya, berlakukan sanksi yang ketat terhadap setiap pelanggaran yang terjadi agar nantinya terbentuk disiplin kerja sehingga tingkat kecenderungan kecurangan dapat berkurang. LPD Se- Kecamatan Tabanan juga harus membangun komunikasi yang diantara para karyawan, dalam menyelesaikan sebuah masalah hendaknya dilakukan sebuah diskusi bersama agar terhindar dari berbagai bentuk informasi menyimpang sehingga asimetri informasi dapat dihindari dan peluang terjadinya tindak kecurangan juga semakin berkurang. Para pegawai LPD Se- Kecamatan Tabanan juga harus rutin diberikan pelatihan kerja agar mereka dapat memahami aturan akuntansi dengan baik, setelah paham nantinya para pegawai dapat bekerja sesuai dengan standar aturan yang ada sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Apriana, IG dan Ayu, PC (2021). DAMPAK INFORMASI YANG TIDAK TERKAIT DAN KEPATUHAN PERATURAN AKUNTANSI TERHADAP TREN PENIPUAN AKUNTANSI PADA LEMBAGA KREDIT DESA KELAPA KELAPA TEGAALLALANG. Hita Akuntansi dan Keuangan, 1-27.
- Aranta, Z. P. (2013) Pengaruh etika formal dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang, 3(2), 11-15.
- Arifa, Anna. (2017). Pengaruh kepatuhan akuntansi, efektivitas pengendalian internal, gaji yang memadai, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi terhadap tren penipuan akuntansi (Studi Universitas Negeri Daerah Khusus Yogyakarta). Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ardyani, Ni Putu Evi (2020) DAMPAK SISTEM

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFISIENSI DISTRIBUSI KREDIT PADA LEMBAGA KREDIT PERDESAAN DI MINIMAL BUSUNGBIU. Tesis kelulusan, Universitas Pedagogis Ganesha

Cinthyani, LP dan Sulindawati, NL (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi tren kecurangan akuntansi LPD di Kabupaten Seririt. *Jurnal Akuntansi Profesional*, 1-8.

Erika, N.W. dan Indraswarawati, S.A. (2022). DAMPAK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AKTIVITAS TIDAK BERETIK DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP TREN PENIPUAN PADA LUDGE LOLAGE ORGANISATION (LPD) DI SUSUT COUNTY. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1-17.

Ghozali (2013). Penerapan analisis multivariat dan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

https:

[//www.mediapelangi.com/2022/03/08/mantan-ketua-lpd-desa-adat-kotatabanan-korusi-for-karaoke/](https://www.mediapelangi.com/2022/03/08/mantan-ketua-lpd-desa-adat-kotatabanan-korusi-for-karaoke/)

Juliantari, N.W., Putra, IG dan Sunarwijaya, I.K. (2020). FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI TREN PENIPUAN AKUNTANSI PADA LEMBAGA KREDIT DESA KABUPATEN KARANGASEM. *Majalah KHARISMA*, 1-15.

Jensen, Michael. dibandingkan dengan & W, H. Meckling. 1976. "Teori Perusahaan: Perilaku manajemen, biaya agensi dan struktur kepemilikan". *Jurnal Ekonomi Keuangan. Praktik*. 3, tidak. 4.

Meitriana, MA dan Irwansyah, M.R. (2018). HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN PEGAWAI TERHADAP ATURAN AKUNTANSI DAN KEMUNGKINAN KOMPENSASI DENGAN TREN PENIPUAN AKUNTANSI PADA LEMBAGA KREDIT DESA (LPD) DI NEGARA GEROKGAK. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1-15.

Murti, N.W., Edy, S. dan Kurniawan, P. S.(2018). DAMPAK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, BADAN PENGAWAS PROFESIONAL, Etika PRIBADI, dan KEADILAN PROSEDUR TERHADAP Kecenderungan Fraud (Studi Empiris pada LPD di Kabupaten Susut Kabupaten Bangli). *Jurnal Sains Mahasiswa Akuntansi*, 1-15.

Mustikasari, Dhermawati Putri. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Di Wilayah Kabupaten Batang. *Jurnal Akuntansi Analitik*, ISSN: 2252-6765.

Nitimiani, N.K. dan Suardika, A. A.(2020). PENGARUH Etika PRIBADI, DISTRIBUSI INFORMASI DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TREN FRAUD AKUNTANSI DI LPD KABUPATEN TEGAALLALANG. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1-34.

Permatasari, D. E., Kurohman, T. dan Kartika. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tren kecurangan (fraud) pada sektor pemerintahan. *Jurnal Keuangan dan Peranakan*, 14(1), 37-44.

Pujayani, P. E. dan Dewi, PE (2021). PENGARUH Etika PRIBADI, PERBEDAAN INFORMASI, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP TREN PENIPUAN AKUNTANSI PADA LPD KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Sains Mahasiswa Akuntansi*, 1-12.

investor (sumber pendanaan) organisasi. Biasanya, para investor organisasi ini dapat berupa pemerintah, swasta, atau kreditor. Adapun hubungan antara pelaku ekonomi ini, yakni organisasi dan investor, berjalan sesuai dengan *agency theory* (teori keagenan).

Menurut teori keagenan, hubungan dua pelaku ekonomi dengan perbedaan kepentingan disebut sebagai agen dan prinsipal (Sengaji, 2018). Kedudukan prinsipal dijelaskan sebagai pihak yang memberikan perintah ke orang lain (agen) supaya menjalankan aktivitas jasa atas nama prinsipal, dengan kewenangan berada di pihak agen untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk prinsipal (Octalianna & Rahayuningsih, 2013). Perintah yang diberikan prinsipal akan didukung dan dilaksanakan oleh agen apabila kedua pihak, baik prinsipal maupun agen, memiliki tujuan yang sama.

Namun, hubungan keagenan di antara keduanya bisa saja menimbulkan masalah apabila terjadi konflik atau perbedaan kepentingan di antara keduanya. Pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dengan fungsi pengendalian (*control*) kerap kali menjadi alasan permasalahan tersebut (Sukmawati, Pujiningsih, & Laily, 2016). Salah satu upaya untuk membatasi munculnya konflik dalam hubungan keagenan adalah dengan menentukan kontrak yang efisien. Namun, upaya ini juga belum efektif untuk menjadi solusi, sehingga munculah konsep *corporate governance* (Ahmad & Septriani, 2008).

Objek pada penelitian ini adalah Kelompok Pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yang berlokasi di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebagai organisasi sektor publik, Pengelola Objek Wisata dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar tentu diharapkan telah mempraktikkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Alasan peneliti melakukan penelitian di Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu adanya fenomena trend peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu.

Observasi yang telah dilakukan terlihat bahwa pada tahun 2020 dengan 2021 pendapatan pada Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu mengalami penurunan karena adanya wabah penyakit Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu mengalami peningkatan yang drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu memiliki daya tarik yang kuat sehingga dikunjungi banyak wisatawan.

Di samping alasan di atas, alasan lain dalam memilih Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sebagai adalah karena terdapat ketimpangan antara teori dengan praktik di lapangan. Yaitu, pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Gianyar tidak memberikan laporan pengeluaran pendapatan kepada pemberi amanah (prinsipal), yaitu Pemerintah Desa Sebatu. Pihak pengelola hanya melakukan pembagian hasil yang diperoleh dari pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu untuk Dinas Pariwisata sebesar 60% dan untuk Desa Adat sebesar 40% dari pendapatan. Hal tersebut menyalahi teori yang dikemukakan oleh Hehanussa (2015), bahwa pengelola (agen) wajib mempertanggungjawabkan, memberikan laporan, dan kegiatan kepada pemberi amanah (prinsipal). Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang berkedudukan sebagai agen, seharusnya mampu mengimplementasikan nilai akuntabilitas dan transparansi yang ditunjukkan kepada masyarakat desa sebagai prinsipal, apalagi dana yang dikelola juga berjumlah besar.

Pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu dari penjualan tiket. Pendapatan dari penjualan tiket tersebut perharinya akan dibuatkan laporan lalu disetor ke dinas dalam bentuk kwitansi laporan. Lalu pendapatan dari Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu dikumpulkan perbulannya, dari pendapatan perbulannya itu akan dibagi ke desa adat Sebatu. Dari pendapatan tersebut desa adat sebatu mengajukan surat pengajuan ke dinas untuk mencairkan dana 40% yang akan dicairkan per tiga bulan ke rekening desa adat dan diberikannya laporan pendapatan tamu pengunjung Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu. Dari laporan yang diberikan oleh dinas akan di balance kan ke laporan Objek Wisata Gunung Kawi sebatu langsung. Dari pendapatan yang 40% itu akan di sampaikan ke masyarakat desa adat melalui pesangkepan secara lisan yang akan dilaksanakan per tiga bulan sekali dalam pesangkepan itu hanya total jumlah pendapatannya saja yang disampaikan ke masyarakat dan tidak ada laporan rinciannya. Berdasarkan penemuan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu.

Selain itu, ditemukan juga kasus serupa terjadi pada kelompok pengelola (agen) terhadap pihak pemerintah desa (prinsipal) di mana agen tidak memberikan laporan rincian pendapatan kepada prinsipal sehingga fenomena ini dapat menjadi informasi tambahan untuk mengatakan bahwa nilai akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola Objek Wisata Gunung Kawi belum dipraktikkan dengan baik. Padahal, penerapan nilai akuntabilitas publik merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para agen guna mempertanggungjawabkan segala tanggungjawabnya kepada para prinsipal, sebagaimana prinsipal juga memiliki berhak dan berwenang menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Urgensi penelitian ini juga didukung dengan minimnya penelitian yang mengangkat topik akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pada objek wisata.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*). Teori ini mengemukakan kesepakatan antara hubungan antara *agent* dan *principal*. Dalam konteks pemerintahan, teori ini diaplikasikan dengan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk memenuhi segala ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, wajib bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan demi kepentingan masyarakatnya. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa laporan yang berhak diketahui dan dinilai oleh masyarakatnya sendiri.

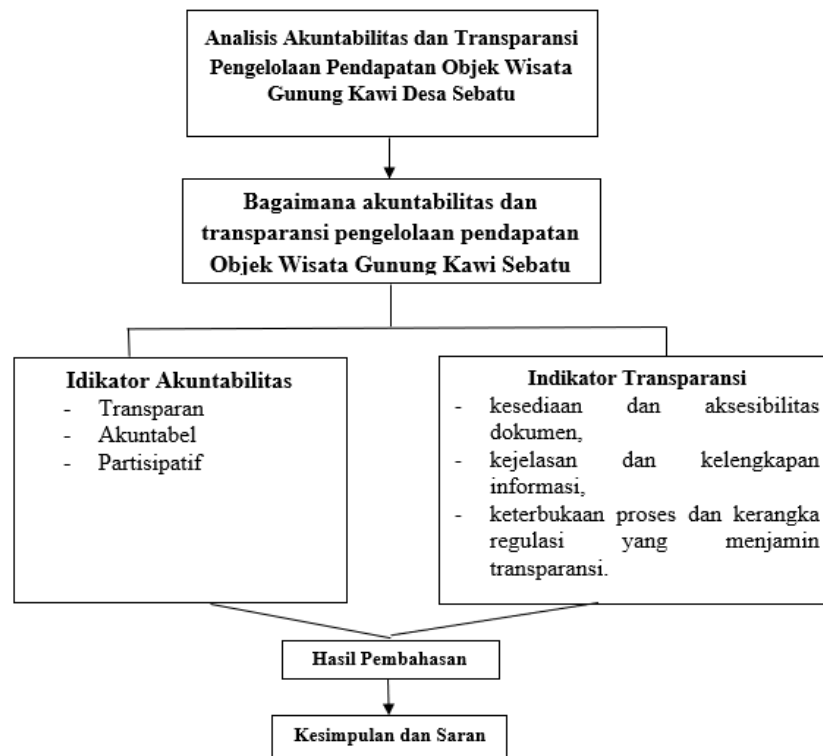
Akuntabilitas adalah sebuah keharusan untuk memberi laporan pertanggungjawaban dari kinerja atau kegiatan kepada pihak yang berhak memintanya (Kuswati, 2020). Pertanggungjawaban tersebut dilakukan untuk menjelaskan tindakan yang telah dijalankan oleh pelopor, kepala kantor, atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak menerimanya (Ardiyanti, 2019).

Adapun transparansi, menjadi hal dasar yang fundamental bagi para pengelola dana desa dalam menjalankan kegiatannya, sehingga nilai ini harus diterapkan pada tiap prosesnya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dana (Hadi, 2019). Sebagaimana ditegaskan pada produk hukum Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa transparansi diartikan juga sebagai prinsip keterbukaan, yang menjamin laporan keuangan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan tepat. Hal ini agar amanah yang diberikan masyarakat untuk mengelola sumber daya dapat diketahui secara transparan dan dipahami bersama.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menganalisis analisis akuntabilitas, transparansi, pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Jenis dan sumber data yang digunakan di sini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, yakni terdiri dari bendesa adat dan pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui pengumpulan dokumen dan catatan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu. Data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini seperti literatur, *e-journal*, dan *internet surfing* yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dengan melalui serangkaian tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu

Pura Gunung Kawi Sebatu menurut sejarah, diperkirakan dibangun sekitar tahun 1300 hingga 1500-an Masehi. Pura ini konon dibangun untuk memuja Dewa Wisnu atas perintah Rsi Markandeya. Rsi Markandeya adalah seorang guru yang berasal dari Kerajaan Majapahit, penyebar agama Hindu dari Jawa. Beliau mempunyai pengaruh terhadap Nusantara, juga Kerajaan Bali. Pura ini juga menjadi tempat penyimpanan abu jenazah Raja Anak Wungsu, salah

satu raja Bali dari dinasti Warmadewa yang memerintah pada abad ke-11 Masehi. Pura Gunung Kawi Sebatu termasuk dalam pura Dhang Khayangan. Yang artinya semua umat Hindu bisa masuk dan sembahyang di pura ini. Mengingat ini masih pura, tempat suci umat Hindu, diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat yang sudah disediakan di area loket untuk disewakan kepada pengunjung. Pura Gunung Kawi Sebatu menarik perhatian yang luar biasa dari wisatawan, baik wisatawan domestik maupun internasional. Berdiri di lahan yang luas, pura ini terletak di atas lahan seluas 5.000 m² yang sekelilingnya terdapat oleh hutan, tebing, dan sumber air yang melimpah. Suasana di pura ini sangat sejuk, hijau, dan damai. Arsitekturnya unik dan memiliki keindahan tersendiri.

Akuntabilitas Dalam Proses Pengelolaan Pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu

Akuntabilitas diartikan sebagai sebuah keharusan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dan tindakannya kepada pihak lain yang berhak dan berwenang memintanya (Kuswanti, 2020). Mahmudi (2016:19) mengemukakan akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pemerintah (*agent*) untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pemberi manfaat (*principal*) atas tindakan yang berkenaan dengan penggunaan sumber daya publik.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini yang menggunakan teori keagenan, variabel akuntabilitas direpresentasikan kepada kondisi di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar (*agent*) bertanggung jawab untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan pengelolaan pendapatan kepada masyarakat setempat (*principal*).

Dilihat dari prakteknya, akuntabilitas pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu masih kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian didapat unsur-unsur akuntabilitas menurut Tahir (2019) yaitu :

1. Transparan

Pada pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu proses transparansi sudah baik. Dimana adanya laporan pendapatan hanya sebatas jumlah dari pengunjung wisatawan yang datang dan besaran nilai pendapatan. Pendapatan ini akan dibagi 60% untuk pengelola yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dan 40% untuk Desa Adat Sebatu, dari pendapatan ini yang ke Desa Adat Sebatu dalam pencairan dana bendesa adat harus melakukan surat pengajuan ke dinas, lalu pada saat pencairan dana dinas akan melakukan transper dana dan memberikan laporan pendapatan dari laporan ini akan di cocokan ke laporan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu. Pembagian pendapatan ini dipakai

untuk sarana prasaran objek wisata gunung kawi sebatu untuk menata objek wisata dan juga kebersihan objek wisata. Namun pada kenyataannya kurangnya transparansi mengenai laporan yang disampaikan kepada masyarakat atas pengelolaan pendapatan ini tidak dirinci dengan baik, sehingga masyarakat hanya mengetahui besarnya saja tanpa mengetahui secara rinci pendapatan itu digunakan untuk apa saja.

2. Akuntabel

Pada pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu adanya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan sudah baik. Bukti laporan pendapatan objek wisata gunung kawi sebatu dilaporkan dalam bentuk kwitansi laporan yang disetorkan ke dinas pariwisata setiap hari. Selain itu laporan pertanggungjawaban Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sudah direkap dan ditulis dalam bentuk laporan setiap harinya akan dijumlahkan pendapatan perbulannya dari berapa tamu yang masuk dan berapa jumlah uangnya yang masuk agar sesuai.

3. Partisipatif

Partisipatif dalam pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu sudah dilakukan yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan dari pendapatan tersebut. Dimana laporan mengenai jumlah pendapatan akan disampaikan kepada masyarakat melalui pesangkepan desa. Pesangkepan itu sendiri dilaksanakan tiga bulan sekali, sehingga masyarakat juga mengetahui besarnya pendapatan dari Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu.

Transparansi Dalam Proses Pengelolaan Pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu

Transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara luas dan efektif mengetahui dan mengakses data mengenai informasi keuangan. Indikator untuk menilai transparansi meliputi ketersediaan dan kemudahan akses dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, serta keterbukaan proses dan kerangka regulasi penjamin transparansi (Ardiyanti, 2019). Penerapan prinsip keterbukaan pada lingkup pemerintahan adalah sebuah nilai yang fundamental karena termasuk prinsip *good governance*.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, variabel transparansi diwujudkan pada pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu (*agent*) yang menyediakan informasi akurat kepada masyarakat (*principal*). Hal ini juga selaras dengan teori Stewardship (prinsip keterbukaan), di mana pada penelitian ini, pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu

berfungsi sebagai *stewards* yang memenuhi hak masyarakat (*principal*) untuk menerima informasi faktual.

Dilihat dari prakteknya, transparansi dalam proses pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian didapat unsur-unsur transparansi menurut Ardiyanti (2019) yaitu :

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Pada Pengelolaan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, sudah ada dokumen yang digunakan dalam mekanisme pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu. Hal ini sesuai dengan teori Coryanata, (2015:99), yang menjelaskan transparansi didasarkan pada arus informasi yang terbuka, di mana semua proses dan informasi dapat diakses oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Adanya laporan dari jumlah hasil pendapatan yang diperoleh kepada masyarakat melalui rapat setiap tiga bulan sekali. Dengan diadakan rapat tersebut masyarakat dapat informasi mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Terkait dengan informasi pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu, pembuatan laporan serta penyampaian kepada masyarakat pada Desa Adat Sebatu cukup baik. Dalam hal ini laporan disampaikan dalam bentuk rapat desa adat secara lisan yang dilaksanakan dalam tiga bulan sekali, dalam rapat tersebut akan disampaikan jumlah atau total pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu.

3. Keterbukaan Proses dan Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Hal ini terkait dengan keterbukaan pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu. Adanya kerangka regulasi yang memastikan prinsip keterbukaan (transparansi) kepada masyarakat pada Desa Adat Sebatu. Laporan yang diberikan dalam bentuk kwitansi yang disetorkan ke dinas pariwisata setiap harinya dan nantinya akan ditotal setiap bulannya. Laporan ini disampaikan untuk menghindari kecurigaan atau kecurangan dan supaya adanya kesesuaian keadaan objek wisata gunung kawi sebatu dengan laporan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.

SIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menemukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu sudah baik. Pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu proses transparansi sudah baik. Pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu adanya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan sudah baik. Partisipatif dalam pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu sudah dilakukan yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan dari pendapatan. Transparansi pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu sudah baik. Pengelolaan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, sudah ada dokumen yang digunakan dalam mekanisme pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu. Pembuatan laporan serta penyampaian kepada masyarakat pada Desa Adat Sebatu cukup baik. Dalam hal ini laporan disampaikan dalam bentuk rapat desa adat secara lisan. Keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam hal ini sudah baik yaitu terkait dengan keterbukaan pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu.

Diharapkan pengelola objek wisata gunung kawi sebatu membuat pelaporan pertanggungjawaban dengan melampirkan rincian yang detail mengenai pendapatan maupun penggunaan dana atas pendapatan tersebut. Selain itu laporan yang disampaikan diharapkan mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Pihak pengelola objek wisata gunung kawi sebatu sebaiknya melakukan pencatatan dengan memanfaatkan sistem digital. Pencatatan dengan system digital ini diharapkan agar lebih mudah melakukan *chek and balance* serta tidak perlu dibuat laporan secara manual lagi sehingga nantinya laporan yang ada sudah lebih rapi dan mudah dimengerti.

- 2) Memberikan bukti empiris bagaimana pemahaman akuntansi memengaruhi laporan keuangan yang berkualitas pada BUMDes Kabupaten Bangli.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori ini disebut juga teori perilaku yang direncanakan yang memuat hubungan dari keyakinan dan perilaku seorang individu. Teori ini dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) yang bertujuan untuk menyempurnakan konsep kontrol perilaku yang sudah ada sebelumnya dalam memprediksi tindakan dan alasan seseorang dalam berperilaku. Teori ini juga berperan dalam meramalkan perilaku seseorang yang termotivasi menggunakan tiga dasar determinan yaitu: *attitude* sebagai sikap individu, *subjective norm* sebagai norma subjektif individu, dan *perceived behavioral control* sebagai kontrol perilaku individu baik itu dari internal individu maupun eksternal individu tersebut.

BUMDes

BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah lembaga yang dijalankan oleh desa, serta bergerak di sektor ekonomi dengan tujuan memajukan masyarakat desa serta mengelola ekonomi desa yang lebih baik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah desa dengan harapan meningkatkan pendapatan warga desa dan desa dapat mendirikan sebuah badan usaha yang pengelolannya dilakukan sepenuhnya oleh desa tersebut, modal usaha BUMDes dapat berasal dari desa dan masyarakat baik berupa aktiva tetap atau lancar serta diatur dalam musyawarah desa sebagai sumber hukumnya. Pembentukan BUMDes diprakarsai oleh masyarakat dengan prinsip partisipatif, emansipasi, kooperatif, serta *member base* dan *self help* yang bertujuan membangun kemandirian dari lembaga desa.

Kompetensi SDM

Kompetensi yang dimiliki pegawai menurut (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022) adalah hal yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan, dimana pegawai sebagai sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya/operasional perusahaan atau organisasi, lembaga yang memiliki manusia yang kompeten diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih cepat (Nyoman & Sujana, 2021). Pengaruh kompetensi SDM dilakukan oleh (Ishak & Syam, 2018) dan memberikan bukti bahwa kompetensi dapat memberikan dampak positif terhadap laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian (Nyoman & Sujana, 2021) juga memberikan hasil secara empiris yang tidak jauh berbeda, yaitu kompetensi memberikan pengaruh positif pada tingkat mutu laporan keuangan. Yang berarti, tingkat kompetensi pada diri pegawai dapat

menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pegawai tersebut, memiliki kompetensi yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Penjelasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan hipotesis penelitian berikut.

H₁: Kompetensi SDM mampu memengaruhi kualitas laporan keuangan secara positif dan signifikan

Pemahaman Akuntansi

Para *stakeholder* sebuah perusahaan dapat mengetahui berbagai informasi mengenai perusahaannya melalui laporan akuntansi, sehingga akuntansi dapat dianggap sebagai bahasa dalam sebuah bisnis. Melalui laporan akuntansi orang yang berkepentingan dalam suatu bisnis mendapatkan informasi yang berguna dari perusahaan seperti kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Hery, 2017). Penelitian (Lestari & Dewi, 2020) mengenai pemahaman seseorang terhadap akuntansi menemukan bahwa pengetahuan akuntansi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian lain juga menemukan bahwa pengetahuan akuntansi merupakan komponen penting dalam meningkatkan mutu laporan keuangan (Ayem & Nugroho, 2020), (L. A. P. Dewi et al., 2018). Penjelasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan hipotesis penelitian berikut.

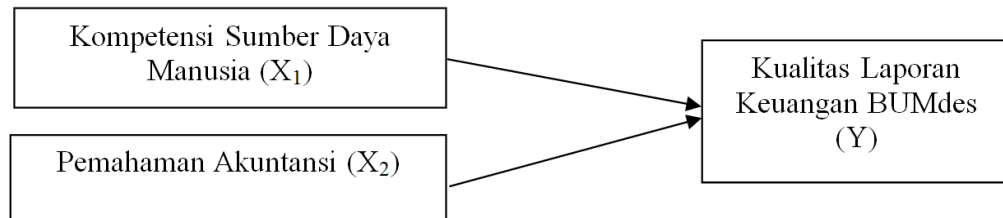
H₂: Pemahaman akuntansi mampu memengaruhi kualitas laporan keuangan secara positif dan signifikan.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes, tetapi kompetensi SDM secara parsial meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes. Penelitian (Zaizar, 2019) menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah desa dapat diimplementasi dari sebuah aplikasi sistem keuangan desa kearah positif dan signifikan. Penelitian (Ishak & Syam, 2018) memberikan bukti empiris bahwa kompetensi mampu memengaruhi kualitas laporan keuangan, disisi lain teknologi informasi akuntansi juga mampu memengaruhi secara parsial ke arah positif pada kualitas laporan keuangan. Penelitian (Posi & Putra, 2021) menunjukkan bahwa pendidikan yang pernah diterima pegawai serta pelatihan yang pernah dilakukan tidak memberikan kontribusi pengaruh baik positif maupun negatif terhadap pelaporan keuangan BUMDes; tetapi pemahaman pegawai terhadap akuntansi mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan BUMDes.

METODE PENELITIAN

Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran yang dibangun oleh peneliti dalam skripsi ini, yang didasarkan pada uraian teori dan penelitian terdahulu. Kerangka ini dapat digunakan untuk menggambarkan kajian teoritis dan empiris.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2020) variabel bebas dapat menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemahaman akuntansi (X_2), dan kualitas laporan keuangan BUMDes (Y) adalah variabel terikat. Keterlibatan seluruh pengurus BUMDes dan staf desa dalam menangani administrasi keuangan, total 204 orang dari 68 desa di Kabupaten Bangli yang memiliki BUMDes yang masih beroperasi. Sampling purposive digunakan, dan sampelnya terdiri dari 69 orang dari 23 BUMDes.

Untuk mengumpulkan data menggunakan teknik kuesioner sebagai teknik utama yang penskorannya menggunakan skala likert lima poin sebagai pilihan jawaban (Sugiyono, 2020). Jawaban tertinggi sangat setuju dinilai skor lima sampai dengan skor terendah sangat tidak setuju diberikan skor satu. Skor yang telah terkumpul dalam tabulasi data kemudian diuji dalam pengujian instrumen. Menurut (Ghozali, 2018) penelitian memerlukan model analisis untuk pengujian awal dengan model-model penyederhanaan data yang dibutuhkan agar data pada pengujian utama dapat menggunakan data yang baik dan valid, dan data dianggap valid jika memenuhi nilai korelasi individu $> 0,05$, sedangkan dinyatakan reliabel dengan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. Pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa data tidak memiliki multikolinearitas jika nilai *toleransi* ≥ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$. Uji heteroskedastisitas menggunakan kriteria nilai $Sig > 0,05$.

Hipotesis pengujianya akan dilakukan menggunakan regresi linier berganda, yang didapatkan dengan memasukkan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Kualitas laporan keuangan BUMDes
- α = Bilangan konstan
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- X_1 = Kompetensi sumber daya manusia

- X₂ = Pemahaman akuntansi
- X₃ = Pengawasan
- e = error

Untuk menentukan validitas model, uji F dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh simultan. Kriteria signifikannya harus di bawah 0,05, untuk selanjutnya dilakukan uji t. Menurut Ghozali (2018), Pengujian t statistik dipakai dalam mengevaluasi hubungan antar variabel serta menjawab masing-masing hipotesis yang diajukan (kompetensi SDM, pemahaman akuntansi, dan pengawasan) benar-benar atau secara parsial mempengaruhi variabel Y (kualitas laporan keuangan BUMDes).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	69	31.00	45.00	37.0580	2.47270
X1	69	24.00	40.00	33.3768	3.35235
X2	69	20.00	25.00	20.8116	1.23996
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data diolah, 2023

Menurut (Ghozali, 2018), model persamaan regresi harus lulus pengujian asumsi klasik sebelum dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dipergunakan dalam pengujian normalitas, dengan asumsi bahwa dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi tiap variabel lebih besar dari 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94531029
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.155
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		1.286
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji menunjukkan bahwa signifikansi 0,073 di atas 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.855	3.457			
	X1	.182	.072	.263	.858	1.166
	X2	.756	.169	.469	.858	1.166

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Menurut (Ghozali, 2018), toleransi data > 0,10 dan VIF < 10 dapat digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Hasil pengujian memenuhi syarat lolos uji multikolinearitas, yang dalam penelitian ini sudah terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.861	1.817		.474	.637
	X1	-.038	.038	-.134	-1.016	.314
	X2	.071	.089	.105	.801	.426

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data diolah, 2023

Uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018), digunakan untuk menentukan dan membandingkan varians dan residual dari pengujian data tidak sama digunakan dalam sebuah model persamaan regresi dengan menggunakan kriteria nilai.

Hasil pengujian selanjutnya yaitu regresi linier berganda sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.855	3.457		4.297	.000
	X1	.182	.072	.263	2.523	.014
	X2	.756	.169	.469	4.487	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Persamaan yang dapat diperoleh dari hasil pengujian tersebut yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 14,855 + 0,182X_1 + 0,756X_2$$

Tabel 3. Menunjukkan nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Analisis Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618 ^a	.382	.364	1.97456

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah, 2023

Jumlah total pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 36,4%, dengan 63,6% tambahan dipengaruhi oleh komponen tambahan diluar bahasan penelitian.

Pengujian secara simultan menggunakan uji F dibawah ini.

Tabel 4. Uji Simultan (F-test)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159.223	2	79.611	20.419	.000 ^a
	Residual	257.328	66	3.899		
	Total	416.551	68			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2023

Sebagai hasil dari pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 3, nilai F hitung sebesar 20,419 dengan sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan karena variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersamaan.

Pembahasan

Menurut hasil uji t-test tentang pengaruh kompetensi SDM terhadap laporan keuangan yang berkualitas, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,182, nilai t hitung 2,523, dan nilai signifikan sebesar 0,014 < 0,05. Menurut Khoirina (2018), kompetensi SDM adalah infikator sebagai penentu dan memengaruhi kinerja karyawan di setiap perusahaan. SDM pada dasarnya adalah orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan untuk membantu mencapai tujuan mereka, berpikir, dan merencanakan (Juni, 2020). Kompetensi yang dimiliki pegawai menurut (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022) adalah hal yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan, dimana pegawai sebagai sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya/operasional perusahaan atau organisasi, lembaga yang memiliki manusia yang kompeten diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih cepat (Nyoman & Sujana, 2021). Pengaruh kompetensi SDM dilakukan oleh (Ishak & Syam, 2018) dan memberikan bukti bahwa kompetensi dapat memberikan dampak positif terhadap laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian (Nyoman & Sujana, 2021) memberikan bukti empiris bahwa kompetensi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan atau berpengaruh ke arah positif pada kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian t-test pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kabupaten Bangli diperoleh korelasi sebesar 0,756, nilai t hitung 4,487 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kabupaten Bangli. Dengan kata lain, laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes di Kabupaten Bangli semakin baik jika pengurus memahami akuntansi. Pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan memahami proses akuntansi, baik secara komputerisasi atau manual. Ketika seseorang mengenal akuntansi, mereka memiliki pemahaman tentang proses akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, yang didasarkan pada prinsip dan standar yang ditetapkan dalam SAK-ETAP (Atmadja et al., 2017). Pengurus BUMDes di Kabupaten Bangli yang lebih memahami akan lebih mampu membuat laporan keuangan yang baik karena pemahaman yang mereka miliki. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Lestari & Dewi, 2020), (Ayem & Nugroho, 2020) yang memberikan bukti secara empiris bahwa pemahaman akuntansi yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pegawai dalam perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pegawai mampu memberikan pengaruh yang positif pada kualitas laporan keuangan, sehingga H1 diterima. Pemahaman akuntansi mampu memberikan pengaruh yang positif pada kualitas laporan keuangan, sehingga H2 diterima.

Saran yang dapat diberikan yaitu: Pernyataan kompetensi sumber daya manusia terendah yaitu pemahaman pengurus terhadap peraturan PSAK ETAP dengan baik, maka disarankan BUMDes di Kabupaten Bangli untuk lebih memberikan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan kepada pengurus sebagai salah satu sumber daya manusia yang dimiliki BUMDes agar BUMDes di Kabupaten Bangli memiliki SDM dengan kompetensi yang tinggi khususnya memahami dengan baik peraturan PSAK ETAP yang berlaku. Pernyataan pemahaman akuntansi terendah yaitu pemahaman terhadap laporan keuangan dibuat sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku maka disarankan agar BUMDes di Kabupaten Bangli untuk giat memberikan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan sehingga pengurus yang bertugas menyusun laporan keuangan lebih memahami dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi

- Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 1–12.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, L. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang PP No 71 Tahun 2010, dan Komitmen Organisasi Tentang Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Zaizar, W. R. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). *JRA Tirtayasa*, 4(1), 1–21.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak terbesar terhadap penyebaran COVID-19 di seluruh dunia pada tahun 2020. Kondisi luar biasa ini berdampak pada UMKM dan koperasi, mulai dari penurunan drastis pembayaran dari mitra sampai penundaan pembayaran angsuran kredit karena omset penjualan yang semakin menurun. Upaya koperasi untuk menjemput bola dalam penagihan kredit sudah dilaksanakan, konfirmasi melalui telepon dan mendatangi rumah masing-masing debitur tidak membuahkan hasil (Munir & Indarti, 2012). Beberapa anggota memiliki bisnis yang sangat menurun, karena tidak ada konsumen yang datang dan bekerja, sehingga bisnis tidak dapat berjalan seperti biasa. Selasa (7/4), Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bali Kencana I Wayan Sudira, yang memiliki 1.839 anggota, menyatakan hal itu. Lebih dari 70% anggota mengalami dampak COVID-19, terutama di bidang perdagangan seperti toko-toko, pasar, perajin, karyawan bidang pariwisata, penyewaan kendaraan, dan tenaga kerja harian (Portonews.com, 2020).

Di Kabupaten Karangasem, tidak semua koperasi dalam kondisi baik. Ada 337 koperasi, 230 di antaranya aktif, dan 107 tidak aktif. Penelitian Analisis tingkat kesehatan lembaga keuangan koperasi dilakukan di Kecamatan Manggis karena persentase koperasi tidak aktif paling tinggi dari kecamatan yang lainnya yaitu sebesar 43% dan Sebagian besar anggota koperasi di Kecamatan Manggis Bekerja di sektor pariwisata dan implikasi terhadap pembayaran hutang koperasi mengalami hambatan akibat pandemi covid19. Di Kecamatan Manggis terdapat 37 koperasi. Sebanyak 21 koperasi masih aktif dan 16 koperasi sudah tidak aktif. Analisis tingkat kesehatan koperasi tersebut berdasarkan peraturan terbaru tentang petunjuk dan pedoman teknik penyelenggaraan pemeriksaan tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Petunjuk Teknis No. 15 Tahun 2021 yang dikeluarkan Deputi Bidang Koperasi dan UMKM yang di tetapkan pada tanggal 30 Juni 2021, sehingga penulis yang saat ini menggunakan penelitian berbasis data tahun 2021 cukup layak menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar dalam perhitungan tingkat kesehatan koperasi.

Permasalahan yang diteliti perlu dirumuskan dengan jelas agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditetapkan, yaitu: Berdasarkan petunjuk teknis Nomor 15 Tahun 2021 dari Deputi Bidang Perkoperasian, bagaimana tingkat kesehatan koperasi di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tahun 2021?

Adanya rumusan masalah, menuntut ditetapkannya tujuan yang jelas dari penelitian, yaitu: Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tahun 2021 berdasarkan petunjuk teknis nomor 15 tahun 2021 dari Deputi Bidang Perkoperasian.

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi

Menurut (Sumarsono, 2003), koperasi dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan dengan badan hukum yang diterbitkan oleh dinas koperasi dengan anggota para individu yang bersatu dalam prinsip gotong royong sebagai landasan operasionalnya, yang secara sekaligus dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Anggota koperasi bebas dipilih oleh koperasi itu sendiri, bebas keluar masuk anggota, mampu bekerjasama sebagai keluarga dalam menjalankan usaha koperasi yang nantinya hasil laba perusahaan digunakan untuk mensejahterakan pada anggota yang ada di dalamnya (Pemerintah Republik Indonesia, 1992).

Penilaian Kesehatan Koperasi

Hasil penilaian kuantitatif atas berbagai elemen yang mempengaruhi koperasi, termasuk likuiditas, profit, dan *capital* (permodalan), disebut evaluasi kesehatan koperasi (Soedarsa & Natalia, 2016). Dari elemen-elemen tersebut di atas, masing-masing diberi nilai berdasarkan seberapa besar pengaruh mereka terhadap kesehatan koperasi. Kesehatan suatu koperasi diperiksa dan diawasi berdasarkan standar yang sama menggunakan pedoman dari Deputi Bidang Perkoperasian sebagai petunjuk yang dapat diterapkan dalam menentukan tingkat kesehatan koperasi, yang mana nantinya dapat diketahui penggolongan koperasi sehat, cukup, atau tidak sehat.

Tata Kelola

Pengelolaan koperasi pada dasarnya harus meliputi prinsip kelembangaan dan manajemen, serta lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagai koperasi yang layak untuk menyelenggarakan pelayanan bidang keuangan agar tidak merugikan masyarakat luas sebagai nasabahnya. Koperasi diharuskan memiliki kerangka kerja yang jelas dengan pola yang terhubung satu sama lain meliputi peran dan aturan yang mencakup organ-organ dalam koperasi itu sendiri sehingga dapat menuntun jalannya usaha koperasi sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan koperasi tersebut (Budiyono & Maya, 2017).

Profil Risiko

Profil risiko adalah daftar risiko atau ancaman yang dapat terjadi yang dapat berdampak negatif pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, risiko harus dikelola secara efektif melalui proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, penentuan sikap, penetapan solusi, serta memonitor dan manajemen risiko, atau dikenal sebagai "manajemen risiko" (BPPKPD, 2019). Dalam penelitian ini, profil risiko paling sedikit mencakup penilaian dan manajemen risiko itu sendiri.

Kinerja Keuangan

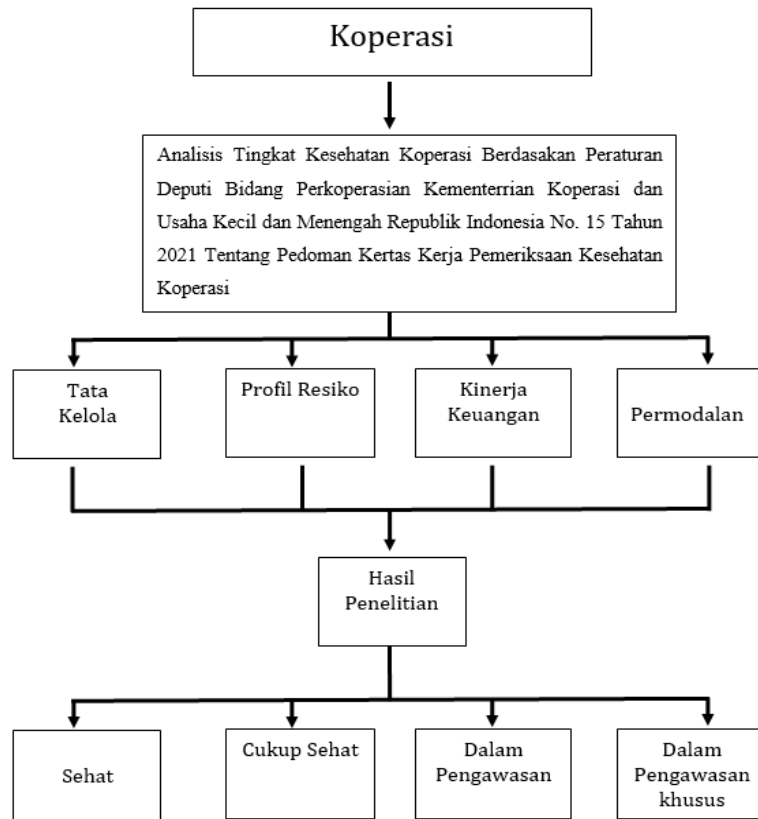
Evaluasi kinerja, manajemen, dan kesinambungan keuangan paling sedikit termasuk kondisi keuangan perusahaan beberapa periode, yang meliputi penyaluran dan penghimpunan dana dari nasabah, yang tergabung dalam beberapa rasio seperti likuiditas, profit, dan *capital* (permodalan) (Jumingan, 2006). Koperasi mendapatkan modal dari simpanan para nasabah, baik itu simpanan wajib, pokok, tabungan, simpanan berjangka, dan sukarela. Koperasi juga mendapat modal dari dana yang dicadangkan, hibah anggota, serta dari kredit dari bank umum, dan lembaga keuangan lain. Modal koperasi juga dapat berasal dari penghematan penggunaan dana operasional koperasi yang disebut modal tak langsung (Putri, 2017). Kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan merupakan komponen dari permodalan paling sedikit dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Agus Sudarsana dan Gede Adi Yuniarta (2022). Memperoleh hasil penelitian bahwa pada tahun buku 2021, tingkat kesehatan KSP pada tiga koperasi didapat skor 67,36, yang menunjukkan bahwa mereka cukup sehat. Penelitian yang dilakukan oleh Herry Goenawan Soedarsa dan Desty Natalia (2016) memperoleh hasil penelitian bahwa menurut Permenkop dan UMKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, KSP di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih banyak berpredikat cukup sehat. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Agustavia Maharani (2018) memperoleh hasil pada tahun 2017, empat unit Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bantul menerima tingkat kesehatan Cukup Sehat. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh I Gusti Putu Darya, yang menggunakan Permenkop dan UMKM RI No: 06/Per/Dep/IV/2016, ditemukan bahwa kesehatan Koperasi Abdi Masyarakat Madani masuk dalam kriteria cukup sehat dengan skor sebesar 75,55. Penelitian yang dilakukan Oleh Kristina Damayanthi Putri (2017) memperoleh hasil di tahun 2014 tingkat kesehatan KSP Wisuda Guna Raharja cukup baik. Namun, pada tahun 2015 dan 2016, kondisi kesehatan koperasi kurang baik (dalam pengawasan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang lebih banyak mendeskripsikan hasil penelitian dari fenomena yang ditemui dilapangan, dengan data berupa angka-angka disertai dengan perhitungan untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian (Syamsudin & Damaianti, 2011).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2020) beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengelolaan, manajemen risiko, kinerja keuangan, dan modal dalam meninjau kesehatan koperasi. Koperasi di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem digunakan sebagai tempat penelitian, dengan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan jumlah sampel sebanyak 15 koperasi.

Menurut (Ghozali, 2018) penelitian memerlukan model analisis untuk pengujian awal dengan model-model penyederhanaan data yang dibutuhkan agar data pada pengujian utama dapat menggunakan data yang baik dan valid. Penelitian dilakukan berdasarkan pedoman dari Menteri Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2021 yang digunakan dalam penilaian kesehatan koperasi, serta peraturan tersebut juga berisi mengenai pedoman kepada pengurus dalam memeriksa, mengawasi, dan menganalisis kesehatan koperasi digunakan dalam penelitian ini untuk teknik analisis. Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi, gunakan kertas kerja yang meliputi:

Gambar 1. Skor dan Kriteria Kesehatan Koperasi

Aspek	Bobot	Skor	Kategori Predikat
Tata Kelola	30%	$80 \leq x \leq 100$ $66 \leq x < 80$ $51 \leq x < 66$ < 51	Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Dalam Pengawasan Khusus
Profil Risiko	15%	$80 \leq x \leq 100$ $66 \leq x < 80$ $51 \leq x < 66$ < 51	Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Dalam Pengawasan Khusus
Kinerja Keuangan	40%	$80 \leq x \leq 100$ $66 \leq x < 80$ $51 \leq x < 66$ < 51	Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Dalam Pengawasan Khusus
Permodalan	15%	$80 \leq x \leq 100$ $66 \leq x < 80$ $51 \leq x < 66$ < 51	Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Dalam Pengawasan Khusus
Total skor dan predikat penilaian kesehatan	100%	$80 \leq x \leq 100$ $66 \leq x < 80$ $51 \leq x < 66$ < 51	Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Dalam Pengawasan Khusus

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penilaian Aspek Tata Kelola

Tabel 1. Hasil Penilaian Aspek Tata Kelola

NO	NAMA KOPERASI	Hasil Perhitungan	
		Skor	Predikat
1	Koperasi Jasa Bali Elsa Sejahtera	89,71	Sehat
2	Koperasi Artha Semaya	95,59	Sehat
3	Koperasi Putra Mekar Sari	92,65	Sehat
4	Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur	94,12	Sehat
5	Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri	98,53	Sehat
6	Koperasi Jasa Wahana Yatra Candidasa	86,76	Sehat
7	Koperasi Tani Mandiri Sejahtera	86,76	Sehat
8	Koperasi Konsumen Kelapa Sari Makmur	85,29	Sehat
9	Koperasi Simpan Pinjam Kencana Permai	95,59	Sehat
10	Koperasi Produksi Surabhi Buana Bakti	94,12	Sehat
11	Koperasi Simpan Pinjam Harta Wiguna	95,59	Sehat
12	Koperasi Unit Desa Sedana Murti	91,18	Sehat
13	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suka Maju	94,12	Sehat
14	Koperasi Amerta Baruna	89,71	Sehat
15	Koperasi Simpan Pinjam Sedana Murti Mandiri	91,18	Sehat
	Rata Rata	92,06	Sehat

Sumber: Data diolah, 2023

Skor masing masing koperasi dapat dilihat pada tabel diatas. Hasil skor dari masing masing koperasi kemudian dijumlah dibagi dengan banyaknya koperasi maka memperoleh skor 92,06 dengan predikat sehat.

Penilaian Aspek Profil Risiko

Tabel 2. Hasil Penilaian Aspek Profil Risiko

NO	NAMA KOPERASI	Hasil Perhitungan	
		Skor	Predikat
1	Koperasi Jasa Bali Elsa Sejahtera	95,24	Sehat
2	Koperasi Artha Semaya	88,10	Sehat
3	Koperasi Putra Mekar Sari	80,95	Sehat
4	Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur	92,86	Sehat
5	Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri	91,67	Sehat
6	Koperasi Jasa Wahana Yatra Candidasa	79,76	Cukup sehat
7	Koperasi Tani Mandiri Sejahtera	75,00	Cukup sehat
8	Koperasi Konsumen Kelapa Sari Makmur	89,90	Sehat
9	Koperasi Simpan Pinjam Kencana Permai	83,33	Sehat
10	Koperasi Produksi Surabhi Buana Bakti	76,19	Cukup Sehat
11	Koperasi Simpan Pinjam Harta Wiguna	89,29	Sehat
12	Koperasi Unit Desa Sedana Murti	85,94	Sehat
13	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suka Maju	89,29	Sehat
14	Koperasi Amerta Baruna	96,43	Sehat
15	Koperasi Simpan Pinjam Sedana Murti Mandiri	78,57	Cukup Sehat
	Rata-Rata	86,17	Sehat

Sumber : Data diolah, 2023

Skor masing masing koperasi dapat dilihat pada tabel diatas. Hasil skor dari masing masing koperasi kemudian dijumlah dibagi dengan banyaknya koperasi maka memperoleh skor 86,17 dengan predikat sehat.

Penilaian Aspek Kinerja Keuangan

Tabel 3. Hasil Penilaian Aspek Kinerja Keuangan

No	NAMA KOPERASI	Hasil Perhitungan	
		Skor	Predikat
1	Koperasi Jasa Bali Elsa Sejahtera	50,00	Dalam Pengawasan
2	Koperasi Artha Semaya	55,56	Dalam Pengawasan
3	Koperasi Putra Mekar Sari	62,50	Dalam Pengawasan
4	Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur	54,17	Dalam Pengawasan
5	Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri	51,39	Dalam Pengawasan
6	Koperasi Jasa Wahana Yatra Candidasa	63,89	Dalam Pengawasan
7	Koperasi Tani Mandiri Sejahtera	75,00	Cukup Sehat
8	Koperasi Konsumen Kelapa Sari Makmur	58,33	Dalam Pengawasan
9	Koperasi Simpan Pinjam Kencana Permai	55,56	Dalam Pengawasan
10	Koperasi Produksi Surabhi Buana Bakti	66,67	Cukup Sehat
11	Koperasi Simpan Pinjam Harta Wiguna	52,78	Dalam Pengawasan
12	Koperasi Unit Desa Sedana Murti	55,26	Dalam Pengawasan
13	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suka Maju	56,94	Dalam Pengawasan
14	Koperasi Amerta Baruna	50,00	Dalam Pengawasan Khusus
15	Koperasi Simpan Pinjam Sedana Murti Mandiri	66,67	Cukup Sehat
	Rata-Rata	58,31	Dalam Pengawasan

Sumber : Data diolah, 2023

Skor masing masing koperasi dapat dilihat pada tabel diatas. Hasil skor dari masing masing koperasi kemudian dijumlah dibagi dengan banyaknya koperasi maka memperoleh skor 58,31 dengan predikat dalam pengawasan.

Penilaian Aspek Permodalan

Tabel 4. Hasil Penilaian Aspek Permodalan

NO	NAMA KOPERASI	Hasil Perhitungan	
		Skor	Predikat
1	Koperasi Jasa Bali Elsa Sejahtera	81,25	Sehat
2	Koperasi Artha Semaya	93,75	Sehat
3	Koperasi Putra Mekar Sari	93,75	Sehat
4	Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur	100,00	Sehat
5	Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri	87,50	Sehat
6	Koperasi Jasa Wahana Yatra Candidasa	100,00	Sehat
7	Koperasi Tani Mandiri Sejahtera	81,25	Sehat
8	Koperasi Konsumen Kelapa Sari Makmur	81,25	Sehat
9	Koperasi Simpan Pinjam Kencana Permai	100,00	Sehat
10	Koperasi Produksi Surabaya Buana Bakti	87,50	Sehat
11	Koperasi Simpan Pinjam Harta Wiguna	93,75	Sehat
12	Koperasi Unit Desa Sedana Murti	83,33	Sehat
13	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suka Maju	100,00	Sehat
14	Koperasi Amerta Baruna	81,25	Sehat
15	Koperasi Simpan Pinjam Sedana Murti Mandiri	93,75	Sehat
	Rata-Rata	90,56	Sehat

Sumber : Data diolah, 2023

Skor masing masing koperasi dapat dilihat pada tabel diatas. Hasil skor dari masing masing koperasi kemudian dijumlah dibagi dengan banyaknya koperasi maka memperoleh skor 90,56 dengan predikat sehat.

Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi

Tabel 5. Hasil Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi

NO	NAMA KOPERASI	Hasil Perhitungan	
		Skor	Kriteria
1	Koperasi Jasa Bali Elsa Sejahtera	73,38	Cukup Sehat
2	Koperasi Artha Semaya	78,18	Cukup Sehat
3	Koperasi Putra Mekar Sari	79,00	Cukup Sehat
4	Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur	78,83	Cukup Sehat
5	Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri	76,99	Cukup Sehat
6	Koperasi Jasa Wahana Yatra Candidasa	78,55	Cukup Sehat
7	Koperasi Tani Mandiri Sejahtera	79,47	Cukup Sehat
8	Koperasi Konsumen Kelapa Sari Makmur	74,14	Cukup Sehat
9	Koperasi Simpan Pinjam Kencana Permai	78,40	Cukup Sehat
10	Koperasi Produksi Surabaya Buana Bakti	79,46	Cukup Sehat
11	Koperasi Simpan Pinjam Harta Wiguna	77,24	Cukup Sehat
12	Koperasi Unit Desa Sedana Murti	74,85	Cukup Sehat
13	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suka Maju	79,41	Cukup Sehat
14	Koperasi Amerta Baruna	73,56	Cukup Sehat
15	Koperasi Simpan Pinjam Sedana Murti Mandiri	79,87	Cukup Sehat
	Rata-Rata	77,42	Cukup Sehat

Sumber : Data diolah, 2023

Skor masing masing koperasi dapat dilihat pada tabel diatas. Hasil skor dari masing masing koperasi kemudian dijumlah dibagi dengan banyaknya koperasi maka memperoleh skor 77,42 dengan predikat cukup sehat.

Pembahasan

Koperasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang terdiri dari 15 koperasi yang telah dinilai tingkat kesehatannya berdasarkan pada Juknis No 15 Tahun 2021 dari Deputi Bidang Perkoperasian yang berisi pedoman pemeriksaan kesehatan koperasi. Dimana dalam

penilaian aspek tata kelola koperasi di Kecamatan Manggis tahun 2021 memperoleh skor 92,06 sehingga memperoleh predikat sehat, yang artinya koperasi sudah menjalankan usahanya dari segi tata kelola yang menyangkut tata administrasi maupun kelembagaan sudah optimal, koperasi harus dapat mempertahankannya atau meningkatkan agar lebih baik lagi. Penilaian profil risiko koperasi di Kecamatan Manggis tahun 2021 memperoleh skor 86,17 sehingga memperoleh predikat sehat, yang artinya koperasi mampu meminimalisir, menangani, dan mengendalikan bentuk-bentuk risiko yang dapat terjadi secara efektif dan efisien, koperasi harus dapat mempertahankannya atau meningkatkan agar lebih baik lagi. Penilaian Kinerja Keuangan koperasi di Kecamatan Manggis tahun 2021 memperoleh skor 58,31 sehingga memperoleh predikat dalam pengawasan karena berada pada rentang skor $51 \leq x < 66$ yang artinya koperasi belum mampu mengelola keuangan dengan optimal koperasi harus meningkatkan penghasilan SHU agar dapat memperoleh predikat lebih baik kedepannya. Dari segi Penilaian Permodalan koperasi di Kecamatan Manggis tahun 2021 memperoleh skor 90,56 sehingga memperoleh predikat sehat, yang artinya koperasi sudah optimal dalam mengelola permodalannya koperasi harus mempertahankannya atau meningkatkan agar menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil perhitungan dan penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi dari hasil akumulasi keempat aspek penilaian kemudian dikalikan dengan bobot masing masing aspek, maka diperoleh tingkat kesehatan koperasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 mendapatkan skor 77,42 sehingga memperoleh predikat cukup sehat karena berada pada rentang skor $66 \leq x < 80$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudarsana & Yuniarta, 2022), yang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP di Desa Bondalem memperoleh skor 67,36 yang tergolong dalam predikat cukup sehat. Penelitian lain yang dilakukan (Soedarsa & Natalia, 2016) menunjukkan bahwa kondisi koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat memperoleh predikat cukup sehat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Maharani, 2018) yang memperoleh tingkat kesehatan koperasi di Kecamatan Bantul pada tahun 2017 seluruhnya memperoleh predikat cukup sehat. Penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh (Darya, 2018) bahwa tingkat kesehatan Koperasi Abdi Masyarakat Madani termasuk dalam kategori cukup sehat dengan skor total 75,55.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu koperasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dari aspek tata kelola didapatkan skor 92,06 yang masuk predikat sehat, dari aspek profil risiko didapatkan skor 86,17 dengan predikat sehat, dari aspek kinerja keuangan didapatkan skor 58,31 dengan predikat pengawasan, dari aspek permodalan didapatkan skor 90,56 dengan predikat sehat, secara keseluruhan kesehatan koperasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem diperoleh skor 77,42 dengan predikat cukup sehat.

Saran yang dapat diberikan yaitu: Bagi koperasi di Kecamatan Manggis mengingat masuk dalam kategori cukup sehat pada tahun 2021, hendaknya koperasi mempertahankannya serta dimasa yang akan datang dapat memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang sehingga tingkat kesehatan koperasi lebih meningkat. Aspek yang perlu diperbaiki yaitu pada aspek kinerja keuangan dengan cara meningkatkan pendapatan dan meminimalkan biaya umum dan administrasi. Perlu ditingkatkan potensi yang dimiliki koperasi agar dapat menambah modal dan SHU dengan menambah sektor usaha riil seperti toko sembako, dan lain lain.

Daftar Pustaka

- BPPKPD. (2019). *Bimtek Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Koperasi*. Www.Bppkpd.Id. <https://www.bppkpd.id/manajemen-risiko-dalam-pengelolaan-koperasi/>
- Budiyono, T., & Maya, C. (2017). Tata Kelola koperasi di Salatiga. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 1–46.
- Darya, I. G. P. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Abdi Masyarakat Madani (Asmaba) Balikpapan dengan Menggunakan Peraturan Deputi Pengawasan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/per/Dep/IV/2016. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 2(1), 2580–2631.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP-UNDIP.
- Jumangan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan* (Cetakan Pe). Aksara.
- Maharani, A. A. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2017*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Munir, & Indarti. (2012). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam "Cendrawasih" Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Portonews.com. (2020). *Keuangan dan Portofolio Perdagangan dan Jasa Pasca Pandemi Covid 19*. Www.Portonews.Com. <https://doi.org/https://www.portonews.com/2020/keuangan-dan-portofolio/perdagangan-dan-jasa/pandemi-covid-19-ksp-bali-kencana-berharap-penanggungan-pembayaran-1-tahun>
- Putri, K. D. (2017). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan pinjam (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja, Lombok*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Soedarsa, H. G., & Natalia, D. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 23–32.

Sudarsana, K. A., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Desa Bondalem Tahun Buku 2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 728–738.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.

Syamsudin, & Damaianti. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Remaja Rosdakarya.

Namun pada kenyataannya tidak semua LPD mampu memiliki kinerja tersebut, seperti yang dikutip dari (radarbali.id, 2021), di Kabupaten Gianyar terdapat sekitar 22 LPD dalam kondisi bermasalah atau sakit. Rinciannya, sebanyak 17 LPD sudah tidak beroperasi dan terdata 5 sisanya yang diketahui masih mampu melakukan kegiatan operasi seperti biasanya, namun tanpa melakukan proses pelaporan ke pihak LPLPD Kab. Gianyar. Salah satunya terjadi pada LPD di Kecamatan Tampaksiring yakni LPD Belusung dan LPD Kulub. Menurut Wiriana selaku ketua LPLPD Gianyar, masalah yang dialami LPD terjadi akibat adanya permasalahan internal seperti hubungan yang tidak harmonis antara pengawas dengan pengurus LPD hingga terjadinya miskomunikasi. Selain itu, terdapat permasalahan eksternal seperti nasabah yang tak mampu membayar kredit. Berdasarkan data LPLPD Kabupaten Gianyar selama tiga tahun terakhir, total laba bersih dan persentasi ROA LPD se-Kecamatan Tampaksiring mengalami penurunan secara berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 1. Total Laba Bersih Tahun 2020-2022

Tahun	Total Laba Bersih
2020	1.936.400
2021	1.729.682
2022	1.124.651

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel 1 memperlihatkan angka penurunan dari total laba bersih LPD se-Kecamatan Tampaksiring. Adapun persentasi ROA juga menurun, dimana pada tahun 2020 persentasi ROA yang diperoleh sebesar 0,70% kemudian pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,66% hingga pada tahun 2022 menjadi 0,40%. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja LPD menjadi kurang baik dikarenakan aspek *earning* yang menurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak LPD yang diketahui berada dalam kondisi yang tengah mengalami penurunan pada hasil perolehan labanya dengan berlangsung secara berturut-turut yang terjadi dalam kurun waktu selama 3 tahun yang ada terakhir ini, maka dalam hal ini pihaknya mengkonfirmasi bahwa telah terjadi penurunan laba pada LPD masing-masing yang dominan disebabkan oleh kredit macet sejak pandemi covid 19 muncul.

Berhasil diketahui bahwa yang menjadi salah satu faktor yang mampu memunculkan pengaruh pada tingkat kinerja LPD ialah berupa *good corporate governance* (GCG). Dalam melakukan pelaksanaan GCG yang dilakukan dengan cara-cara yang secara konsisten, maka akan mampu memperkuat posisi dari daya saing, dimana akan mampu adanya pengelolaan

sumber daya dan juga risiko yang berubah menjadi lebih secara efisien dan juga lebih secara efektif, serta akan mampu mengoptimalkan nilai-nilai yang dihasilkan oleh LPD yang secara akhirnya akan mampu meningkatkan rasa percaya atau rasa yakin dari para pihak *stakeholder*, sehingga secara otomatis pihak LPD dalam melakukan kegiatan operasionalnya dengan lancar dan juga mampu tumbuh dengan secara berkesinambungan.

Selain itu, maka berhasil diketahui telah berhasil adanya faktor lain yang juga mampu memunculkan pengaruh pada tingkat kinerja LPD ialah berupa kompetensi SDM. SDM diketahui telah memberikan perannya yang begitu esensial yang ada pada tiap-tiap kegiatan yang ada di dalam atau di luar perusahaan, dimana walaupun telah adanya tunjangan atau dukungan dari ketersediaan sarana dan juga prasarana serta adanya sumber dana yang nilainya berlebihan, namun pada saat tanpa mampu adanya tunjangan atau dukungan yang baik dari SDM yang secara kompeten atau memadai, maka secara umum biasanya apa yang telah menjadi harapan atau tujuan perusahaan akan menemukan kesulitan untuk diraih.

Dikarenakan diketahui pada perolehan hasil kegiatan riset yang ada pada terdahulu ditemukan hasil yang berlainan, maka dalam hal ini pihak peneliti melakukan proses penambahan pemakaian variabel moderasi budaya organisasi. Diketahui bahwa budaya organisasi akan mampu memberikan dukungan pada tingkat keberhasilan atas pengimplementasian prinsip-prinsip GCG yang pastinya mampu menumbuhkan atau meningkatkan kontribusi yang ada pada tiap-tiap anggota organisasi guna diimplementasikan. Begitu juga kompetensi SDM, yang dimana dengan mampu adanya budaya organisasi yang memberikan pengaruh pada para anggotanya dengan secara baik, maka akan mampu dipakai dalam mengarahkan SDM guna meraih tingkat kinerja organisasi yang hasilnya optimal.

Mengacu pada munculnya fenomena yang telah berhasil diberikan penjelasan, maka dalam kesempatan ini pihak peneliti begitu sangat tertarik menyelenggarakan kegiatan penelitian dengan judul yang diangkat ialah **“Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Tampaksiring“**.

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan riset ini sebagai berikut, ialah:

1. Guna dipakai dalam mengetahui pengaruh apa yang mampu dimunculkan oleh *GCG* pada Kinerja LPD yang ada di daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring.

tiap-tiap organisasi dalam hal ini akan selalu menginginkan budaya organisasi yang mampu secara baik sebab dalam hal ini akan adanya hubungan kaitannya dengan tingkat keberhasilan organisasi yang akan diraih (Dahlan & Madjodjo, 2020).

Budaya organisasi yang dinilai secara baik, maka akan mampu dipakai sebagai acuan atau mampu mendukung tingkat keberhasilan atas pengaplikasian prinsip-prinsip yang ada di GCG yang pastinya mampu dipakai dalam membutuhkan kontribusi dari tiap-tiap anggota organisasi guna akan mampu diterapkannya. Kegiatan riset yang berhasil digelar oleh Anugerah (2019), maka diketahui memberikan hasil bahwa budaya organisasi berhasil memperkuat pengaruh *good governance* pada kinerja organisasi.

Diketahui bahwa kinerja yang ada pada suatu organisasi dalam hal ini begitu sangat ditentukan oleh SDM yang ada membantu di dalamnya, dimana SDM yang baik juga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang menjadi pedoman dalam membentuk sikap serta perilaku para anggota organisasi. Penelitian oleh Suryanto dkk. (2017) menyatakan nilai-nilai organisasi (budaya organisasi) berhasil diketahui memperkuat pengaruh yang dimunculkan oleh kompetensi pegawai pada kinerja organisasi.

H3: Budaya organisasi mampu memperkuat hubungan GCG pada kinerja LPD.

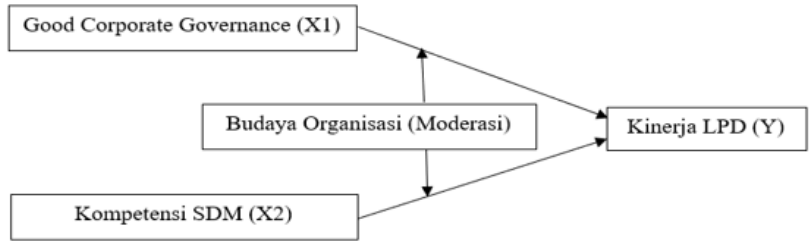
H4: Budaya organisasi mampu memperkuat hubungan kompetensi SDM pada kinerja LPD.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini memakai jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang mendukung kegiatan riset ini ialah semua karyawan yang terdata berkerja secara aktif di LPD yang ada di daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring dengan data yang memperlihatkan 182 orang dari 34 jumlah LPD yang masih aktif melakukan kegiatan operasionalnya. Kegiatan ini memakai teknik pengambilan sampel berupa teknik *purposive sampling* dengan adanya kriteria yang dipakai acuan ialah para karyawan yang dinilai mempunyai aspek pengetahuan yang ada hubungannya secara langsung dengan kegiatan manajemen LPD baik yang menyangkut aspek keuangan dan juga aspek non keuangan seperti pihak ketua LPD, pihak bendahara dan juga pihak ketua badan pengawas internal.

Mengacu pada kriteria dipakai tersebut, maka diketahui tiap-tiap LPD akan diwakili oleh 3 orang sebagai responden, sehingga berhasil diperoleh jumlah sampel dengan data yang memperlihatkan 102 orang. Adapun teknik analisis yang membantu kegiatan ialah memakai

Partial Least Squares (PLS) yang mencakup dari *outer model* dan juga *inner model*. Berikut tampak pada Gambar 1 kerangka berpikir yang dihasilkan oleh kegiatan riset ini.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah, 2023

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil melakukan perhitungan nilai *outer loading* yang terjadi sebelum eksekusi yang telah memperlihatkan ditemukannya tampak beberapa jumlah indikator yang hasilnya berada dibawah angka 0,60 sehingga wajib dilakukan proses untuk dikeluarkann dari model. Adapun indikator yang dikeluarkan tersebut mencakup ialah X1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, dan juga 1.15 yang ditemukan pada GCG, X2.3 yang ditemukan pada kompetensi SDM, M1.4 yang ditemukan pada budaya organisasi, serta Y1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, dan 1.10 yang ditemukan pada kinerja LPD. Dengan begitu tampak hasilnya pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Outer Loading Setelah Eksekusi

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Good Corporate Governance (X1)	X1.2	0,645
	X1.8	0,715
	X1.9	0,718
	X1.10	0,704
	X1.11	0,665
	X1.12	0,685
	X1.13	0,779
	X1.14	0,764
Kompetensi SDM (X2)	X2.1	0,731
	X2.2	0,711
	X2.4	0,766
	X2.5	0,745
	X2.6	0,752
	Budaya Organisasi (Mod)	M1.1
M1.2		0,840
M1.3		0,782
M1.5		0,769
M1.6		0,633
Kinerja LPD (Y)		Y1.2
	Y1.3	0,780
	Y1.4	0,836
	X1*M	0,971
X2*M	0,920	

Sumber: Data diolah, 2023

Berladasakan pada data Tabel 2, maka berhasil memperlihatkan bahwa tampak seluruh indikator telah dinilai memenuhi apa yang menjadi syarat valid dengan mengacu pada kriteria *convergent validity* ialah perolehan nilai *outer loading* yang hasilnya tampak mencapai diatas angka 0,60 dan juga dengan hasil signifikan yang secara statistik.

Tabel 3. Uji Discriminant Validity

Variabel	AVE	√AVE	GCG	KSDM	BO	GCG*BO	KSDM*BO
GCG	0,505	0,711					
KSDM	0,550	0,742	0,615				
BO	0,572	0,757	0,560	0,682			
GCG*BO	1,000	1,000	0,157	0,300	0,273		
KSDM*BO	1,000	1,000	0,317	0,386	0,249	0,514	
KLPD	0,682	0,826	0,549	0,586	0,771	0,221	0,181

Sumber : Data diolah, 2023

- GCG : *Good Corporate Governance*
- KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- BO : Budaya Organisasi
- GCG*BO : Interaksi *good corporate governance* dengan budaya organisasi
- KSDM*BO : Interaksi kompetensi sumber daya manusia dengan budaya organisasi
- KLPD : Kinerja LPD

Berladasakan pada data Tabel 2, maka berhasil memperlihatkan bahwa tampak nilai AVE untuk semua konstruk yang berada dengan hasil angka yang mencapai > 0,50 dan juga adanya perolehan hasil nilai √AVE yang tiap-tiap konstruk berada dikisaran antara angka 0,711 s.d angka 1,000 yang diketahui lebih besar dari nilai korelasi yang besarnya berada antara angka 0,157 s.d angka 0,771. Dengan begitu, maka hasil ini berhasil memenuhi syarat valid dengan memakai acuan kriteria *discriminant validity*.

Tabel 4. Uji Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
<i>Good corporate governance</i>	0,860	0,891
Kompetensi SDM	0,797	0,859
Budaya organisasi	0,811	0,869
GCG*budaya organiasi	1,000	1,000
²¹ Kompetensi SDM*budaya organisasi	1,000	1,000
Kinerja LPD	0,767	0,865

Sumber: Data diolah, 2023

pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada kinerja yang ada di LPD daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring. Dengan demikian, maka dalam kegiatan riset ini hipotesis pertama berhasil dibuktikan dengan keputusan diterima. Melakukan penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan pada LPD mampu akan memberikan manfaat yang begitu sangat berharga yang dimana akan memberikan dukungan dalam pengelolaan yang arahnya akan menuju pada pertumbuhan atau peningkatan yang terjadi pada kinerja LPD yang dilakukan melalui terbentuknya pola kerja manajemen yang secara bersih atau bebas dari hal yang dinilai negatif, mampu akan terjadinya peningkatan efisiensi LPD dan pada saat melakukan proses pengambilan keputusan akan mampu dilakukan dengan secara tepat serta juga terwujudnya nilai-nilai tambah bagi semua kalangan pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini (*stakeholder*). Nilai tambah yang disebutkan oleh GCG itu akan mampu dipakai dalam memberikan perlindungan yang secara efektif pada para nasabah LPD dalam mendapatkan kembali hasil investasinya dengan secara wajar dan memiliki nilai yang tinggi.

Mengacu pada hasil melakukan proses pengujian mengenai pengaruh yang diberikan oleh kompetensi SDM pada kinerja LPD, maka berhasil memperoleh hasil bahwa kompetensi SDM memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada kinerja yang ada di LPD daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring. Dengan demikian, maka dalam kegiatan riset ini hipotesis kedua berhasil dibuktikan dengan keputusan diterima. Sebuah LPD wajib mempunyai SDM yang memadai dan juga kompeten, guna dipakai dalam memberikan hasil yang selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan juga sasaran LPD yang sebelumnya telah dilakukan penetapan. Pada saat mempunyai mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan yang dinilai memadai serta mampu menunjukkan sikap yang secara profesional, maka aspek ini semua dinilai sebagai pondasi kuat guna dipakai dalam memberikan hasil SDM yang secara yang kompeten, sehingga apa yang diinginkan untuk dicapai oleh LPD mampu akan diraihinya. Adanya kemampuan mengelola keuangan, komunikasi dalam menarik nasabah dan etika yang sopan dalam bekerja tentunya akan mendorong keberhasilan LPD dalam bentuk kinerja yang baik.

Mengacu pada hasil melakukan proses pengujian mengenai pengaruh yang diberikan oleh adanya interaksi yang terjadi diantara GCG dengan budaya organisasi pada kinerja LPD, maka berhasil memperoleh hasil bahwa GCG yang telah dimoderasi oleh budaya organisasi memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada kinerja yang ada di LPD daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring. Dengan demikian,

maka dalam kegiatan riset ini hipotesis ketiga berhasil dibuktikan dengan keputusan diterima. Implementasi GCG yang dilakukan di kegiatan perusahaan mampu berjalan dengan lancar dan juga memberikan keberhasilan pada saat adanya dukungan atau dorongan dari internalisasi budaya organisasi yang mampu secara baik. Diiketahui bahwa tanpa adanya budaya organisasi yang secara kuat dan juga dijalankan dengan cara-cara yang secara konsisten, maka penerapan dari GCG akan menemukan adanya kesulitan bahkan bisa saja mengalami hasil yang gagal. Budaya organisasi dinilai sebagai inti dari GCG yang dianggap menjadi penentu atau juga determinan dari tata kelola perusahaan yang secara baik, mampu akan terbentuk dan juga berkembangnya manajemen yang secara profesional, mampu secara kuatnya komitmen tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh organisasi pada lingkungannya dan juga mampu menumbuhkan semangat guna dipakai dalam menjaga keunggulan sebuah organisasi.

Mengacu pada hasil melakukan proses pengujian mengenai pengaruh yang diberikan oleh adanya interaksi yang terjadi diantara kompetensi SDM dengan budaya organisasi pada kinerja LPD, menunjukkan kompetensi SDM yang dimoderasi budaya organisasi memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada kinerja yang ada di LPD daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring. Dengan demikian, maka dalam kegiatan riset ini hipotesis keempat berhasil dibuktikan dengan keputusan diterima. Diketahui bahwa budaya organisasi dalam hal ini hendaknya dianggap menjadi perekat yang terjadi diantara pihak para pimpinan, pihak para karyawan dan juga organisasi, yang berhasil terbentuk dengan cara lewat keadaan atau kondisi pekerjaan, jalinan hubungan interpersonal dan juga adanya rasa yakin yang dalam hal ini dirasakan oleh semua anggota organisasi, sehingga memiliki identitas secara tersendiri. Budaya organisasi menjadi pembentuk karakter karyawan dan perilaku karyawan yang di tanamkan organisasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan pada perolehan hasil analisis data dan juga merujuk pada pembahasan, maka mampu dalam hal ini disimpulkan secara akhir sebagai berikut:

- 1. GCG memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada kinerja yang ada di LPD daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring. Pada kondisi yang semakin baiknya penerapan GCG, maka secara otomatis mampu menyebabkan kinerja LPD yang akan mengalami perubahan untuk semakin baik.

- 2. Kompetensi SDM memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada kinerja yang ada di LPD daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring. Pada kondisi yang semakin tingginya kompetensi SDM yang dimiliki oleh pengurusnya, maka kinerja LPD pun akan ikut meningkat.
- 3. GCG yang telah dimoderasi oleh budaya organisasi memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada kinerja yang ada di LPD daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring. Hasil ini memberikan makna bahwa budaya organisasi telah dinilai mampu memperkuat hubungan GCG pada kinerja LPD. Dalam penelitian ini budaya organisasi tergolong kedalam *quasi* moderator (moderator semu), dimana variabel budaya organisasi berhubungan signifikan dengan kinerja LPD serta berinteraksi signifikan juga terhadap variabel GCG.
- 4. Kompetensi SDM yang telah dimoderasi oleh budaya organisasi memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada kinerja yang ada di LPD daerah kawasan se-Kecamatan Tampaksiring. Hasil ini memberikan makna bahwa budaya organisasi telah dinilai mampu memperkuat hubungan kompetensi SDM pada kinerja LPD. Dalam penelitian ini budaya organisasi tergolong kedalam *quasi* moderator (moderator semu), dimana variabel budaya organisasi berhubungan signifikan dengan kinerja LPD serta berinteraksi signifikan juga terhadap variabel kompetensi SDM.

Mengacu pada perolehan hasil melakukan kegiatan riset ini, maka mampu untuk diberikan saran, ialah:

- 1. Bagi LPD se-Kecamatan Tampaksiring agar tetap mempertahankan bahkan meningkatkan penerapan GCG, budaya organisasi yang baik dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya agar apa yang menjadi tujuan LPD dapat dicapai melalui peningkatan kinerja LPD.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan saat proses penyebaran kuesioner agar mendampingi tiap responden dalam mengisi kuesioner sehingga data yang diperoleh benar-benar berasal dari sampel yang dituju.

DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, R.P. 2019. Pengaruh Good Governance, Desentralisasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Pekbis Jurnal*, 11(3): 179–188.

pengetahuan untuk melaporkan pajak secara akurat, berdasarkan penghasilan dan kekayaannya, serta sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga tidak mengambil keuntungan. celah. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang secara paksa berdasarkan Undang-undang, orang pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya keperluan negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Barang Kena Pajak diklasifikasikan sebagai berikut, sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021:

1. a. Orang pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
2. Korporasi, perseroan terbatas, perseroan lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi, lembaga, dan kelompok orang dan/atau modal lainnya merupakan contoh entitas. Setiap lembaga, badan, dan lain-lain, milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan suatu usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan, adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, apapun nama sah atau susunan organisasinya. . Istilah "asosiasi" cukup luas untuk mencakup pengelompokan orang-orang yang memiliki tujuan atau nilai yang sama.
3. Lokasi tetap suatu perusahaan dianggap sebagai entitas kena pajak sebagaimana halnya korporasi.

Penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 meliputi setiap peningkatan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Ada dua jenis individu yang mengajukan pajak: penduduk Amerika Serikat dan penduduk negara lain. Segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia atau di luar negeri harus dilaporkan dan dikenakan pajak dengan tarif umum (tarif yang ditentukan dalam pasal 17 UU PPh) dan SPT harus disampaikan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Sedangkan bagi warga negara non-Indonesia tidak wajib menyampaikan SPT dan dikenakan pajak atas penghasilannya di seluruh dunia dengan tarif yang sepadan (tarif UU Pajak Penghasilan pasal 26) atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia.

1. Afrizal Izzaki B.M, Suparna Wijaya (2017)
Temuan penelitian bertajuk Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak Melalui Hibah mengungkapkan bahwa wajib pajak memanfaatkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 UU Pajak Penghasilan dengan memanfaatkan jenis hibah yang bukan merupakan objek pajak. . untuk menghindari pembayaran pajak.
2. Suparna Wijaya, Aditya Setiawan (2021)
Hasil penelitian bertajuk Potensi Penghindaran Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan ketentuan bagi wajib pajak akibat diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 menggantikan PP 46 Tahun 2013. Beberapa modifikasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Misalnya saja CV dan perusahaan yang dikecualikan dalam penerapan PP 23 Tahun 2018, namun tidak bagi wajib pajak badan berupa PT yang memberikan jasa terkait pekerjaan bebas. Untuk memanfaatkan tarif lebih rendah yang diberikan PP 23 Tahun 2018, wajib pajak yang akan membentuk badan usaha dapat memilih untuk berbentuk PT dibandingkan CV atau firma..
3. Fauzan Zaki (2019)
Temuan penelitian bertajuk Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak yang Dilakukan Perusahaan Berdasarkan Undang-undang Perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan Penghindaran Pajak yang dilakukan manajemen perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak jarang wajib pajak atau dunia usaha memanfaatkan celah hukum. Hal ini terjadi karena wajib pajak mampu memanfaatkan celah hukum untuk menurunkan kewajiban perpajakannya. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan menghadapi pengenaan sanksi penghindaran pajak dan potensi rusaknya reputasi mereknya. Sayangnya, tidak semua anggota dewan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Akibatnya, perusahaan tidak dapat berfungsi secara normal atau sebagaimana mestinya.
4. Rifaldi Josua Muaja, Jullie Sondakh, & Steven Tangkuman (2015)

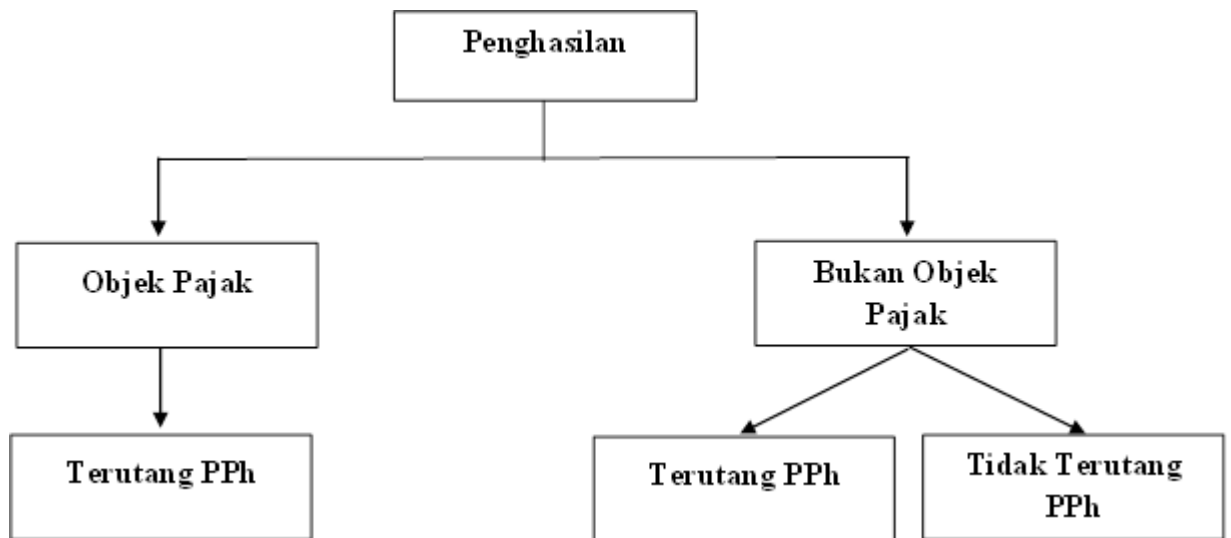
Hasil penelitian yang bertajuk Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Bagi Wajib Pajak Badan Pada PT. Elsadai Servo Cons menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan perencanaan pajak melalui dua strategi yaitu memberikan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta memberikan tunjangan natura. Jika PT. Elsadai Servo Cons serius dalam menyederhanakan pembayaran pajak penghasilannya, harus menerapkan perencanaan pajak. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan bagaimana menerapkan perencanaan pajak.

5. Mauliana Julianti (2019)

Hasil penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan menunjukkan bahwa upaya perusahaan dalam mengurangi tagihan pajaknya kurang terorganisir dan tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan mendeskripsikan makna data atau fenomena yang ditemukan (Megawani dkk, 2018).



Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran

Penelitian perpustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini. Menurut Megawani dkk. (2018), tinjauan pustaka adalah suatu pendekatan untuk mempelajari dan mendiskusikan suatu topik dengan mengumpulkan informasi dari berbagai bahan pustaka (referensi). Tinjauan literatur menghasilkan informasi yang dikumpulkan oleh

para ahli yang berpengalaman luas di bidangnya untuk menambahkan konteks pada perdebatan yang ada. Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk tinjauan literatur :

- a. Memepelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan dan mendukung pada masalah yang sedang diteliti.
- b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu berupaya memberikan gambaran keadaan objek melalui pengumpulan data, kategorisasi, analisis, dan interpretasi guna menarik kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan dan memajukan tujuan penelitian (Fiqram & Lina, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengenaan Pajak Atas Bantuan atau Sumbangan

Menerima bantuan atau sumbangan merupakan salah satu bentuk pemberian kepada orang lain, demikian pula pemberian bantuan atau sumbangan merupakan bentuk pemberian kepada diri sendiri. Pajak Penghasilan (PPh) wajib dibayar oleh penerima jika menerima segala bentuk bantuan atau sumbangan yang termasuk dalam objek pajak. Apabila PT A merupakan produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B, maka bantuan atau sumbangan PT A kepada PT B akan dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila PT A menerima sumbangan bahan baku dari PT B, maka sumbangan bahan baku tersebut dianggap sebagai Barang Kena Pajak. Karena ada hubungan komersial antara kedua organisasi, bantuan atau sumbangan apa pun akan dikenakan pajak.

Ketentuan Pajak Penghasilan atas Bantuan atau Sumbangan bagi Pihak Penerima

Sepanjang bantuan atau sumbangan tersebut tidak diterima dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka tidak termasuk objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1. Semua zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah, dan semua zakat yang diterima oleh penerima zakat yang berhak menerima zakat, serta semua sumbangan keagamaan yang diwajibkan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, dan semua sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah, harus diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang kami maksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undang.

Bisa jadi ada hubungan bisnis antara pemberi dan penerima; Misalnya, PT A dapat menjadi produsen suatu golongan barang tertentu yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Sumbangan bahan baku yang diberikan PT B kepada PT A merupakan objek pajak yang diterima PT A.

Ketentuan Pajak Penghasilan atas Bantuan atau Sumbangan bagi Pihak yang Memberi

Penerima bantuan keuangan atau sumbangan amal akan dikenakan pajak penghasilan atas setiap keuntungan yang timbul akibat pengalihan harta. Apabila pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan, maka keuntungannya adalah selisih antara harga pasar dan sisa nilai buku fiskal; jika tidak, itu adalah harga perolehan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), agar pihak pemberi bantuan atau sumbangan dapat dikecualikan dari Objek Pajak, maka harus dipenuhi dua syarat berikut:

1. Diakui oleh organisasi dan perseorangan yang berdasarkan atau diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), seperti lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, badan sosial (seperti yayasan dan koperasi), dan swasta. individu yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
2. Jika tidak ada keterkaitan antar pihak dalam hal bisnis, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.

Keluarga Sedarah Dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua kandung dan anak kandung.

Badan Keagamaan

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan, termasuk dalam kaitannya dengan Bantuan Zakat atau Sumbangan Keagamaan, yang dimaksud dengan “badan keagamaan” adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan dengan mengawasi bangunan utama keagamaan dan/atau melakukan kegiatan di bidang keagamaan. Karena bersifat wajib maka tidak dikenakan pajak penghasilan.

Badan Pendidikan

Badan pendidikan sebagaimana dimaksud adalah badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pendidikan.

Badan Sosial Termasuk Yayasan

Badan sosial termasuk yayasan sebagaimana dimaksud adalah yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:

- 1. Pemeliharaan kesehatan
- 2. Pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo
- 3. Pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat
- 4. Santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya
- 5. Pemberian beasiswa
- 6. Pelestarian lingkungan hidup

Koperasi

Koperasi sebagaimana dimaksud adalah badan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan di bidang perkoperasian.

4.1.3.6. Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil

Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud adalah orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2. Memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Hubungan Usaha

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020) mendefinisikan hubungan usaha sebagai hubungan yang berkembang sebagai hasil pertukaran nilai yang wajar antara pihak-pihak yang terlibat.

Hubungan Pekerjaan

Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan merupakan hubungan yang terjadi apabila terdapat hubungan berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara Pihak pemberi dan Pihak penerima.

Hubungan Kepemilikan

Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan merupakan hubungan yang terjadi apabila terdapat penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung antara Pihak pemberi dan Pihak penerima.

Hubungan Penguasaan

Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan penguasaan merupakan hubungan yang terjadi apabila terdapat penguasaan secara langsung atau tidak langsung antara Pihak pemberi dan Pihak penerima.

Potensi Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak atas Bantuan atau Sumbangan

Tuan E karyawan PT V menerima Rp. 5.000.000,00 bantuan dari PT V sebagai contoh pengobatan bantuan atau sumbangan. Karena hubungan kerjanya dengan PT V, Tuan E wajib melaporkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 bantuan tunai yang diterimanya sebagai bagian dari penghasilan kena pajak.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) D, suatu badan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUD Ayat 2, menghibahkan mobil kepada Panti Asuhan W, suatu badan sosial termasuk yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 UUD, dengan pasar harga Rp150.000.000,00 dan sisa nilai buku fiskal sebesar Rp100.000.000,00. Sesuai maksud Pasal 4(4), LAZ D dan Panti Asuhan W berbagi kepentingan pengendali satu sama lain.” Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU Pajak Penghasilan tidak dipenuhi oleh tambahan data bantuan LAZ D. LAZ D tidak mampu mengurangi nilai mobil yang diterimanya sebagai bantuan dari penghasilan kena pajaknya. Meskipun terdapat hubungan kepemilikan antara LAZ D dan Panti Asuhan W, namun LAZ D tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Rp. 150.000.000,00 - Rp. 100.000.000,00) keuntungan pengalihan harta karena baik LAZ D maupun Panti Asuhan W memenuhi syarat berdasarkan Pasal 5 sebagai badan keagamaan dan badan sosial termasuk yayasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan atas bantuan atau sumbangan dapat dikecualikan dari objek pajak jika pemberi atau penerimanya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
2. Badan keagamaan
3. Badan pendidikan
4. Badan sosial termasuk yayasan
5. Koperasi
6. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil

Jika penghasilan atas bantuan atau sumbangan yang diterima atau diberikan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka penghasilan yang awalnya dikecualikan dari objek pajak, maka dikatakan sebagai objek pajak penghasilan. Adapun syarat-syarat lainnya yang menyatakan penghasilan atas bantuan atau sumbangan dapat di kecualikan dari objek pajak yaitu sepanjang:

1. Tidak ada hubungan dengan usaha
2. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan
3. Tidak ada hubungan dengan kepemilikan
4. Tidak ada hubungan dengan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sekalipun terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima, penghasilan atau keuntungan dari bantuan atau sumbangan tersebut tetap dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan jika penerimanya adalah badan keagamaan, pendidikan, atau sosial, termasuk yayasan.

Peneliti dapat memberikan rekomendasi khusus kepada pemerintah berdasarkan temuan penelitian ini, antara lain: meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan; perbaikan mekanisme pengawasan terhadap tindakan Wajib Pajak yang berpotensi melakukan penghindaran pajak; dan meminimalisir potensi penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yaitu penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak. Dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak khususnya sumbangan dan bantuan agar wajib pajak sadar bahwa penghasilan yang diterimanya dari sumber tersebut masih dapat dikenakan pajak.

Daftar Pustaka

- Afrizal Izzaki, & Suparna Wijaya. 2017. *Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Hibah*. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Faisal Ahmad Chotib. 2018. *Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Berupa Bantuan Atau Sumbangan Dan Hibah*. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Fauzan Zaki. 2019. *Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia*. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi
- Mauliana Julianti. 2019. *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan*. *Skripsi Akuntansi*
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020) Tentang Bantuan Atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- Rachel Yolanda Pratiwi. 2022. *Teori-Teori Pemungutan Pajak*.
<https://www.pajak.com/pajak/teori-teori-pemungutan-pajak/#:~:text=Teori%20Daya%20>

20Pikul%20atau%20Gaya,tepat%20seseseorang%20yang%20berbeda%2Dbeda. (diakses pada 30 Mei 2023).

Rifaldi Josua Muaja, Jullie Sondakh & Steven Tangkuman. 2015. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Elsdai Servo Cons.* E-Jurnal Akuntansi.

Suparna Wijaya, & Aditya Setiawan. 2021. *Potensi Tax Avoidance terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas.* E-Jurnal Akuntansi.

Suwadi, Ak, M.M. 2014. *Mencermati Ketentuan Bantuan Atau Sumbangan Dan Hibah Dalam Undang-Undang PPh.* <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/mencermati-ketentuan-bantuan-atau-sumbangan-dan-hibah-dalam-undang-undang-pph-021413>. (diakses pada 12 Agustus 2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Edisi Perubahan.

**Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Kepuasan Penggunaan
Financial Teknologi (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending Di Denpasar**

**Ni Luh Putu Eka Anatasia⁽¹⁾
Ni Ketut Muliati⁽²⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: ekanatasia340@gmail.com

ABSTRACT

Fintech, short for financial technology, is an industry that combines information technology with financial services to provide innovation in financial management and services, changing traditional ways of carrying out transactions, investments, loans and payments. Technical regulations from Bank Indonesia and Financial Services Authority, such as OJK Regulation number 77/POJK.01/2016 and Bank of Indonesia Regulation number 19/12/PBI/2017, regulates fintech to facilitate healthy industry growth while protecting consumers and the stability of financial system. The research goals is to determinate influence of perceived convenience and security on satisfaction with the use of Fintech (financial technology) Peer To Peer (P2P) Lending in Denpasar. The population for research is all (P2P) Lending users in the city of Denpasar in 2022 totaling 164,896. Samples is 100 corespondend and use Slovin formula and tested with multiple linear regresion analysis techniques. Based on research, the conclusion is ease and security of using the P2P Lending application has positive significant influence on user satisfaction. Therefore, it is recommended that P2P Lending application developers continue for pay attention and improve the ease and security of transactions for users. In addition, future research could involve other variables to further enrich understanding of the factors that influence user satisfaction, as well as conduct testing on different applications to gain a broader perspective.

Keywords: Perception of Convenience, Security, Satisfaction, Financial Technology

PENDAHULUAN

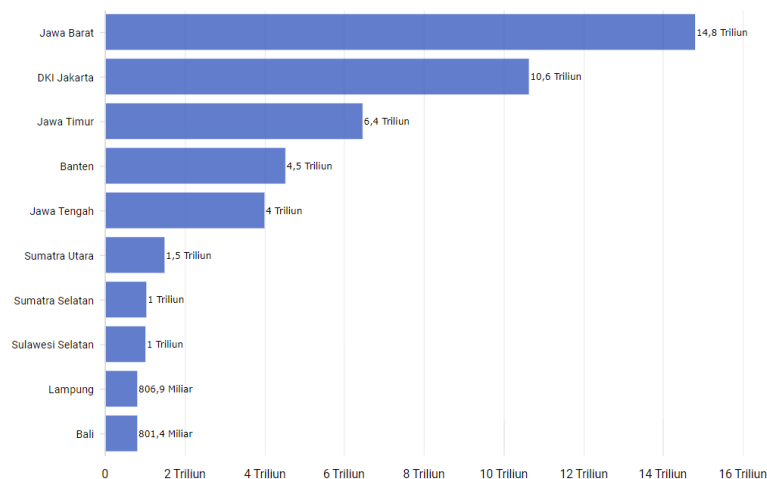
Pertumbuhan layanan perbankan daring terus bertumbuh seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi. Inovasi dari produk dan juga teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sektor perbankan, memungkinkan dengan adanya peningkatan kualitas layanan dengan kecepatan, keunggulan, dan efisiensi yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, salah satunya yang relevan adalah fasilitas pembiayaan teknologi, yang memudahkan pelanggan dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan melalui teknologi.

Zaman digital saat ini menantang kita untuk melihat peluang di baliknya, karena memberikan keleluasaan dan kegunaan yang lebih dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sektor yang mengalami transformasi besar adalah sektor keuangan, dengan munculnya teknologi finansial atau fintech. Pertumbuhan fintech yang pesat membutuhkan regulasi hukum untuk mengelola industri ini dan melindungi pengguna. Bertumbuhnya service dari financial technology,

terutama dalam hal peer to peer lending atau yang lebih dikenal dengan nama pinjaman secara online, dapat membawa manfaat seperti kemudahan pada saat mendapatkan pinjaman dana dengan instan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai masalah baru. Keluhan tentang tindakan intimidatif, fintech tidak resmi, pelecehan, penyelewengan data private debitur, dan kejahatan lainnya semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada konsumen.

Pemahaman tentang kemudahan bermain peran penting dalam membentuk Kepuasan penggunaan Financial Technology (Fintech) Peer-To-Peer (P2P) Lending. Fasilitas akses dan penggunaan platform P2P lending bisa menjadi dorongan bagi individu untuk mengadopsi teknologi ini. Konsep kemudahan meliputi elemen-elemen seperti antarmuka pengguna yang simpel, proses pendaftaran pinjaman yang lancar, dan ketersediaan informasi yang jelas. Dengan peningkatan kemudahan yang dirasakan, diharapkan penerimaan pengguna terhadap Fintech P2P Lending akan meningkat. Keamanan menjadi aspek krusial dalam Fintech P2P Lending, terutama bagi individu dan pengusaha. Perlindungan data, transparansi transaksi, dan pencegahan kejahatan keuangan daring menjadi kunci untuk membangun kepercayaan. Dengan tingkat keamanan yang tinggi, platform P2P lending dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keyakinan dalam solusi pendanaan ini.

Gambar 1. Data Pinjaman Online Nasiona



Sumber : Databoks, 2023

Pada bulan Agustus 2023, Bali menempati posisi ke-10 dalam jumlah utang pinjaman daring terbesar di Indonesia. Total utang pinjol di Bali mencapai Rp801,44 miliar pada periode tersebut, meliputi pinjaman yang diambil oleh masyarakat Bali melalui platform pinjol. Menurut laporan dari (Detik.com, 2023), Penyaluran pinjaman daring di Bali mencapai Rp258,75 miliar pada November 2022, menjadikannya yang tertinggi ke-4 di luar Pulau Jawa setelah pulau Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pertumbuhan yang signifikan dari

Rp180,39 miliar pada Januari 2022 menunjukkan kenaikan sebesar 43,3 persen. Jumlah outstanding pinjol di Bali mencapai Rp644 miliar dengan 893 ribu akun penerima pinjaman, sedangkan tingkat wanprestasi di atas dari 90 hari (TWP 90) sebesar 1,61 persen, lebih rendah dari rata-rata di luar Pulau Jawa yang mencapai 2,07 persen. Dari total pinjaman daring yang diberikan di Indonesia, sebesar Rp3,68 triliun beradadi luar pulau Jawa, dan telah didistribusikan oleh 95 fintech konvensional serta tujuh fintech berprinsip syariah.

Data tentang pengguna P2P lending di Kota Denpasar dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan jumlah pengguna aktif dari 182,849 pada tahun 2019 menjadi 164,895 pada tahun 2022. Pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan dengan 180,563 pengguna aktif, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2021 dengan hanya 167,622 pengguna aktif. Data ini mencerminkan perubahan dinamis dalam adopsi layanan P2P lending di wilayah tersebut selama periode tersebut. Tingkat penggunaan P2P lending di Kota Denpasar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan dan keamanan. Penurunan jumlah pengguna aktif bisa mengindikasikan kemungkinan penurunan kepuasan dalam menggunakan layanan P2P lending. Sebaliknya, peningkatan jumlah pengguna aktif bisa menunjukkan peningkatan kepuasan dalam P2P lending.

Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Menggunakan Fitur *Financial Technology Peer-To-Peer Lending* di Kota Denpasar dengan judul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Kepuasan Penggunaan Financial Teknologi (Fintech) Peer To Peer (P2p) Lending Di Denpasar”.

KAJIAN PUSTAKA

Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model/TAM) didasarkan pada teori psikologi yang kuat dan berpengaruh, yaitu Teori Tindakan Rasional (Theory Reasoned Action/TRA) yang diajukan oleh Ajzen (1991). Untuk mengevaluasi minat individu atau organisasi dalam menggunakan teknologi, TAM mengandalkan dua konstruk utama, yaitu persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Menurut teori TAM, semakin tinggi keyakinan bahwa suatu teknologi berguna dan mudah digunakan, semakin positif pula sikap terhadap penggunaan teknologi tersebut (Taylor, S dan Todd, 1995). TAM juga diperluas dengan penambahan variabel baru untuk meningkatkan kekuatan modelnya. Davis (1989) mengenalkan model TAM2 dengan memasukkan variabel proses pengaruh sosial (norma subjektif, keterpaksaan, dan citra) dan proses kognitif instrumental (relevansi pekerjaan, kualitas output, demonstrasi hasil, dan persepsi kemudahan penggunaan), yang ternyata secara signifikan mempengaruhi penerimaan pengguna.

Menurut definisi dari Bank Indonesia (bi.go.id, 2017), Financial Technology (FinTech) atau Teknologi Keuangan adalah penerapan teknologi dalam ranah keuangan yang menghasilkan inovasi produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas moneter, sistem keuangan, serta efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Ernst & Young (2019) menyatakan bahwa FinTech adalah organisasi yang memadukan model bisnis inovatif dengan teknologi terkini untuk memperluas dan mengubah industri jasa keuangan. Sedangkan menurut The Fed (Federal Reserve, 2016), FinTech adalah industri yang terdiri dari perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan menyediakan layanan jasa keuangan.

Konsep Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) dalam kerangka Technology Acceptance Model (TAM) secara langsung terkait dengan tingkat kenyamanan dan kemudahan penggunaan suatu teknologi, yang pada akhirnya mempengaruhi kepuasan pengguna. Dalam TAM, Persepsi Kemudahan merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi Sikap Terhadap Penggunaan dan Intensi Penggunaan suatu teknologi. Menurut teori ini, semakin mudah suatu teknologi digunakan oleh pengguna, semakin besar kemungkinan mereka akan menerimanya dan menggunakan teknologi tersebut dengan senang hati. Dalam konteks Fintech P2P Lending, Persepsi Kemudahan berhubungan dengan seberapa mudah proses peminjaman uang atau investasi dapat dilakukan melalui platform tersebut. Jika pengguna merasa bahwa platform Fintech P2P Lending mudah digunakan, seperti proses pendaftaran yang sederhana, navigasi yang intuitif, dan proses transaksi yang lancar, maka mereka cenderung akan merasa puas dengan pengalaman penggunaan tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara Persepsi Kemudahan dan Kepuasan Penggunaan dalam konteks Fintech P2P Lending mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang ditemukan dalam TAM, di mana persepsi positif tentang kemudahan penggunaan teknologi secara langsung memengaruhi kepuasan pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh (Marhaendra & Mahyuzar, 2023), (Salsabillah Ramadhani, 2021), (Hady et al., 2022) dan (Pranoto & Setianegara, 2020) menyatakan bahwa Presepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap kepuasan Penggunaan *Fintect P2P Lending*.

H₁ : Presepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Penggunaan *Fintect P2P Lending*

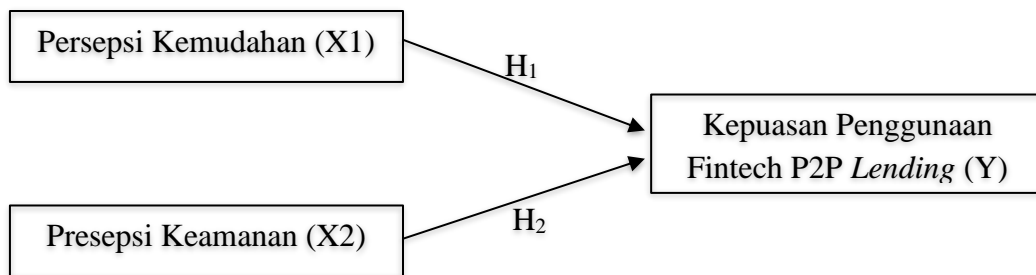
Pengaruh Persepsi Keamanan terhadap Kepuasan Penggunaan Fintech P2P Lending dapat dijelaskan melalui Teori Acceptance Model (TAM) dan konsep Sikap Terhadap Penggunaan. Menurut TAM, Sikap Terhadap Penggunaan dipengaruhi oleh dua faktor utama: Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) dan Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefulness). Dalam konteks Fintech P2P Lending, Persepsi Keamanan termasuk dalam Persepsi Kemudahan yang

memengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi. Apabila pengguna merasa bahwa platform Fintech P2P Lending memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dan keuangan mereka, mereka akan cenderung memiliki sikap positif terhadap penggunaan teknologi tersebut. Kepercayaan yang terbangun penting bagi pengguna dalam mengadopsi dan menggunakan platform tersebut secara konsisten. Dengan demikian, Persepsi Keamanan berpengaruh terhadap Sikap Terhadap Penggunaan, yang pada gilirannya memengaruhi Kepuasan Penggunaan. Menurut TAM, persepsi terhadap kemudahan dan keamanan penggunaan suatu teknologi akan berdampak pada kepuasan pengguna, dengan kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan mereka terhadap pengalaman menggunakan Fintech P2P Lending. Penelitian ini dilakukan (Marhaendra & Mahyuzar, 2023), (Salsabillah Ramadhani, 2021), (Hady et al., 2022) dan (Pranoto & Setianegara, 2020) menyatakan bahwa Presepsi Keamanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Penggunaan *Fintect P2P Lending*..

H₂: Pengaruh Presepsi Keamanan berpengaruh terhadap Kepuasan Penggunaan *Fintect P2P Lending*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kuantitatif yang menguji hipotesis tentang bagaimana Presepsi Kemudahan dan Keamanan berdampak pada Kepuasan Penggunaan Financial Technology (Fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending di Denpasar.



Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti, 2023

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar dengan fokus pada data kuantitatif, yang berupa data berbentuk angka. Populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan P2P Lending di Denpasar, yang jumlahnya sekitar 164.896 menurut data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik Stratified random sampling. Analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk Uji Asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi Linear Berganda, Uji

Koefisien Determinasi (R²), Uji Kelayakan Model (Uji F), dan Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian, Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan terhadap instrumen penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Pernyataan	Validitas		Reliabilitas	
			Koefisien	Keterangan	Cronbach alfa	Keterangan
1	<u>Kemudahan Pengguna (X1)</u>	X1.1	0,515	Valid	0,704	Reliabel
		X1.2	0,312	Valid		
		X1.3	0,557	Valid		
		X1.4	0,459	Valid		
		X1.5	0,508	Valid		
		X1.6	0,685	Valid		
		X1.7	0,612	Valid		
2	<u>Persepsi Keamanan (X2)</u>	X2.1	0,769	Valid	0,776	Reliabel
		X2.2	0,600	Valid		
		X2.3	0,658	Valid		
		X2.4	0,747	Valid		
3	<u>Kepuasan Pengguna (Y)</u>	Y1.1	0,640	Valid	0,732	Reliabel
		Y1.2	0,434	Valid		
		Y1.3	0,663	Valid		
		Y1.4	0,533	Valid		
		Y1.5	0,717	Valid		

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien berada diatas 0,30 dan koefisien alpha lebih besar dari 0,6 dengan demikian semua instrumen tersebut adalah valid dan reliabel. Setelah itu ditemukan bahwa hasil uji normalitas, seperti yang tercantum dalam Tabel 4.3, menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 (0,200>0,05), menandakan bahwa data memiliki distribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance yang tinggi, yaitu kemudahan pengguna (X1) sebesar 0,807 dengan nilai VIF 1,239, dan nilai keamanan (X2) juga sebesar 0,807 dengan nilai VIF 1,239. Karena nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF tidak melebihi 10, dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hasil uji Glejser pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi variabel melebihi 0,05, menunjukkan tidak adanya indikasi heterokedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Table with 5 columns: Variabel, Unstandardized Coefficients (B, Std.Error), Standardized Coefficients (Beta), T, Sig. Rows include (Constant), Kemudahan Pengguna (X1), Keamanan (X2), R, R Square, Adjusted R Square, Uji F, and Sig. Model.

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 maka persamaan regresi yang dipakai adalah:

Y= 3,871+0,234X1+0,605X2+ e

Dari hasil pengujian di atas, didapatkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,713, yang menunjukkan bahwa persepsi tentang kemudahan penggunaan dan keamanan memiliki dampak sebesar 71,3% terhadap kepuasan penggunaan, sedangkan 28,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil Uji F menunjukkan Fhitung sebesar 129,704 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan dan keamanan terhadap kepuasan penggunaan fintech P2P. Berdasarkan hasil regresi, Presepsi Kemudahan dan Presepsi Keamanan secara positif mempengaruhi kepuasan penggunaan fintech peer to peer lending.

Analisis menunjukkan bahwa nilai variabel Presepsi Kemudahan memiliki pengaruh positif sebesar 0,234 dengan tingkat signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa persepsi kemudahan penggunaan berdampak positif dan signifikan terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending. Dengan kata lain, semakin mudah aplikasi P2P digunakan oleh masyarakat, semakin tinggi tingkat kepuasan penggunaan aplikasi tersebut.

Analisis juga menunjukkan bahwa nilai variabel Presepsi Keamanan memiliki pengaruh positif sebesar 0,605 dengan tingkat signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa

tingkat keamanan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending. Dengan kata lain, semakin baik tingkat keamanan aplikasi P2P Lending, semakin tinggi tingkat kepuasan penggunaan aplikasi tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan penggunaan, semakin mudah aplikasi P2P Lending digunakan oleh masyarakat maka akan mampu meningkatkan kepuasan penggunaan akan aplikasi tersebut.
2. Keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan penggunaan, semakin baik tingkat keamanan yang dimiliki oleh aplikasi P2P Lending akan mampu meningkatkan kepuasan penggunaan akan aplikasi tersebut.

Berdasarkan simpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengguna aplikasi P2P Lending
Aplikasi P2P Lending telah mampu memberikan kemudahan dan keamanan bagi penggunanya, diharapkan kemudahan dan keamanan ini mampu dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar para pengguna merasa nyaman dalam bertransaksi.
2. Peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang mampu meningkatkan kepuasan penggunaan serta dapat juga melakukan pengujian pada aplikasi yang berbeda.

Daftar Pustaka

Ajzen, E. (1991). Teori perilaku terencana. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>

bi.go.id. (2017). Peraturan BANK Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi FINANSIAL. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_191217.pdf

Chatterjee, S., Chaudhuri, R., Galati, A., & Vrontis, D. (2021). Adoption Of Ubiquitous Crm For Operational Sustainability Of The Firms: Moderating Role Of Technology Turbulence. Sustainability (Switzerland), 13(18), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su131810358>

Davis. (1989). Technology Acceptance Model. <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/technology-acceptance-model>

Djaja, J., Tongli, B., & Tahendrika, A. (2022). Pengaruh Kemudahan Dan Keamanan Transaksi

- Menggunakan Kode QR Terhadap Kepuasan Pengguna Shopeepay Pada Mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.47178/jesit.v3i1.1644>
- Ernst, & Young. (2019). EY Worldwide Reference Guide 2018-19.Federal Reserve. (2016). <https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomchistorical2016.htm>.
<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomchistorical2016.htm>
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hady, A., Sudaryanti, D., & Novianto, A. S. (2022). Pengaruh Presepsi MANFAAT, Keamanan DAN Kemudahan Terhadap Kepuasan NASABAH Pengguna Quick Response Code Indonesian STANDARD (QRIS) BANK SYARIAH Indonesia (BSI) (Studi Pada Masyarakat Kota Malang). *Islamic Economic And Finance Journal*, 3(2), 575–590.
- Hendri Rahmayani Asri, Ekaning Setyarini, & Hantoro Arief Gisijanto. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Peer To Lending. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 01–09. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.99>
- Kamil, I. (2020). Islamiah Kamil | 185 Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Technology. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(02), 185–209. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index>
- Khoiriyah, S. U., Zulkarnaeni, A. S., & Halim, M. (2023). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Keamanan terhadap Minat Menggunakan Financial Technology pada Aplikasi Dana. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(1), 70–79. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i1.950>
- Kumala, A. M. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A MATCH Terhadap Kreativitas DAN HASIL Belajar Ilmu Pengetahuan SOSIAL Materi Keragaman Suku BANGSA DAN Budaya DI Indonesia SISWA MI.
- Marhaendra, A. N., & Mahyuzar, H. (2023). Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Keamanan Terhadap Kepuasan Pada Pengguna E-Wallet Dana Di Kebumen. *Journal of Digital Business and Management*, 2(2), 84–90. <https://doi.org/10.32639/jdbm.v2i2.400>
- Paramitha Pratiwi, R. A. (2019). Analisis Persepsi Keamanan Nasional India Terhadap Serangan Siber dari Pakistan 2008-2017. *Duke Law Journal*, 1(1), 764–771.
- Pranoto, M. O., & Setianegara, R. G. (2020). ANALISIS Pengaruh Persepsi MANFAAT, Persepsi Kemudahan, DAN Keamanan Terhadap MINAT NASABAH Menggunakan Mobile BANKING (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran). *Keunis*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v8i1.2117>
- Rahayu Wulan Ageng. (2022). Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Pada Generasi Millenial Di Kelurahan Pasir Putih (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Dana). 1–76.
- Salsabillah Ramadhani. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Keamanan &

Kerahasiaan Terhadap Penggunaan Fasilitas E-Filing Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening. 1–118.

Silfia, B., & Utami, A. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia. 03(1), 1–7.

Sudimanto, Kurniawan, C. P., & Christian, M. (2023). Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan, Keamanan Privasi, Kualitas Sistem, serta Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Pedulilindungi. Media Informatika, 21(3), 211–220. <https://doi.org/10.37595/mediainfo.v21i3.160>

Taylor, S and Todd, P. . (1995). Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models. Information Systems Research.

Wahyuningtyas, R. A. (2016). Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap NIAT Beli Ulang Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Intervening (Studi PADA Pengguna LAYANAN APLIKASI GO-Jek DI Surabaya). 4, 1–10.

Wulan, S., & Sari, P. (2023). Pengaruh Kepuasan Pelanggan Marketplace Umkm Kuliner Di Kota Bandung. Jurnal Riset Akuntansi, 15(1), 46–58.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Se Kabupaten Klungkung

Ni Ketut Mulyadewi⁽¹⁾

Ni Komang Sumadi⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: ketutm50@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of sistem pengendalian internal, information technology and organizational ethical culture on the tendency of accounting fraud in the management of funds from village-owned enterprises (BUMDesa) in Klungkung Regency. The population in this study was 229 people consisting of 44 BUMDesa in Klungkung Regency. The number of samples in this study was 129 people who were determined using a purposive sampling technique and tested using multiple linear regression analysis techniques. The results of this research show that Sistem pengendalian internal has a positive and significant effect on the tendency of accounting fraud. Information technology has a positive and significant effect on the tendency of accounting fraud. The ethical culture of the organization has no effect on the tendency for accounting fraud. The advice that can be given to BUMDesa in Klungkung Regency is to be able to maintain and even improve things that can reduce the tendency for accounting fraud, so that the organization's goals can be realized.

Keywords: Sistem pengendalian internal, Information Technology, Ethical Organizational Culture, Fraud

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan desa pada dasarnya adalah mewujudkan desa yang mandiri. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah provinsi Bali melalui alokasi dana Program Gerbang Sadhu Mandara. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDesa memaparkan jika BUMDesa merupakan bentuk pendayagunaan pedesaan, dibangun aparatur desa dimana penyertaan ekuitas serta penyelenggaraannya dilakukan aparatur desa serta penduduk desa. Dukungan permodalan yang berkelanjutan dari program Gerbang Sadhu Mandara ini nantinya akan dialokasikan ke masing-masing desa dan dana yang diterima akan disalurkan kembali ke kelompok masyarakat terorganisir yaitu BUMDesa. Namun, meski pemerintah sudah gencar berupaya memaksimalkan pengelolaan BUMDesa, kecurangan akuntansi masih sering terjadi dalam pengelolaan BUMDesa. Dalam pengelolaan dana BUMDesa banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan uang yang sengaja

Kabupaten Klungkung adalah salah satu kabupaten yang memiliki jumlah BUMDesa sebanyak 50 BUMDes (Sumber: PMD Kab. Klungkung). Dari 50 BUMDesa di Kabupaten Klungkung terdapat beberapa BUMDesa yang bermasalah salah satunya yang masih dalam proses penyelidikan yaitu BUMDesa Kerta Laba Dawan Kaler. Kasus ini melibatkan oknum pengurus yang di duga melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana BUMDesa Kerta Laba tahun 2014 - 2020 terkait tidak adanya laporan pertanggungjawaban terhadap hadiah uang BKK lomba Desa Terpadu Kabupaten Klungkung yang dialokasikan untuk penyertaan ke BUMDesa. Selain itu ada juga penyalahgunaan dana BUMDesa Desa Dawan Kaler pada tahun anggaran 2018–2020 yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa dalam dua bidang usaha yakni toko serba ada dan simpan pinjam. Selain dugaan penyalahgunaan pengelolaan tersebut BUMDesa Kerta Laba juga keropos dikarenakan banyaknya kredit macet sejak pandemi Covid-19. Termasuk ada kredit dari perbekel dan keluarganya mencapai sekitar Rp 600 juta. Pinjaman itu disertai agunan, hanya saja pembayarannya belum lancar. Selain itu, unit usaha air bersih dalam kemasan juga mendapat dana pinjaman dari BUMDesa sekitar Rp 1,6 miliar. Namun sampai saat ini pembayaran juga macet (<https://radarbali.jawapos.com/>).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh (Yasa & Sujana, 2023) yang berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian internal, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada BUMDes se-Kecamatan Sawan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Sistem pengendalian internal sebagai variabel bebas. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada penelitian (A. A. M. Pratiwi et al., 2023) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di LPD Kabupaten Badung. Dimana persamaan penelitian ini yaitu menggunakan budaya etis organisasi sebagai variabel bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, terdapat perbedaan proksi variabel yang diteliti. Pada penelitian ini mengkombinasikan variabel sistem pengendalian internal, teknologi informasi dan budaya etis organisasi. Variabel sistem pengendalian internal dan budaya etis organisasi diteliti kembali karena adanya inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kedua penggunaan populasi dan sampel serta lokasi penelitian yang berbeda. Dimana penelitian menggunakan populasi dan sampel pengelola pada sektor BUMDesa dan penelitian ini dilakukan pada BUMDesa Se Kabupaten Klungkung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan BUMDesa bentukan Gerbang Sadhu Mandara (GSM) sebagai objek dalam penelitian ini yang mana kebanyakan

H2: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penerapan budaya etis di suatu organisasi mendorong seseorang agar bertindak sesuai etika seperti mengedepankan kejujuran, sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dihindari. Umumnya, mereka dengan perilaku tidak jujur akan lebih mudah untuk merasionalisasikan tindakan kecurangan akuntansi yang dilakukannya. Jika budaya etis organisasi berada pada tingkat yang tidak terlalu tinggi, akan menyebabkan seseorang memilih tindakan kecurangan akuntansi. Sedangkan, apabila kultur atau budaya etis yang tertanam dalam organisasi cenderung baik seperti kejujuran adalah hal yang penting dan menganggap kecurangan adalah perilaku yang merugikan, maka tidak akan ada sedikitpun peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini didukung oleh penelitian (A. A. M. Pratiwi et al., 2023) yang menemukan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD Kabupaten Badung.

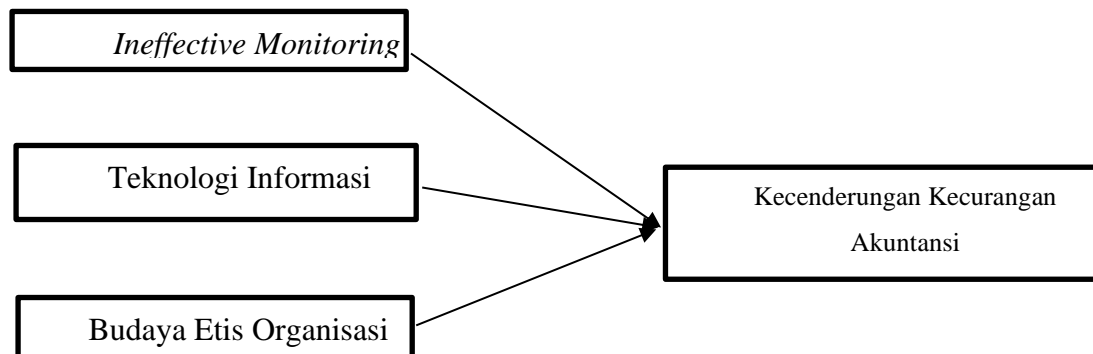
H3: Budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian ini menguji Pengaruh Sistem pengendalian internal, Teknologi Informasi Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Se Kabupaten Klungkung.

Adapun hubungan dari variable bebas dan variable terikat dijabarkan dalam desain penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Populasi dalam penelitian ini adalah 229 orang yang terdiri dari 44 BUMDesa di Kabupaten Klungkung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuisisioner dengan 4 Responden Ketua BUMDesa, Sekretaris, Bendahara dan Kasir. Selain itu dalam penyebaran kuisisioner juga disertakan petunjuk pengisian yang jelas agar memudahkan partisipan dalam memberikan jawabannya secara lengkap. Dalam penelitian ini digunakan skala likert yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Teknik tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu antara Pengaruh Sistem pengendalian internal, Teknologi Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi, Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Mencari persamaan garis regresi dengan menggunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Uji Validitas

(Ghozali, 2016) mengatakan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuisisioner. Suatu kuisisioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuisisioner tersebut.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel penelitian (Ghozali, 2016)

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, residu dari persamaan regresi mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada uji F dan t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2012:160)

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier atau korelasi yang kuat diantara variabel – variabel independen dalam model regresi. Menurut (N.

- Pebriantari, N. K., & Andayani, R. D. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi , Fungsi Badan Pengawas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Lpd Sekecamatan Gianyar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 432–447.
- Pradila, E., Animah, A., & Nurabiah, N. (2023). Pengaruh Spi, Teknologi Informasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan. *Accountthink : Journal Of Accounting And Finance*, 8(01), 97–116. <https://doi.org/10.35706/acc.v8i01.8594>
- Pratiwi, A. A. M., Mertha, M., & Suryanawa, I. K. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Lpd Kabupaten Badung. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5086–5099.
- Pratiwi, N., Pritanova, N., Hidayati, A. N., Management, J., Santoso, B. H., Meidha, R., Sumantyo, R., Nugroho, A. A., Sulisty, H., Sina, P. G., Afaf, I. N., Yendrawati, R., Mathematics, A., Yushita, A. N., Ii, B. A. B., Teori, A. D., Pemahaman, P., & Matematika, K. (2017). *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen Volume 6, Nomor 11, November 2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 42–48.
- Publik Indonesia, I. A. (2001). Sa Seksi 316 Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan. *Standar Profesional Akuntan Publik*, 312(70).
- Regina Aprilia. (2017). Pengaruh Financial Stability, Personal Financial Need, Sistem pengendalian internal, Change In Auditor Dan Change In Director Terhadap Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Diamond (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Ef. *Jom Fekon*, 4(1), 1472–1486.
- Sudariani, N. M. R., & Yudiantara, I. G. A. P. (2021). Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12, Pp.830-841.
- Sugiyono, D. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. In Penerbit Alfabeta.
- Utama, G. P., & Yuniarta, G. A. (2020). Pengaruh Sistem pengendalian internal, Komitmen Organisasi, Kultur Organisasi, Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(3), 630–639.
- Wulandari Aprilliyanti. (N.D.). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Budaya Etis Organisasi Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pemerintah Kota Kendari.
- Yasa, I. K. A., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian internal, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Bumdes Sekecamatan Sawan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 70–82. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.43137>

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)

Anak Agung Putu Agung Wahyu Pratama⁽¹⁾

Putu Cita Ayu⁽²⁾

Ni Putu Trisna Windika Pratiwi⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: agungwahyu250101@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate and analyze how regional financial oversight, accountability, and budgetary participation affect the performance of local government. The research focuses on civil servants who work in 30 regional apparatus organizations located in Tabanan Regency. The study involved 177 individuals, and data was collected using a questionnaire. The sampling method utilized in this study was purposive sampling, while the analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results of the study indicated that regional financial oversight did not affect the performance of local government in Tabanan Regency's regional apparatus organization. However, accountability and budgetary participation had a significant and positive impact on local government performance.

Keywords: Regional Financial Supervision, Accountability, Participation in Budgeting and Regional Government Performance

PENDAHULUAN

Pemerintahan adalah sebuah kelompok orang atau organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola kewenangan, memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan serta pembangunan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah bertugas mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, ditunjukkan agar dapat mempercepat terselenggaranya pelayanan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pengaruh dan peran masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, mengikuti prinsip demokrasi dan keadilan, persamaan, keistimewaan. dan ciri khas daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Kinerja pemerintah daerah yang baik merupakan kinerja yang dapat diukur dengan beberapa indikator, yang pertama, dengan mengukur Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kemudian yang kedua, dengan bebas KKN (*Free Corruption*) diukur menggunakan indeks persepsi korupsi dan integritas, serta akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) diukur melalui nilai pada laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dilansir dari (Biizaa.com, 2022).

Dikutip dari (Kompas.Id, 2022) terdapat tiga kabupaten meraih predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik 2021 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, yakni Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Namun walaupun beberapa Kabupaten di Bali memperoleh predikat tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus-kasus negatif seperti pada kasus ini merujuk kepada kinerja pemerintah daerah yang melakukan tindakan suap (korupsi) terhadap Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Tabanan yang terungkap pada tahun 2022. Dikutip dalam (Tribunnews.com, 2022) yaitu tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan dan telah menjadwalkan terkait pemeriksaan kepada Prasetyo selaku Ketua/Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), terkait posisinya menjadi saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap terhadap pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Tabanan, Bali. Tahun Anggaran 2018 dan beberapa orang yang menjadi tersangka dalam hal tersebut. Kasus ini tidak hanya pada lingkup itu saja namun melebar luas juga seperti yang dikutip dalam (Tribun-Bali.com, 2022) yaitu sebanyak 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tabanan juga menerima dana dari DID tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)”**. Tujuan Penelitian ini: 1. Untuk mengetahui apakah Pengawasan Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan? 2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan? 3. Untuk mengetahui apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan? Manfaat Penelitian ini: 1. Manfaat secara teoritis yaitu, dalam penelitian ini yaitu untuk menjadi landasan pemikiran maupun referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai seputar Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur yang tersedia bagi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) dan dapat berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa/i yang membutuhkan mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. 2. Manfaat secara praktisnya yaitu, dalam hasil penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan maupun sumber informasi alternatif bagi setiap Pemerintah Daerah agar mampu meningkatkan kinerja individu maupun dalam organisasi pemerintahan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori inti pada penelitian ini ialah teori *stewardship*. Teori *stewardship* menurut (Donaldson and Davis, 1991) suatu keadaan bahwa manager mereka memiliki kepentingan pribadi, tetapi mereka menganggap penting untuk menjadi orang utama. Pada dasarnya manusia bertindak bertanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan apa adanya. Teori *stewardship* ini menerangkan hubungan erat baik dari kinerja organisasi dengan keberhasilan organisasi, hingga organisasi tersebut bisa berjalan dengan optimal.

Menurut (Mahsun, 2009) Kinerja yaitu menerangkan mengenai tingkat implementasi kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, perencanaan strategis suatu organisasi meliputi tujuan, misi dan visi organisasi. (Sari, 2018) Kinerja merujuk pada hasil yang dihasilkan dari interaksi antara kemampuan individu dan sikap individu terhadap pekerjaan dan organisasi.

Pengawasan keuangan daerah menurut (Kuswandi, 2016) merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan sedemikian rupa agar pengeluaran-pengeluaran daerah memang dimanfaatkan sebagaimana dengan sasaran yang ditetapkan, sedangkan disisi lain supaya penerimaan-penerimaan daerah dapat diserahkan pada kas daerah dengan waktu yang telah ditentukan, dan jumlah yang telah ditentukan dapat terlaksana untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah. Alatas *et al.*, (2022), menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan.

Mokalu *et al.*, (2018). Menyatakan akuntabilitas mempunyai dua definisi, baik pada lingkup besar dan lingkup kecil. Pada lingkup besar, dalam hal akuntabilitas, pemegang amanah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dan informasi mengenai seluruh kegiatan yang dilakukannya, sebagai bagian dari kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanah tersebut. Pada lingkup kecil, yakni akuntabilitas adalah suatu wujud tanggung jawab yang mengarah terhadap siapa dan organisasi bertanggung jawab untuk apa.

Menurut Rahayu, *et al.*, (2014), Partisipasi penyusunan anggaran yaitu suatu bentuk keikutsertaan pegawai dan pejabat pemerintah didalam suatu organisasi pemerintahan agar berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan pada suatu capaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan pada anggaran organisasinya.

Hipotesis dalam penelitian ini:

Pengawasan keuangan daerah menurut *Alatas et al.*, (2022), menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan. Penelitian ini merujuk pada *Purnama & Nadirsyah* (2016), menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H1: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut *Sedarmayanti*, Akuntabilitas merupakan keharusan dalam memberikan pertanggung jawaban baik menjawab dan menjelaskan tindakan serta kegiatan individu atau suatu badan atau lembaga memberikan keterangan atau pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memintanya. Penelitian ini merujuk pada, *Putra & Indraswarawati* (2021), *Wiguna et al.*, (2015), *Jatmiko* (2020), *Elkha & Wahidahwati* (2020), serta *Purnama & Nadirsyah* (2016), menyatakan bahwa Akuntabilitas Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipasi penyusunan anggaran menurut (*Nurchayani*, 2010) adalah salah satu bentuk proses keterlibatan orang-orang secara langsung yang mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran yang kinerjanya dievaluasi dan kemungkinan besar akan diberi imbalan berdasarkan pencapaian tujuan anggaran. Rujukan pada penelitian sebelumnya oleh *Rahayu et al.* (2014) dan *Cottalismewati et al.* (2022) menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berkontribusi pada kinerja pemerintah daerah.

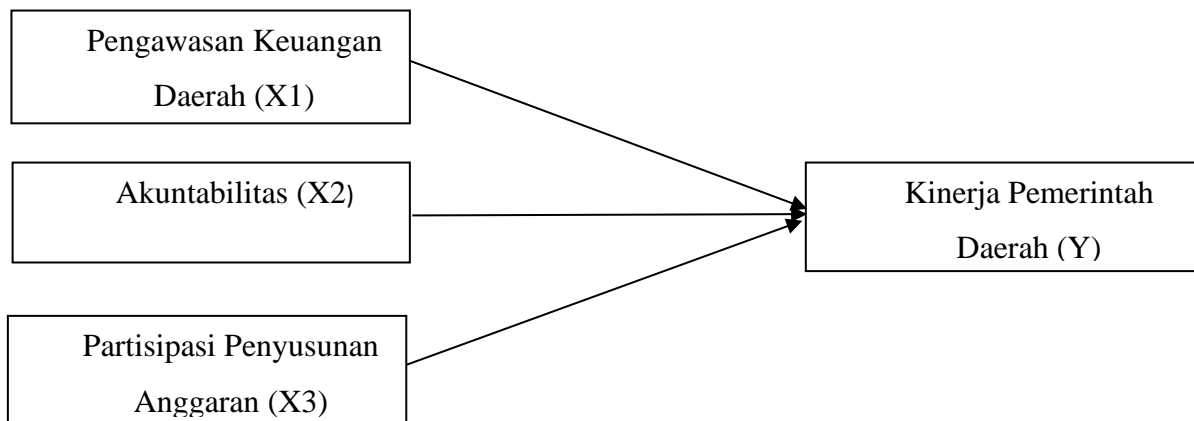
H3: Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Berlandaskan pada penjelasan latar belakang permasalahan serta pengembangan hipotesis penelitian “pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)”. Hal ini dapat dilihat dengan kerangka berpikir berikut ini:

Gambar 3.1

Model Kerangka Pemikiran Teoritis dalam Penelitian Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah



Kinerja Pemerintah Daerah menurut (Mahsun, 2009) Kinerja yaitu menerangkan mengenai tingkat implementasi kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, perencanaan strategis suatu organisasi meliputi visi/misi dan tujuan organisasi. Penilaian kinerja pemerintah daerah (Y) menggunakan lima indikator, yaitu dalam suatu sistem, terdapat masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dengan total sembilan item pernyataan (Yohana, 2020).

Menurut Alatas, *et al.*, (2022) menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah beroperasi sesuai dengan rencana, tujuan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Indikator dalam variabel pengawasan keuangan daerah (X1) ada 4 yaitu: akurat, tepat waktu, perspektif dan operasional dan fleksibel dengan 5 item pernyataan (Aguspita, 2019).

Menurut Poae dan Saerangi (2013: 29), akuntabilitas berarti tanggung jawab baik orang atau badan yang dipilih atas pilihan dan tindakan mereka. Indikator dalam variabel akuntabilitas (X2) ada 4 yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dengan 6 item pernyataan (Aguspita, 2019).

Didalam penyusunan anggaran, partisipasi dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik salah saji, kecurangan dan yang lainnya dimana yang melibatkan individu-individu secara langsung yang sesuai dengan bidangnya. Indikator dalam partisipasi penyusunan daerah (X3) ada 4 yaitu: keikutsertaan, kepuasan, besarnya pengaruh, dan kebutuhan berpendapat dengan 8 item pernyataan (Kristiastanti, 2018). Dalam variabel partisipasi penyusunan anggaran ini menggunakan 8 pernyataan dengan 6 pernyataan positif dan 2 pernyataan negatif, yakni pada pernyataan X3.7 dan X3.8. Sehingga menggunakan konversi nilai dalam tabulasi data. Responden

yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) itu hasilnya 5, Sangat Setuju (SS) hasilnya 4, Netral hasilnya tetap 3, Setuju (S) hasilnya 2, dan Sangat Setuju (SS) hasilnya 1, dan sebaliknya.

Populasi dalam penelitian ini penulis mengambil Pegawai Negeri Sipil di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan sejumlah 6.134 yang tersebar di 30 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini, yaitu *Purposive Sampling*. Sugiyono (2015: 67) menyatakan Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan 2. Kasubag Keuangan., Kasubag Umum serta Kasubag Perencanaan, 3. Tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tabel 1. Data Kriteria Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Jumlah Populasi	6.134
Jumlah sampel yang tidak masuk kriteria sampel	(5.957)
Jumlah Sampel yang diperoleh	177

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tabanan (2023)

Penelitian ini dalam pengolahan data dan menganalisis data dengan beberapa tahapan penelitian, yakni:

1. Analisis Statistik Deskriptif dipakai agar mengetahui keadaan data baik dilihat dari nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasinya.
2. Uji Instrumen dalam penelitian ini adalah Uji Validitas yaitu diukur dari nilai koefisien korelasinya diatas 0,3 maka item pernyataan dikatakan valid dan Uji Reliabilitas *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 maka instrumen yang digunakan reliabel dengan menggunakan rumus alpha.
3. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memverifikasi bahwa distribusi data pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan tidak mengandung nilai yang ekstrim (outlier).
4. Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Merujuk tabel yang ditampilkan, terlihat bahwa nilai korelasi (r) dari semua variabel lebih dari 0,30 dan koefisien alpha Cronbachnya melebihi 0,60. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asumsi validitas dan reliabilitas dari variabel-variabel tersebut telah terpenuhi, yang kemudian dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 4.4. Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas (sig. 2 tailed)	Multikolonearitas		Heterokedastisitas (sig. 2 tailed-Abres)
		Tolerance	VIF	
X1	0.062	.496	2.015	.628
X2		.490	2.043	.714
X3		.981	1.020	.069

Sumber: Data diolah(2023)

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi tiga asumsi dasar yaitu normalitas, multikolonearitas, dan heteroskedastisitas. Dalam hal normalitas, nilai sig pada bagian normalitas sebesar 0,062, jika nilai residual atau model regresi terdistribusi normal, maka nilai yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan hal ini. Sementara untuk mengecek adanya multikolonearitas dalam model regresi, dapat ditinjau dari nilai tolerance yang lebih besar daripada 0,10 serta nilai VIF yang kurang daripada 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolonearitas. Dalam hal ini, nilai-nilai yang diperoleh memenuhi kedua kriteria tersebut. Terakhir, dalam hal heteroskedastisitas, probabilitas signifikansi melebihi tingkat kepercayaan 5% pada semua variabel independen terhadap variabel dependen nilai absolut residual (Abres), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4.5. Uji Hipotesis

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	18.281	5.633	.000	
Pengawas (PW)	.105	.163	.500	Tidak Signifikan
Akuntabilitas (AK)	.228	2.725	.006	Signifikan
Partisipasi Penyusunan Anggaran (PP)	.441	6.246	.000	Signifikan
Adjusted R Square	0.226			
F Statistik	18.172			
Probabilitas (p-value)	0,000			
Variabel Dependen	Kinerja Pemerintah Daerah			

Sumber: Data diolah(2023)

Berdasarkan pada tabel di atas, fungsi regresi dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Pemerintah Daerah} = 18.281 + 0.105PW + 0.228AK + 0.441PP + e$$

Dari persamaan yang ada, jika semua variabel independen tidak memiliki nilai, oleh sebab itu besarnya Kinerja Pemerintah Daerah adalah 18.281. Nilai beta masing-masing variabel mempunyai signifikansi yaitu setiap kenaikan 1 basis point variabel independen yaitu bisa meningkat sesuai dengan nilai *standardized Beta*.

Tabel 4.6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 ^a	.240	.226	3.28189

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Pengawasan, Akuntabilitas

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,226 atau 22,6% variasi nilai Kinerja Pemerintah Daerah dapat dijelaskan dalam faktor-faktor Pengawas Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 77,4% di pengaruhi dengan faktor lain yang tidak diamati pada penelitian ini.

Tabel 4.7. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	587.192	3	195.731	18.172	.000 ^b
	Residual	1863.350	173	10.771		
	Total	2450.542	176			

- a. Dependent Variable: Kinerja
- b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Pengawasan, Akuntabilitas

Hasil Uji *P-value* menunjukkan bahwa nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka Pengawas Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 4.8. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.281	3.246		5.633	.000
	Pengawasan	.105	.155	.064	.676	.500
	Akuntabilitas	.228	.132	.163	2.725	.006
	Partisipasi	.441	.071	.418	6.246	.000

- a. Dependent Variable: Kinerja

Variabel Pengawas Keuangan Daerah memiliki koefisien positif yaitu 0,064, nilai signifikasinya sebesar 0,500 > 0,05, menunjukkan bahwa Pengawas Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis 1 pada penelitian ini ditolak.

Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien positif dari Variabel Akuntabilitas yang bernilai 0,163 dan nilai signifikasinya sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Hipotesis 2 dalam penelitian ini dapat diterima.

Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki koefisien positif yaitu 0,418, nilai signifikasinya sebesar 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis 3 pada penelitian ini diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil analisis serta hal yang dibahas yangmana telah diuraikan, dapat dikemukakan simpulan berikut:

1. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti Pengawasan Keuangan Daerah tidak memiliki peran terhadap meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Jika dilihat dari pengertian Pengawasan Keuangan Daerah, yaitu segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah khususnya di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan perlu meningkatkan pemahaman terkait Pengawasan Keuangan Daerah dan melaksanakan program pelatihan kepada seluruh pegawai agar dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Kinerja Pemda dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas. di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dari hasil ini, menunjukkan Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan telah menerapkan dan mengimplementasikan akuntabilitas dengan baik dari segi laporan keuangan dan kinerja pegawai baik individu/organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik.
3. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan disepakati serta para pegawai sudah terlibat dan berpartisipasi sebagaimana mestinya dalam penyusunan anggaran sehingga bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Saran

Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan
Diharapkan untuk dapat meningkatkan pemahaman terkait Pengawasan Keuangan Daerah baik dari pimpinan, sub bagian, serta pegawai lainnya baik dengan program pelatihan dan melakukan pengkajian ulang terkait dengan Pengawasan Keuangan Daerah dan sebaiknya pengawasan dilakukan sewajarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta meningkatkan dan mengaktifkan Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran agar dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah sehingga Kinerja Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan optimal.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan uji R pada penelitian ini, bahwa terdapat 77,4% yang

Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2011. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Jatmiko, Bambang.2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). Volume 7.Issue 2.

Jitmau, Fanny Kalangi, Lintje Lambey, Linda.2017.Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong).Universitas Sam Ratulangi.

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial.

Kristiastanti, E.2018.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten).

Kuswandi, Aos.2016.Manajemen Pemerintahan Daerah.Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).

Lilis Saidah Napisah, Cecep Taufiqurachman.2020.Model Pengolahan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Badung.STIE Ekuitas Bandung.Volume 6 No 2 Juli 2020.

Mahsun,Mohamad.2009.Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Edisi 1.Yogyakarta BPFE , Yogyakarta.

Meiryani.2021.Memahami Analisis Regresi Linear Berganda.Jakarta Indonesia., diakses tanggal 24 Juni 2022.

[https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linearberganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20\(Ghozali%2C%202018\)](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linearberganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20(Ghozali%2C%202018))

Morad, Ayuwandira M et al.,.2022.Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating.Volume 4, Nomor 1, Juni 2022. E-ISSN: 2685-0915 , P-ISSN: 2685-080X.

Nurchayani, Kunwawiyah.2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening.Uninersitas Diponegoro Semarang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Poe, Dedy Aries, Saerang, David P.E.2013.Pengaruh Akuntabilitas dan Aksibilitasnya Terhadap Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan kabupaten Kepulauan Talaud.Jurnal Accountability, Vol.2 No. 1, hal 29-34.

Purnama, Fifit, Nadirsyah, Dan.2016.Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya.Universitas Syiah Kuala. Vol 1, No 2, (2016) Halaman 01-15.

Putra, C.Y.M.2022.Tiga Kabupaten di Bali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi, diakses tanggal 11 Januari 2022 jam 17.50 WIB.

Putra, Putu Deddy Samtika, Indraswarawati, Sang Ayu Putu Arie.2021.Pengaruh Pengawasn Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kelungkung.Universitas Hindu Indonesia.

Pratama,, I.R.2022. Kasus DID Tabanan, KPK Periksa Direktur Eksekutif Pusaka Negara dan 3 PNS Kemenkeu., diakses tanggal 16 Februari 2022, jam 13.59 WIB.

Rahayu, Ni Luh Sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, Sinarwa, Ni Kadek.2014.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja, Indonesia. Volume 2 No. 1 Tahun 2014.

Republik Indonesia.2004.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Riana Mayasari.2021.Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya. Deepublish.ISBN: 978-623-02-3658-7.

Sari, Putri Kartika.2018.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisaasi Perangkat Daerah Kota Magelang).Universitas Muhammadiyah. Magelang.

Sugiyono.2018.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Tiga Kabupaten di Bali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi.2022., diakses tanggal 24 Juni 2022.

Warisman, Kika Sakinah Wulandari, Endang.2022.Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021.E-ISSN : 2829-2006.

Wiguna, Budi Sastra, Yuniartha, Gede Adi Ari, Nyoman Darmawan, Surya.2015.Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.Universitas Pendidikan Ganesha.Singaraja, Indonesia. Volume 3 No. 1 Tahun 2015.

Yohana, V.B.2020.Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Good Governance (Tata kelola Pemerintahan yang baik) (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan).

Pengaruh Penghapusan Sanksi Administratif, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Gianyar)

I Kadek Bayu Mahardika⁽¹⁾

I Wayan Suidana⁽²⁾

Ni Wayan Alit Erlina Wati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: bymhrdk09@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to explore whether the removal of administrative penalties, Waiving fees for transferring vehicle titles and implementing tax relief measures can influence the extent to which motor vehicle taxpayers adhere to compliance regulations. Additionally, this research aims to determine whether tax socialization can mitigate the influence of eliminating administrative sanctions and waiving vehicle title transfer fees is contingent upon the adherence of motor vehicle taxpayers to certain compliance standards. The study was conducted at the Gianyar Regency Samsat Office involving 100 respondents using a questionnaire as the data collection instrument. The utilized method for data analysis was Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). with Smart PLS software. The research findings indicate that: (1) The removal of administrative penalties has little impact on the adherence of motor vehicle taxpayers to regulations. (2) Waiving the fees for transferring vehicle titles doesn't notably affect the compliance level of taxpayers regarding motor vehicle obligations. (3) Socializing taxes on motor vehicles positively influences the compliance level of taxpayers in this sector. (4) The correlation between the removal of administrative penalties and tax socialization has little impact on the compliance rate of motor vehicle taxpayers in Gianyar Regency. (5) The correlation between the waiving of vehicle title transfer fees and tax socialization does not notably impact the adherence of motor vehicle taxpayers in Gianyar Regency.

Keywords: Elimination of Administrative Sanctions, Exemption from Vehicle Title Transfer Fees, Tax Socialization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sektor, termasuk di dalamnya adalah penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus bertambah. Fenomena tersebut dapat diamati dari meningkatnya jumlah individu yang saat ini memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada memanfaatkan layanan angkutan umum. Oleh sebab itu, kantor samsat harus memungut pajak dari pemilik kendaraan bermotor guna meningkatkan sumber utama pendapatan daerah dan meningkatkan tanggung jawab wajib pajak.

tambahan dalam domain perpajakan mengenai ketaatan yang harus dipatuhi oleh pemilik kendaraan bermotor. Selain itu, 2) Temuan dari riset ini dapat berfungsi sebagai pijakan bagi penyelidikan yang akan dijalankan selanjutnya. 3) Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bernilai, tambahan informasi, ide dan bahan yang dapat dipertimbangkan oleh suatu instansi/lembaga dalam upaya meningkatkan ketaatan para wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Serta 4) Penelitian ini memiliki tujuan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pendidikan tingkat tinggi dengan kenyataan yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut regulasi yang diatur UU No. 28 (2007) Mengenai Regulasi Umum dan Prosedur Perpajakan, kewajiban pembayaran Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dilaksanakan oleh individu atau entitas kepada pemerintah, yang pada hakikatnya mengikat tanpa menerima kompensasi secara langsung dan dimanfaatkan oleh negara demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau entitas yang memiliki atau mengendalikan alat transportasi berbasis mesin.. Dalam hal ini, individu yang mempunyai kendaraan bermotor diharuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka serta menjalankan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara benar dan bertanggung jawab penuh. (Ilhamsyah, 2016). Apabila tingkat ketaatan para wajib pajak meningkat, dampaknya akan tercermin pada peningkatan penerimaan pajak.

Atribusi merupakan proses pembuatan kesan yang mengacu pada langkah seorang individu menguraikan tingkah laku individu lain atau dirinya sendiri kemudian menarik kesimpulan. Dalam teori atribusi ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang berperan dalam menentukan perilaku seseorang. Faktor internal merujuk pada elemen yang bersumber dari dalam individu, seperti kemampuan atau upaya yang dilakukan, kesadaran maupun kepribadian. Faktor eksternal merupakan variabel yang timbul dari lingkungan eksternal individu yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu sebagai respons terhadap situasi yang dihadapi. Dalam penelitian ini terdapat faktor eksternal seperti penghapusan sanksi administratif, pembebasan pembayaran pajak balik nama kendaraan serta penyebarluasan informasi tentang regulasi perpajakan.

Penghapusan sanksi administratif pengenaan pajak merupakan upaya untuk mendorong pemilik kendaraan yang telah lama menunggak kewajiban pembayaran pajak kendaraan mereka. Langkah ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk melunasi pajak tanpa dikenai sanksi berupa denda keterlambatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika kesadaran terhadap program pemutihan pajak ini tinggi. Maka, peningkatan tingkat pengalihan pajak kendaraan akan diberlakukan secara seimbang bagi setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ammy (2023) dan Rohmah (2022) temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak besar terhadap tingkat ketaatan para pemilik kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, maka suatu hipotesis telah diformulasikan sebagai berikut.

H1 : Penghapusan Sanksi Administratif Berpengaruh Positif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

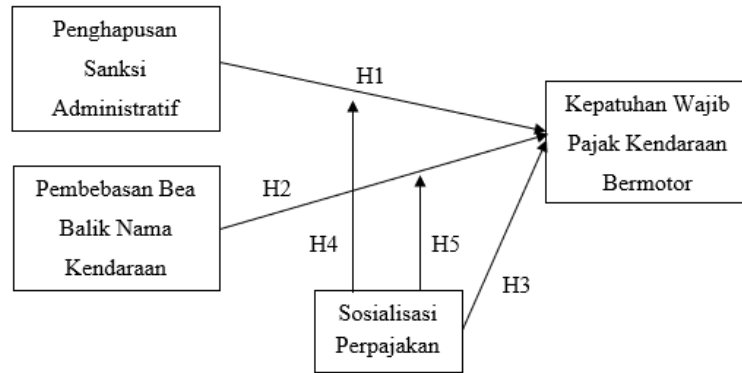
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2020 menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dipungut atas pengalihan hak milik kendaraan bermotor yang timbul karena perbuatan sepihak atau dua pihak yang timbul dari kesepakatan atau situasi akibat adanya pembelian dan penjualan, pertukaran, pemberian sukarela, peninggalan, atau penghasilan ke dalam badan usaha. Tujuan dari keberadaan program ini untuk meningkatkan kesadaran serta ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sekaligus memberikan bantuan kepada mereka dalam proses pembayaran pajak untuk mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor apabila terjadi pergantian kepemilikan karena dalam hal tersebut terdapat sanksi administrasi dalam proses pengurusannya (Yuliawati & Meliya, 2021).

H2 : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Berpengaruh Positif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan tindakan yang diambil oleh otoritas pajak dengan tujuan memberi pemahaman kepada masyarakat akan signifikansi pembayaran pajak dalam mendukung pembangunan lokal. Dengan melakukan sosialisasi, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak serta langkah-langkah yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi proses pembayaran pajak kendaraan dapat diperkuat. Jika sosialisasi perpajakan

METODE PENELITIAN

Dengan merujuk pada latar belakang permasalahan serta proses perumusan hipotesis, pengaruh penghapusan sanksi administratif, pembebasan dari kewajiban membayar bea balik nama kendaraan diberikan sesuai dengan ketaatan Terhadap regulasi perpajakan kendaran bermotor, dengan melakukan sosialisasi perpajakan sebagai faktor moderasi dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagai berikut.



Sumber: data diolah, 2023

Metode riset yang digunakan pada kajian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sampel penelitian mencakup seluruh jumlah individu yang berkewajiban membayar pajak, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 346.285 orang. Dalam metodologi pengambilan sampel, peneliti juga menetapkan standar yang sesuai untuk calon responden sebagai sumber data. Standar tersebut mencakup syarat bahwa responden harus merupakan pemilik kendaraan dengan plat nomor berwarna hitam atau putih, telah terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gianyar, dan juga merupakan wajib pajak langsung, bukan perantara. Dalam studi ini, populasi penelitian terdiri dari 100 individu yang berstatus sebagai wajib pajak, yang dipilih berdasarkan metode penarikan sampel menggunakan rumus Slovin. Pendekatan analisis data yang diterapkan adalah Structure Equation Modeling (SEM), dimana perangkat lunak Partial Least Squares (PLS) digunakan sebagai alat utama untuk analisis. Dalam kerangka analisis SEM-PLS, terdapat dua tahapan yang diterapkan untuk menguji kecocokan model yang diajukan, yang dikenal sebagai Metode Pemodelan Persamaan Struktural Dua Langkah. Pendekatan ini dimulai dengan melakukan estimasi terhadap model pengukuran terlebih dahulu, yang merujuk pada Outer Model dalam konteks SEM-PLS. Langkah selanjutnya melibatkan estimasi terhadap model struktural, yang dikenal sebagai Inner Model.

Table 4.1 Nilai Outer Loading Sebelum Eksekusi

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Penghapusan sanksi administratif	X1.1	0,814
	X1.2	0,807
	X1.3	0,854
	X1.4	0,753
	X1.5	0,370
Pembebasan bea balik nama	X2.1	0,778
	X2.2	0,749
	X2.3	0,831
	X2.4	0,859
	X2.5	0,716
Sosialisasi perpajakan	Mod 1	0,730
	Mod 2	0,764
	Mod 3	0,848
	Mod 4	0,755
	Mod 5	0,804
Ketaatan Wajib Pajak	Y1.1	0,777
	Y1.2	0,774
	Y1.3	0,882
	Y1.4	0,884
	Y1.5	0,869
	Y1.6	0,816
Interaksi penghapus*sosialisasi		1,060
Interkasi pembebasan bea balik nama*sosialisasi		1,130

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ada satu indikator yang nilai korelasinya berada dibawah 0,60 yaitu indikator X1.5 dari variabel penghapusan sanksi administratif, sehingga tanda tersebut dihapus dari kerangka. Sehingga diperoleh hasil:

Table 4.2 Nilai Outer Loading Setelah Eksekusi

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Penghapusan sanksi administratif	X1.1	0,799
	X1.2	0,806
	X1.3	0,880
	X1.4	0,781
Pembebasan bea balik nama	X2.1	0,778
	X2.2	0,748
	X2.3	0,831
	X2.4	0,859

	X2.5	0,716
Sosialisasi perpajakan	Mod 1	0,730
	Mod 2	0,764
	Mod 3	0,848
	Mod 4	0,754
	Mod 5	0,804
Ketaatan Wajib Pajak	Y1.1	0,778
	Y1.2	0,775
	Y1.3	0,881
	Y1.4	0,883
	Y1.5	0,868
	Y1.6	0,817
Interaksi penghapusan*sosialisasi		1,064
Interaksi pembebasan bea balik nama*sosialisasi		1,130

Sumber: data diolah, 2024

Perhitungan hasil menunjukkan bahwa semua indikator pada Tabel 4.2 telah memenuhi syarat validitas dengan memiliki nilai beban eksternal melebihi angka 0,60.

b) *Discriminant Validity*

Table 4.3 Uji Discriminant Validity

Variabel	AVE		X1*M X2*M				
		√AVE	X1	X2	Mod	od	od
X1	0,668	0,817					
X2	0,621	0,788	0,759				
Mod	0,610	0,781	0,382	0,447			
X1*mod	1,000	1,000	-0,058	-0,084	-0,070		
X2*mod	1,000	1,000	-0,079	-0,149	-0,090	0,847	
Y	0,697	0,835	0,392	0,377	0,427	-0,159	-0,085

Sumber: data diolah, 2024

Keterangan:

- X1 : Penghapusan sanksi administratif
- X2 : Pembebasan bea balik nama
- Mod : Sosialisasi perpajakan
- Y : Ketaatan wajib pajak
- X1*Mod : Interaksi penghapusan dengan sosialisasi
- X2*Mod : Interaksi pembebasan dengan sosialisasi

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa seluruh konstruk menunjukkan nilai Ekstraksi Varians Rata-rata (AVE) yang melebihi 0,50. Sementara itu, nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ untuk masing-masing variabel berada dalam rentang 0,781 hingga 1,000. Rentang ini mengindikasikan bahwa nilai AVE jauh lebih besar daripada korelasi yang berkisar antara -0,070 hingga 0,847. Penemuan ini mengonfirmasi bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi dalam konteks penelitian ini.

c) *Composite Reliability dan Cronbach Alpha*

Table 4.4 Uji Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Penghapusan sanksi administratif (X1)	0,834	0,889
Pembebasan bea balik nama (X2)	0,850	0,891
Sosialisasi perpajakan (Mod)	0,845	0,887
Interaksi penghapusan dengan sosialisasi (X1*mod)	1,000	1,000
Interaksi pembebasan dengan sosialisasi (X2*mod)	1,000	1,000
Ketaatan wajib pajak (Y)	0,913	0,932

Sumber: data diolah, 2024

Tabel 4.4 menggambarkan bahwa nilai keandalan komposit serta Alfa Cronbach untuk tiap konstruk telah melampaui angka 0,60, yang menandakan keandalan yang memadai sesuai dengan standar keandalan komposit yang ditetapkan.

Evaluasi Model Struktural (Structural Model/Inner Model)

a) Evaluasi Model Struktural Melalui *R-Square (R2)*

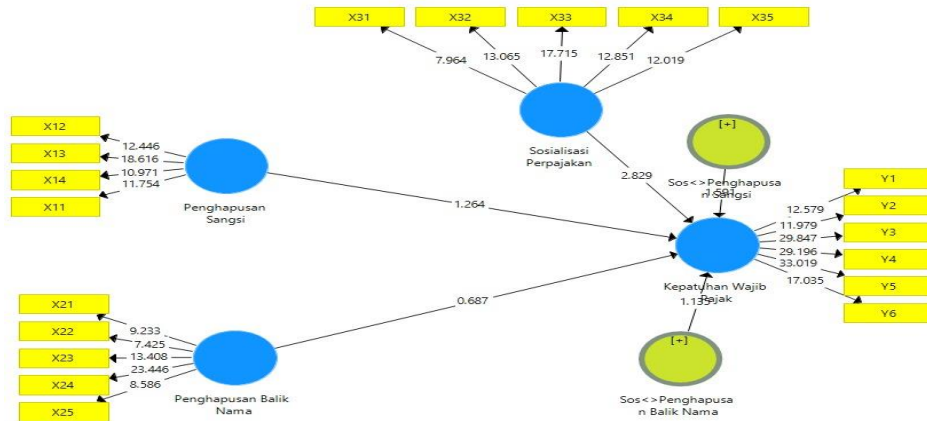
Table 4.5 Evaluasi Model Struktural Inner Melalui R-square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Ketaatan Wajib Pajak	0,278	0,239

Sumber: data diolah, 2024

Tabel 4.5 menggambarkan hasil analisis yang menurut kriteria Chin, menunjukkan bahwa R square ketaatan wajib pajak mencapai 0,278, yang mengindikasikan bahwa model ini dapat diklasifikasikan sebagai model moderat. Temuan ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti penghapusan sanksi administratif, pembebasan biaya pengalihan kepemilikan, sosialisasi perpajakan, serta interaksi antara penghapusan sanksi administratif dengan sosialisasi perpajakan, dan interaksi pembebasan biaya pengalihan kepemilikan dengan sosialisasi

Sumber: data diolah, 2024



Sumber: data diolah, 2024

Tabel 4.7 mengindikasikan bahwa 1) Penghilangan sanksi administratif menunjukkan dampak positif sebesar 0,202 terhadap tingkat ketaatan wajib pajak, Namun, hubungan yang teramati tidak dapat disebut signifikan karena nilai p-value yang dihitung melebihi ambang batas signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ($0,207 > 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini harus ditolak. 2) Pembebasan dari kewajiban membayar bea cukai menunjukkan dampak positif sebesar 0,097 terhadap tingkat ketaatan wajib pajak, tetapi keterkaitan tersebut tidak memiliki relevansi yang berarti karena angka p-value melebihi batas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ($0,492 > 0,05$). Maka dari itu, asumsi kedua yang terdapat dalam penelitian ini juga harus disangkal. 3) Kegiatan sosialisasi perpajakan menunjukkan dampak positif sebesar 0,306 terhadap tingkat ketaatan wajib pajak, dan keterkaitan tersebut bermakna karena nilai p-value yang diperoleh lebih rendah dari 0,05 ($0,005 < 0,05$), hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 4) Interaksi penghapusan sanksi administratif dengan sosialisasi perpajakan pengaruh yang tidak menguntungkan sebesar 0,316 terhadap tingkat ketaatan wajib pajak telah diamati, namun demikian, hubungan ini tidak menunjukkan signifikansi statistik, Dikarenakan nilai-nilai p berada di atas ambang batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05 ($0,112 > 0,05$), hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. 5) Interaksi berpengaruh Pengurangan atau dispensasi pajak atas pengalihan kepemilikan dengan memperkenalkan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan positif sebesar 0,228 terhadap ketaatan wajib pajak dan hubungan tersebut tidak signifikan, Dikarenakan nilai p-value melebihi ambang batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05 ($0,257 > 0,05$). hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak.

Pengaruh Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar

Temuan dari uji coba menunjukkan bahwa eliminasi sanksi administratif tidak berdampak secara signifikan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar. Akibatnya, hipotesis awal dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa efektivitas program penghapusan sanksi administratif terkait pajak kendaraan bermotor belum mencapai peningkatan yang berarti dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan timbulnya dugaan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mengalami peningkatan manfaat dari kebijakan penghapusan sanksi administratif tersebut. Tindakan ini merupakan respons terhadap permasalahan yang signifikan, yaitu meningkatnya jumlah kontributor pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka, sehingga mengakibatkan akumulasi denda pajak kendaraan bermotor yang mengkhawatirkan.

Selain itu, Kemauan untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh penghapusan sanksi administratif terkait pajak kendaraan bermotor, meskipun upaya pemerintah untuk mengurangi denda keterlambatan, dikarenakan Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya yang masih tertunggak.

Temuan yang didapat dari kajian ini sesuai dengan hasil yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sasana dan rekan-rekannya pada tahun 2021, serta riset yang dilakukan oleh Dzulfitriah dan Saepuloh pada tahun yang sama. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan sanksi keuangan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketaatan para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar. Karena itu, proposisi kedua yang diusulkan dalam penelitian ini tidak dapat disetujui. Tujuan dari penerapan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Namun, rendahnya dampak dari pembebasan bea balik nama ini disebabkan oleh rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat tentang prosedur balik nama kendaraan serta kurangnya pemanfaatan insentif yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pembebasan bea balik nama. Temuan studi ini konsisten dengan temuan yang diungkapkan oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari pembebasan bea balik nama terhadap tingkat ketaatan para wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar

Temuan dari pengujian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi perpajakan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketaatan yang diwajibkan kepada wajib pajak, yang pada gilirannya mendukung hipotesis ketiga dalam kerangka penelitian ini. Fiskus memanfaatkan sosialisasi perpajakan sebagai saluran untuk mengkomunikasikan informasi terbaru seputar regulasi dan kebijakan perpajakan kepada masyarakat secara efektif. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, yang berpotensi meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai aspek-aspek perpajakan yang relevan, termasuk pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin intensif sosialisasi perpajakan yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat ketaatan yang termanifestasikan oleh wajib pajak kendaraan bermotor dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini konsisten dengan temuan yang disajikan oleh Rahayu & Amirah pada tahun 2018 serta oleh Saputra Deni pada tahun 2022, yang menegaskan bahwa proses sosialisasi terkait perpajakan berperan signifikan dalam memengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Interaksi Penghapusan Sanksi Administratif Dengan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar

Hasil riset menyatakan bahwa proses sosialisasi terkait perpajakan tidak berhasil memperkuat efek pengurangan sanksi administratif terhadap ketaatan para wajib pajak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis keempat dalam kajian ini tidak dapat disetujui. Tidak didukungnya hipotesis ini, dapat dijelaskan bahwa ketika penghapusan sanksi administratif tidak mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak, sehingga diperlukan peran para fiskus dalam memberikan sosialisasi perpajakan.

Namun kehadiran fiskus ini dalam memberikan sosialisasi tidak mampu memperkuat hubungan penghapusan sanksi administratif terhadap ketaatan yang diharuskan dari pihak yang membayar pajak.. Hal ini diduga, sosialisasi yang diberikan belum maksimal dan wajib pajak

tidak mengetahui adanya informasi mengenai penghapusan sanksi tersebut. Para wajib pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat ketaatan mereka, dapat menghilangkan sanksi yang terbukti efektif tanpa mengandalkan secara eksklusif pada upaya sosialisasi terkait perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini bukanlah sebagai pemoderasi melainkan dapat berfungsi sebagai variabel intervening, eksogen, anteseden, maupun sebagai predictor. (Ghozali, 2018).

Interaksi Pembebasan Bea Balik Nama Dengan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar

Temuan dari proses pengujian menunjukkan bahwa proses sosialisasi perpajakan tidak mampu menaikkan signifikansi pengaruh dari pembebasan bea balik nama terhadap tingkat ketaatan wajib pajak. Sebagai hasilnya, hipotesis kelima yang disampaikan dalam urutan penelitian ini tidaklah dapat disetujui. Tidak didukungnya hipotesis ini, dapat dijelaskan bahwa ketika pembebasan bea balik nama tidak mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi.

Penelitian ini mencatat bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam keterkaitan antara pembebasan bea balik nama dan tingkat ketaatan wajib pajak. Tingkat pemahaman mengenai kewajiban pajak masih tergolong rendah, dan besarnya biaya yang terkait dengan bea balik nama dianggap tidak begitu membebani, sehingga langkah-langkah sosialisasi terkait perpajakan belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap ketaatan wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini bukanlah sebagai pemoderasi melainkan dapat berfungsi sebagai variabel intervening, eksogen, anteseden, maupun sebagai predictor. (Ghozali, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa di Kabupaten Gianyar, penghapusan sanksi administratif dan pembebasan bea balik nama tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian, upaya sosialisasi terkait perpajakan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap ketaatan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penghapusan sanksi administratif dan sosialisasi perpajakan, ataupun antara pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan terhadap ketaatan wajib pajak.

Saran yang dapat diberikan adalah pertama, disarankan agar Kantor SAMSAT Gianyar mempertahankan upaya sosialisasi secara teratur guna memastikan penyebaran informasi terkait program pemerintah yang lebih luas. Tindakan ini diharapkan dapat memperkuat ketaatan wajib pajak di wilayah tersebut. Kedua, penelitian ini menyoroti adanya batasan tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pembaruan metodologis serta menambahkan variabel tambahan yang mungkin dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Ammy, B. (2023). ... Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*.
<http://polgan.ac.id/owner/index.php/owner/article/view/1257>
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut. *FRIMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 4
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). ... , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan *Jurnal Revenue*
<https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/111>
- Miftahur Rohmah, R. F., Suyanto, U. Y., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 5(1).
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (n.d.).

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1).

Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).

Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (n.d.).

Yuliawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Kab. Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2).

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) dan Implementasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (Si Apik) Pada Laporan Keuangan Anugerah Bali Computer

Made Hari Krisnayanti⁽¹⁾
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
I Wayan Budi Satriya⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
email : harikrisnayanti24@gmail.com

ABSTRACT

This research aim to evaluate whether financial reports based on SAK EMKM have been implemented by Anugerah Bali Computer, compare the financial reports and elements of Anugerah Bali Computer's financial statements with the provisions regulated in SAK EMKM and implement Si Apik in its accounting records and interpret the results of comparative analysis. then draw a conclusion. This research method is a comparative and descriptive qualitative method. Data was obtained through interviews and observations. Comparative data analysis by analyzing the presentation of Anugerah Bali Computer's financial reports with theories referring to the SAK EMKM, then implemented in Si Apik. The result of this research is that the type of financial report produced is only a profit and loss report so it is not in accordance with SAK EMKM. However, after Si Apik was implemented, the resulting financial reports were profit and loss reports, financial position reports and notes on financial reports which were made manually.

Keywords : EMKM Financial Accounting Standards ; MSMEs ; Si Apik

PENDAHULUAN

UMKM dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya jika dikelola dengan manajemen yang baik. Manajemen yang efisien tidak hanya berfokus pada operasional harian, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai pencatatan keuangan yang akurat dan tepat. Selain itu, penting bagi UMKM guna memahami dan mengimplementasikan standar pelaporan keuangan sesuai kebutuhan dan karakteristik bisnisnya. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan UMKM dengan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM), dibuat guna menyederhanakan proses pelaporan keuangan UMKM, sehingga pihaknya mampu menyusun informasi mengenai kondisi finansial dan kinerja bisnisnya secara lebih efisien dan mudah dipahami. Dengan informasi keuangan yang transparan dan akurat, UMKM dapat membantu berbagai pihak, seperti pemangku kepentingan dan investor, dalam membuat keputusan yang lebih tepat. (Hendika Wibowo, 2015)

Peneliti juga memperkenalkan sebuah aplikasi yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. Aplikasi ini dirancang guna membantu UMKM dalam pelaporan keuangan lebih efisien.

Selain itu, laporan keuangan tersebut bisa dijadikan sebagai referensi saat pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman kepada bank. Aplikasi yang dimaksudkan di sini yaitu Sistem Informasi Aplikasi Informasi Keuangan yaitu Si Apik.

Anugerah Bali Computer sebagai salah satu UMKM dagang yang memiliki hasil penjualan tahunan sekitar 800 juta rupiah sehingga usaha Anugerah Bali Computer termasuk ke dalam usaha mikro yang bisa menggunakan SAK EMKM sebagai standar laporan keuangannya. Saat ini, Anugerah Bali Computer dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan excel, namun sebelumnya Anugerah Bali Computer sudah pernah menggunakan aplikasi akuntansi, seperti buku kas, kledo, akuntansiku dan akuntansi umkm. Anugerah Bali Computer kembali menggunakan excel untuk penyusunan laporan keuangannya karena pemilik merasa tidak cocok dan tidak mengerti cara menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu, Anugerah Bali Computer berniat memperluas usahanya dengan membuka cabang sehingga membutuhkan modal. Sementara persyaratan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM adalah adanya penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di Anugerah Bali Computer untuk mengkaji penerapan Akuntansi berdasarkan SAK EMKM dan implementasi Si Apik pada Anugerah Bali Computer. Penelitian bertujuan guna mengetahui bagaimana laporan keuangan Anugerah Bali Computer dan apakah laporan keuangannya sudah menerapkan SAK EMKM atau tidak serta bagaimana laporan keuangan tersebut jika Si Apik sudah diimplementasikan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori akuntansi positif adalah teori berfokus pada penerapan dan kegunaan praktis dari metode-metode akuntansi yang ada di lapangan, dengan tujuan untuk memvalidasi atau membenarkan praktik-praktik akuntansi yang telah ada (Rizki & Rahayuningsih, 2021). Menurut Watts dan Zimmerman (1978) teori ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan alasan di balik keputusan perusahaan terkait pilihan-pilihan akuntansi dan responnya terhadap perubahan atau revisi standar akuntansi yang baru. Dalam hal ini, apakah SAK EMKM yang dikhususkan bagi UMKM sudah dapat diterapkan dalam laporan keuangan itu sendiri.

Berlandaskan SAK EMKM (2016), laporan keuangan bertujuan guna memberikan informasi mengenai kondisi finansial dan performa sebuah perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi berbagai pihak yang memerlukan data tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan aspek ekonomi (Indonesia, 2016).

SAK EMKM sebagai standar akuntansi keuangan yang ditujukan guna mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta dapat memacu perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Implementasi SAK EMKM ini sejak 1 Januari 2018.

Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan harus disiapkan oleh pengusaha UMKM terdiri dari beberapa komponen, meliputi dokumen yang menggambarkan informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas suatu organisasi. Komponen-komponen dalam laporan posisi keuangan meliputi kas dan setara kas, inventaris, aset tetap, hutang dagang dan bank, serta ekuitas. Berdasarkan SAK EMKM 2016 (5.1:11), laporan laba rugi mencerminkan performa finansial suatu organisasi dalam waktu tertentu, yang di dalamnya meliputi beberapa kompen antara lain pendapatan, serta beban keuangan maupun pajak. Sementara itu, berdasarkan SAK EMKM 2016 (6.1:13), catatan yang menyertai laporan keuangan harus berisikan penjelasan yang menyatakan laporan yang telah disusun mengikuti ketentuan SAK EMKM, ringkasan kebijakan akuntansi yang digunakan, serta penjelasan lainnya serta detail mengenai transaksi dan material. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pemahaman para pengguna laporan keuangan. Di samping itu, SAK EMKM juga mengatur komponen-komponen laporan keuangan lainnya.

Berdasarkan SAK EMKM 2016 (2.22:6), aset akan dicatat pada laporan posisi keuangan suatu entitas apabila memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang dan jika nilai atau biaya dari aset tersebut dapat diestimasi dengan akurat. Menurut SAK EMKM 2016 (8.2:19) Entitas mencatat persediaan pada laporan keuangannya berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Penentuan biaya perolehan persediaan, entitas memiliki opsi antara metode MPKP atau metode rerata tertimbang. Berdasarkan SAK EMKM 2016 (11.3:25) aset tetap ialah aset milik entitas yang diperuntukan guna mendukung operasional bisnisnya secara rutin dan untuk beberapa periode. Berlandaskan SAK EMKM 2016 (11.13:26), beban penyusutan aset tetap tercatat pada pelaporan laba rugi. Adapun prosesnya melalui metode garis lurus dan saldo menurun, adapun dalam perhitungannya, nilai sisa dari aset tidak diikutsertakan.

Berdasarkan SAK EMKM 2016 (2.23:6), liabilitas dicatat ketika entitas memiliki kewajiban yang mengharuskan untuk mengeluarkan sumber daya dimana sumber daya tersebut bermanfaat secara ekonomi yang jelas dan pasti untuk memenuhi kewajiban. Pengakuan liabilitas dihentikan atau dihapus dari laporan keuangan ketika kewajiban tersebut telah dibayar penuh dengan menggunakan uang tunai, aset yang memiliki likuiditas setara dengan kas, atau dengan menggunakan aset non kas. Berdasarkan SAK EMKM 2016 (2.7:4), ekuitas merupakan sisa nilai dari aset suatu entitas setelah dikurangi keseluruhan liabilitas. Klaim ekuitas adalah hak tertentu yang dimiliki atas sisa nilai aset entitas sesudah semua kewajiban atau liabilitas telah dibayarkan.

Berdasarkan SAK EMKM 2016 (2.24:6), penghasilan dicatat saat adanya penambahan potensi manfaat ekonomi dimasa depan terkait kenaikan aset ataupun pengurangan liabilitas, di mana kenaikannya dapat diestimasi dengan akurat. Berdasarkan SAK EMKM 2016 (2.25:6), Beban dicatat saat adanya penurunan potensi kegunaan ekonomi dimasa mendatang terkait penurunan aset ataupun peningkatan liabilitas, di mana penurunannya dapat diestimasi dengan akurat. Didasarkan pada SAK EMKM 2016 (2.19:5), Entitas menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip akrual, di mana entitas menyetujui beberapa pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, perolehan, serta beban.

Si APIK adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama IAI, yang dikhususkan bagi UMKM. Metode pencatatan yang digunakan dalam aplikasi tersebut yaitu debit-kredit menerapkan sistem satu masukan sesuai jenis transaksi. Aplikasi Si Apik memiliki kemampuan untuk menyajikan laporan meliputi neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan detail dari pos-pos keuangan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan komparatif. Dalam studi kualitatif, penghimpunan datanya berupa informasi tertulis maupun lisan dari individu atau tindakan yang bisa diobservasi. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data deskriptif serta untuk memahami suatu kejadian berdasarkan informasi yang terkumpul.

Informan pada studi ini adalah Bapak Timbul sebagai pemilik Anugerah Bali Computer. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria dimana informan harus berkaitan dengan pencatatan keuangan dan pembuatan laporan keuangan Anugrah Bali Computer. Sedangkan datanya berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari data keuangan usaha. Pada studi ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data berupa observasi dengan cara mengamati objek penelitian, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi.

Miles & Huberman menjelaskan analisis data kualitatif melalui proses interaktif dan dilakukan hingga tuntas dan data yang diperoleh jelas. Langkah-langkah dalam analisis data diantaranya: mereduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Peneliti menggunakan uji kredibilitas guna mengetahui keabsahan data, yang dalam studi ini dilakukan dengan teknik triangulasi.

Studi ini akan menerapkan teknik triangulasi dalam menganalisis keabsahan data. Triangulasi teknik dilakukan melalui proses pengecekan data dari sumber yang sama dan menggunakan beberapa metode penghimpunan data.

mencatatnya hanya sebagai pembelian barang tidak ada daftar aset tetap yang tercatat. Dan karena tidak ada daftar aset tetap maka penyusutan juga tidak di tercatat. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Timbul selaku pemilik pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pada pukul 09.00 WITA:

“Untuk persediaan, pertama kami catat dulu pembelian barangnya, kemudian baru catat barang apa saja yang kami beli. Barang yang pertama kami beli yang kami jual terlebih dahulu. Untuk pembelian peralatan dan bangunan kami catat beli. Tapi kami tidak membuat daftar apa saja peralatan dan bangunan yang kami miliki karena itu sudah lama sekali kami beli. Kami tidak melakukan pencatatan penyusutan, alat-alat dan lainnya kami pakai begitu saja kalau rusak ya kami perbaiki atau kami beli baru.”

Untuk modal, Anugerah Bali Computer hanya mencatat di awal saja ditambah lagi bahwa tidak adanya laporan posisi keuangan menyebabkan tidak adanya modal yang di catat oleh Anugerah Bali Computer. Hal ini juga berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Timbul selaku pemilik pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pada pukul 09.00 WITA:

“Modal awal saya catat di awal pada saat pertama kali saya memulai usaha. Tapi seterusnya saya sudah tidak mencatat lagi.”

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa hasil observasi sesuai dengan hasil wawancara dimana Anugerah Bali Computer hanya membuat laporan laba rugi saja. Laporan laba rugi Anugerah Bali Computer berisi informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan serta keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran secara kredit dan secara tunai dipisah. Karena pencatatan tersebut dipisah sehingga Anugerah Bali Computer juga telah mencatat piutang dagang dan hutang dagangnya. Untuk rumus pencatatan persediaan Anugerah Bali Computer adalah biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP). Untuk pembelian barang secara kredit memiliki alur dimana ketika pembelian dilakukan

dan barang serta nota diterima maka akan langsung di catat barang apa saja yang di beli atau bertambah namun jika pembelian secara tunai maka pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima begitu pula untuk penjualan. Anugerah Bali Computer tidak mencatat pembelian aset tetap sebagai aset tetap, namun langsung mencatat pembelian aset sebagai beban pada periode pembelian. Sehingga Anugerah Bali Computer juga tidak mencatat penyusutan aset tetapnya. Terkait pencatatan modal, Anugerah Bali Computer tidak mencatat jumlah modal.

Berlandaskan SAK EMKM laporan laba rugi menggambarkan performa keuangan suatu entitas, berisikan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu, dan dari hasil wawancara serta observasi menunjukkan laporan laba rugi Anugerah Bali Computer telah berisi informasi terkait penghasilan dan beban saat pelaporan serta keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Anugerah Bali Computer tidak laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, Sehingga laporan keuangan Anugerah Bali Computer tidak mengikuti ketentuan dalam SAK EMKM.

Selain dari jenis laporan keuangan, SAK EMKM juga mengatur terkait komponen-komponen dalam laporan keuangan UMKM, yang pertama adalah bagian aset yaitu persediaan. Berlandaskan SAK EMKM, entitas menyetujui persediaan saat didapatkan sebesar biaya yang diperoleh. Entitas mempunyai pilihan menggunakan metode MPKP atau pendekatan rerata tertimbang dalam pengelolaan biaya. Dan hasil wawancara serta observasi menunjukkan bahwa Anugerah Bali Computer telah melakukan pencatatan persediaan barang dagangnya sebesar biaya perolehannya dan menggunakan rumus MPKP dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap, Anugerah Bali Computer tidak mencatat aset tetap sebagai aset, namun langsung mencatatnya sebagai beban pada saat periode pembelian aset tetap. Hal ini menyebabkan pencatatan aset Anugerah Bali Computer tidak mengikuti ketentuan dalam SAK EMKM.

Unsur kedua adalah liabilitas, berdasarkan SAK EMKM Liabilitas dicatat dalam laporan keuangan ketika terdapat kewajiban yang memerlukan penggunaan sumber daya ekonomi yang pasti untuk memenuhinya, dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan akurat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Anugerah Bali Computer telah melakukan pencatatan hutang dagangnya yang dimana setiap pembelian secara kredit dilakukan maka akan dicatat pada jurnal pembelian yang berisi tanggal pembelian, jumlah barang yang di beli, total biaya yang ditagihkan, nama pemasok dan termin atau batas waktu pelunasan. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa Anugerah Bali Computer dalam pencatatan hutangnya sudah sesuai aturan dalam SAK EMKM.

Unsur ketiga adalah Ekuitas atau modal, yaitu hak residual atas aset entitas sesudah dikurangkan semua liabilitasnya. Dan dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Anugerah Bali Computer tidak mencatat modalnya karena modalnya hanya dicatat di awal dan tidak dibuatkannya laporan posisi keuangan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Anugerah Bali Computer dalam mencatat Modalnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam SAK EMKM.

Unsur keempat adalah penghasilan. Berdasarkan SAK EMKM, penghasilan dicatat pada laporan laba rugi saat adanya penambahan potensi manfaat ekonomi terkait kenaikan aset ataupun pengurangan liabilitas, di mana kenaikannya bisa diestimasi secara akurat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Anugerah Bali Computer telah mencatat pendapatannya atau dapat diukur secara andal. Hal ini ditunjukkan dimana Anugerah Bali Computer mengakui penghasilannya di laporan laba rugi ada kenaikan manfaat ekonomi kedepannya terkait kenaikan aset ataupun penurunan liabilitasnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam pencatatan penghasilannya Anugerah Bali Computer telah sesuai dengan ketentuan dalam SAK EMKM.

Unsur selanjutnya adalah beban. Berdasarkan SAK EMKM, beban dicatat di laporan laba rugi saat adanya penurunan potensi manfaat ekonomi terkait penurunan aset ataupun peningkatan liabilitas, di mana penurunan tersebut bisa diestimasi dengan akurat. Dari hasil wawancara dan observasi, Anugerah Bali Computer telah mencatat beban pada jurnal pengeluaran yang dimana pencatatan tersebut menunjukkan penurunan aset sehingga data tersebut dapat diukur secara andal. Namun terdapat satu beban yang tidak dicantumkan pada laporan tersebut, yaitu beban penyusutan aset tetap. Hal ini terjadi karena Anugerah Bali Computer tidak mencatat penyusutan aset tetapnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pencatatan beban, Anugerah Bali Computer tidak mengikuti ketentuan dalam SAK EMKM.

Berlandaskan SAK EMKM, Entitas menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip akrual, di mana entitas menyetujui beberapa pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, perolehan, serta beban. Melihat pos-pos diakui sebagai liabilitas dan penghasilan sudah memenuhi makna dan ketentuan pengakuan namun pos-pos seperti aset, ekuitas dan beban tidak memenuhi makna dan ketentuan pengakuan. Maka dapat diartikan bahwa Anugerah Bali Computer dalam menggunakan dasar akrual sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya tidak mengikuti ketentuan dalam SAK EMKM.

Tabel 1. Hasil Triangulasi Data

Unsur-Unsur dan Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Triangulasi Data
Kas dan setara kas	Ada	Ada	Valid
Persediaan	Ada	Ada	Valid
Aset tetap	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Penyusutan aset tetap	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Liabilitas	Ada	Ada	Valid
Ekuitas	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Penghasilan	Ada	Ada	Valid
Beban	Ada	Ada	Valid
Dasar akrual	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Laporan laba rugi	Ada	Ada	Valid
Laporan posisi keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Catatan atas laporan keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Valid

Sumber : Diolah Mandiri 2024

Data yang dimasukkan ke aplikasi Si Apik adalah data profil UMKM. Profil tersebut meliputi logo badan usaha, nama badan usaha, nomor telepon pemilik, nama pemilik, jenis usaha, KTP pemilik. Setelah *input* data profil usaha, langkah selanjutnya adalah mengisi manajemen data. Berdasarkan observasi, pemilik hanya mengisi data barang dagang, data bank, data aset tetap, data pemasok dan data pelanggan serta saldo awal karena tidak semua fitur pada Si Apik yang diperlukan pada usaha ini. Selanjutnya Pemilik dapat langsung melakukan *input* transaksi setelah mengisi manajemen data. *Input* transaksi yang dilakukan seperti, *input* transaksi penjualan, pembelian dan pengeluaran. Hasil *output* dari Si Apik berlandaskan SAK EMKM mencakup laporan keuangan dan laporan laba rugi. Namun, untuk memenuhi standar pelaporan keuangan SAK EMKM, juga disusun Catatan atas Laporan Keuangan secara manual.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil temuan dari Anugerah Bali Computer hanya membuat laporan laba rugi dan untuk unsur-unsur laporan keuangan, seperti liabilitas dan penghasilan telah mengikuti SAK EMKM sedangkan untuk unsur aset, ekuitas, beban serta dasar akrual tidak sesuai ketentuan SAK EMKM. Kesimpulan bahwa laporan keuangan Anugerah Bali Computer tidak sesuai SAK EMKM.

Implementasi pembuatan laporan keuangan dalam aplikasi Si Apik melalui dua tahapan yakni *input* dan *output*. Proses *Input* dilakukan mulai dari pembuatan atau pendaftaran sampai penginputan transaksi. Sedangkan *Output* dari aplikasi Si Apik berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pencatatan tambahan untuk laporan keuangan dalam Si Apik masih kurang lengkap, sehingga peneliti harus menyusunnya secara manual.

Saran yang dapat penulis berikan bagi para pelaku usaha yaitu Anugerah Bali Computer adalah untuk lebih rutin menggunakan Si Apik dalam menyusun laporan keuangannya. Sedangkan untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk menerapkan SAK EMKM dan Si Apik pada berbagai jenis usaha agar dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh setiap jenis usaha.

Daftar Pustaka

Dwi, B. O., & Agustina, Y. (2020). Implementasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Pastellia Intermoda Bumi Serpong Damai dengan menggunakan aplikasi Si Apik periode 2018 – 2019. *4*(2).

Hasan, A., & Gusnardi. (2018). Prospek implementasi standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah berbasis kualitas laporan keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2018.

Hendika, W., & Wibowo, D. (2015). Analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, *29*.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Kurniawansyah, D. (2016). Penerapan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *2*(4).

Nuvitasari, A., Citra, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *3*(3).

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. *086507*, 1–121.

Rizki, T., & Rahayuningsih, D. A. (2021). Faktor yang mendukung penerapan konservatisme akuntansi perusahaan manufaktur di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *1*(3).

Setyaningsih, T., & Farina, K. (2021). Pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM (Studi kasus pada UMKM di PD Pasar Jaya Kramat Jati). *10*(1).

Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol. *1*(2).

Sugiyono. (2014). Metode penelitian manajemen. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. CV. Alfabeta.

Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Risiko Investasi Dan Modal Minimal Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa S1 Prodi Akuntansi Universitas Hindu Indonesia)

**Luh Putu Dian Athari Cahyani ⁽¹⁾
Ni Wayan Yuniasih ⁽²⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: dian.atari2001@gmail.com

ABSTRACT

The economy of a nation is significantly influenced by the pivotal role that the capital market assume because it has two objectives, covering economic and financial functions. The goal or aim of this study is to evaluate and analyze the impact of students' familiarity with investment, their perception of risk, and the minimum capital they can invest, on their tendency to participate in the capital market. The research focused on a population of 368 majoring in Accounting FEBP UNHI in semesters 5 (2019) and 7 (2020). Through the application of The mathematical equation known as the Slovin formula and Analysis involving multiple linear regression, A group of 78 participants was included in the sample determined. The findings derived from this study indicate that: (1) A higher level of Knowledge related to investments has a beneficial and statistically significant effect on students' interest in participating in the capital market. (2) Student perceptions of investment risk also have a large and positive Influence on students' enthusiasm for the stock market. (3) The amount of minimum investment capital has a positive and Notable impact on the tendency of students to invest Within the financial market.

Keywords: *Investment knowledge, Perceived investment risk, Minimum capital investment, Student Investment Interest*

PENDAHULUAN

Didasarkan informasi (KSEI) Kustodian Sentral Efek Indonesia, investasi di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Kenaikan signifikan dalam jumlah investor di Indonesia ini disebabkan oleh peningkatan minat masyarakat untuk berinvestasi. Hal ini juga terjadi di Provinsi Bali, yang mengalami pertumbuhan ekonomi setelah pandemi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa selama periode Juli - September 2022, ekonomi Bali tumbuh sebesar 8,09% dibandingkan dengan periode sebelumnya (sumber: kominfo.go.id, 2022).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali memiliki dampak positif terhadap peningkatan jumlah investor saham di wilayah tersebut. In dibuktikan dengan menlonjaknya jumlah partisipan di pasar modal pada bulan September 2022, yang sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi, terutama dengan dukungan kemajuan teknologi digital. Dalam hal usia, dapat diamati bahwa investor saham di Bali didominasi oleh individu berusia 18-25 tahun, yang mencapai 35 persen dari total partisipan. Sementara itu, kelompok usia 26-30 tahun=23%, usia 31-40 tahun=23%, dan sisanya= 19% terdiri dari usia 41-100 tahun. Kemudian

dari segi pekerjaan, pegawai swasta menduduki peringkat dari atas dengan proporsi 40% dari total investor. Selanjutnya, terdapat pelajar sebanyak 20%, pengusaha 15%, dan sekitar 13% lainnya. Pegawai negeri menyumbang sekitar 5%, sementara ibu rumah tangga mencapai 4%, pensiunan 1%, TNI/Polri 0%, dan guru sekitar 1%. Proyeksi ke depannya menunjukkan bahwa minat masyarakat Bali terhadap investasi saham diperkirakan akan terus meningkat, dengan jumlah investor saham yang terus bertambah (bisnisbali.com, 2022).

Minat investasi adalah dorongan kuat atau keinginan seseorang untuk menggali pengetahuan tentang investasi dan pada akhirnya mulai melakukan investasi. Faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi termasuk pengetahuan tentang investasi. Pengetahuan merupakan fondasi dari pemahaman tentang suatu konsep atau objek tertentu, dan mengerti dasar mengenai investasi yang sehingga dapat membantu investor dalam oebfambilan sebuah keputusan. Keputusan yang didasarkan oleh pengetahuan memiliki potensi untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul melalui analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain pemahaman/pengetahuan mengenai investasi juga diperlukan fasilitas pendukung dalam upaya meningkatkan invermasi pada pasar modal. selain pengetahuan investasi, diperlukan juga fasilitas pendukung lainnya agar dapat menarik berbagai lapisan masyarakat untuk memulai investasi di Pasar Modal. Oleh sebab itu, (BEI) telah berkolaborasi bersama (KSEI) bersama perusahaan sekuritas untuk mengagendakan berbagai bentuk kegiatan yakni talkshow, seminar, hingga workshop, serta (SPM) Sekolah Pasar Modal (Merawati & Putra, 2015).

Selain itu, modal minimum juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap minat berinvestasi dalam penelitian ini. Dari sekian banyak investor, terutama seorang mahasiswa, berpendapat bahwa investasi memerlukan jumlah modal yang besar. Sebagian besar mahasiswa masih bergantung pada uang dari orangtua dan ini membuat mereka merasa ragu untuk memulai investasi di pasar modal.

Inisiatif untuk mengenalkan dunia akademis terhadap pasar modal adalah dengan dibuatnya ruang pameran oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Galeri BEI menganut konsep (3 dalam 1) melibatkan kerja sama antara BEI, universitas, dan perusahaan sekuritas. Tujuannya agar Galeri BEI tidak hanya memberikan wawasan mengenai pasar modal dari sudut pandang teoritis, namun juga dari sudut praktis. Di Universitas Hindu Indonesia, Galeri BEI didirikan pada tahun 2019. Ketua Galeri Investasi UNHI, Agus Artawan (2022), mencatat bahwa minat berinvestasi mahasiswa di UNHI masih tergolong rendah. Ini disebabkan karena sedikitnya jumlah mahasiswa, terutama yang mengambil jurusan akuntansi, yang aktif berpartisipasi dalam investasi.

Salah satu mahasiswa jurusan akuntansi menemukan bahwa mata kuliah pasar modal adalah salah satu materi kuliah yang memerlukan metode belajar luring. Hal ini disebabkan karena materi yang diajarkan dalam mata kuliah tersebut tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa melibatkan praktik langsung, minimal dalam bentuk aktivitas simulasi. Mahasiswa perlu mengalami sendiri aktivitas di pasar modal, terutama dalam melakukan pembelian dan penjualan saham dengan menggunakan kondisi nyata, termasuk alat, data, waktu, dan faktor-faktor lainnya. Dalam era berkembangnya teknologi informasi yang pesat di era ini, mencapai hal ini menjadi lebih mudah.

KAJIAN PUSTAKA

Planned Behavior Theory yakni di kembangkan dari *Reasoned Action Theory* yang diperkenalkan melalui (Icak Ajzen, 1991). Dalam ini teori ini mengatakan bahwa sikap orang akan terlihat berdasarkan keinginan untuk melakukan perilaku tersebut. Secara ringkas, apabila orang mempunyai ketertarikan untuk mulai berinvestasi, maka mereka cenderung akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan mereka untuk berinvestasi.

Teori Planned Behavior mengatakan jika sikap seseorang dapat dikendalikan oleh niat mereka untuk melakukan suatu tindakan, sehingga perilaku tersebut dapat diprediksi (Ajzen, 1991). Pada dasarnya, teori ini mencakup sikap seseorang terhadap tindakan tersebut, norma subjektif yang memengaruhi persepsi mereka, dan juga keyakinan tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan tindakan tersebut (Ajzen, 1991). Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu hal, pengetahuan ini dapat menjadi pendorong bagi mereka untuk bertindak. Seperti yang diungkapkan oleh Notoatmodjo (2014:15), pengetahuan atau pemahaman kognitif memegang peran begitu penting dalam membentuk perilaku seseorang.

H1: Minat Investasi dipengaruhi secara positif dan kuat oleh pengetahuan investasi

Didasarkan oleh teori, dapat dinyatakan tidak ada individu yang secara umum menyukai adanya resiko. bedanya terletak pada sejauh mana seseorang bersedia menerima resiko. Yang Mampu atau bersedia menerima resiko yang rendah, sementara ada Mereka yang bersedia menghadapi resiko yang lebih tinggi.. *Planned Behavior Theory* dari Ajzen menjelaskan bahwa sikap seseorang dipengaruhi oleh minat mereka dan persepsi mengenai pengendalian diri. Oleh karena itu, individu yang berencana untuk melakukan investasi akan cenderung mempertimbangkan resiko yang mungkin mereka hadapi, baik itu resiko rendah maupun resiko tinggi, sebelum mereka benar-benar melakukan investasi. Risiko ini menjadi Satu aspek yang perlu ditimbang dalam mengambil keputusan investasi. seperti yang dijelaskan dalam konsep trade-off.

H2 : Minat Investasi dipengaruhi secara positif dan kuat oleh persepsi resiko

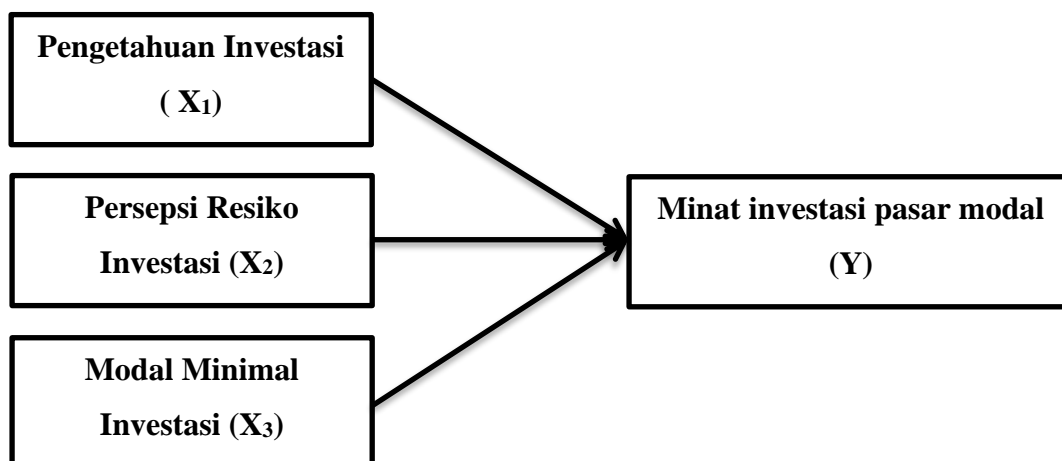
Factor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan saat berani membuat keputusan berinvestasi yakni modal minimal. (Pajar, 2017). Modal minimal seringkali berhubungan dengan penawaran yang besar yang ditawarkan di pusat perbelanjaan, dan tawaran ini dapat mendorong orang untuk membelanjakan uangnya. Nisa (2017) menunjukkan tentang modal minimal mempunyai hasil yang kuat. Temuan N. Hikmah dkk. (2021) dan Burhanudin dkk. (2021), yang mengindikasikan didasarkan pada hasil ini, memiliki modal awal yang terbatas secara positif dan kuat memengaruhi minat investasi mahasiswa. Berdasarkan itu, dapat disimpulkan bahwa Minat mahasiswa dalam hal ini adalah berinvestasi yang lebih tinggi ketika modal yang diperlukan relatif lebih kecil.

H3: Minat investasi dipengaruhi secara positif dan kuat oleh modal minimal

METODE PENELITIAN

Rangka konseptual dipakai untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai hubungan antar variable penelitian. Penelitian ini menggunakan *quantitative method* dan Menggunakan survei dengan kuesioner sebagai metode untuk mengumpulkan informasi. yang disampaikan melalui Google form (data primer). Populasi adalah mahasiswa jurusan Akuntansi di FEBP UNHI yang berada pada semester 5 dan 7, karena pada semester ini mereka biasanya telah mengikuti mata kuliah pasar modal secara langsung. Jumlah sampel yang ditentukan adalah sebanyak 78,4 responden, yang dibulatkan menjadi 78 responden setelahnya. Selanjutnya, jumlah sampel pada masing-masing semester ditentukan sesuai dengan proporsi jumlah mahasiswa yang sedang diteliti. Maka, didasarkan oleh hal itu, kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Research Framework



Apabila data telah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah dilakukannya analisis pada data, yang terdiri dari serangkaian tahapan yang akan dijelaskan berikut ini.

1. *Descriptive Statistical Analysis* dipakai untuk mengelola, Menggambarkan atau mengilustrasikan data Menyajikan data yang telah dikumpulkan tanpa upaya untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi yang berlaku, (2018:147).
2. Validity Test adalah langkah yang dipakai untuk menilai apakah suatu kuesioner memiliki keabsahan atau validitas. Validitas suatu instrumen atau kuesioner dianggap terpenuhi jika pertanyaan yang terdapat di dalamnya secara memadai mencerminkan aspek yang dimaksud oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51).
3. Selain itu, Uji Keandalan dipakai untuk menilai suatu kuisisioner dapat diandalkan atau dipercaya. Suatu instrumen dalam kuisisioner dianggap reliable jika nilai (α) *Cronbach Alpha* melebihi angka 0.60.
4. *Normality Test*, untuk menentukan *Regretion Model*, Independen variabel dan Dependen variable memiliki distribusi yang mengikuti pola normal, seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2018:161). Dengan menggunakan uji "Kolmogorov-Smirnov". dianggap terdistribusi normal jika nilai "Asymp. Sig" (2-tailed) > alpha (0.5) (Ghozali, 2018:154).
5. *Multikolinearity Test* dipakai untuk menilai *Regretion Model*, menunjukkan adanya korelasi antara Independen Variabel. Dengan melakukan perbandingan antara nilai toleransi dan "VIF," peneliti dapat menilai keberadaan multikolinearitas. Jika tolarence value kurang dari 0,1 dan VIF melebihi 10, maka dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas ada dalam *Regretion model* (Ghozali, 2016).
6. Uji heteroskedastisitas adalah untuk menilai dalam *Regretion Model* ada korelasi antara Independen variable. Jika terdapat korelasi, maka hal ini menandakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak bersifat ortogonal atau tidak saling bebas.
7. Dalam *Examining linear regression*, digunakan persamaan ($Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$).
8. Uji (R^2) ini dilaksanakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan seberapa besarnya pengaruh bersamaan dari Independen Variable memengaruhi Dependen Variable yang dapat dinyatakan melalui nilai adjusted R-Squared (Ghozali, 2016).
9. Uji kelayakan model (Uji F), Kriteria pengujian: 1. Bila nilai P- value <0.05, itu memperlihatkan bahwa model ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian. 2. Bila nilai P-value >0.05, itu memperlihatkan bahwa model ini tidak layak untuk dipakai dalam penelitian

10. Uji t-statistik (t-test) akan menunjukkan bahwa apabila (Sig.) < 0.05, maka secara parsial Independen Variable memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. (Kuncoro, 2013:244).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil terdokumentasi pada lampiran yang tersedia, karakteristik responden pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, dari segi (Jenis kelamin), mayoritas responden yakni perempuan = 64 (orang) (82,1%). Kedua, dalam hal karakteristik berdasarkan angkatan dan semester, mayoritas responden berasal dari angkatan 2019, yang berjumlah 42 orang (53,8%).

Table of Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev
X1	78	29,00	45,00	38,7308	4,08886
X2	78	17,00	30,00	24,3462	3,53765
X3	78	18,00	30,00	25,1667	3,06813
Y	78	26,00	40,00	34,7564	3,68988
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data Diolah (2023)

Dijelaskan bahwa sampel penelitian terdiri dari 78 responden dengan 4 variabel yang terlibat, yakni (pengetahuan investasi) = X^1 , (persepsi risiko investasi) = X^2 , (modal minimal investasi) = X^3 , dan (minat investasi) = Y. Variabel X^1 memiliki rentang nilai = 29,00 hingga 45,00, dengan nilai (mean) = 38,73 dan nilai Std.Dev = 4,088. Variabel persepsi risiko investasi memiliki rentang nilai antara = 17,00 hingga 30,00, dengan nilai (mean) = 24,34 dan nilai Std. Dev = 3,537. Variabel modal minimal investasi memiliki rentang nilai antara = 18,00 hingga 30,00, (mean) = 25,16, Std.Dev = 3,068. Terakhir, variabel minat investasi memiliki rentang nilai antara 26,00 hingga 40,00, dengan nilai (mean) = 34,75 dan nilai Std. Dev = 3,689.

Hasil pengujian validitas memaparkan bahwa setiap indikator dalam variable (X^1), (X^2), (X^3), dan (Y) memiliki korelasi > 0,30. Dengan demikian, kesimpulannya yakni semua indikator sudah memenuhi kriteria validitas data yang ditetapkan.

Dari uji yang terdokumentasi pada lampiran 6, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap indikator dalam variable 1), (X2), (X3), dan (Y) punya nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Oleh sebab itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa instrumen secara keseluruhan adalah reliabel.

Normality Test
“One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test”

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,89563680
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,057
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,a}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Diolah (2023)

Uji yang menggunakan “*One-Sample Kolmogorov – Smirnov*”, memperlihatkan tentang nilai “*Asymp. Sig (2-tailed)*” =0,200 > tingkat signifikansi= 5 %(0,05). Ini memperlihatkan bahwa nilai residual dalam Regretion Model yang telah diuji memiliki distribusi yang mendekati normal.

Table Of Multicollinearity Test

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardizd Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	5,538	2,165		2,558	,013		
	X1	,336	,079	,372	4,235	,000	,461	2,167
	X2	,369	,094	,354	3,947	,000	,443	2,256
	X3	,287	,109	,238	2,620	,011	,431	2,322

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Diolah (2023)

Multicollinearity Test memperlihatkan statistik kolinearitas dari pengetahuan investasi (X1) mempunyai nilai toleransi=0,461 dan nilai VIF= 2,167. Variabel persepsi risiko investasi (X2) mempunyai nilai toleransi=0,443 dan nilai VIF= 2,256, variabel modal minimum investasi (X3) mempunyai nilai toleransi=0,431 dan nilai VIF= 2,322. Oleh sebab itu, seluruh variabel mempunyai tolerance value > 0.10(10%) dan nilai VIF < 10. Maka , didasarkan oleh nilai toleransi dan VIF di variable dalam penelitian ini, tidak terdapat indikasi multikolinearitas.

Heteroscedasticity Test Results

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,177	1,340		2,372	,020
	X1	-,032	,049	-,108	-,642	,523
	X2	-,049	,058	-,146	-,849	,399

X2	.369	.094	.354	3.947	.000
X3	.287	.109	.238	2.620	.011

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil perhitungan uji t pada uji parsial disimpulkan bahwa variabel pengetahuan investasi mempunyai koefisien regresi= 0,336 dengan tingkat Sig. = 0.000< α = 0.05. ini memperlihatkan bahwa pengetahuan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil investasi, maka, H1 Diterima.

Selain itu, perhitungan uji t variable persepsi risiko investasi menunjukkan koefisien regresi= 0.369, Sig=0.000<α = 0,05 ini mengindikasikan, persepsi risiko investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat berinvestasi, sehingga H2 juga diterima.

Terakhir, perhitungan uji t variabel penanaman modal minimum menunjukkan koefisien regresi=0.287, Sig.=0.011<α=0.05. Kondisi ini memperlihatkan modal minimum investasi memiliki pengaruh positif dan sangat kuat terhadap tingkat bunga investasi, sehingga hipotesis 3 juga diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Maka dari hasil analisis disimpulkan minat berinvestasi di Pasar modal terpengaruh oleh. tiga faktor yaitu pengetahuan seputar investasi, persepsi risiko berinvestasi dan minimal modal investasi.Literasi investasi mempunyai efek terhadap ketertarikan mahasiswa akuntansi Universitas Hindu Indonesia dalam berinvestasi di pasar modal. Persepsi resiko investasi juga mempunyai pengaruh Pengaruh yang positif dan sangat kuat terhadap minat mahasiswa akuntansi Universitas Hindu Indonesia dalam berinvestasi di pasar modal.. Setelah itu, minimnya modal investasi juga mempunyai Pengaruh yang positif dan sangat kuat terhadap minat mahasiswa akuntansi Universitas Hindu Indonesia dalam berinvestasi di pasar modal. Berikut adalah saran yang dapat dijabarkan:

1. Bagi Universitas, disarankan untuk terus meningkatkan dan mendukung kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang investasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sosialisasi, seminar pasar modal, atau kolaborasi dengan kelompok mahasiswa yang berfokus pada studi pasar modal di setiap universitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam berinvestasi.

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha , Volume 12, Nomor 1, 13-22.

ERMANDO, B. (2019). Bab II Kajian Pustaka 2.1 Landasan Teori 2.1.1 TheoryOf Planned Behaviour (TPB). Link : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16117/05.2%20bab%20.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Luky, M. R. Minat Berinvestasi di Pasar Modal : Aplikasi Theory PlannedBehaviour Serta Persepsi Berinvestasi di Kalangan Mahasiswa.

Dwiyani Sudaryanti, M. E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal dan Aktivitas Galeri Investasi Universitas Islam Malang Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang). E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang , 09, 74-83.

Junaidi, M. Y. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal Investasi dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang). E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IslamMalang , 11, 49-57.

Utami, N. K. (2022). Pengaruh Investment Knowledge, Modal Minimal Investasi dan Keajuan Teknologi Informasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal.

Herawati, N. T., & Prasini, N. K. (2022). Pengaruh Motivasi, Modal Investasi Minimal Dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Mahasiswa Universitas Negeri di Bali Untuk Berinvestasi Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana. JIMAT (Journal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha , 13, 91-102.

Eka, I. G., & Harta, S. (2023). Pengaruh Risiko Terhadap Minat Investasi Dengan Pengetahuan Investasi Sebagai Moderasi Terkait Kasus Trading Binomo Dan Robottrading. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 15(1), 139–148.

Bisnisbali.com. Investor Saham Bali Kembali Bertambah 19,81 Persen. Diakses dari website : <http://bisnisbali.com/investor-saham-bali-kembali- bertambah- 1981-persen/>.

Pengaruh *Good Corporate Governance* , *Whistleblowing System* Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan//Kecurangan (*Fraud*) Dalam Lembaga Perkreditan Desa.

I Ketut Bagus Demi Ryana Putra ⁽¹⁾

Ni Komang Sumadi ⁽²⁾

Ni Wayan Alit Erlinawati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: Bagussdemi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence on the Effect of Good Corporate Governance , Whistleblowing System and Internal Control on Fraud Prevention in village Credit Institutions in Mengwi Badung district. The Mengwi district LPD was chosen in this study because of the phenomenon of fraud that occurred in one of the Mengwi District LPDs. The number of samples taken was 161 respondents. Data collection techniques by observation, interviews, and questionnaires. Multiple linear regression analysis technique is the analysis technique used in this study. It was found that Good Corporate Governance had a positive and significant effect on the variable of accounting (fraud), Whistleblowing System had a positive and significant effect on the variable of accounting (fraud) and Internal Control had a positive and significant effect on accounting (fraud) in the Village Credit Institution Mengwi district. This research can support the fraud triangle theory as a theoretical research implication. It is hoped that this research can provide input to improve Good Corporate Governance, Whistleblowing System, and Internal Control against fraud committed by LPD internal parties with practical research implications.

Keywords: *Good Corporate Governance, Whistleblowing System, and Internal Control of Fraud Prevention*

PENDAHULUAN

LPD, yang merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh komunitas Desa Adat di Bali, berlandaskan konsep Tri Hita Karana, terutama mengarah pada kegiatan keagamaan dan budaya sosial. Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1988 dan No. 8 Tahun 2002 tentang LPD, tujuan didirikannya LPD adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dengan meningkatkan budaya menabung di kalangan masyarakat desa dan memberikan kredit kepada usaha kecil. Hal ini dilakukan untuk menghapus bentuk eksploitasi dalam sistem kredit, memberikan peluang yang sama bagi usaha di tingkat desa, dan meningkatkan tingkat moneter di pedesaan.

Kecurangan, yang juga dikenal sebagai *fraud*, adalah tindakan disengaja yang dilakukan oleh pihak dalam manajemen dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan. Pencegahan terhadap kecurangan bisa dilakukan melalui penerapan pengendalian internal yang efektif, praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta sikap independen dari setiap individu. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk mencegah kecurangan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, integritas,

dan partisipasi. Dalam upaya mencegah kecurangan, penerapan *Good Corporate Governance* membantu membentuk budaya jujur dan etika yang tinggi, serta meningkatkan tanggung jawab manajemen dalam pencegahan dan evaluasi potensi kecurangan. Fungsi *Whistleblowing* merupakan sistem penting dalam mencegah dan mengidentifikasi kecurangan di dalam organisasi atau perusahaan, dan untuk menjalankannya diperlukan peran aktif dari pegawai. Hal ini karena hanya orang dalam organisasi yang bisa menjadi whistleblower, karena mereka merupakan sumber daya berharga untuk meminimalkan kecurangan. Sistem pengendalian intern adalah proses integral yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset perusahaan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam konteks memahami penyebab masalah, terdapat insiden kasus di LPD Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang melibatkan penyimpangan dana atau kasus korupsi di LPD Gulingan Mengwi. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh pengurus LPD di Desa Adat Gulingan Badung, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.30 juta. Kasus ini melibatkan dua tersangka, yaitu Ketua dan Bendahara LPD Desa Adat Gulingan Badung. Kasus korupsi ini dilaporkan oleh salah satu nasabah ke Polres Badung sejak tahun 2021. Setelah dilakukan penyelidikan dan audit oleh Reskrim Polres Badung, ditemukan bahwa modus operandi yang digunakan adalah manipulasi neraca dan penundaan penyeteroran uang nasabah seperti tabungan, deposito, dan kredit dari buku tabungan ke kas LPD. Proses penyelidikan masih terus berlanjut, dengan R Darta dan M Danu sebagai tersangka yang telah ditetapkan. Namun, kemungkinan besar masih ada tersangka lainnya. Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, mengonfirmasi hal tersebut dan menyatakan bahwa masalah di LPD Desa Adat Gulingan telah menetapkan dua tersangka (Bali.tribunnews, 2022).

Berdasarkan fenomena dan pemaparan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System* , Dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Lembaga Perkreditan Desa Gulingan Kecamatan Mengwi”**.

KAJIAN PUSTAKA

Teori agensi adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara dua pihak ekonomi yang memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan. Hubungan agensi terjadi ketika satu atau lebih individu (prinsipal) mengontrak individu lain (agen) untuk melakukan suatu tugas atas nama prinsipal tersebut, dengan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang dianggap terbaik bagi prinsipal. Sementara itu, Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud*

Triangle Theory) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Zimbleman (2014), terdapat tiga komponen dalam segitiga kecurangan yang secara bersama-sama mendorong individu untuk melakukan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*) yang memberikan dorongan awal bagi individu untuk melakukan kecurangan yang dapat berasal dari tekanan dalam organisasi atau kehidupan pribadi, kesempatan (*opportunity*) yang merupakan situasi di mana individu memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan tindakan kecurangan karena kurangnya pengendalian, dan pembenaran (*rationalization*) yang merupakan upaya pembenaran mental sebelum melakukan kecurangan di mana individu merasa bahwa kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan orang lain.

Good Corporate Governance merujuk pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Konsep *Good Corporate Governance* mencakup tiga domain, yaitu negara (*state*), sektor swasta (*private sectors*), dan masyarakat (*society*). Peningkatan efektivitas implementasi *Good Corporate Governance* dalam sebuah lembaga dapat meningkatkan transparansi dan kinerja akuntansi, serta membantu dalam menekan tingkat kecurangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Soleman, 2013) dan (Utama, 2021) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

H₁: *Good Corporate Governance* berpengaruh Positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Whistleblowing adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah dan mengidentifikasi tindakan kecurangan, yang dapat dijelaskan sebagai perilaku yang disengaja di luar batas-batas aturan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sambil merugikan orang lain. Dengan adanya sistem ini, pegawai cenderung lebih termotivasi untuk melaporkan tindakan kecurangan, sehingga dapat mencegah terjadinya fraud di dalam lembaga. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yumia, 2019) dan (Suputra, 2021) menyatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan pencegahan kecurangan (*fraud*).

H₂ : *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Pengendalian internal, juga dikenal sebagai Internal Control, telah didefinisikan oleh COSO (1992) sebagai proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tiga tujuan utama, yaitu efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Sistem pengendalian internal mencakup serangkaian prosedur yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Keberhasilan dalam menerapkan sistem pengendalian internal di pemerintahan desa dapat mengurangi risiko atau

signifikan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi. Artinya semakin baik *Good Corporate Governance* maka Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Mengwi akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil anaalisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai variabel *Whistleblowing System* memiliki pengaruh yang positif sebesar 2,149 dengan tingkat signifikansi 0,036 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi. Artinya semakin baik *Whistleblowing System* yang diberikan maka Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi akan meningkat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai dari variabel Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif sebesar 2,449 dengan tingkat signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi. Artinya semakin tinggi Pengendalian Internal maka Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi akan meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud* pada LPD di Kabupaten Mengwi.
2. *Whistleblowing System* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud* pada LPD di Kabupaten Mengwi.
3. Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud* pada LPD di Kabupaten Mengwi.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan pihak Lembaga Perkraditan Desa (LPD) memahami penerapan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *transparansi* dan pelaksanaan fungsi akuntansi akan semakin baik dan dapat menekan kecurangan.
2. Disarankan pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-kecamatan Mengwi menerapkan *Whistleblowing System* yang mana mekanisme pelaporan ini dapat mencegah terjadinya kecurangan *Fraud*.
3. LPD diharapkan untuk mengurangi risiko kecurangan dengan selalu memperhatikan

pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta menghindari manipulasi data untuk membuat laporan keuangan terlihat positif. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan pengendalian internal sesuai dengan prosedur operasional standar yang ada, dan juga dengan membuka diri terhadap sudut pandang beragam dan menerima masukan dari individu yang kompeten.

4. Bagi peneliti sebelumnya, diharapkan menambahkan variabel bebas seperti Pendidikan dan pelatihan, badan pengawas yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (*Fraud*).

Daftar Pustaka

- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185-194.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga (2021). "Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha, Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Karangasem." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 12.3, 852-864.
- Cattrysse, J. (2005). *Reflections on Corporate Governance and the Role of Internal Auditor*. Belgium: Roularta Media Group.
- Edi, & Victoria, E. (2018). Pembuktian Fraud Triangle Theory Pada Financial. *Jurnal Benefita* 3(3) Oktober 2018 (380-395), 3 (September), 380–395. E-ISSN: 2477- 7862.
- Fitrawansyah. (2014). *Fraud Auditing Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra WacanaMedia.
- Gamayuni, R. R. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Perspektif Fraud Diamond. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 19-34.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Beni Wirakusuma I Gede dan Ery Setiawan Putu (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26: 1545-1569 ISSN: 2302-8556.
- Machado, M. R. R., & Gartner, I. R. (2017). The Cressey hypothesis (1953) and an investigation into the occurrence of corporate fraud : an empirical analysis conducted in Brazilian banking institutions Original Article. ISSN 1808-057X DOI: 10.1590/1808057x201803270, (1953), 1–22. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201803270>
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Wistleblowing Sistem Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Kecerdasan Spritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat).

Umayah Achmad,(2019). Dampak Jabatan Dalam Memoderasi Pengaruh Tekanan, Peluang Dan Rasionalisasi Terhadap Niat Melakukan Fraud : Survei Pada Profesi Akuntan. (*Skripsi*) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Usman, Syahriani. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Utama, K. D. S., & Astawa, I. G. P. B. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi, Good Corporate Governance, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(01), 56-67.

Utari , Ayu Diah, Edy Sujana Ni Made , and Adi Yuniarta (2020). "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Whistleblowing Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Buleleng." *Jurnal Akuntansi Profesi* 10.2, 33-44.

Wulandari, Trisna (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.

Wolfe, David T. and Hermanson, Dana R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*. Vol 74 Issue 12, hal. 1-5.

Zulkarnain, Rifki Mirza. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se- Kota Surakarta). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Menjalani Program Brevet Pajak

Ni Komang Juliantari⁽¹⁾
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
Rai Dwi Andayani W⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: juliantaaarii@gmail.com

ABSTRACT

The tax brevet serves as the initial phase for students and individuals aspiring to embark on a career in taxation, marking their initial foray into the intricacies of tax practices and regulations. Within this context, several factors come into play in shaping students' decisions regarding the pursuit of the tax brevet, encompassing dimensions such as Career Motivation, Quality Motivation, Economic Motivation, and Tax Knowledge Motivation. This research endeavors to delve into the intricate interplay of these motivational factors and their influence on students' inclination towards undertaking the tax brevet program, particularly within the academic framework of the accounting program at Hindu University of Indonesia. In order to comprehensively analyze this phenomenon, the study encompasses a diverse cohort of active students enrolled in the Accounting Study Program spanning the years from 2017 to 2020 at Indonesian Hindu University, constituting a total of 374 individuals who have successfully completed all requisite taxation courses. Employing probability sampling techniques, specifically simple random sampling methods, the study recruited a sample size of 193 respondents, as determined by the Slovin formula. Through the administration of questionnaires calibrated on a Likert scale for data collection purposes, the study gathered valuable insights into the multifaceted motivations driving students' decisions. Leveraging statistical analysis techniques, including multiple linear regression conducted using SPSS 24.0, the research findings elucidate the significant and positive impact of economic motivation, tax knowledge motivation, quality motivation, and career motivation on accounting students' propensity to pursue the tax brevet program, both collectively and individually.

Keywords: Motivation, Tax Knowledge, Economic, Career, Quality, and Tax Brevet.

PENDAHULUAN

Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam mempengaruhi dinamika ekonomi dan administrasi pemerintahan secara keseluruhan. Sebagai salah satu instrumen utama dalam mengatur alokasi sumber daya dan redistribusi pendapatan, sistem perpajakan memainkan peran krusial dalam mendukung keberlangsungan program-program pemerintah yang beragam. Pendapatan yang diperoleh dari pajak tidak hanya diarahkan untuk membiayai program-program publik yang penting, seperti

pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas administrasi pemerintah dalam menyediakan layanan masyarakat yang berkualitas.

Dengan diberlakukannya sistem *self-assessment* di Indonesia, tanggung jawab dan otoritas dalam memenuhi kewajiban perpajakan diberikan kepada para wajib pajak secara mandiri. Mereka bertanggung jawab untuk melaporkan, menghitung, dan melakukan pembayaran pajak yang terhutang harus dibayarkan dengan ketentuan yang diberlakukan. Namun, kompleksitas dan dinamika yang terkait dengan kebijakan perpajakan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa pembayar pajak. Peraturan pajak yang rumit dan perubahan-perubahan dalam kebijakan perpajakan dapat menyulitkan pemahaman mereka tentang kewajiban mereka, bahkan dalam melakukan kalkulasi dan pengelolaan pembayaran pajak yang tepat. Ketidakpastian yang terkait dengan proses perpajakan, bersama dengan persyaratan yang semakin kompleks, dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para pembayar pajak. Ini dapat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak, serta menimbulkan risiko ketidakpatuhan yang berpotensi berujung pada konsekuensi hukum dan finansial. Dengan demikian, pemerintah harus terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap para pembayar pajak, serta untuk mempertimbangkan perbaikan dan penyederhanaan dalam kebijakan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan keadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa jumlah profesi konsultan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang tidak seimbang, sementara jumlah wajib pajak mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Ketika ekonomi suatu negara berkembang, jumlah bisnis dan pendapatan individu juga cenderung meningkat, sehingga banyak orang atau entitas memiliki kewajiban pajak. Hal ini turut memengaruhi pertumbuhan jumlah wajib pajak. Untuk memastikan akurasi jumlah wajib pajak, pemerintah menerapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP sebagai langkah untuk mengidentifikasi secara tepat jumlah wajib pajak yang sebenarnya. Program Brevet Pajak diartikan sebagai program pendidikan atau pelatihan yang bermaksud guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan pada bidang perpajakan. Ini mencakup pemahaman tentang peraturan perpajakan, prosedur pelaporan pajak, serta teknis-teknis terkait lainnya. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada pesertanya agar mereka dapat bekerja secara efektif dalam bidang perpajakan, baik sebagai praktisi pajak maupun dalam kapasitas lain yang berkaitan dengan administrasi dan kepatuhan pajak.

Menurut hasil survei awal yang dijalankan oleh peneliti pada 30 mahasiswa yang sedang mengikuti program studi akuntansi di Universitas Hindu Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yakni sebanyak 60%, menyatakan ketidaktertarikan mereka dalam menjalani

program brevet pajak. Hal tersebut diduga karena rendahnya pemahaman mereka terhadap perpajakan, yang tercatat mencapai 56,7%. Selain itu, sebanyak 60% dari responden juga mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap manfaat memiliki sertifikat brevet pajak dalam pengembangan karier mereka. Atas dasar ini, dibutuhkan upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai tujuan dan manfaat dari menjalani program brevet pajak. (Aniswatin et al., 2020). Survei awal yang dilakukan oleh peneliti menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong minat mahasiswa dalam menjalani program brevet pajak di Universitas Hindu Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami ketidakpercayaan terhadap manfaat sertifikat brevet pajak terhadap perkembangan karier mereka. Selain itu, rendahnya pemahaman mereka terhadap aspek-aspek perpajakan juga menjadi faktor penghambat.

Setiap mahasiswa perlu memiliki motivasi yang jelas untuk memastikan bahwa keputusan mereka dalam menjalani program brevet pajak merupakan hal tepat. Adapun sejumlah faktor motivasi yang memengaruhi minat mahasiswa terhadap program brevet pajak, dan salah satu di antaranya adalah motivasi pengetahuan perpajakan. Faktor ini memicu mahasiswa agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka terkait dengan konsep-konsep dasar perpajakan, memahami berbagai jenis pajak yang berlaku, serta prosedur pelaporan pajak yang berlaku. Selain itu, motivasi ekonomi juga merupakan faktor penting yang mampu memengaruhi minat mahasiswa terhadap program brevet pajak. Motivasi ini termasuk pendorong mahasiswa dalam meningkatkan potensi finansial mereka dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan, yang diharapkan akan membuka peluang baru dalam karier dan pengembangan finansial mereka di masa depan.

Selanjutnya, motivasi karir juga memainkan peran penting, dimana mahasiswa memiliki keinginan untuk meningkatkan kualifikasi dan mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih baik. Terakhir, ada motivasi kualitas, di mana mahasiswa memiliki dorongan untuk meningkatkan kemampuan mereka pada bidang yang mereka tekuni, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan efisien dan berdasarkan standar yang ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada Universitas Hindu Indonesia, terutama di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata dengan Program Studi akuntansi. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Universitas Hindu Indonesia baru-baru ini mendirikan sebuah organisasi tax center dan memperkenalkan program kerja brevet pajak pertamanya, yang berpotensi memengaruhi minat mahasiswa. Selain itu, pemilihan program studi akuntansi juga mempertimbangkan keberadaan mata kuliah perpajakan yang menjadi bagian penting dari kurikulum.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan serta adanya variasi dalam temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti merasa terganggu dalam menjalankan penelitian dengan judul **“Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Ekonomi, Motivasi Karir, dan Motivasi Kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjalani program brevet pajak (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Hindu Indonesia)”**.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB) yakni suatu teori yang bertujuan guna memperkirakan dan menjabarkan bagaimana perilaku manusia terbentuk pada konteks tertentu, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada. Penggunaan teori ini dalam konteks penelitian ini menjadi sangat relevan karena memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi mahasiswa dalam mengambil keputusan terkait partisipasi dalam program brevet pajak sebagai tahapan awal untuk membangun karir pada sektor perpajakan. Teori ini menguraikan secara sistematis bagaimana norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku individu memengaruhi pembentukan niat dan tindakan yang diambil, yang pada gilirannya memberikan wawasan yang berharga tentang mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks dalam memilih untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Melalui pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial ini berinteraksi, mahasiswa dapat lebih bermakna dalam merencanakan dan mengelola langkah-langkah karir mereka, serta menavigasi tantangan yang mungkin terjadi dalam perjalanan profesional mereka di dunia perpajakan. Oleh karena itu, penggunaan TPB dalam penelitian ini bukan hanya memperkaya pemahaman akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi mahasiswa yang berminat dalam mengeksplorasi jalur karir di bidang perpajakan.

Melalui penerapan Teori Perilaku Perencanaan (TPB), penelitian ini memiliki potensi untuk mendalami dan mengidentifikasi lebih lanjut faktor-faktor yang berperan dalam membentuk minat mahasiswa terhadap program brevet pajak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perilaku individu tercermin dari pengaruh norma sosial dan kontrol diri, penelitian ini dapat membuka jalan bagi pengembangan metode yang lebih terfokus juga efektif untuk meningkatkan keterlibatan serta minat mahasiswa dalam program brevet pajak. Selain itu, melalui pendekatan ini, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk lebih baik merencanakan dan merumuskan langkah-langkah karir mereka di bidang perpajakan dengan kesadaran yang lebih besar akan faktor-faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku mereka. Dengan demikian, upaya ini juga berpotensi untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran etika di masa depan yang mungkin timbul dalam konteks karir perpajakan.

Minat, sebagai dimensi individual, mencerminkan kompleksitas psikologis individu yang mempengaruhi preferensi atau kecenderungan terhadap suatu objek, aktivitas, atau topik tertentu. Konsep ini tidak hanya terkait dengan respons individu terhadap stimulus eksternal, tetapi juga dengan kesiapan psikologis dan emosional individu dalam menanggapi atau mengambil tindakan terkait objek yang menarik minatnya. Dalam konteks ini, teori ini mengakui bahwa minat merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang membentuk kepribadian individu. Pemahaman ini diperkuat oleh kontribusi pemikiran Ratnaningsih (2022), yang menyoroti bahwa minat merupakan refleksi dari berbagai kebutuhan individu yang beragam, mulai dari kebutuhan akan pencapaian, pengakuan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan ini menegaskan bahwa minat bukanlah suatu entitas statis yang telah ditentukan, tetapi lebih sebagai proses dinamis yang berkembang seiring waktu dan pengalaman hidup individu. Dengan kata lain, minat seseorang dapat berubah sejalan dengan perkembangan kepribadian dan lingkungan sekitarnya. Atas dasar tersebut, pemahaman mendalam terkait faktor-faktor yang membentuk minat menjadi penting dalam konteks psikologi individu dan pengembangan diri.

Menurut Pramesti (2019), indikator – indikator yang berpengaruh pada minat mampu diperinci lebih lanjut menjadi dua kategori utama, yakni faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik, yang bersumber dari dalam individu itu sendiri, melibatkan dorongan-dorongan internal seperti persepsi, kebutuhan batiniah, konsep diri, nilai-nilai personal, serta rasa kepuasan atas pencapaian. Ini mencerminkan dimensi psikologis yang mendalam yang mempengaruhi preferensi individu terhadap suatu objek atau aktivitas. Di sisi lain, faktor ekstrinsik mencakup pengaruh dari luar individu, seperti lingkungan sosial, keluarga, kesempatan yang tersedia, dan pengalaman pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal juga memainkan peran penting dalam membentuk minat seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas. Oleh karena itu, minat individu seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik, yang saling memengaruhi dan membentuk preferensi individu secara holistik.

Motivasi, seperti yang dijabarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada pendorong internal yang berpengaruh terhadap individu, baik dengan sadar maupun tidak sadar, dalam bertindak dengan tujuan tertentu. Ini mencakup serangkaian dorongan psikologis dan emosional yang memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan meraih kepuasan pribadi. Motivasi tidak hanya muncul sebagai dorongan abstrak, tetapi juga tercermin dalam perilaku yang dapat diamati, seperti tindakan konkret yang diambil oleh individu untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, motivasi bukanlah sekadar keinginan atau harapan,

tetapi juga merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak dan melakukan usaha menuju pencapaian yang diinginkan.

Motivasi pengetahuan perpajakan adalah dorongan internal yang mendorong seseorang dalam menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai beragam konsep dan ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. Hal ini mencakup pemahaman tentang berbagai tarif pajak yang berlaku, subjek dan objek pajak, jenis pajak yang diberlakukan, proses perhitungan pajak, pencatatan transaksi, serta prosedur pelaporan pajak yang berlaku di Indonesia. Dengan mengikuti pelatihan brevet pajak, mahasiswa mempunyai kesempatan dalam memperluas pengetahuan mereka terkait aspek-aspek tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka dalam bidang perpajakan. Selain itu, dengan meningkatnya pemahaman mereka, mahasiswa juga dapat mengurangi ketergantungan pada pihak lain dalam menangani berbagai masalah yang terkait dengan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri dan kemandirian mereka dalam menghadapi tantangan dalam bidang perpajakan. Motivasi ini, sejalan dengan *Theory Planned Behavior*, memiliki potensi untuk membentuk sikap positif mahasiswa terhadap program brevet pajak, dikarenakan mereka memiliki minat yang tinggi dalam memahami perpajakan dan melihat nilai dari program tersebut dalam meningkatkan pengetahuan mereka. Penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh (Rahayu *et al.*, 2021) dan (Aniswatin *et al.*, 2020) menunjukkan bahwasanya motivasi pengetahuan perpajakan membawa dampak signifikan pada minat mahasiswa dalam menjalani pelatihan brevet pajak.

H₁: Motivasi pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi menjalani program brevet pajak.

Motivasi ekonomi menjadi pendorong internal yang signifikan bagi individu dalam upaya meningkatkan kemampuan finansial mereka serta mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan. Hal ini tidak hanya memengaruhi keputusan individu terkait pilihan karier dan pendidikan, tetapi juga merupakan aspek krusial dalam manajemen organisasi secara keseluruhan. Manajemen perusahaan sering kali menggunakan insentif keuangan sebagai alat untuk memotivasi karyawan agar tetap produktif dan berkinerja optimal sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Besarnya penghargaan finansial yang diberikan oleh manajemen seringkali sejalan dengan tingkat keahlian dan kontribusi yang diberikan oleh tenaga kerja. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan keterampilan, motivasi ekonomi juga memegang peranan penting sebagai penentu minat mahasiswa terhadap berbagai program pelatihan atau sertifikasi, termasuk pelatihan brevet pajak. Temuan dari riset sebelumnya, seperti yang dijalankan oleh Rahayu *et al.* (2021) dan Ramadhini & Chaerunisak (2022), yang mana mengindikasikan bahwasanya tingkat motivasi ekonomi

dengan signifikan mempengaruhi minat mahasiswa dalam menjalani pelatihan brevet pajak. Hal tersebut menegaskan bahwasanya pemahaman akan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari program pelatihan tersebut menjadi salah satu faktor kunci yang memotivasi mahasiswa dalam memilih jalur pendidikan tertentu.

H₂ : Motivasi Ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk menjalani program brevet pajak.

Motivasi dalam konteks karier tidak hanya mencakup dorongan dalam meraih jabatan atau posisi yang lebih tinggi, tetapi juga mencerminkan keinginan intrinsik seseorang untuk terus meningkatkan keterampilan dan pencapaian pribadinya. Menurut Sarjono (2011), hal ini tercermin dari upaya individu untuk meraih pencapaian yang signifikan dalam karier mereka, yang seringkali diukur melalui pengalaman kerja dan kontribusi yang mereka berikan terhadap perkembangan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai dorongan karier yang tinggi cenderung akan berkomitmen yang kuat pada pengembangan diri mereka sendiri dan kesuksesan organisasi tempat mereka bekerja (Prayitno, 2021). Pilihan karier bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, tetapi merupakan hasil dari kombinasi motivasi, pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh Suyanto et al. (2023) dan Aniswatin et al. (2020) mengindikasikan bahwasanya motivasi dalam karier membawa dampak yang signifikan pada minat mahasiswa dalam menjalani program pelatihan brevet pajak. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman akan hubungan antara minat mahasiswa dan motivasi karier dalam memilih jalur pendidikan tertentu, seperti program brevet pajak, sebagai bagian dari upaya mereka dalam meraih tujuan karier dan pengembangan pribadi yang lebih baik.

H₃: Motivasi Karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk menjalani program brevet pajak.

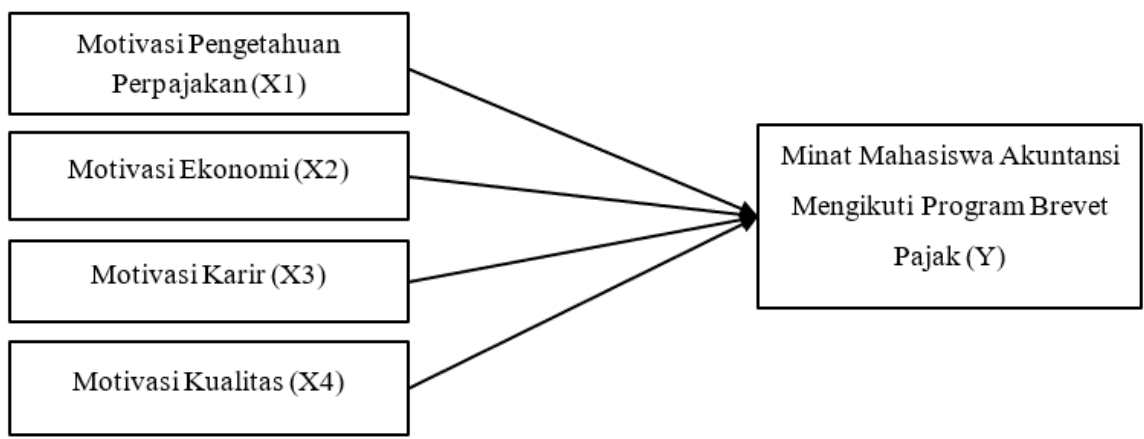
Motivasi kualitas ialah dorongan batin seseorang agar terus memaksimalkan kualitas keterampilan pada bidang yang diminatinya, dengan tujuan akhir mampu menjalankan tugas dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi (Aniswatin et al., 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa individu yang memiliki motivasi kualitas yang kuat cenderung memiliki keinginan yang besar dalam mengasah keterampilan mereka untuk menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang mereka tekuni, termasuk dalam hal perpajakan. Motivasi ini tidak hanya mencerminkan keinginan individu untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka, tetapi juga untuk mencapai standar kualitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Motivasi kualitas ini sangat relevan dalam konteks perpajakan, di mana partisipasi dalam pelatihan brevet

pajak dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapai peningkatan kualitas yang diinginkan. Mahasiswa yang berhasil memperoleh keahlian dan sertifikasi brevet pajak cenderung dinilai lebih tinggi oleh perusahaan, karena kemampuan mereka dalam mengelola masalah perpajakan dianggap lebih terpercaya dan berkualitas. Penelitian sebelumnya oleh Rahayu et al. (2021) dan Ramadhini & Chaerunisak (2022) telah menegaskan bahwa motivasi untuk meningkatkan kualitas membawa dampak yang signifikan pada minat mahasiswa dalam menjalani program brevet pajak. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengembangan motivasi kualitas dalam meraih keberhasilan dalam bidang perpajakan.

H4: Motivasi Kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk menjalani program brevet pajak.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan sebuah studi kuantitatif yang bermaksud guna mengetes hipotesis terkait pengaruh variabel independen pada variabel dependen yang diteliti. Melalui penggunaan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data empiris yang diperlukan untuk menguji hubungan antar variabel dan menguji keabsahan hipotesis yang diajukan. Langkah-langkah ini harapannya mampu memberi pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang berpengaruh pada variabel dependen, serta implikasinya dalam konteks yang diteliti. Variabel independen yang menjadi fokus pengujian adalah Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi, Motivasi Pengetahuan Perpajakan, dan Motivasi Kualitas. Studi ini akan meneliti bagaimana variabel-variabel ini membawa dampak pada variabel dependen, yakni Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Menjalani program brevet pajak. Penelitian ini akan dilakukan secara empiris, yaitu dengan mengumpulkan data dari mahasiswa yang terdaftar di jurusan Akuntansi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia.



distribusi yang signifikan dari kecenderungan normal. Hal ini penting untuk memastikan kevalidan analisis statistik yang dilakukan, karena normalitas data merupakan salah satu asumsi dasar dalam sebagian besar teknik analisis statistik parametrik.

Dengan menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, hasil uji normalitas ini memberikan keyakinan tambahan terhadap keakuratan dan keandalan dari hasil analisis statistik yang dilakukan. Terlebih lagi, penggunaan teknik-teknik statistik parametrik membutuhkan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi distribusi normal untuk memastikan interpretasi yang tepat dari hasil-hasil analisis tersebut. Dengan demikian, hasil dari uji normalitas ini memberikan dasar yang kuat bagi keberlanjutan analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian tersebut, serta memperkuat kepercayaan pada kesimpulan yang diambil dari analisis data tersebut.

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Motivasi Pengetahuan Perpajakan	.538	1.859
	Motivasi Ekonomi	.617	1.620
	Motivasi Karir	.521	1.918
	Motivasi Kualitas	.488	2.049

Pengujian multikolinearitas yang mengindikasikan bahwasanya semua variabel bebas bernilai Variance Inflation Factor (VIF) yang di bawah 10 dan angka toleransi melebihi 0,10 adalah indikasi yang sangat positif dalam konteks analisis regresi. Penemuan ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinearitas yang signifikan pada model regresi yang dipergunakan. Multikolinearitas yaitu keadaan di mana dua maupun lebih variabel bebas dalam model regresi mempunyai keterkaitan yang kuat satu sama lain, yang mampu mengganggu interpretasi hasil regresi.

Dengan tidak adanya indikasi multikolinearitas, kepercayaan terhadap hasil analisis regresi meningkat. Hal ini karena ketika terdapat multikolinearitas, interpretasi koefisien regresi menjadi sulit dilakukan karena variabilitas yang berlebihan dalam estimasi koefisien. Namun, dengan nilai VIF di bawah 10 serta angka toleransi melebihi 0,10, mampu disimpulkan bahwasanya setiap variabel bebas pada model regresi memberikan kontribusi unik terhadap perubahan dalam variabel dependen tanpa adanya gangguan dari multikolinearitas.

Penemuan ini memperkuat validitas hasil analisis regresi dan memungkinkan peneliti untuk membuat interpretasi yang lebih akurat tentang hubungan antara variabel dependen dan variabel bebas dalam konteks penelitian. Dengan demikian, hasil regresi dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk membuat keputusan atau rekomendasi dalam bidang yang bersangkutan,

Pengetahuan Perpajakan, dan Motivasi Kualitas dengan positif memengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi terhadap Program Brevet Pajak.

Temuan dari analisis mengindikasikan bilamana nilai variabel motivasi pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif sebanyak 6,268 melalui tingkat signifikansi 0,000 yang di bawah 0,05. Ini menegaskan bahwasanya motivasi pengetahuan perpajakan dengan positif serta signifikan memengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam berpartisipasi pada dalam program brevet pajak. Atau dapat dikatakan, kian besarnya dorongan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait perpajakan, semakin besar pula minat mereka dalam menjalani brevet pajak.

Hasil analisis menunjukkan nilai variabel motivasi ekonomi memiliki pengaruh yang positif senilai 5,755 melalui tingkat signifikansi 0,000 yang di bawah dari 0,05. Ini merupakan indikator bahwasanya variabel motivasi ekonomi membawa dampak positif serta signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam menjalani program brevet pajak. Dengan kata lain, semakin besar keinginan mahasiswa untuk mencapai stabilitas finansial yang lebih baik dalam pekerjaan mereka, kian tinggi pula minat mereka dalam menjalani program brevet pajak.

Temuan dari analisis menunjukkan nilai variabel motivasi karir memiliki pengaruh yang positif sebesar 6,810 melalui tingkat signifikansi 0,000 yang kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwasanya variabel motivasi karir membawa dampak positif serta signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam menjalani program brevet pajak. Dengan kata lain, kian besarnya dorongan mahasiswa untuk meningkatkan karir mereka, semakin besar pula minat mereka dalam menjalani program brevet pajak.

Hasil analisis menunjukkan nilai variabel motivasi kualitas memiliki pengaruh yang positif sebesar 4,740 dengan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya variabel motivasi kualitas memiliki dampak positif serta signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam menjalani program brevet pajak. Dengan kata lain, semakin besar motivasi mahasiswa terhadap peningkatan kualitas, kian tinggi minat mereka dalam menjalani program brevet pajak

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan didasarkan atas temuan dari analisis penelitian dan pemaparan pada bab-bab terdahulu alhasil simpulan dari penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Motivasi pengetahuan perpajakan menjadi landasan yang kuat dalam membentuk minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk menjalani program brevet pajak. Ini tidak hanya mengacu pada keinginan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang sistem perpajakan yang

kompleks, tetapi juga pada pemahaman bahwa pengetahuan yang mendalam dalam hal ini nantinya menjadikan mereka lebih unggul pada persaingan pasar kerja yang kian kompetitif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan dan praktik terkait, mahasiswa menjadi lebih siap ketika dihadapkan oleh tantangan yang ada di dunia profesional. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa mengikuti program brevet pajak akan membuka peluang yang lebih luas untuk karier yang sukses dan berkembang di bidang akuntansi, karena pengakuan dan penghargaan atas kemampuan khusus ini semakin meningkat.

2. Di samping motivasi pengetahuan perpajakan, faktor ekonomi juga membawa dampak yang signifikan dalam membentuk minat mahasiswa akuntansi menjalani program brevet pajak. Motivasi ekonomi ini mencakup tidak hanya keinginan untuk mencapai stabilitas finansial yang baik, tetapi juga untuk mencari peluang penghasilan yang lebih besar di masa depan. Dalam lingkungan ekonomi yang terus berubah, mahasiswa menganggap investasi dalam pendidikan tambahan seperti program brevet pajak sebagai langkah yang cerdas dan strategis untuk mencapai tujuan finansial mereka.
3. Motivasi karir juga menjadi faktor penting dalam membentuk minat mahasiswa akuntansi dalam menjalani program brevet pajak. Mahasiswa yang memiliki ambisi dalam mencapai posisi yang lebih tinggi pada karier mereka di bidang akuntansi menyadari bahwa memiliki kualifikasi tambahan dalam perpajakan dapat membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Mereka melihat program brevet pajak sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik mereka bagi perusahaan dan membuka pintu untuk peluang promosi yang lebih baik di masa depan.
4. Terakhir, motivasi terkait kualitas juga memainkan peran penting dalam membentuk minat mahasiswa akuntansi dalam menjalani program brevet pajak. Mahasiswa yang memiliki dorongan guna mencapai standar kualitas yang tinggi dalam pekerjaan mereka menyadari bahwa memiliki sertifikasi atau kualifikasi tambahan dalam perpajakan adalah langkah yang penting dalam mencapai tujuan tersebut. Mereka percaya bahwa program brevet pajak akan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan bermutu tinggi terhadap klien atau perusahaan di masa depan. Dengan demikian, motivasi terkait kualitas menjadi dorongan yang kuat bagi mahasiswa untuk mengambil langkah ekstra dan mengikuti program brevet pajak sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai kesuksesan profesional yang lebih besar.

Menurut simpulan diatas alhasil saran dari penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Bagi Mahasiswa, penting untuk mempertimbangkan pelatihan brevet pajak sebagai fondasi untuk perencanaan masa depan setelah menyelesaikan studi S1 Akuntansi. Mengambil langkah ini tidak hanya akan memperluas wawasan mereka tentang bidang perpajakan, tetapi juga akan membuka peluang karier yang lebih luas di dunia profesional. Melalui program brevet pajak, mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola dan menganalisis isu-isu perpajakan yang kompleks, yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan dengan cepat. Selain itu, sertifikasi tambahan dalam perpajakan juga mampu memaksimalkan daya saing mereka pada pasar kerja.
2. Bagi Universitas Hindu Indonesia, hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya motivasi karir dan motivasi pengetahuan perpajakan membawa dampak yang signifikan dalam membentuk minat mahasiswa dalam menjalani program brevet pajak. Oleh karena itu, penting bagi universitas untuk mengintegrasikan pembelajaran perpajakan lebih awal dalam kurikulum akuntansi mereka. Ini akan memungkinkan mahasiswa untuk memahami konsep dasar perpajakan dan mempertimbangkan pilihan karier mereka dengan lebih baik di masa depan. Selain itu, menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau lembaga terkait lainnya juga dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dengan memberikan wawasan langsung tentang peluang karir yang tersedia setelah menyelesaikan program brevet pajak. Kerjasama semacam ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh universitas, tetapi juga akan membantu membekali mahasiswa agar menjadi profesional yang berketerampilan dan siap untuk menghadapi persaingan di pasar kerja global.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan perbandingan antara minat mahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang belum mengikuti pelatihan brevet pajak dengan yang telah menjalani pelatihan serupa. Penelitian semacam ini dapat membantu memperluas pemahaman tentang indikator – indikator yang berpengaruh pada minat mahasiswa untuk menjalani program brevet pajak. Di luar faktor behavior belief, penelitian juga dapat mempertimbangkan faktor normative belief seperti pengaruh teman sebaya atau gender, serta faktor Control Belief seperti biaya pendidikan. Dengan memperluas cakupan variabel yang diteliti, penelitian selanjutnya mampu meningkatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang indikator – indikator yang memengaruhi minat mahasiswa dalam mengambil program brevet pajak, yang pada gilirannya dapat membantu universitas dan

Suhendra, F. A. (2023). *Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Ekonomi, Motivasi Karir, Dan Motivasi Kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Brevet Pajak* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. etheses.uin-malang.ac.id

Suyanto, Yakin, A. M., Putri, F. K., & Nur, A. C. P. (2023). DETERMINAN MINAT MAHASISWA MENGIKUTI BREVET PAJAK. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(2). <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n2.p147>

Wildan. (2022). *Indonesia Masih Membutuhkan Lebih Banyak Ahli Pajak, Ini Alasannya*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/indonesia-masih-membutuhkan-lebih-banyak-ahli-pajak-ini-alasannya-42607>

Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Desa Di Denpasar Barat

I Gusti Ayu Made Budiani⁽¹⁾
Cokorda Gede Bayu Putra⁽²⁾
Putu Cita Ayu⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: madebudianii02@gmail.com

ABSTRACT

The study underscores the significance of effectively managing diverse sources of village income, including funds from APBN, PDRD proceeds, and external contributions. Accountability values are crucial in this regard. The research, conducted in West Denpasar District, investigates the impact of village head leadership, official competency, and community participation on financial management accountability. The population comprises all village officials in 8 villages, with 64 individuals selected through purposive sampling. Multiple linear regression analysis reveals that leadership positively influences financial accountability, while competence and community participation also have positive effects on financial management accountability in the West Denpasar District village government.

Keywords: Leadership, Competence, Community Participation, Financial Management Accountability

PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo mengutamakan pembangunan Indonesia dari daerah-daerah dan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa, termasuk dari APBN, harus dipertanggungjawabkan dengan benar, sesuai UU No. 6 Tahun 2014. *Accountability* menjadi kunci dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, menunjukkan perilaku etis dan tanggungjawab aparatur desa. Manajemen Dana desa tidak hanya tentang pengelolaan, tetapi juga pertanggungjawaban,. Prinsip-prinsip konsistensi, *accountability*, transparansi, dan kelangsungan hidup usaha menjadi landasan dalam mencapai tujuan Manajemen Dana.

Meskipun pedoman pengelolaan dana desa telah dibentuk, tindak penyelewengan masih terjadi di lapangan. Sebagai contoh, kasus korupsi di Kantor Desa Dauh Puri Klod Denpasar Barat, dengan total 1,035 milyar rupiah, menunjukkan bahwa alokasi dana desa seringkali tidak tepat sasaran. Meski sebagian dana sudah dikembalikan oleh beberapa oknum aparatur desa, jumlah yang masih belum jelas mencerminkan masalah dalam proses alokasi dana desa. *Accountability* pengelolaan dana desa yang sesuai aturan dianggap sebagai solusi untuk mencegah penyalahgunaan dana. Komitmen individu dalam organisasi juga diakui sebagai faktor penting, di mana *accountability* dapat tercapai melalui sistem pengendalian yang terukur, terarah, dan teratur dalam organisasi.

Kasus penyelewengan dana desa oleh aparatur desa, seperti yang terjadi pada Ni Putu Ariyaningsih di Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, menimbulkan stigma negatif pada peran aparat desa dalam menjalankan kewajibannya. Kasus korupsi dana SiLPA APBDes sebesar Rp 988 juta lebih mencuatkan tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh bendahara desa bersama rekan-rekannya. Kasus ini terungkap ketika terdapat selisih antara SILPA APBDes tahun 2020 dengan dana yang masih dipegang oleh mantan Perbekel, Bendahara, dan Kaur Keuangan. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,03 miliar menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Upaya pengembalian sebagian dana oleh beberapa tersangka masih belum mencakup seluruh kerugian yang terjadi.

Pada tahun 2023, data dari dpd.go.id menunjukkan bahwa selama tujuh tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 pelaku, di mana 50% di antaranya adalah kepala desa. Untuk mengatasi penyelewengan dana desa, pemerintah secara aktif melakukan evaluasi aliran dana dan pemeriksaan di berbagai daerah, termasuk yang pernah mengalami masalah seperti Bali, Pulau Jawa, dan daerah lainnya. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan *accountability* dalam pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan. Seorang pemimpin, khususnya Kepala Desa, memiliki tanggung jawab utama atas seluruh aktivitas pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa. Peran kunci kepala desa dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel terletak pada kemampuannya untuk memotivasi dan membimbing karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Kepemimpinan yang terampil hasil dari pendidikan dan pengalaman membentuk individu tersebut. Keterampilan kepemimpinan yang memahami kepentingan masyarakat dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perangkat daerah (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Selain kepemimpinan, faktor penting lain yang memengaruhi *accountability* Manajemen Dana adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi yang memadai dalam aparatur desa sangat penting untuk mencapai *accountability* yang baik (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Penelitian ini memperhatikan peran kunci kepemimpinan kepala daerah dalam membentuk kebijakan dan tindakan terkait keuangan daerah. Selain itu, penekanan diberikan pada kompetensi aparatur daerah, yang mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan efektif. Selanjutnya, penelitian ini juga mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses Manajemen Dana pemerintahan daerah. Partisipasi ini dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai tingkat

Kompetensi Terhadap *Accountability* Manajemen Dana

Kepatuhan individu terhadap aturan dan norma mencerminkan tingkat kompetensinya. Kompetensi aparatur daerah, yang melibatkan pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, dan perilaku, memiliki peran krusial dalam pengelolaan dana daerah untuk optimalisasi pembangunan dari berbagai aspek (Anto, R. P., & Amir, 2017). Dalam konteks pengelolaan dana daerah, kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan, yang diamanatkan oleh Undang-Undang, menjadi kunci dalam mewujudkan *accountability* (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019).

Bahwa dalam konteks pengelolaan dana daerah, keberhasilan *accountability* sangat bergantung pada adanya individu-individu yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Temuan (Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, 2017) menegaskan pentingnya dukungan kompetensi dalam meningkatkan tingkat *accountability* dalam pengelolaan dana daerah. Penelitian ini menjadi semakin relevan dengan hasil studi (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019), yang menunjukkan bahwa kompetensi secara positif memengaruhi *accountability* dalam pengelolaan dana daerah. Dengan dasar ini, hipotesis penelitian diarahkan untuk menguji dan mengonfirmasi hubungan positif antara kompetensi individu di dalam tim pengelola dana daerah dan tingkat *accountability* yang dihasilkan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi individu dalam tim, semakin baik pula *accountability* dalam pengelolaan dana daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran kompetensi individu sebagai faktor penentu dalam mencapai tingkat *accountability* yang optimal dalam konteks pengelolaan dana daerah."

H₂ : Kompetensi berpengaruh positif pada *accountability* Manajemen Dana.

Partisipasi Terhadap *Accountability* Manajemen Dana

Dalam teori keagenan, partisipasi masyarakat dianggap sebagai mekanisme untuk mengurangi potensi konflik antara prinsipal dan agen. Masyarakat, sebagai prinsipal, memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari agen atas tindakannya (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Bahwa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan pembangunan tersebut. (Mahayani, 2017) menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi dan permasalahan di daerah mereka. Menurutnya, partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup peran aktif dalam perencanaan dan pengawasan, tetapi juga melibatkan mereka dalam pelaksanaan, serta mendorong penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat semakin diperkuat oleh temuan penelitian

4,3638, dan standar deviasi sekitar 0,30748. Hal ini menunjukkan bahwa skor kepemimpinan responden cenderung berkisar antara 4,00 hingga 5,00, dengan tingkat variasi yang relatif rendah. Sementara itu, varbel kompetensi (X2) menunjukkan nilai minimum 4,00, nilai maksimum 5,00, rata-rata sebesar 4,4241, dan standar deviasi sekitar 0,30962. Hasil ini menandakan bahwa responden dalam penelitian memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, dengan skor yang umumnya berada di atas 4,00. Varbel partisipasi masyarakat (X3) memiliki nilai minimum 3,86, maksimum 5,00, rata-rata sebesar 4,2500, dan standar deviasi sekitar 0,27177. Hasil ini menunjukkan variasi yang cukup kecil dalam tingkat partisipasi masyarakat, yang secara keseluruhan cenderung tinggi. Terakhir, varbel *accountability* pengelolaan daerah (Y) menunjukkan nilai minimum 4,00, maksimum 5,00, rata-rata sebesar 4,3848, dan standar deviasi sekitar 0,29823. Ini menggambarkan bahwa tingkat *accountability* pengelolaan dana daerah oleh responden cenderung tinggi, dengan skor rata-rata di atas 4,00. Secara keseluruhan, statistik deskriptif ini memberikan gambaran tentang distribusi dan variasi dari setiap varbel penelitian, menciptakan dasar pemahaman yang baik sebelum melakukan analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Varbel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,396	3,662		1,746	,016
Kepemimpinan (X1)	,326	,140	,295	2,334	,023
Kompetensi (X2)	,376	,113	,010	3,325	,002
Partisipasi (X3)	,618	,162	,493	3,806	,000
R					0,737
R Square					0,544
Adjusted R Square					0,521
Uji F					23,830
Sig. Model					0,000

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6,396 + 0,326 X_1 + 0,376 X_2 + 0,618 X_3 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta 6,396 menunjukkan bahwa jika nilai kepemimpinan, kompetensi, dan partisipasi adalah nol, maka nilai *accountability* Manajemen Dana daerah diperkirakan sebesar 6,396. Koefisien regresi 0,326 untuk varbel kepemimpinan menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam varbel kepemimpinan berkontribusi terhadap peningkatan 0,326 dalam *accountability* Manajemen Dana daerah, dengan asumsi varbel lain konstan. Koefisien regresi 0,376 untuk varbel kompetensi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam varbel

kompetensi berkontribusi terhadap peningkatan 0,376 dalam *accountability* Manajemen Dana daerah, dengan asumsi varbel lain konstan. Koefisien regresi 0,618 untuk varbel partisipasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam varbel partisipasi berkontribusi terhadap peningkatan 0,618 dalam *accountability* Manajemen Dana daerah, dengan asumsi varbel lain konstan. Dengan demikian, persamaan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana varbel independen dapat mempengaruhi varbel dependen dalam konteks *accountability* Manajemen Dana daerah.

Dengan nilai Adjusted R-square sebesar 0,544, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan, kompetensi, dan partisipasi memiliki kemampuan untuk menjelaskan sekitar 54,4% dari variasi dalam *accountability* Manajemen Dana. Sisanya, sekitar 45,5%, kemungkinan dipengaruhi oleh varbel lain yang tidak diteliti dalam lingkup penelitian ini. Hasil ini memberikan gambaran tentang sejauh mana variabilitas dalam *accountability* dapat dijelaskan oleh kombinasi ketiga varbel tersebut. Selanjutnya, nilai uji F sebesar 23,830 dengan signifikansi 0,000 (yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05) menunjukkan bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki kecocokan yang signifikan. Artinya, varbel kepemimpinan, kompetensi, dan partisipasi secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. Dengan demikian, hasil ini menguatkan kesimpulan bahwa model yang diusulkan memiliki daya penjelasan yang kuat terhadap *accountability* Manajemen Dana dalam konteks penelitian ini.

Pembahasan

Kepemimpinan kepala daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah memiliki positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. Artinya, semakin baik kepemimpinan kepala daerah di setiap kantor daerah di Kecamatan Denpasar Barat, semakin baik pula *accountability* Manajemen Dana daerah tersebut. kepemimpinan kepala daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana" dapat dideskripsikan sebagai pernyataan yang menyoroti hubungan antara peran kepemimpinan seorang kepala daerah dan tingkat *accountability* dalam Manajemen Dana di suatu pemerintahan daerah. Deskripsi kalimat ini mengindikasikan bahwa fokus utama adalah bagaimana gaya atau kualitas kepemimpinan kepala daerah dapat mempengaruhi sejauh mana keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Pramayoga, I. B., & Ramantha, 2020), yang juga menyatakan bahwa kepemimpinan kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. Peran kepemimpinan kepala daerah dianggap sangat penting dalam konteks Manajemen Dana daerah, mengingat kepala daerah bertanggung jawab dalam seluruh tahapan Manajemen

Dana daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Transparansi dan integritas kepala daerah dalam memimpin pemerintahan daerah dapat menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan dapat meningkatkan motivasi perangkat daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah sebagai langkah strategis dalam upaya mencapai *accountability* pengelolaan dana daerah yang lebih baik di Kecamatan Denpasar Barat.

kompetensi aparatur daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur daerah memiliki positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. kompetensi aparatur daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana," kita dapat membayangkan sebuah cerita tentang bagaimana tingkat keahlian dan kualifikasi dari aparat daerah memainkan peran penting dalam mengelola dana publik di tingkat lokal. Dalam sebuah daerah, aparat daerah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan dan prosedur keuangan, serta keterampilan teknis yang baik dalam pelaporan keuangan, dapat secara positif memengaruhi bagaimana dana daerah digunakan dan dipertanggungjawabkan. Mereka mungkin dapat merancang sistem Manajemen Dana yang efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada integritas dan tanggung jawab.

Sebaliknya, jika kompetensi aparatur daerah rendah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam Manajemen Dana, membuat sulit untuk memahami dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana daerah. Dalam cerita ini, kompetensi aparatur daerah menjadi faktor penentu dalam membentuk tingkat *accountability* Manajemen Dana di tingkat daerah tersebut. Artinya, semakin tinggi kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, semakin optimal dan akuntabel pengelolaan dana daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, 2017) dan (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019), yang juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Dana daerah. Kompetensi aparatur daerah melibatkan kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Hasil ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur daerah sebagai strategi untuk meningkatkan *accountability* dalam pengelolaan dana daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia di tingkat daerah, termasuk pelatihan dan pembinaan, dapat menjadi langkah efektif dalam mencapai tingkat kompetensi yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan kompetensi aparatur daerah dapat memiliki dampak positif pada *accountability* Manajemen Dana daerah.. Hal ini termasuk dalam menjaga integritas, mencegah korupsi atau

penyelewengan dana, serta melaksanakan tugas dengan hati nurani. Kompetensi yang baik akan memberikan kontribusi positif terhadap optimalisasi Manajemen Dana daerah. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, diharapkan Manajemen Dana daerah dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip *accountability*. Selain itu, kompetensi yang baik juga mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal. Aparatur yang kompeten dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kualitas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur daerah dianggap penting untuk mendukung pengelolaan dana daerah yang lebih baik dan optimal.

Partisipasi masyarakat terhadap *accountability* Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana daerah, semakin optimal pengelolaan dana tersebut. "partisipasi masyarakat terhadap *accountability* Manajemen Dana" membawa kita ke dalam gambaran mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat secara aktif dapat membentuk tingkat pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik. Dalam deskripsi kalimat ini, kita dapat membayangkan suatu konteks di mana partisipasi masyarakat memiliki dampak substansial pada cara keuangan pemerintahan daerah dikelola. Dampak dari partisipasi masyarakat ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menciptakan suatu lingkungan di mana informasi keuangan mudah diakses oleh warga daerah. Hal ini dapat memunculkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga transparansi dan *accountability* dalam setiap keputusan keuangan yang diambil oleh pemerintahan daerah. Dalam konteks lokal daerah, partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk budaya demokratis dan melibatkan warga secara langsung dalam perencanaan dan Manajemen Dana. Akibatnya, cerita ini menciptakan gambaran tentang bagaimana hubungan dinamis antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk praktik Manajemen Dana yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arta, I. M. A. S., & Rasmini, 2019), yang juga menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki positif terhadap *accountability* pengelolaan dana daerah. Partisipasi masyarakat mencerminkan tingkat keterlibatan aktif mereka dalam proses pembangunan daerah, mencakup peran mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Hasil ini menegaskan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan *accountability* pengelolaan dana daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pentingnya mempromosikan partisipasi masyarakat sebagai elemen kritis dalam

mencapai *accountability* yang optimal dalam pengelolaan dana daerah. Semakin banyak masukan, saran, dan evaluasi yang diberikan oleh masyarakat, semakin baik pula pengelolaan dana daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada proses perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat menjadi mekanisme pengawasan alami terhadap pengelolaan dana daerah. Dengan memberikan masukan dan evaluasi, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyelewengan dana daerah. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dianggap penting untuk mendukung *accountability* pengelolaan dana daerah dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang ditarik dari analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah, kompetensi aparatur daerah, dan partisipasi masyarakat memiliki positif dan signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana daerah. Semakin baik kepemimpinan kepala daerah, semakin tinggi kompetensi aparatur daerah, dan semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka Manajemen Dana daerah cenderung lebih akuntabel dan optimal. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diberikan kepada kantor daerah di Kecamatan Denpasar Barat: Tingkatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk kepala daerah guna meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam mengelola dana daerah. Pertahankan dan tingkatkan komunikasi terbuka dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mendukung transparansi dalam pengelolaan dana daerah. Teruskan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dalam Manajemen Dana daerah, sehingga mereka dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan kepada masyarakat. Tingkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan publikasi secara rutin di website dan media sosial tentang informasi penggunaan keuangan daerah. Sosialisasikan penggunaan dana daerah secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam pengawasan pengelolaan dana daerah. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan varbel lain yang dapat mempengaruhi *accountability* Manajemen Dana daerah. Luaskan area penelitian ke berbagai kecamatan atau daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif.

UMKM dalam mengambil suatu tindakan dengan hati-hati, sehingga keputusan yang dibuat tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi risiko kerugian. Dalam sektor keuangan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis atau usahanya, pelaku UMKM dapat menggunakan *fintech (financial technology)* yang biasa dikenal dengan teknologi keuangan. *Fintech* merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan dibidang finansial, sehingga transaksi keuangan dapat dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Pengembangan ekonomi pada era digital selain adanya *fintech*, usaha mikro kecil menengah memerlukan strategi-strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing UMKM misalnya dengan pemanfaatan *e-commerce*. *E-commerce* adalah pemasaran produk atau jasa melalui saluran informasi online yang dapat diakses oleh calon konsumen dalam ruang lingkup yang luas sehingga memberikan kemudahan bertransaksi tanpa terhalang jarak ruang dan waktu.

Beberapa UMKM telah diwawancarai sebagai survey awal mengenai dampak dari digitalisasi terhadap kinerja usaha mereka. Kebanyakan UMKM memberikan respon yang baik dan mengatakan bahwa digitalisasi sangat bermanfaat , namun masih ada UMKM yang kesulitan beradaptasi bahkan mengalami penurunan pendapatan. Perubahan peralihan digitalisasi tersebut memberikan dampak pada kinerja dari UMKM tersebut. Selain peningkatan kinerja UMKM, pelaku UMKM juga memiliki berbagai permasalahan. Kinerja yang tidak maksimal dapat menyebabkan rendahnya pendapatan, begitu juga sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah literasi keuangan, *financial technology* dan penggunaan *e-commerce* mempengaruhi kinerja UMKM di Denpasar. Sehingga manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja UMKM terutama dalam mengadopsi digitalisasi UMKM. Bagi Pelaku UMKM, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari terkait kinerja usaha. Sehingga dengan adanya penelitian ini akan membawa perubahan dan meningkatkan upaya pemulihan ekonomi nasional. Bagi Mahasiswa, hasil dari penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa mengenai mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usaha UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi (Apriliyan, Sasanti, & Nurabiah, 2022). Teori TAM menjelaskan bahwa niat perilaku individu untuk menggunakan suatu sistem ditentukan oleh dua keyakinan persepsi manfaat dan persepsi kemudahan. UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro

Kecil Menengah. UMKM sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam hal *financial*. Dalam hal ini pelaku bisnis dituntut memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi bisnis serta pengelolaan keuangannya, bukan hanya mampu melakukan perencanaan saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaku usaha juga harus mampu untuk mengambil keputusan secara efisien dan efektif. Penelitian oleh Yanti (2019) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Sajuyigbe et al. (2020) juga menemukan bahwa literasi keuangan mempengaruhi usaha kecil. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Denpasar

Teknologi keuangan (*Fintech*) adalah jenis informasi yang digunakan dalam penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi. *Financial Technology (Fintech)* merupakan sebuah industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi (Ginantara & dkk, 2020). UMKM dapat memanfaatkan *fintech* dengan kalsifikasi *paymet* sebagai strategi dalam meningkatkan kemajuan usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajar & Larasati, 2021), (Utami & Sitanggung,2021) yang menunjukkan bahwa *financial technology* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : *Financial Technology* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Denpasar

E-commerce merupakan suatu perusahaan yang menyediakan platform jual beli secara online dan menyediakan kemampuan untuk melakukan transaksi yang melibatkan barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dalam suatu aplikasi yang dapat diakses menggunakan alat-alat elektronik. Adanya *e-commerce* membuat para penjual dan pembeli menjadi lebih efektif dan efisien dalam memasarkan produknya dengan jangkauan yang lebih luas. Penelitian dari Ramdhani et al. (2022) menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara penerapan *E-commerce* teradap kinerja UMKM. Octavia et al. (2020) juga memperoleh hasil bahwasannya *E-commerce*

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. sejalan dengan penelitian Setiawati et al. (2021) yang menjelaskan bahwa e-commerce berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Penggunaan *E – Commerce* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Denpasar

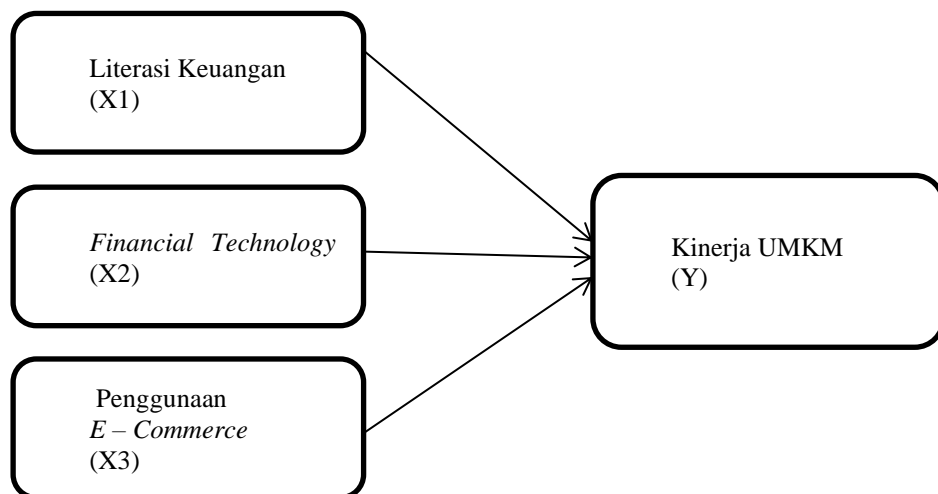
Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Definisi kinerja UMKM menurut Pramestiningrum dan Iramani (2020) adalah hasil kerja yang dicapai oleh UMKM pada periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu serta menyesuaikan dengan peran atau tugas dari tujuan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai variabel literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM, *financial technology* berpengaruh terhadap kinerja UMKM, dan penggunaan *e-commerce* berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Gambar 1.3

Desain Penelitian



sumber : hasil pemikiran peneliti, 2023

Populasi untuk penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di kota Denpasar pada tahun 2022 sejumlah 32.476 UMKM. Penelitian ini menggunakan data tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 sedang dilaksanakan pembangunan basis data tunggal KUMKM melalui

Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM) 2023, sehingga keakuratan data akan berkurang dan akan berubah ubah sampai ditetapkan data yang pasti. Dalam metode ini teknik yang dipakai adalah *stratified random sampling*. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil menggunakan rumus *slovin*.

Adapun Teknik Analisis Data yang digunakan :

1. Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai r-hitung dengan r-tabel. Jika nilai r-hitung > r-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel penelitian valid, dan sebaliknya.
2. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, dengan ketentuan, jika nilai *Cronbach Alpha* > dari 0,7 maka instrumen variabel penelitian reliabel, dan sebaliknya.
3. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi penggunaan statistik parametrik (*multiple regression analysis*), yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.
4. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas pada variable terikat (Sugiyono, 2019).
5. Koefisien Determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara lain nol dari satu. Penelitian ini menggunakan nilai adjusted R² .
6. Uji F (uji kelayakan model) bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen layak digunakan.
7. Uji t pengujian ini dilakukan dengan melihat profabilitas signifikansi t yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar ≤ 0,05, maka secara parsial terdapat pengaruh signifikansi variabel independen terhadap variabel, jika nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka secara parsial tidsk terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang meliputi jenis kelamin dan lama memulai usaha usaha yang dimana dideskripsikan sebagai berikut:

1. Karakteristik reponden berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk mengetahui proposi jumlah responden.

Hasil dari analisis koefisien determinasi dilihat pada nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,657 menunjukkan bahwa 65,7% variabel Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM dipengaruhi oleh Literasi Keuangan, *Financial Technology* Dan Penggunaan *E-Commerce*, sedangkan sisanya sebesar 34,3% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil uji F menunjukkan nilai F. Hitung sebesar 64,260 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Literasi Keuangan, *Financial Technology* Dan Penggunaan *E-Commerce* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Berdasarkan hasil Uji hipotesis (Uji t) pada tabel 4.6 variabel Literasi Keuangan, *Financial Technology* Dan Penggunaan *E-Commerce* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Literasi Keuangan, *Financial Technology* Dan Penggunaan *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman Literasi Keuangan akan meningkatkan Kinerja UMKM di Denpasar. *Financial Technology* berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin baik pemanfaatan *Financial Technology* akan meningkatkan Kinerja UMKM di Denpasar. Penggunaan *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin efektif dan aktif Penggunaan *E-Commerce* akan meningkatkan Kinerja UMKM di Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : Bagi UMKM di Kota Denpasar, peningkatan literasi keuangan dan bijak dalam mengadopsi *financial technology* menjadi kunci sukses dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Pemahaman mendalam terhadap penggunaan teknologi finansial dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, aktif dan efektif memanfaatkan platform *e-commerce* dengan strategi pemasaran kreatif dapat memperkuat daya saing UMKM di pasar digital yang berkembang pesat. Bagi penelitian selanjutnya, hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai materi serta contoh dalam menelaah studi kasus pada mata kuliah tertentu serta penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM di Denpasar selain dari tiga variabel bebas yang diteliti saat ini sehingga dihasilkan data yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Ramdhani, M. L., Nurleli, & Anandya, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan E-commerce terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Alamsyah, M. F. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan kualitas manajemen keuangan terhadap kinerja keuangan pada ukm meubel di kota gorontalo *The effect of financial literacy and quality of financial management towards financial performance in meubel smes in gorontalo city. FORUM EKONOMI*, 22 (2) 2020, 245-255 .
- Aprayuda, R., & Dalam, W. W. (2022). Apakah Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan dapat Mempengaruhi Kinerja UMKM ? *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Apriliyan, Y., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2022). Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risma*, Vol. 2 No. 2.
- Arifuddin, Nurnaluri, S., & Intani, F. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan DAN Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada Cafe Di Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 08, No. 01.
- Budiarto, D. S, Vivianti, E, & Diansari, R. E. (2021). Maintaining the Performance and Sustainability of MSMEs with E Commerce: Research during the Covid- 19 Pandemic. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(3).
- Chaidir, T., Suprpti, I. A., Arini, G. A., & Ismiwati, B. (2020). Determinan Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1–19.
- Christoper, S. W., & Kristiati, I. (2020). HUBUNGAN E-Commerce DAN Literasi Keuangan Terhadap Kelangsungan USAHA Di Boyolali. *Jurnal Akuntansi*, 1 - 12.
- Fadilah, I., Rahman, S., & Anwar, M. (2022). Analisis pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Financial Technology terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung . *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Fathimah, V. (2019). Determinan Adopsi E-Commerce dan Dampaknya Pada . *Jurnal Riset Akuntansi Dan* , 7(3), 445–464.

Ningtyas, M. N. (2019). Literasi Keuangan pada Generasi Milenial. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 13(1), 20–27.

Nurhidayati, S. E., & Anwar, M. K. (2018). Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Literasi Keuangan Syariah Karyawan Perbankan Syariah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1–11.

Nurlinda, & Fathimah, V. (2019). Determinan Adopsi E-Commercedan Dampaknya Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *JURNAL Riset Akuntansi DAN Keuangan*.

Peraturan Bank Indonesia. (n.d.). No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi.

Purnata, I. R., & Suardikha, I. S. (2019). Pengaruh E-Commerce, Budaya Organisasi, dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada UKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 296-321.

Purwidiyanti, W., & Tubastuvi, N. (2019). The Effect of Financial Literacy and Financial Experience on SME Financial Behavior in Indonesia. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 40–45.

Putri, R. E., Goso, Hamid, R. S., & Ukkas, I. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pengusaha Muda. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 6 Nomor 2.

Rizky, M. (2022, 9 21). Sesuai Target Digitalisasi Pasar Rakyat, Kini Pasar Badung Sudah Pakai Aplikasi E-banking Balipay. (P. M. Setyaningrum, Editor) Retrieved 8 22, 2023, from wartaekonomi.co.id: <https://wartaekonomi.co.id/read445788/sesuai-target-digitalisasi-pasar-rakyat-kini-pasar-badung-sudah-pakai-aplikasi-e-banking-balipay>

Rusdianasari, F. (2018). Peran Inklusi Keuangan Melalui Integrasi Fintech Dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 244–253.

Sajuyigbe, A. S., Odetayo, T. A., & Adeyemi, A. Z. (2020). Financial Literacy and Financial Inclusion as Tools to Enhance Small Scale Businesses' Performance in Southwest, Nigeria. *Finance & Economics Review*, 2(3), 1–13.

Setiawati, E., Diana, N., & Mawardi, M. (2021). Pengaruh E-Commerce, Pengetahuan Akuntansi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Malang. *E-Jra*.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.

Susilo, J., Anisma, Y., & Syofyan, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, DAN Inovasi Terhadap Kinerja UMKM. *Current Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1-10.

Suyanto. (2022). FAKTOR Demografi, Financial Technology, DAN Kinerja Keuangan USAHA Mikro Kecil DAN Menengah (UMKM): Inklusi Keuangan Sebagai . Akuntansi Dewantara, VOL. 6 NO 1.

Tambunan, C. R. (2023, 6 23). [djpb.kemenkeu.go.id](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html). Retrieved 10 3, 2023, from Artikel: Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>

Winbaktianur, & Siregar, L. M. (2020). Kinerja Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa.

Winbaktianur, & Siregar, L. M. (2021). Kinerja . Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 5(02), 121–129.

Yanti, W. I. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2(1).